



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

(LKPJ)

BUPATI SIDOARJO

TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Nomor : 130/2866/438.1.2.2/2023

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan tepat waktu.

Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Melalui LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, diharapkan DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bupati Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2022, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan strategis tahun selanjutnya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten



Sidoarjo. Selain itu LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur keberhasilan kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan. Termasuk juga pelaksanaan 17 Program Prioritas Bupati Sidoarjo dan 10 Paket Strategis Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021. Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak target kinerja yang tercapai, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2022 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2022, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

BUPATI SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDOR, S.IP.

H. AHMAD MUHDOR ALI, S.IP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, berkaitan dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas oembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya, serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Penyusunan LKPJ merupakan bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah, dimana LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, yang pada tahun anggaran 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD dimaksud. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang telah diubah melalui Peratiran Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Selain itu, penyusunan LKPJ juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang pada hakikatnya menunjukkan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya LKPJ akan dibahas oleh DPRD dengan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan strategis daerah.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;



C. VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 – 2026

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN ”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :



Pokok - Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.



2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin



diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: *Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.*

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.*

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo



Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.*

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: *Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.*

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada *value* tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten Opini atas Audit BPK Survey Eksternal Persepsi Korupsi Status Kinerja LPPD Nilai Indeks SPBE Indeks Inovasi Daerah Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan Persentase kontribusi PDRB sektor industri Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri Persentase koperasi berkualitas Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di semblan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Indeks Infrastruktur Pendidikan Indeks Infrastuktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
			Indeks Resiko Bencana	



Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Pelestarian Budaya
				Indeks Rasa Aman

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan (*Quick Win*) untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan. Adapun Program Prioritas dimaksud, yang selanjutnya menjadi 17 Agenda Pokok Prioritas Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorir
12. Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah



D. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° – 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

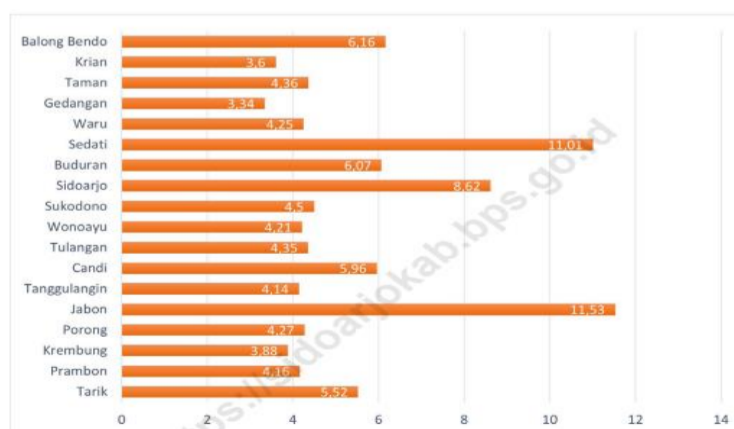
Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,24 km² ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 322 Desa, dan 31 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Tarik	39,73
2	Prambon	29,89
3	Krembung	27,90
4	Porong	30,71
5	Jabon	82,92
6	Tanggulangin	29,78
7	Candi	42,86
8	Tulangan	31,31
9	Wonoayu	30,29
10	Sukodono	32,85
11	Sidoarjo	62,03
12	Buduran	43,65
13	Sedati	79,23
14	Waru	30,59
15	Gedangan	24,01
16	Taman	31,36
17	Krian	25,89
18	Balombangendo	44,34
Jumlah		719,34

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	322	31

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.



Sepanjang tahun 2022, Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,5oC, terjadi di bulan September. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 21,0oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 81,6 persen.

Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari- Desember 2022 terdapat 195 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebuah anomali, curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Mei, sebesar 461,3 mm dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Lebih tinggi daripada curah hujan di musim hujan, Bulan Oktober – Maret. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Agustus menjadi 38,9 mm dengan 4 hari hujan, namun kembali meningkat di Bulan September, Oktober, November, dan Desember, berturut – turut sebesar 151.5 mm, 259.9 mm, 208.7 mm, dan 204.5 mm dengan total hari hujan sebanyak 59 hari.

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2022

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	34,1	27,7	23,4	96,7	82,6	51,8
Februari	34,2	27,3	24,0	98,3	83,5	56,4
Maret	34,6	27,6	23,0	98,3	85,9	51,2
April	34,8	28,2	24,0	98,3	86,0	53,6
Mei	33,6	27,7	23,2	98,3	86,0	53,6
Juni	33,8	27,8	22,9	96,7	81,7	55,1
Juli	33,8	28,9	21,0	97,5	81,6	49,3
Agustus	33,7	29,2	23,0	95,1	80,2	47,6
September	36,5	28,7	22,9	95,0	74,4	49,0
Oktober	34,4	27,6	23,2	98,3	83,3	51,8
Nopember	34,4	27,9	22,7	98,3	83,9	57,2
Desember	35,2	27,6	22,1	96,6	83,9	55,9

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0,0	9,2	32,0	--	1.009,5	--
Februari	0,0	7,4	19,0	--	1.008,8	--
Maret	0,0	7,2	38,0	--	1.008,7	--
April	0,0	6,5	25,0	--	1.009,3	--
Mei	0,0	5,5	24,0	--	1.009,5	--
Juni	0,0	6,4	18,0	--	1.009,9	--
Juli	0,0	7,6	16,0	--	1.010,2	--
Agustus	0,0	8,7	20,0	--	1.010,5	--
September	0,0	6,5	15,0	--	1.011,1	--
Oktober	0,0	5,8	23,0	--	1.010,3	--
Nopember	0,0	5,9	19,0	--	1.009,8	--
Desember	0,0	6,1	27,0	--	1.008,5	--

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023



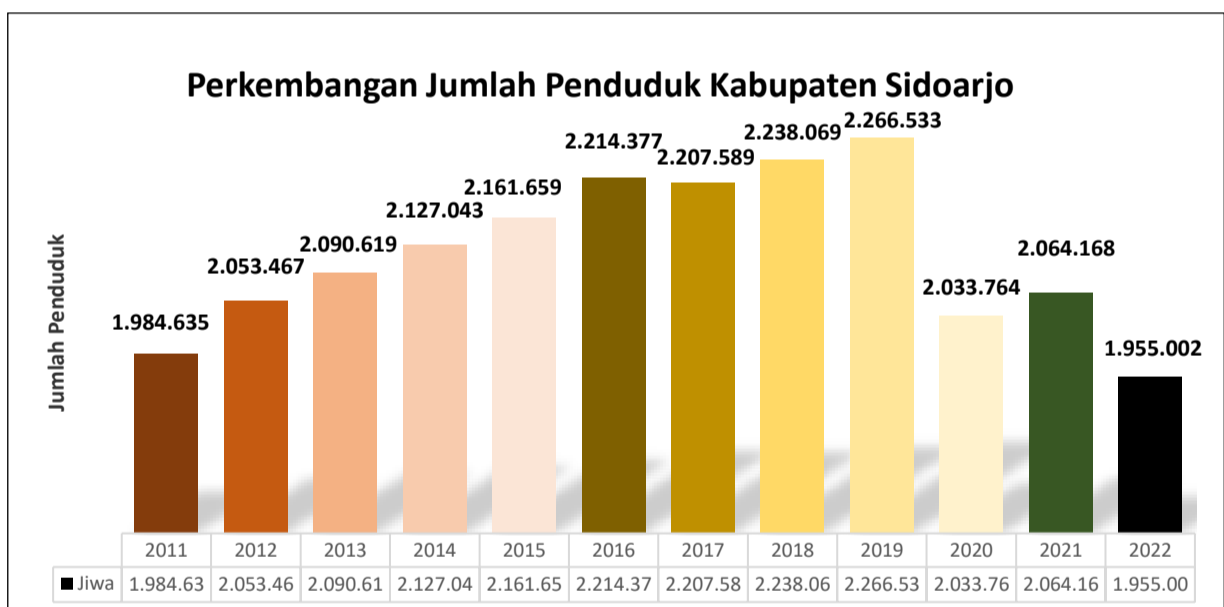
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	376,9	25	54,0
Februari	183,6	25	49,4
Maret	393,1	18	59,7
April	226,7	17	57,7
Mei	461,3	21	66,3
Juni	189,7	18	66,4
Juli	126,2	8	90,3
Agustus	38,9	4	88,7
September	151,5	3	67,9
Oktober	259,9	14	64,3
Nopember	208,7	23	30,8
Desember	204,5	19	61,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2022, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.955.002 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
75 <	12.850	17.862	30.712
70 -74	13.923	15.149	29.072
65 -69	29.130	27.613	56.743
60 - 64	42.856	44.481	87.337
55 -59	56.102	59.978	116.080
50 -54	73.053	76.427	149.480
45 -49	73.776	79.266	153.042
40 -44	76.978	80.403	157.381
35 -39	76.228	76.346	152.574
30 -34	71.032	69.140	140.172
25 -29	77.657	75.492	153.149
20 -24	80.433	76.646	157.079
15 -19	76.081	71.907	147.988
10 - 14	82.089	76.677	158.766
05 - 09	75.824	70.962	146.786
00 - 04	61.555	57.086	118.641
JUMLAH	979.567	975.435	1.955.002

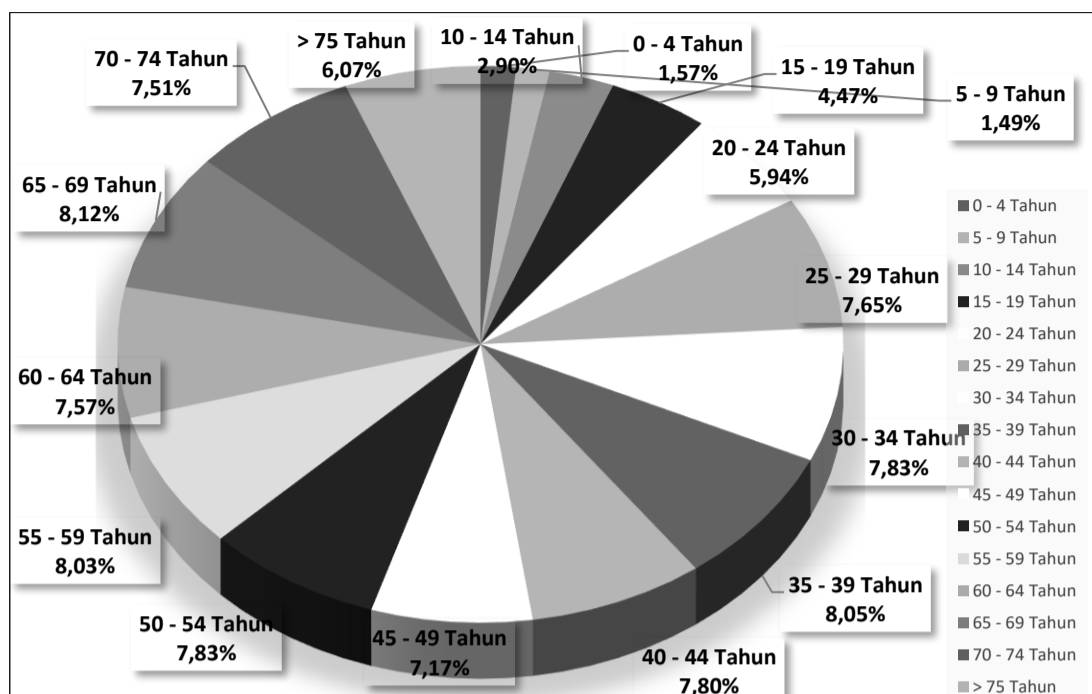
Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK



Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK



Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2022



Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Tarik	66.144	22.594
2	Prambon	76.446	26.209
3	Krembung	66.858	22.844
4	Porong	69.271	23.480
5	Jabon	54.054	18.517
6	Tanggulangin	85.476	28.083
7	Candi	149.219	48.092
8	Sidoarjo	194.247	63.465
9	Tulangan	97.960	32.591
10	Wonoayu	81.395	26.898
11	Krian	126.718	41.563
12	Balongsendo	72.587	24.616
13	Taman	197.892	64.906
14	Sukodono	118.447	37.699
15	Buduran	96.580	31.051
16	Gedangan	116.034	37.960
17	Sedati	93.061	30.253
18	Waru	192.613	64.212
	Jumlah	1.955.002	654.033

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK



3. Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 245,22 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 34,57 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 210,65 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan harga dan produksi untuk beberapa lapangan usaha sejak pandemi covid-19.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2022), struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori transportasi dan pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sidoarjo.

Pada tahun 2022, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 50,02 persen, menurun jika dibandingkan dua periode sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,41, menurun 0,42 satuan dari tahun 2021, disusul oleh transportasi dan pergudangan sebesar 11,15 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2022 sebagai berikut :

PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.855,63	2.686,06
2	Pertambangan dan Penggalian	99,60	53,15
3	Industri Pengolahan	122.667,84	80.337,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.973,52	1.162,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	142,64	118,13
6	Konstruksi	17.590,63	11.903,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40.236,38	24.427,44
8	Transportasi dan Pergudangan	27.353,86	9.697,07

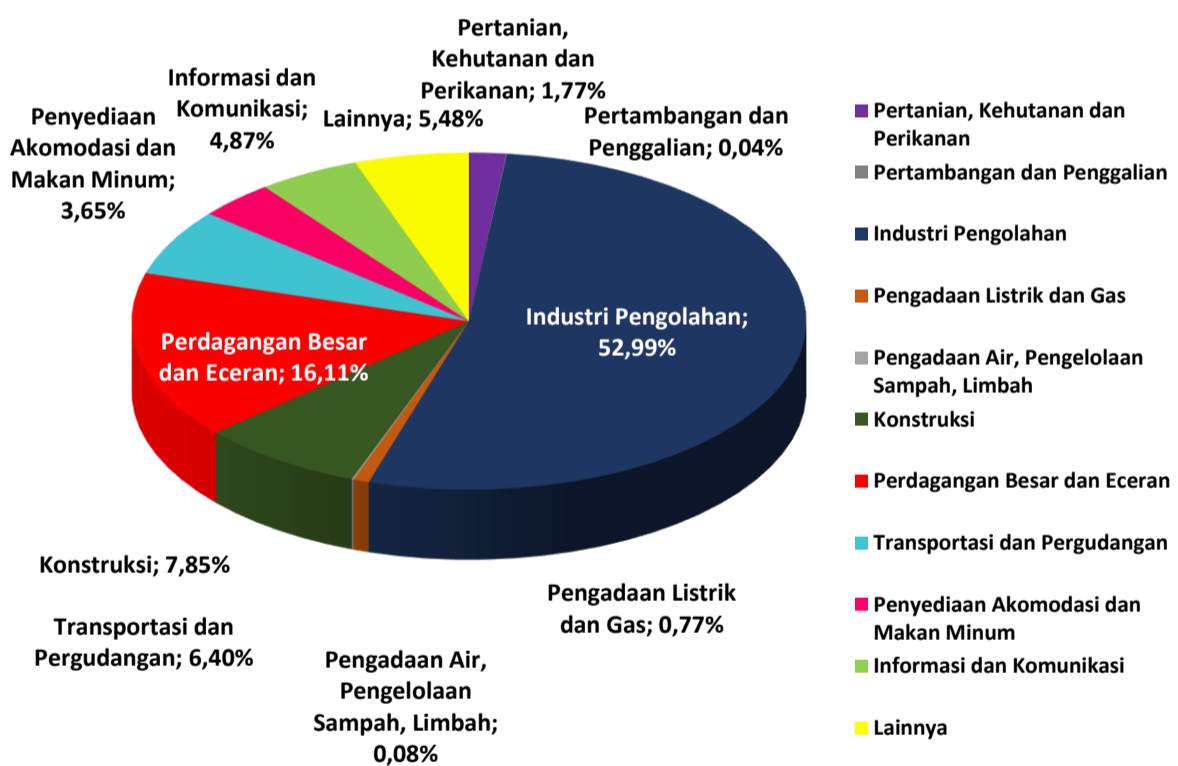


9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.694,51	5.529,77
10	Informasi dan Komunikasi	8.418,10	7.385,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.550,76	1.654,72
12	Real Estate	2.125,95	1.486,24
13	Jasa Perusahaan	338,05	213,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.832,05	2.222,56
15	Jasa Pendidikan	2.525,94	1.699,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	763,14	526,64
17	Jasa Lainnya	744,42	508,84
	TOTAL	245.222,46	151.613,88

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Share PDRB Berdasarkan ADHK



Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

E. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang



memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 11.816 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

NO	OPD	PERSONIL (PNS)				Jumlah Pegawai
		Jabatan Struktural Yang Harus Ada	Jabatan Struktural Yang Ada / Terisi	Non Struktural (Staf)	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKRETARIAT DAERAH	22	15	116	29	160
2	SEKRETARIAT DPRD	7	4	40	11	55
3	INSPEKTORAT	7	7	19	56	82
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18	15	72	55	142
5	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BALONGBENDO			5	216	221
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BUDURAN			10	247	257
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CANDI			5	341	346
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN GEDANGAN			8	289	297
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN JABON			8	170	178
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN KREMBUNG			10	206	216
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN KRANON			5	347	352
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PORONG			8	181	189
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PRAMBON			14	235	249
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SEDATI			1	202	203
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SIDOARJO			9	486	495
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUKODONO			7	288	295
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN TAMAN			24	450	474
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN TANGGULANGIN			8	209	217
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN TARIK			6	233	239
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN TULANGAN			11	272	283
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN WARU			11	348	359
	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN WONOAYU			10	275	285
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BALONGBENDO			3	38	41
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BUDURAN			2	33	35
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 CANDI			4	29	33
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 GEDANGAN			8	43	51
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 JABON			3	33	36



UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KREMBUNG			1	35	36
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KRIAN			3	30	33
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 PORONG			6	40	46
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 PRAMBON			6	32	38
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SEDATI			3	34	37
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SIDOARJO			6	37	43
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SUKODONO			4	37	41
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TAMAN			5	41	46
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TANGGULANGIN			4	33	37
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TARIK			4	35	39
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TULANGAN			5	33	38
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WARU			4	33	37
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WONOAYU			4	40	44
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 BALONGBENDO			3	25	28
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 BUDURAN			7	33	40
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 CANDI			3	42	45
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 GEDANGAN			6	42	48
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 JABON			3	25	28
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 KREMBUNG			2	37	39
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 KRIAN			7	36	43
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 PORONG			6	23	29
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SEDATI			7	34	41
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SIDOARJO			3	39	42
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SUKODONO			3	34	37
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TAMAN			4	46	50
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TANGGULANGIN			5	29	34
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TARIK			3	31	34
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TULANGAN				6	6
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 WARU			4	28	32
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 WONOAYU			5	41	46
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 CANDI			5	35	40
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 KRIAN			4	36	40



	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 PORONG			3	25	28
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 SIDOARJO			3	29	32
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 TAMAN			6	35	41
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 WARU			5	33	38
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 SIDOARJO			4	34	38
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 WARU			6	28	34
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 SIDOARJO			5	30	35
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 6 SIDOARJO			6	32	38
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI SATU ATAP				4	4
	DINAS KESEHATAN	9	8	57	25	90
6	UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS		1	2	8	11
	UPTD INSTALASI FARMASI			5	4	9
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			1	2	3
	UPTD PUSKESMAS BALONGBENDO		1	2	49	52
	UPTD PUSKESMAS BARENGKRAJAN		1	5	27	33
	UPTD PUSKESMAS BUDURAN			5	42	47
	UPTD PUSKESMAS CANDI			4	39	43
	UPTD PUSKESMAS GANTING			2	32	34
	UPTD PUSKESMAS GEDANGAN		1	7	33	41
	UPTD PUSKESMAS JABON			5	52	57
	UPTD PUSKESMAS KEDUNGSOLO			2	31	33
	UPTD PUSKESMAS KEPADANGAN		1	4	34	39
	UPTD PUSKESMAS KREMBUNG			9	43	52
	UPTD PUSKESMAS KRAN			9	55	64
	UPTD PUSKESMAS MEDAENG		1	4	30	35
	UPTD PUSKESMAS PORONG		1	17	47	65
	UPTD PUSKESMAS PRAMBON		1	11	52	64
	UPTD PUSKESMAS SEDATI		1	5	54	60
	UPTD PUSKESMAS SEKARDANGAN			3	28	31
	UPTD PUSKESMAS SIDOARJO		1	7	32	40
	UPTD PUSKESMAS SIDODADI			4	31	35
	UPTD PUSKESMAS SUKODONO			8	63	71
	UPTD PUSKESMAS TAMAN		1	17	61	79
	UPTD PUSKESMAS TAMBAREJO			1	17	18
	UPTD PUSKESMAS TANGGULANGIN		1	6	44	51
	UPTD PUSKESMAS TARIK		1	7	40	48
	UPTD PUSKESMAS TARIK 2			2	21	23
	UPTD PUSKESMAS TROSOBO			4	31	35
	UPTD PUSKESMAS TULANGAN		1	7	30	38
	UPTD PUSKESMAS URANG AGUNG		1	4	28	33
	UPTD PUSKESMAS WARU		1	6	47	54
	UPTD PUSKESMAS WONOAYU		1	7	46	54
	UPTD PUSKESMAS WONOKASIAN			3	21	24
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	8	86	14	108
7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9	8	30	12	50



8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12	8	27	60	95
9	DINAS SOSIAL	7	3	15	8	26
10	DINAS TENAGA KERJA	6	6	11	18	35
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	6	15	11	32
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7	7	10	9	26
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	11	8	51	108	167
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	9	6	245	17	268
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	5	27	15	47
16	DINAS PERHUBUNGAN	19	15	62	17	94
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	5	42	14	61
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6	6	27	6	39
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	6	17	12	35
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6	4	41	7	52
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	5	15	16	36
22	DINAS PERIKANAN	6	6	25	6	37
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	5	134	20	159
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7	6	25	19	50
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	5	51	10	66
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	6	6	76	11	93
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	6	37	19	62
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	3	17	4	24
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	5	56	5	66
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29	28	126	461	615
31	KECAMATAN BALONGBENDO	9	5	19	1	25
32	KECAMATAN BUDURAN	9	5	15	1	21
33	KECAMATAN CANDI	9	8	17	1	26
34	KECAMATAN GEDANGAN	9	7	14	1	22
35	KECAMATAN JABON	9	5	12	1	18
36	KECAMATAN KREMBUNG	9	8	16	1	25
37	KECAMATAN KRIAN	9	7	16		23
38	KELURAHAN KEMASAN KECAMATAN KRIAN	5	1	2		3
	KELURAHAN KRIAN KECAMATAN KRIAN	5	2	2		4
	KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN KECAMATAN KRIAN	5	1	1		2
	KECAMATAN PORONG	9	8	16	1	25
39	KELURAHAN GEDANG KECAMATAN PORONG	5	3	2		5
	KELURAHAN JATIREJO KECAMATAN PORONG	5				0
	KELURAHAN JUWETKENONGO KECAMATAN PORONG	5	2	1		3
	KELURAHAN MINDI KECAMATAN PORONG	5				0
	KELURAHAN PORONG	5	1	2		3



	KELURAHAN SIRING KECAMATAN PORONG	5				0
	KECAMATAN PRAMBON	9	4	18	1	23
40	KECAMATAN SEDATI	9	7	17	1	25
41	KECAMATAN SIDOARJO	9	8	17	1	26
42	KELURAHAN BULUSIDOKARE KECAMATAN SIDOARJO	5	2	2		4
	KELURAHAN CELEP KECAMATAN SIDOARJO	5	3	3		6
	KELURAHAN CEMENKALANG KECAMATAN SIDOARJO	5	2	4		6
	KELURAHAN GEBANG KECAMATAN SIDOARJO	5	2	1		3
	KELURAHAN LEMAHPUTRO KECAMATAN SIDOARJO	5	3	2		5
	KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN SIDOARJO	5	3	3		6
	KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN SIDOARJO	5	2	3		5
	KELURAHAN PUCANG KECAMATAN SIDOARJO	5	3	2		5
	KELURAHAN PUCANGANOM KECAMATAN SIDOARJO	5	3	1		4
	KELURAHAN SEKARDANGAN KECAMATAN SIDOARJO	5	2	3		5
	KELURAHAN SIDOKARE KECAMATAN SIDOARJO	5	2	1		3
	KELURAHAN SIDOKLUMPUK KECAMATAN SIDOARJO	5	2	4		6
	KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN SIDOARJO	5	2	1		3
	KELURAHAN URANGAGUNG KECAMATAN SIDOARJO	5	2	1		3
	KECAMATAN SUKODONO	9	7	13	1	21
43	KECAMATAN TAMAN	9	9	18	1	28
44	KELURAHAN BEBEKAN KECAMATAN TAMAN	5	1	1		2
	KELURAHAN GELURAN KECAMATAN TAMAN	5	2	2		4
	KELURAHAN KALIJATEN KECAMATAN TAMAN	5	2	1		3
	KELURAHAN KETEGAN KECAMATAN TAMAN	5	2	2		4
	KELURAHAN NGELOM KECAMATAN TAMAN	5	2			2
	KELURAHAN SEPANJANG KECAMATAN TAMAN	5	1	3		4
	KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN	5	1	2		3
	KELURAHAN WONOCOLO KECAMATAN TAMAN	5	1	2		3
	KECAMATAN TANGGULANGIN	9	7	18	1	26
45	KECAMATAN TARIK	9	7	20	1	28
46	KECAMATAN TULANGAN	9	7	18	1	26
47	KECAMATAN WARU	9	6	17	1	24
48	KECAMATAN WONOAYU	9	6	18	1	25
49	SEKRETARIAT KPU & PANWASLU		2			2
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT	14	11	23	128	162
		615	431	2.486	8.899	11.816

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)



F. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication technology (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

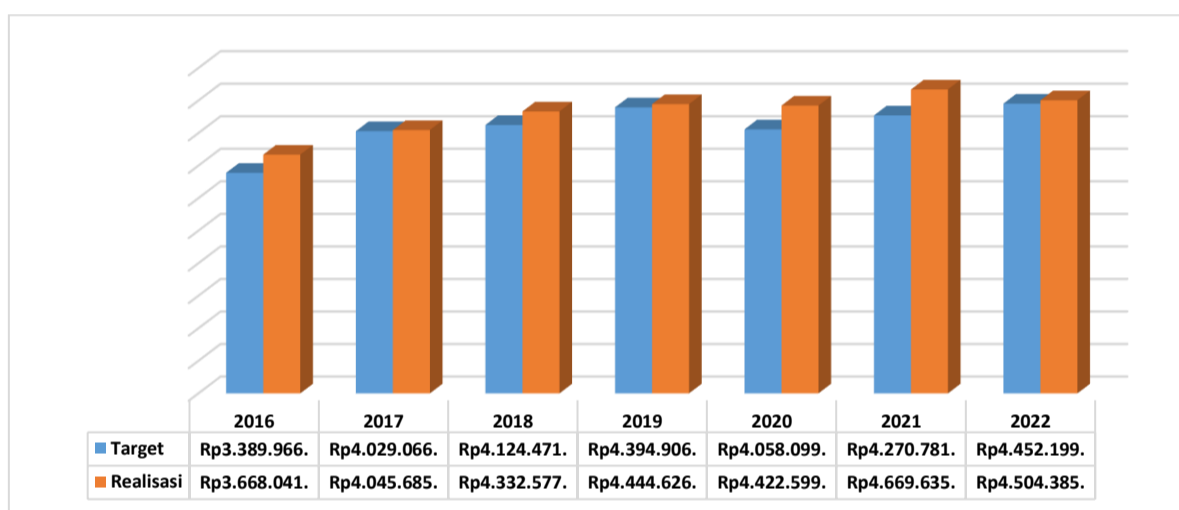


Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2016	Rp. 3.389.966.737.239,00	Rp. 3.668.041.957.746,70	108,20%
2017	Rp. 4.029.066.902.057,03	Rp. 4.045.685.362.112,53	100,41%
2018	Rp. 4.124.471.103.455,83	Rp. 4.332.577.984.768,01	105,05%
2019	Rp. 4.394.906.478.896,00	Rp. 4.444.626.346.624,69	101,13%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp. 4.452.199.210.000,00	Rp. 4.504.385.259.558,71	101,17%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2021 Audited, seangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.744.754.800.944,00	1.801.518.328.298,71	103,25
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.703.414.198.128,00	2.699.903.720.332,00	99,87
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.030.210.928,00	2.963.210.928,00	73,52
	JUMLAH PENDAPATAN	4.452.199.210.000,00	4.504.385.259.558,71	101,17

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023



Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.4.504.385.259.558,71 atau 101,17% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.452.199.210.000,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.801.518.328.298,71 atau tercapai sebesar 103,25% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.744.754.800.944,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.068.000.000.000,00	1.214.783.864.845,49	113,74
1.1.2.	Retribusi Daerah	64.368.142.675,00	60.672.060.848,94	94,26
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.717.095.663,00	32.410.312.618,50	102,19
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	580.669.562.606,00	493.652.089.985,78	85,01
	JUMLAH	1.744.754.800.944,00	1.801.518.328.298,71	103,25

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun anggaran 2022 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.214.783.864.845,49 atau 113,74% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
	1.068.000.000.000,00	1.214.783.864.845,49	113,74
Pajak Daerah			
Pajak Hotel	17.500.000.000,00	19.993.670.874,00	114,25
Pajak Restoran	82.500.000.000,00	89.635.837.875,00	108,65
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.346.772.075,00	115,40
Pajak Reklame	15.000.000.000,00	15.903.462.071,00	106,02
Pajak Penerangan Jalan	330.500.000.000,00	332.411.739.624,49	100,58
Pajak Parkir	15.000.000.000,00	17.980.663.027,00	119,87
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.301.094.440,00	110,04
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	267.000.000.000,00	289.139.806.404,00	108,29
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	332.000.000.000,00	440.070.818.455,00	132,55

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

**c. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.60.672.060.848,00 atau tercapai 94,26% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	64.368.142.675,00	60.672.060.848,94	94,26
Retribusi Jasa Umum	41.950.081.000,00	38.498.221.084,94	91,77
Retribusi Jasa Usaha	6.662.811.675,00	5.728.216.803,00	85,97
Retribusi Perizinan Tertentu	15.755.250.000,00	16.445.622.961,00	104,38

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.31.717.095.663,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.410.312.618,00 atau tercapai sebesar 102,19%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Laba YANG DIBAGIKAN KEPADA Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD	31.717.095.663,00	32.410.312.618,50	102,19
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	5.011.307.617,00	6.074.312.264,00	121,21
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	134.901.422,00	135.269.580,00	100,27
BPR "Delta Artha"	6.911.909.431,00	6.911.909.431,00	100,00
Bank Jatim	19.658.977.193,00	19.288.821.343,50	98,12

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain-lain PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.493.652.089.985,78 atau tercapai 85,01%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.580.669.562.606,00.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	198.050.000,00	563.781.200,00	284,67
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.481.310.670,00	4.644.366.624,00	133,41
Hasil Kerja Sama Daerah	16.000.000.000,00	0,00	0,00
Jasa Giro	5.425.000.000,00	5.331.558.410,38	98,28
Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	5.721.572.492,41	143,04
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.800.000,00	55.103.000,00	1.147,98
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	12.549.219.532,00	15.082.988.230,80	120,19
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	436.233.720,00	1.199.122.593,67	274,88
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.026.965.518,00	3.746.107.028,00	184,81
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	29.584.476,00	105.256.801,00	355,78
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	



Pendapatan dari Pengembalian	803.894.700,00	1.107.053.675,00	137,71
Pendapatan BLUD	535.648.699.947,00	456.008.849.802,52	85,13
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan			
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.534.135,00	8.370.000,00	2.205,92
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	62.269.908,00	77.960.128,00	79,87
JUMLAH	580.669.562.606,00	493.652.089.985,78	85,01

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.2.699.903.720.332,00 atau 99,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.703.414.198.128,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.266.549.029.728,00	2.234.104.021.398,00	98,57
Dana Perimbangan	1.951.341.725.728,00	1.920.299.063.398,00	98,41
Dana Insentif Daerah (DID)			
Dana Desa	315.207.304.000,00	313.804.958.000,00	99,56
Pendapatan Transfer Antar Daerah	436.865.168.400,00	465.799.698.934,00	106,62
Pendapatan Bagi Hasil	424.597.327.400,00	453.553.632.934,00	106,82
Bantuan Keuangan	12.267.841.000,00	12.246.066.000,00	99,82
JUMLAH	2.703.414.198.128,00	2.699.903.720.332,00	99,87

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

g. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Hibah	3.830.000.000,00	2.763.000.000,00	72,14
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.830.000.000,00	2.763.000.000,00	72,14
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.210.928,00	200.210.928,00	100,00
Lain-lain Pendapatan	200.210.928,00	200.210.928,00	100,00
JUMLAH	4.030.210.928,00	2.963.210.928,00	73,52

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

G. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja



daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut :

- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

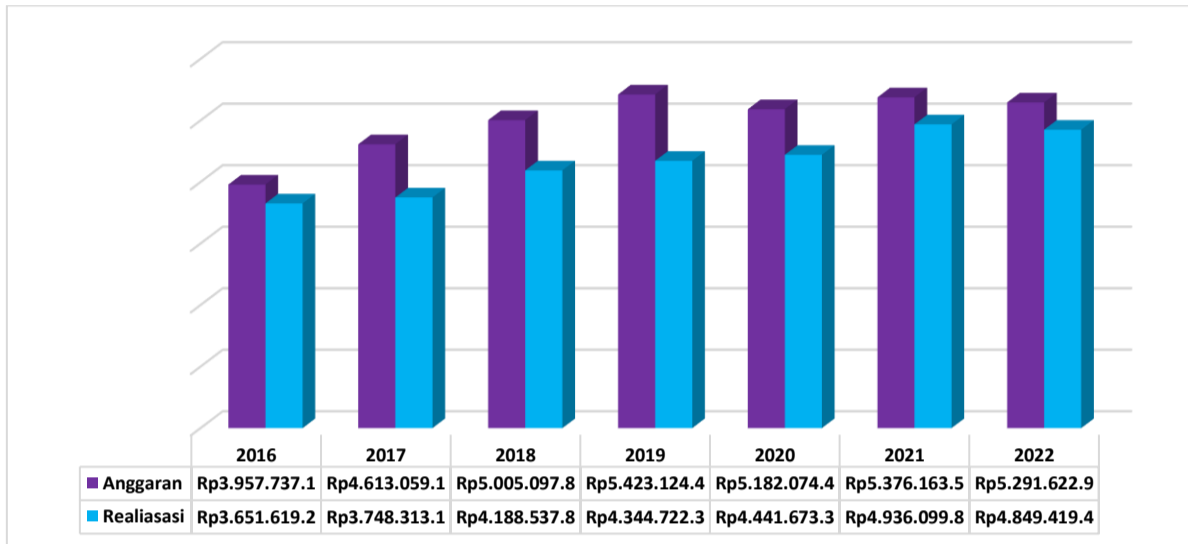
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2016	Rp. 3.957.737.172.284,80	Rp. 3.651.619.251.558,26	92,27%
2017	Rp. 4.613.059.104.900,67	Rp. 3.748.313.122.059,10	81,25%
2018	Rp. 5.005.097.845.031,35	Rp. 4.188.537.810.911,10	83,69%
2019	Rp. 5.423.124.488.516,28	Rp. 4.344.722.393.986,67	80,11%



2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp. 5.291.622.947.330,00	Rp. 4.849.419.407.073,06	91,64%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2021 Audited, seangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2021 Audited, seangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.5.291.622.947.330,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.849.419.407.073,06 atau tercapai sebesar 91,81%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	3.590.672.231.858,00	3.311.505.407.660,26	92,23
2.2.	BELANJA MODAL	993.021.183.832,00	845.926.887.543,80	85,19
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.432.520.991,00	12.077.360.560,00	47,49
2.4.	BELANJA TRANSFER	682.497.010.649,00	679.909.751.309,00	99,62
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.291.622.947.330,00	4.849.419.407.073,06	91,64

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.3.590.672.231.858,00 atau 92,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.311.505.407.660,26.



Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.1.	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.576.644.506.347,00	1.490.285.235.545,00	94,52
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.615.449.714.004,00	1.437.499.905.565,26	88,98
2.1.3	Belanja Subsidi	2.520.000.000,00	2.429.079.999,00	96,39
2.1.4	Belanja Hibah	291.785.947.838,00	281.646.372.888,00	96,52
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	104.272.063.669,00	99.644.813.663,00	95,56
	JUMLAH	3.590.672.231.858,00	3.311.505.407.660,26	92,23

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.993.021.183.832,00 atau 85,19% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.845.926.887.543,80. Rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA MODAL			
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	82.642.394.176,00	62.038.724.940,00	75,07
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.471.929.905,00	199.487.326.568,00	77,48
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.810.980.323,00	130.122.924.155,00	91,76
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	503.687.901.360,00	448.013.072.185,80	88,95
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.629.421.416,00	612.189.111,00	37,57
2.2.5.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.778.556.652,00	5.652.650.584,00	97,82
	Jumlah Belanja Modal	993.021.183.832,00	845.926.887.543,80	85,19

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.12.077.360.560,00 atau 47,49% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.25.432.520.991,00

Belanja Transfer tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.679.909.751.309,00 atau 99,62% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.682.497.010.649,00

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.432.520.991,00	12.077.360.560,00	47,49
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	25.432.520.991,00	12.077.360.560,00	47,49
2.4.	BELANJA TRANSFER	682.497.010.649,00	679.909.751.309,00	99,62



2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	113.236.814.268,00	112.974.498.267,00	99,77
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	569.260.196.381,00	566.935.253.042,00	99,59

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023

H. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit	(839.423.737.330,00)	(345.034.147.514,35)	(494.389.589.815,65)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	841.823.737.330,00	842.259.150.481,06	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	840.996.530.211,00	840.996.530.211,75	(0,75)
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	827.207.119,00	1.262.620.269,31	(435.413.150,31)
Pengeluaran Pembiayaan daerah	2.400.000.000,00	2.319.000.000,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.400.000.000,00	2.319.000.000,00	
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.400.000.000,00	2.319.000.000,00	81.000.000,00
Badan Usaha Swasta			
Pembiayaan Netto	839.423.737.330,00	839.940.150.481,06	(516.413.151,06)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	494.906.002.966,71	(494.906.002.966,71)

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 28 Februari 2023



BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.5.446.313.292.380,00 berkurang sebesar Rp.155.781.545.050,00 sehingga menjadi Rp.5.290.531.747.330,00 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.4.500.313.292.380,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.49.205.282.380,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.4.451.108.010.000,00

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.5.446.313.292.380,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.155.781.545.050,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.5.290.531.747.330,00

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.950.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.108.176.262.670,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.841.823.737.330,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.4.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.1.600.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.839.423.737.330,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00



1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dimaksud, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.1.816.972.659.380,00
2. Bertambah	<u>(Rp.72.217.858.436,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp.1.744.754.800.944,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.2.683.340.633.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.18.982.365.128,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp.2.702.322.998.128,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	<u>Rp.4.030.210.928,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp.4.030.210.928,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.1.034.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.34.000.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp.1.068.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.95.762.707.220,00
2. Berkurang	<u>(Rp.31.394.564.545,00)</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp.64.368.142.675,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.32.927.263.646,00
2. Bertambah	<u>(Rp.1.210.167.983,00)</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp.31.717.095.663,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.654.282.688.514,00
2. Bertambah	<u>(Rp.73.613.125.908,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp.580.669.562.606,00



Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.2.267.784.033.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.1.235.003.272,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.2.266.549.029.728,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.415.556.600.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.20.217.368.400,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.435.773.968.400,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	<u>Rp.3.830.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.3.830.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	<u>Rp.200.210.928,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.200.210.928,00

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.3.670.134.110.624,00
2. Bertambah	<u>(Rp.84.140.520.072,00)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.3.585.993.590.552,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.1.072.747.880.034,00
2. Berkurang	<u>(Rp.79.802.942.102,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.992.944.937.932,00



c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.50.000.000.000,00
2. Bertambah	(Rp.20.903.791.803,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp.29.096.208.197,00</u>

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.653.431.301.722,00
2. Bertambah	Rp.29.065.708.927,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp.682.497.010.649,00</u>

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.1.612.301.410.057,00
2. Bertambah	(Rp.35.656.903.710,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp.1.576.644.506.347,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.1.670.627.732.729,00
2. Berkurang	(Rp.56.430.860.031,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp.1.614.196.872.698,00</u>

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp.0,00</u>

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.2.520.000.000,00
2. Bertambah	Rp.,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp.2.520.000.000,00</u>

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.291.314.767.838,00
2. Berkurang	Rp.471.180.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp.291.785.947.838,00</u>



f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.93.370.200.000,00
2. Bertambah	Rp.7.476.063.669,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp.100.846.263.669,00</u>

Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.166.888.804.900,00
2. Berkurang	(Rp.84.246.410.724,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp.82.642.394.176,00</u>

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.209.978.045.394,00
2. Bertambah	Rp.47.417.638.611,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	<u>Rp.257.395.684.005,00</u>

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.163.546.388.205,00
2. Berkurang	(Rp.21.735.407.882,00)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	<u>Rp.141.810.980.323,00</u>

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp.530.016.871.035,00
2. Berkurang	(Rp.26.328.969.675,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp.503.687.901.360,00</u>

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.2.317.770.500,00
2. Berkurang	Rp.5.090.207.568,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp.7.407.978.068,00</u>

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	Rp.0,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	<u>Rp.0,00</u>



Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, yaitu :

1. Semula	Rp.50.000.000.000,00
2. Bertambah	(Rp.20.903.791.803,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp.29.096.208.197,00</u>

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.112.976.270.722,00
2. Bertambah	<u>Rp.260.543.546,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.113.236.814.268,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.540.455.031.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.28.805.165.381,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.569.260.196.381,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.950.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.108.176.262.670,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.841.8231737.330,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.4.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.1.600.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.400.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.950.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.109.003.469.789,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.840.996.530.211,00



b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	<u>Rp.827.207.119,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.827.207.119,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri :

a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1. Semula	Rp.4.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.1.600.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.2.400.000.000,00



c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	
a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Tema pembangunan Tahun 2022 sebagaimana Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Masyarakat”, dimana Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pemulihan dampak covid-19 melalui upaya simultan dan terpadu bidang ekonomi dan Kesehatan
2. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas yang mendukung pengembangan dan potensi lokal
3. Peningkatan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas yang mendukung pengembangan dan potensi local
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif berbasis *Information Communication Technology*.

Pada tahun anggaran 2022 telah ditetapkan paket strategis pengadaan barang / jasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/207/438.1.1.3/2022 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yaitu antara lain :

No.	Paket Strategis	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
1	Peningkatan Jalan Tulangan – Kepadangan	Rp.71.200.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road	Rp.50.000.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air



3	Peningkatan Jalan Kebonagung – Kemasan	Rp.45.300.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Cluster 6 (DC Gedangan – Desa Karangbong)	Rp.16.309.385.000,-	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata RFuang
5	Peningkatan Jalan Gedangan – Betro	Rp.15.400.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
6	Peningkatan Jalan Pilang – Tulangan	Rp.10.400.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
7	Peningkatan Jalan Pabean – Wadungasri	Rp.10.000.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Cluster 1 (Desa Masanganwetan – Kloposepuluh (Perum Pasegan Asri))	Rp.9.583.099.000,-	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata RFuang
9	Pembangunan Gedung Puskesmas Urangagung Kecamatan Sidoarjo	Rp.7.500.000.000,-	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan USB SMPN 2 Tulangan	Rp.7.344.642.000,-	Dinas Pendidikan



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2020	2021	2022		Keterangan	2023
					TARGET	REALISASI		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	BB	B	TIDAK TERCAPAI	BB
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,69	4,21	1,36	7,53	TERCAPAI	2,89
3	Indeks Gini	Poin	0,34	0,347	0,359	0,373	TIDAK TERCAPAI	0,347
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,97	10,87	10,39	8,80	TERCAPAI	10,09
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,59	5,93	6,00	5,36	TERCAPAI	5,40
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,747	0,793	0,762	0,792	TERCAPAI	0,772
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,78	59,81	59,80	57,54	TIDAK TERCAPAI	59,81
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,29	80,65	80,77	81,02	TERCAPAI	80,92
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,03	82,77	84,23	TERCAPAI	85,00

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi pengungkit percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu :

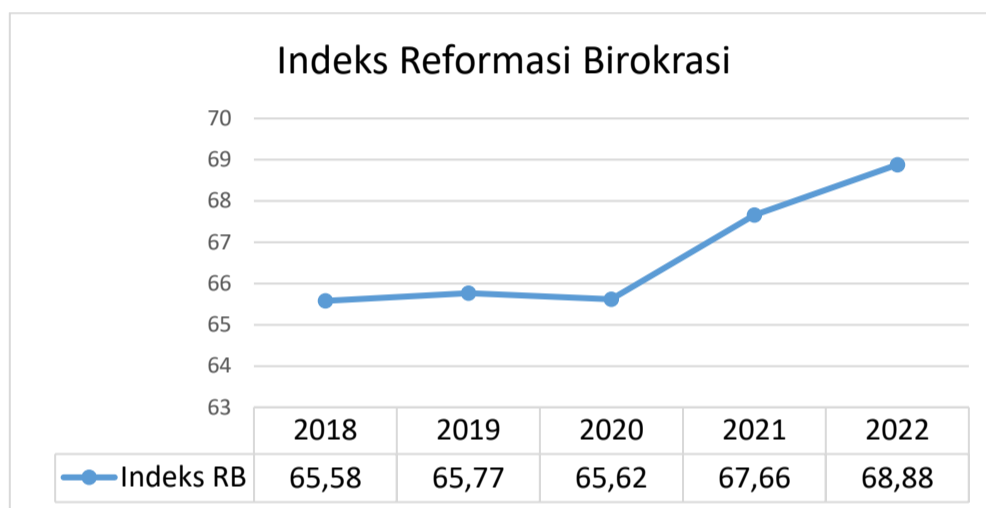
1. Manajemen Perubahan
2. Organisasi
3. Tata Laksana
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur



5. Deregulasi Kebijakan
6. Pengawasan
7. Akuntabilitas Kinerja
8. Pelayanan Publik

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 ditargetkan BB (Sangat Baik), sedangkan untuk capaiannya adalah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat B (Baik). Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik berikut :



Sumber data : LHE RB Kementerian PAN & RB

Sedangkan tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian tercapai sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen Pengungkit	Bobot	2022
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	13,24
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,32
	III. Reform	30,00	16,44
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,00
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,56
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,69
	Total Komponen Hasil	40,00	32,88
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	68,88

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2022



Untuk Hasil Antara area perubahan yang telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0 – 400	314,5	KASN
2.	Indeks Kualitas Kebijakan	0 – 100	23,74	LAN
3.	ASN yang Profesional	0 – 100	50,38	BKN
4.	Implementasi SPBE	0 – 5	2,29	Kementerian PANRB
5.	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 – 100	52,20	LKPP
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0 – 5	4,52	Kementerian PANRB
7.	Maturitas SPUP	0 -5	3	BPKP
8.	Kapabilitas APIP	0 – 5	2	BPKP
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0 -100	84,46	Ombudsman RI
10.	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	0 – 100	81,89	ANRI
11.	Indeks Reformasi Hukum	0 -100	65,95	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Sedangkan pada pelaksanaan Survey terhadap kepuasan masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berikut tabel hasilnya :

No.	Hasil Survey	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0 – 100	91,00	Kementerian PANRB
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0 – 100	85,63	KPK
3.	Survei Internal Organisasi	0 – 100	81,61	KPK

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2022

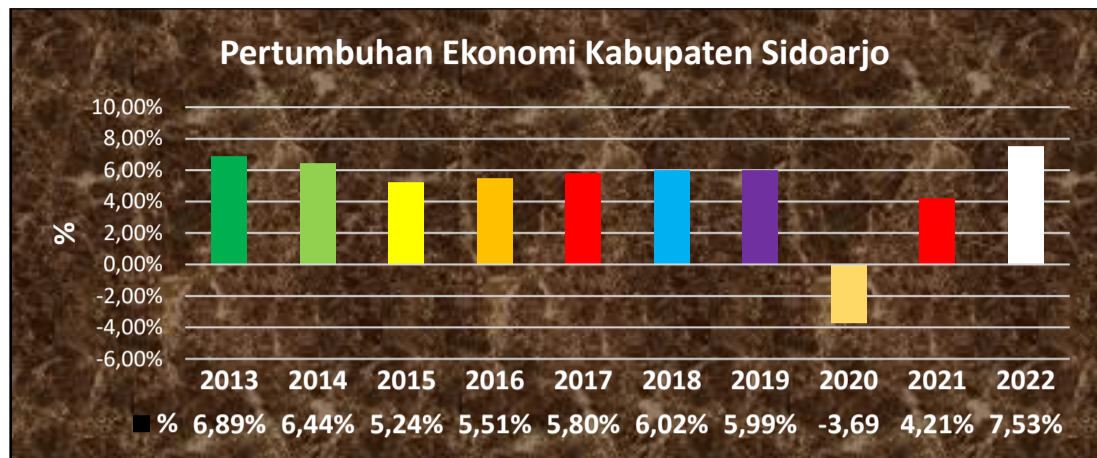
2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,36 dan realisasi sebesar 7,53 atau capaian 453,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 4,21 maka terdapat kenaikan yang sangat tajam di tahun 2022 sebesar 332 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-2 se Provinsi Jawa Timur.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

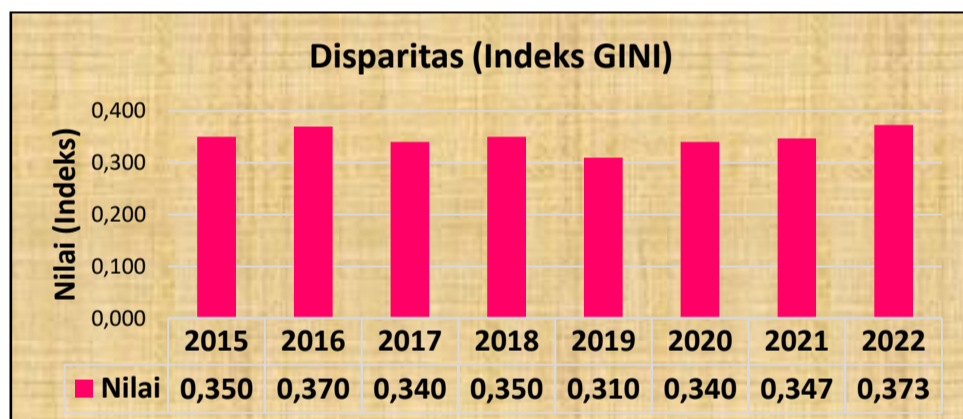


Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

3. Indeks GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tercapai 0,373 dari target 0,359 capaian 95,98% atau masih berada dalam kisaran sedang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo cenderung stabil.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 81,02 dari target 80,77 atau capaian 100,31%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2020 yaitu 80,65 maka terdapat kenaikan 0,37 poin. Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	74,36
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,95
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,77
- Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (Rp.000)	14.578

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

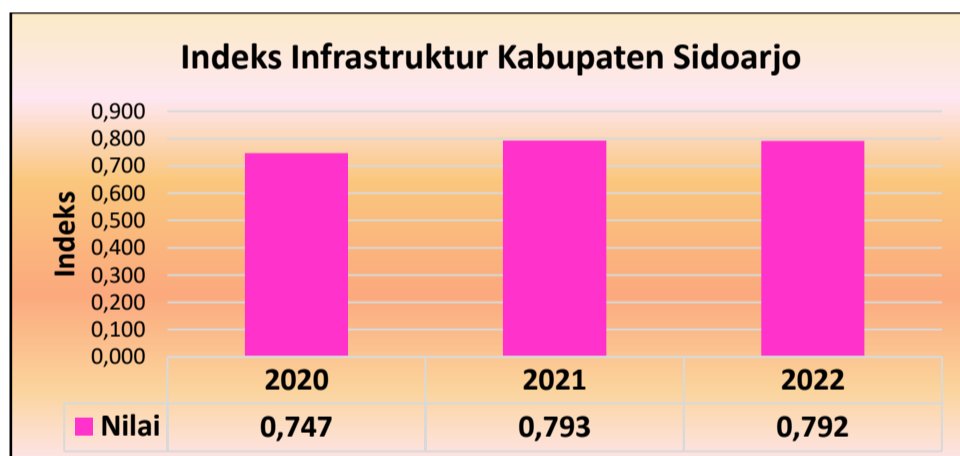
5. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 0,792 dari target 0,762 atau capaian 103,94%.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Pada tahun 2022 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road, Peningkatan / Betonisasi Jalan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Puskesmas Urangagung, Pembangunan USB SMPN 2 Tulangan.

Apabila dijabarkan hasil perhitungan Indeks Infrastruktur untuk setiap aspek, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No.	Variabel	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	90,20	95,05
2	Persentase Saluran Irigasi dan Drainase dalam kondisi baik	58,00	59,20
3	Persentase sarana dasar permukiman	72,00	73,57
4	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	61,00	64,14



5	Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik	84,56	84,32
6	Persentase fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik	71,13	77,13
Indeks Infrastruktur		0,762	0,792

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

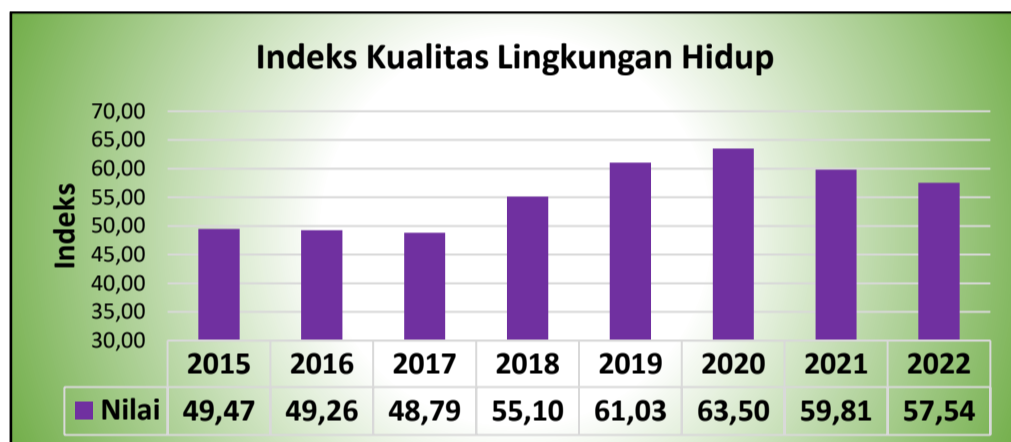
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKTL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 57,54 dari target 59,80 atau capaian 96,22%. Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2021 yaitu 59,81 maka terdapat penurunan 2,27 poin.

Adapun perkembangan nilai / skor IKLH setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IKLH di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	47,75
- Indeks Kualitas Udara	84,96
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	23,63

Sumber : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

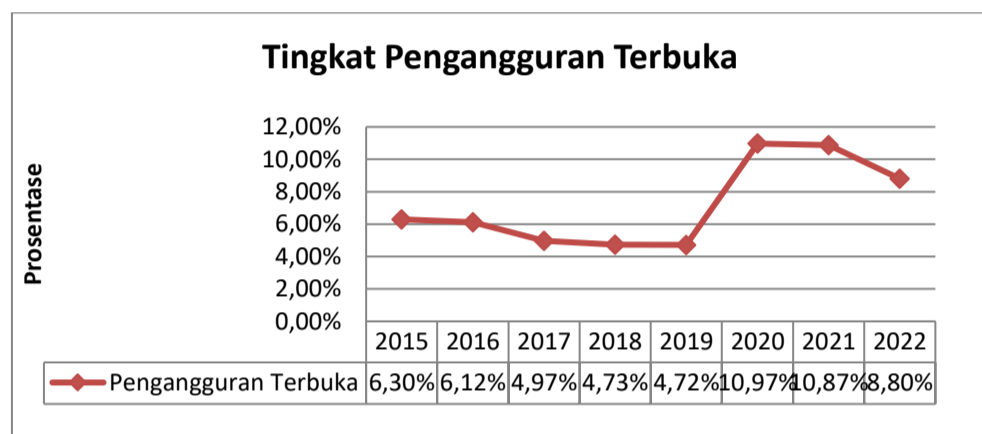
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan

tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebesar 8,80 persen, turun 2,07 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih berada pada angka 10,87 persen. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

8. Tingkat Kemiskinan

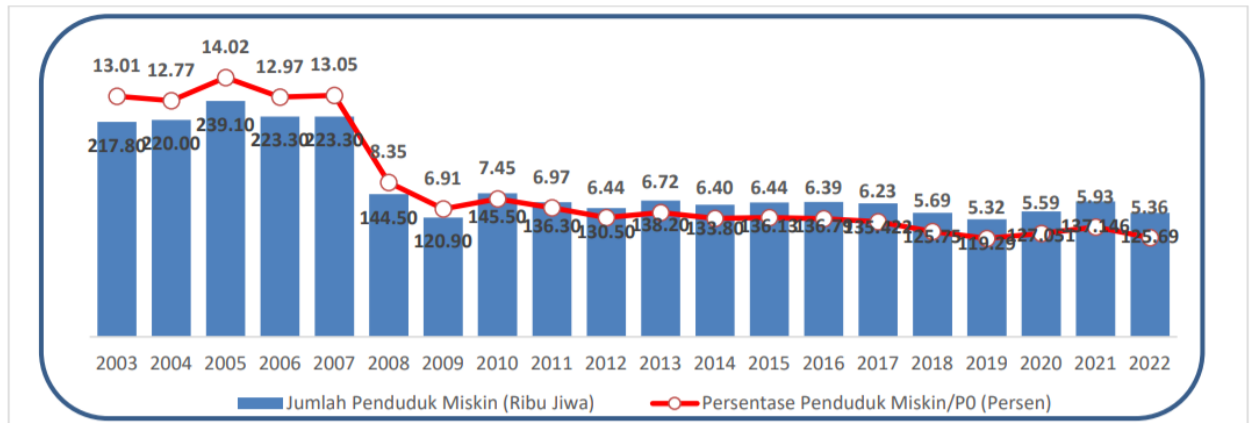
Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,36 persen turun dari tahun 2021 yang masih berada pada angka 5,93%.

Selama periode Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo berkurang sebanyak 11,46 ribu jiwa, dari 137,15 ribu jiwa pada Tahun 2021 menjadi 125,69 ribu jiwa pada Tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 8,36 persen. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

Tingkat Kemiskinan

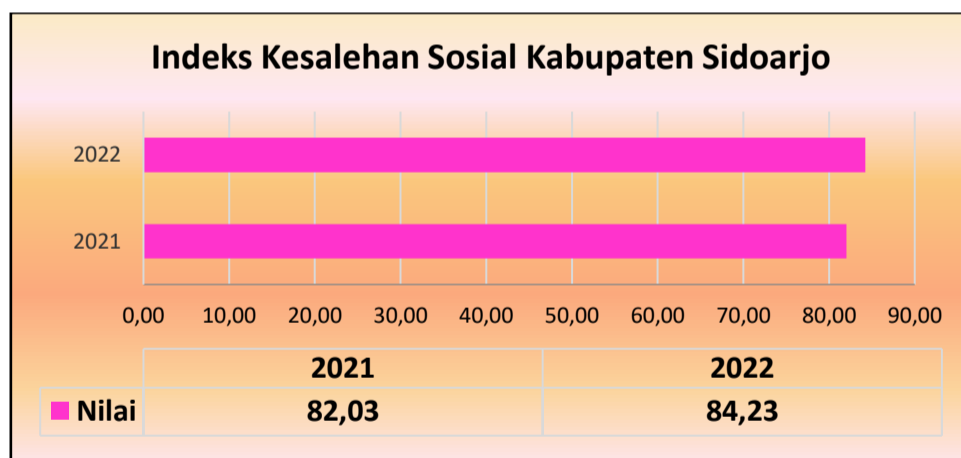


Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Berikut perkembangan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik sebagai berikut :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Indeks Rasa Aman	77,92	80,77
Indeks Toleransi	78,68	82,14
Indeks Pelestarian Budaya	60,55	90,46

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023

**B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TAHUN 2022**

Indikator Kinerja Utama (IKD), merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 IKD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah, capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Status	Akhir RPJMD
			2022			2026
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	BB	B	Belum Tercapai	A
2	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	%	1,36	7,53	Tercapai	5,53
3	Indeks Gini	Poin	0,359	0,373	Belum Tercapai	0,34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,39	8,8	Tercapai	9,14
5	Tingkat Kemiskinan	%	6	5,36	Tercapai	5,00
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,762	0,792	Tercapai	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,8	57,54	Belum Tercapai	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,77	81,02	Tercapai	81,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,77	84,23	Tercapai	92,08
B	Aspek Pelayanan Umum					
B.1	Layanan Urusan Wajib Dasar					
B.1.1	Urusan Pendidikan					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,22	14,95	Belum Tercapai	16,44
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,79	10,77	Belum Tercapai	13,11
B.1.2	Urusan Kesehatan					
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,77	74,36	Belum Tercapai	76,81
B.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
4	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,754	0,783	Tercapai	0,777
B.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	84,56	84,32	Belum Tercapai	92,71
6	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	71,13	77,13	Tercapai	72,59
B.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat					
7	Indeks Rasa Aman	Indeks	77,92	80,77	Tercapai	82,12



8	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	98,44	98,73	Belum Tercapai	76,86
9	Indeks Toleransi	Indeks	78,68	82,14	Tercapai	84,84
B.1.6	Urusan Sosial					
10	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Persen	94	94,64	Tercapai	95,00
B.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
B.2.1	Urusan Tenaga Kerja					
11	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Persen	89,61	91,2	Tercapai	90,86
B.2.1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
12	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,53	*)	Belum Rilis	96,25
B.2.1	Urusan Lingkungan Hidup					
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,53	47,75	Belum Tercapai	51,57
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,15	84,96	Belum Tercapai	85,19
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,11	23,63	Belum Tercapai	27,15
B.2.1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	12,42	22,67	Tercapai	18,63
B.2.1	Urusan Komunikasi dan Informatika					
17	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,35	2,29	Belum Tercapai	4,25
B.2.1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
18	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	23,2	23,33	Tercapai	30,34
19	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Persen	1,93	1,93	Tercapai	2,15
B.2.1	Urusan Penanaman Modal					
20	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	0,92	44,13	Tercapai	1,52
	Urusan Kebudayaan					
21	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,55	90,46	Tercapai	73,60
	Urusan Pemerintahan					
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Tercapai	A- (Sangat Baik)
23	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	BB	Belum Tercapai	AA
24	Opini atas Laporan BPK	Kriteria	WTP	WTP	Tercapai	WTP
25	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Indeks	3,76	85,63	Tercapai	3,95
26	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4.21)	*)	Belum Rilis	Sangat Tinggi
27	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Tercapai	Level 3 Terdefinisi



B.3	Layanan Urusan Pilihan					
B.3.1	Urusan Pertanian					
28	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas	Persen	2,77	2,27	Belum Tercapai	3,25
B.3.2	Urusan Perdagangan					
29	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	16,17	16,11	Belum Tercapai	16,75
B.3.3	Urusan Industri					
30	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	52,29	52,99	Tercapai	54,21
C	Aspek Daya Saing Daerah					
31	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Tercapai	Sangat Inovatif



C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026. Adapun Program Prioritas dimaksud, hasil keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru

Prioritas dimaksud bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pencetakan wirausaha baru dari hasil pelatihan kerja, maupun penempatan tenaga kerja melalui lowongan usaha / bursa kerja / perjanjian kerja. Pada tahun 2021 telah terserap 18.447 lapangan kerja, dan di tahun 2022 terserap 30.856 lapangan kerja, sehingga total sampai dengan tahun 2022 terdapat 49.303 lapangan kerja baru.

Tahun 2021	Tahun 2022	TOTAL (2021 + 2022)
18.447 Lapangan Kerja	30.856 Lapangan Kerja	49.303 Lapangan Kerja

2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

Prioritas dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang merata.

Pada tahun 2022 sebanyak 1.936.470 jiwa atau 99,05% penduduk telah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sidoarjo yang telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Tahun 2022	
Target	Realisasi
1.955.002 jiwa	1.936.470 jiwa (99,05%)



3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berupa pemberian makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada penduduk miskin (PMKS Lansia Terlantar).

Sebanyak 730 orang miskin di Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan makan gratis dengan gizi lengkap setiap hari 2 kali dalam sehari.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Belum Dilaksanakan	730 orang setiap hari 2 kali makan	730 orang setiap hari 2 kali makan

4. 10.000 Beasiswa Kuliah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa untuk : pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, dan mahasiswa dari keluarga miskin.

Beasiswa diberikan untuk 3 sasaran, yaitu : untuk penduduk miskin tersalurkan 497 beasiswa, untuk yang berprestasi di bidang keagamaan tersalurkan 357 beasiswa, dan untuk pemuda berprestasi tersalurkan 1.000 beasiswa.

Tahun 2021	Tahun 2022		
	Target	Target	Realisasi
Belum Dilaksanakan	Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	500 orang	497 orang
	Jumlah pemuda berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 orang	1.000 orang
	Jumlah pemuda berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	500 orang	357 orang

5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama dengan memberikan insentif / tambahan penghasilan.

Pada tahun 2022 sebanyak 9.677 orang guru ngaji dan guru agama telah diberi insentif untuk peningkatan kesejahteraan.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
8.351 orang	9.677 orang	9.677 orang



6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha, yaitu dengan Program KURMA (Kelompok Usaha Perempuan Mandiri).

Dari 2.400 kelompok yang ditargetkan, sebanyak 1.891 kelompok telah mendapatkan modal untuk usaha, yaitu melalui Program KURMA.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Belum Dilaksanakan	2.400 kelompok	1.891 kelompok

7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran aktif RT dengan memberikan biaya operasional.

Program ini akan dimulai pada tahun anggaran 2023, diawali alokasi untuk seluruh RT di Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan insentif Rp.500.000,- per Bulan.

8. 20.000 UMKM Naik Kelas

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM agar naik kelas dengan memberi bekal pembinaan dan pelatihan.

Dari target 4.900 UMKM, ternyata capaian melampaui hingga 5.533 UMKM naik kelas di tahun 2022 melalui berbagai pembinaan dan pendampingan.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
100 UMKM	4.900 UMKM	5.533 UMKM

9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memada di Kabupaten Sidoarjo melalui : betonisasi jalan, pembangunan jalan pendamping (frontage road), pembangunan fly over, peningkatan sarana prasarana perhubungan, dan lain sebagainya.

Pembangunan jalan dan jembatan Frontage Road ruas Waru – Buduran telah terbangun sepanjang 3.003,9 meter. Betonisasi jalan yang dibangun di tahun 2022 sepanjang 23.305 meter. Selain itu juga telah dalam tahapan pembangunan Fly Over Krian dan Fly Over Aloha.



TARGET	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Pembangunan jalan dan jembatan Frontage Ruas Waru - Buduran	2.600 meter	3.003,9 meter
Panjang jalan kabupaten yang dibetonisasi	21.665 meter	23.305 meter
Pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Krian & Aloha	sudah terlaksana	sudah terlaksana

10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan memberikan honorarium bulanan dan pembinaan.

Pada tahun 2022 sebanyak 7.331 kader posyandu telah ditingkatkan kesejahteraannya.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
606 kader posyandu	7.331 kader posyandu	7.331 kader posyandu

11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer dengan memberikan honorarium bulanan dan insentif.

Sebanyak 10.505 orang GTT, guru swasta, dan tenaga honorer yang terdata di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sidoarjo, telah mendapatkan alokasi anggaran guna peningkatan kesejahteraan.

Tahun 2022	
Target	Realisasi
10.505 orang	10.505 orang

12. Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.

Pada tahun 2022 banyak terdapat event kepemudaan yang mendorong prestasi anak muda di kabupaten Sidoarjo. salah satunya adalah penyelenggaraan event olahraga POPDA XIII dan PEPARPEDA I, serta Jayandaru Youth Night Paradise.



13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan warung / usaha perdagangan rakyat dengan memberikan pendampingan, bantuan dan renovasi.

Tahun 2021 sebanyak 150 warung direnovasi, dan di tahun 2022 ada 402 warung yang direnovasi, sehingga total sampai dengan tahun 2022 ada 552 warung.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
150 Warung	402 Warung	402 Warung

14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan status Desa menjadi Desa Mandiri melalui peningkatan operasional ADD (Alokasi Dana Desa).

Terdapat kenaikan besaran alokasi dana desa di tahun 2023 dari yang diberikan di tahun 2022, dana tersebut ada yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).

Sumber Dana	Tahun 2022		Tahun 2023
	Target	Realisasi	
DAU	Rp.124.942.712.235,-	Rp 124.942.712.235,-	Rp.126.403.322.467,-
DBH	Rp13.047.744.338,-	Rp13.036.176.834,-	Rp13.200.275.433

15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pada tahun 2022 telah diluncurkan Sidoarjo Call Center 112 untuk respon cepat bebas pulsa 24 jam penuh melayani pengaduan masyarakat.

16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perijinan khususnya untuk pelaku usaha mikro.

Pada tahun 2022 terdapat 300 usaha mikro yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan, selain juga telah diterbitkan 1.611 ijin berusaha sesuai prosedur.



	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan	300 UM	300 UM
Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	1.000 ijin	1.611 ijin

17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui : revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), Normalisasi Sungai, dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Sungai yang direvitalisasi di tahun 2022 sepanjang 351 meter. Selain juga telah dibangun 4 unit rumah pompa untuk mengantisipasi banjir. Terdapat 7 RTH dan 4 TPST yang direvitalisasi, dan Kabupaten Sidoarjo telah berkolaborasi dengan PLN Group untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar *co-firing* PLTU.

Tahun 2021	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Panjang sungai yang direvitalisasi	280 meter	351 meter
Jumlah rumah pompa / busem / pintu air yang ditingkatkan / dibangun	4 unit	4 unit
Jumlah RTH yang direvitalisasi	7 RTH	7 RTH
Jumlah TPST yang direvitalisasi	4 TPST	4 TPST

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

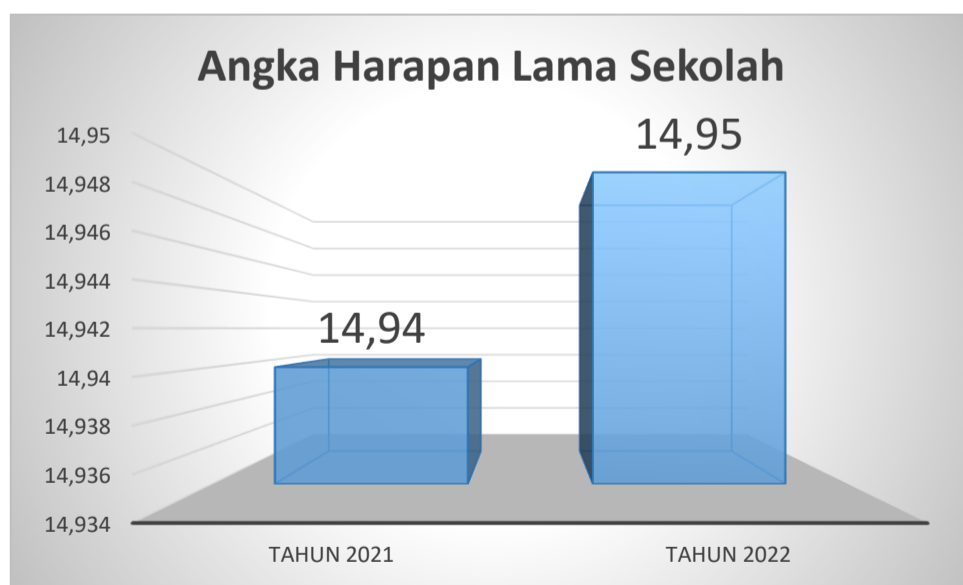
No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	14,95	97%
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23	10,77	96%
3a	APK PAUD	93,20%	102,51%	109,99%
3b	APK SD sederajat	104,75%	110,77%	105,75%
3c	APK SMP sederajat	99,15%	100,68%	101,54%
4a	Persentase Bangunan Ruang Kelas SD kategori Baik	95,30%	90,46%	94,92%
4b	Persentase Bangunan Ruang Kelas SMP kategori Baik	95,50%	90,92%	95%

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 tercapai 14,95 tahun dari target 15,41 tahun sehingga tercapai 97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 14,94 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,01. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,95 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Diploma 2.

Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

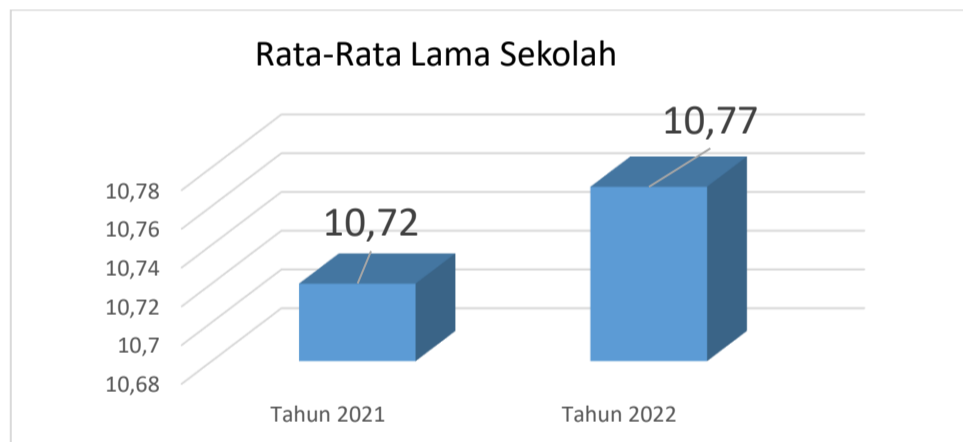
- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan Memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo

Rata – Rata Lama Sekolah

Rata – Rata Lama Sekolah (RTL) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2022 tercapai 10,77 tahun dari target 11,23 tahun sehingga tercapai 96 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 10,72 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,05. Dengan realisasi Rata – Rata Lama Sekolah 10,77 tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang pendidikan SMA/SMK atau setara SMA/SMK kelas XI

Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

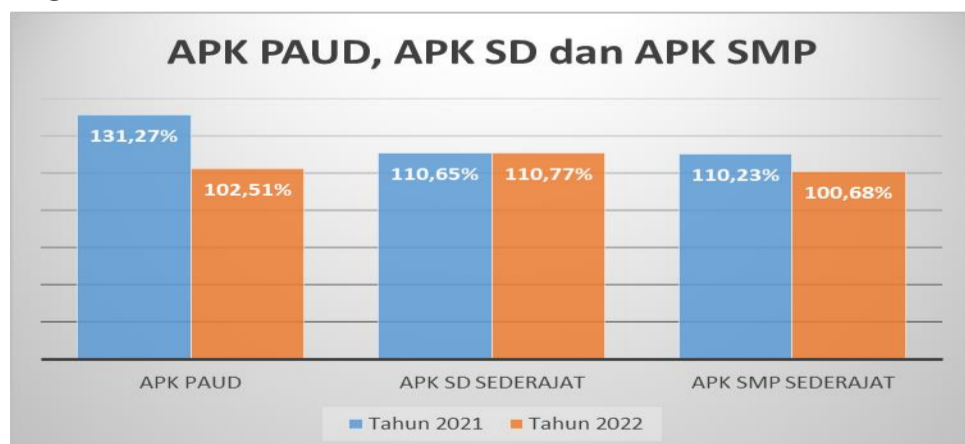
- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, yaitu :

1. APK PAUD Tahun 2022 tercapai 102,51% dari target 93,20% sehingga tercapai 109,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 131,27% maka terdapat penurunan sekitar 28,76%. Namun demikian penurunan tersebut bukanlah suatu preseden yang buruk dalam bidang pendidikan, hal tersebut dikarenakan pencapaian APK PAUD telah terlampaui 100 % yang artinya bahwa penduduk Sidoarjo pada usia 5 – 6 tahun telah seluruhnya menempuh pendidikan PAUD. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun di Sidoarjo tahun 2022 sebanyak 56.494 orang sedangkan peserta didik usia 5 – 6 tahun 57.913 orang yang sedang bersekolah di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat selisih 1.419 siswa bukan dari penduduk Sidoarjo atau penduduk urban.
2. APK SD sederajat Tahun 2022 tercapai 110,77% dari target 104,75% sehingga tercapai 105,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 110,65% maka terdapat peningkatan sekitar 0,12%. Jika di lihat dari banyaknya penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2022 sebanyak 187.795 orang sedangkan siswa usia 7 – 12 tahun sebanyak 208.032 maka terdapat selisih 20.237 anak yang bukan penduduk Sidoarjo namun bersekolah di Sidoarjo.
3. APK SMP sederajat Tahun 2022 tercapai 100,68% dari target 99,15% sehingga tercapai 101,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 110,23% maka terdapat penurunan sekitar 9,55%. Namun penurunan realisasi APK SMP Sederajat tersebut bukanlah merupakan preseden yang buruk dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dikarenakan pencapaian APK SMP sederajat telah terlampaui 100 % yang artinya bahwa penduduk Sidoarjo pada usia 13 – 15 tahun telah seluruhnya menempuh pendidikan SMP sederajat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Sidoarjo 98.389 orang sedangkan peserta didik usia 13 – 15 tahun yang sedang bersekolah di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 99.062 orang sehingga terdapat selisih 673 siswa bukan dari penduduk Sidoarjo atau penduduk urban.

Adapun tren capaian APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022



Adapun upaya yang telah dilakukan agar APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memberikan layanan pendidikan yang optimal
- Meningkatkan infrastruktur pendidikan untuk pemerataan pendidikan
- Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dengan melakukan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai wilayah, serta
- Memberikan dukungan biaya pendidikan yang optimal melalui BOSDA

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SDN maupun jenjang SMPN, adalah sebagai berikut :

SD Negeri

Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
1.256 bangunan (R.Kelas)	2.268 bangunan (R.Kelas)	155 bangunan (R.Kelas)
34,14%	61,65%	4,21%

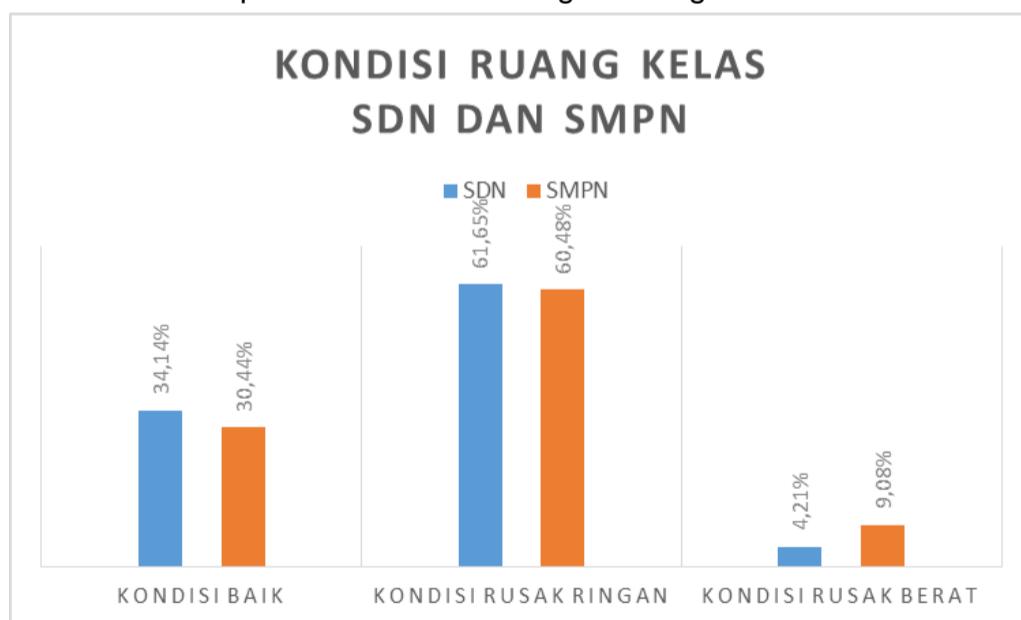
Apabila diproporsi maka sebagian besar kondisi bangunan ruang kelas belajar untuk jenjang SDN adalah dalam kondisi rusak ringan

SMP Negeri

Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
379 bangunan (R.Kelas)	753 bangunan (R.Kelas)	113 bangunan (R.Kelas)
30,44%	60,48%	9,08%

Apabila diproporsi maka sebagian besar kondisi bangunan ruang kelas belajar untuk jenjang SMPN adalah dalam kondisi rusak ringan.

Adapun tren persentase bangunan ruang kelas belajar dalam kondisi baik untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022



Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu :

- Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanakan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusat Berat.
- Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biayai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi.
- Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya pemerataan akses pendidikan melalui infrastruktur yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan dasar yang memenuhi SPM	88,05%	98,05%		
		Persentase satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang difasilitasi	81,69%	100,00%		
		Persentase satuan pendidikan PAUD/TK yang difasilitasi	76,38%	98,94%		
2	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	14,95	Berdasar UU no 23 tahun 2014 pasal 12 berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang Pendidikan Menengah, agar capaian kinerja selaras
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23	10,77	Berdasar UU no 23 tahun 2014 pasal 12 berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang Pendidikan Menengah, agar capaian kinerja selaras
		Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi ijin operasional	68,00%	69,00%		
3.	Terwujudnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan bahasa	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	70,00%	84,02%		



		Persentase seni tradisional yang dilestarikan	77,11%	87,90%		
4.	Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan melalui infrastruktur yang berkualitas di seluruh jenjang	APK PAUD	93,20%	102,51%		
		APK SD sederajat	104,75%	110,77%		
		APK SMP sederajat	99,15%	100,68%		
		Persentase bangunan ruang kelas SD katagori baik	95,30%	90,46%	adanya rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada program pembangunan infrastruktur bidang pendidikan pada jenjang sekolah SD yang bertujuan meningkatkan persentase bangunan ruan kelas SD kategori baik.	mengusulkannya kembali program dan kegiatan yang berdampak rasionalisasi anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023
		Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	37,00%	37,94%		
		Persentase SD yang telah terakreditasi A	73,75%	73,92%		
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	66,95%	93,62%		
		Persentase pendidikan noformal/kesetaraan yang memenuhi standart	35,00%	35,00%		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	01:32	01:32		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	01:32	01:32		
5.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 dalam pendidikan kesetaraan	98,04%	100,00%		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	60,25%	67,67%		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	29,00%	60,33%		



6.	Menguatnya pendidikan karakter peserta didik	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	5,00%	76,00%		
		Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	5,00%	95,87%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	93,2	102,51		
		APK SD	104,75	110,77		
		APK SMP	99,15	100,68		
		Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	95,3	90,46	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik	95,5	90,92	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Persentase PAUD akreditasi A	37	37,94		
		Persentase Pendidikan nonformal / kesetaraan yang memenuhi standar	35	35		
		Persentase SD yang telah terakreditasi A	73,75	73,92		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	60,25	67,67		
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	29	60,33		
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	66,95	93,62		
		Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	5	95,87		
		Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	5	76		
		Prosentase bangunan dan ruang kelas SMP kategori baik	95,5	90,92	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Prosentase bangunan dan ruang kelas SD kategori baik	95,85	90,46	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Rasio guru terhadap murid jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio guru terhadap murid jenjang SMP	01:30	01:30		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa jenjang SMP	01:30	01:30		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	98.04	100		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK SD/MI	110,77	110,77		
		1. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	90,46	90,46		



		1. Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	76	76		
		2. Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	67,67	67,67		
		3. Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	95,87	95,87		
		4. Persentase SD yg update data pokok pendidikan.	100	100		
		5. Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori sangat tinggi)	0	0		
		6. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	59	59		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/MTs	99,15	100,68		
		1. Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	37,25	76		
		2. Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	60,45	67,67		
		3. Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	28,85	60,33		
		4. Persentase SMP yg update data pokok pendidikan	100	100		
		5. Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sangat tinggi)	0	0		
		6. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	60	81		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD	93,2	102,51		
		2. Persentase data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan	94,13	98,68		
		3. Persentase PAUD yang telah terakreditasi	45	82,22		
		4. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1.	82	86,86		
		5. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	51,9	69		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standar	40	40		
2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SD yang dilayani perizinannya	20	20		
	Keg : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase lembaga SD yang mendapatkan ijin operasional	75	100		
		2. Persentase lembaga SMP yang mendapatkan ijin operasional	75	100		
	Keg : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan	1. Persentase PAUD yang mendapatkan ijin operasional	26	26		



	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		2. Persentase Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang mendapatkan ijin operasional	22	22	

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	724.165.758.281,00	694.677.469.822,00	95,93%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	683.147.543.071,00	652.704.134.722,00	95,54%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.269.300,00	3.643.500,00	23,86%

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,77	74,36	99,45%
2	Persentase Keluarga Sehat (KS)	24,67%	33,7%	136,6%
3	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	51,8 per 100.000 KH	37,31 per 100.000 KH	138,83%
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,53 per 1.000 KH	2,41 per 1.000 KH	146,47%
5	Persentase Balita Stunting (Versi E-PPGM)	7,64%	5,8%	131,72%
6a	Persentase bangunan RSUD dalam kondisi baik	100%	100%	100%
6b	Persentase bangunan Puskesmas dalam kondisi baik	96,30%	76,67%	79,61%
6c	Persentase bangunan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik	80,36%	54,72%	68,09%
7	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna	100%

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

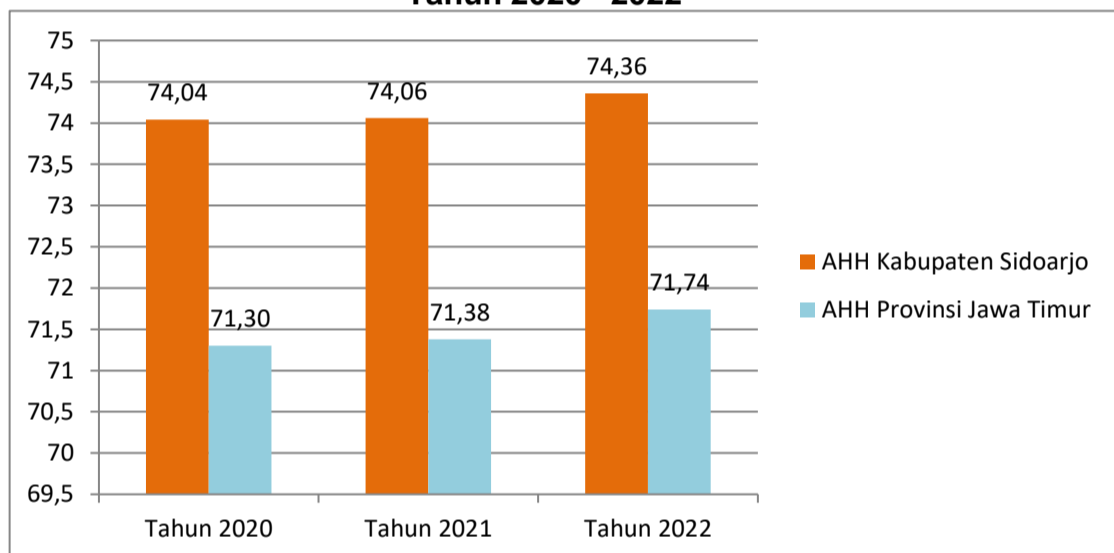
Angka Harapan Hidup Tahun 2022 tercapai 74,36 tahun dari target 74,77 tahun sehingga tercapai 99,45%. Capaian AHH Tahun 2022 belum bisa 100% karena skrening kesehatan pada usia produktif belum tercapai maksimal. Dimana skrening tersebut merupakan salah



satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan skrening tersebut, jumlah kematian ibu dan bayi dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya AHH, antara lain faktor kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola asuh, budaya, dan ketersediaan sumber pangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 74,06 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,27 point atau sekitar 0,4%. Dengan realisasi Angka Harapan Hidup 74,36 tahun ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup yang dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

**Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur
Tahun 2020 - 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

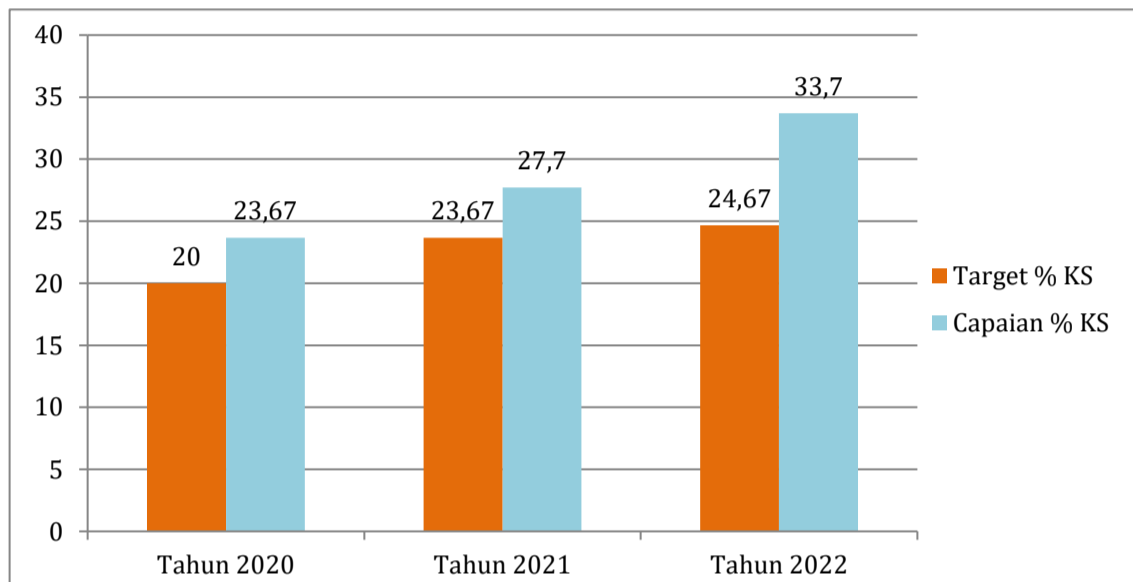
Persentase Keluarga Sehat (KS)

Persentase keluarga sehat Tahun 2022 tercapai 33,7% dari target 24,67% sehingga tercapai 136,6%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 27,7% maka terdapat peningkatan angka 6 point atau sekitar 21%. Hal ini menunjukkan adanya

keberhasilan dan kesinambungan program-program bidang kesehatan, juga karena adanya program KOIPU (Konseling Dari Pintu Ke Pintu), yang terintegrasi dengan program KS, yang akhirnya ikut mendongkrak kunjungan keluarga rawan. Selain itu, koordinasi antar program juga telah dilaksanakan di puskesmas untuk kroscek dan *update* data sehingga data pada aplikasi tervalidasi.

Adapun tren capaian Persentase Keluarga Sehat dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Persentase Keluarga Sehat (KS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2022



Sumber : Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kab. Sidoarjo

Permasalahan yang timbul dalam meningkatkan keluarga sehat, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Koordinator PISPK dengan Koordinator program lainnya untuk validasi dan updating data.
2. Aplikasi PISPK sering error dan tidak secara otomatis *update* data apabila proses edit dan intervensi sudah dilakukan.
3. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum entri data survey awal karena kurangnya koordinasi dan tenaga.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan keluarga sehat, yaitu :

- Optimalisasi peran/ kerjasama lintas sektor, dalam hal ini organisasi masyarakat dan kader untuk melaksanakan intervensi lanjut.
- Dukungan anggaran yang cukup memadai untuk kunjungan intervensi.
- Koordinasi dan kerjasama antar program di Puskesmas untuk sinkronisasi dan validasi data PISPK.
- *Cleaning* data untuk memastikan kevalidan data untuk kemudian dilakukan analisis sehingga tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami keluarga



- Pemantauan *update* data di aplikasi Keluarga Sehat sehingga dapat dilakukan pengunduhan *raw* data sebagai data dasar untuk analisis dan intervensi.

Angka Kematian Ibu

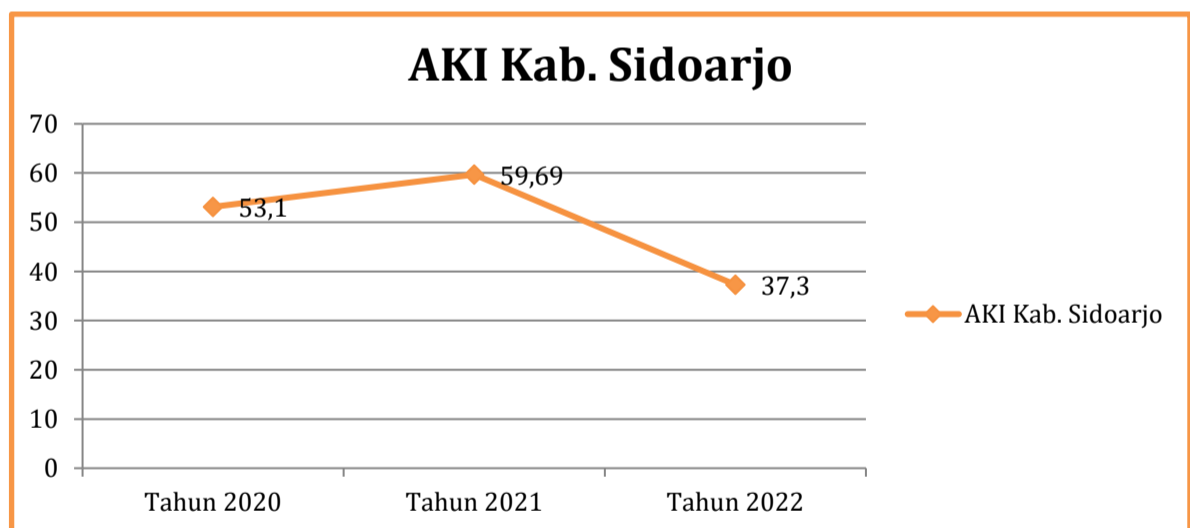
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2022 tercapai 37,31 per 100.000 kelahiran hidup dari target 51,8 per 100.000 kelahiran hidup sehingga tercapai 138,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 59,69 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat penurunan angka 22,38 point atau sekitar 37,49%. Penurunan tersebut disebabkan karena komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan jumlah kematian ibu dengan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Standart Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo berada jauh dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 – 2022



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review Asuhan Persalinan Normal*), kelas ibu, kegawatdaruratan;



- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja 1 (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Angka Kematian Bayi Tahun 2022 tercapai 2,41 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,53 per 1.000 kelahiran hidup sehingga tercapai 146,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 3,01 per 1.000 kelahiran hidup maka terdapat penurunan angka 0,6 point atau sekitar 19,9%. Penurunan tersebut disebabkan karena Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan terus berupaya menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;

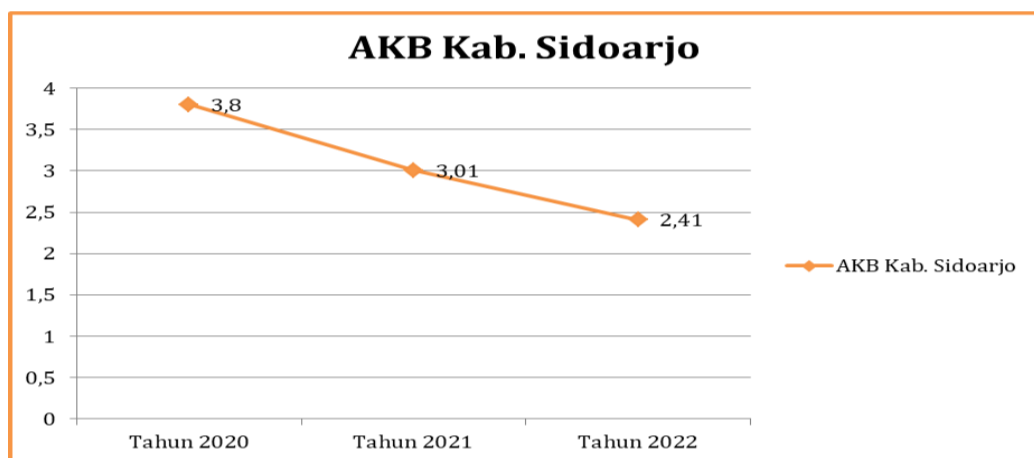


- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Standart Nasional angka kematian bayi adalah 14 per 1.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :

Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2022



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Persentase Balita Stunted

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

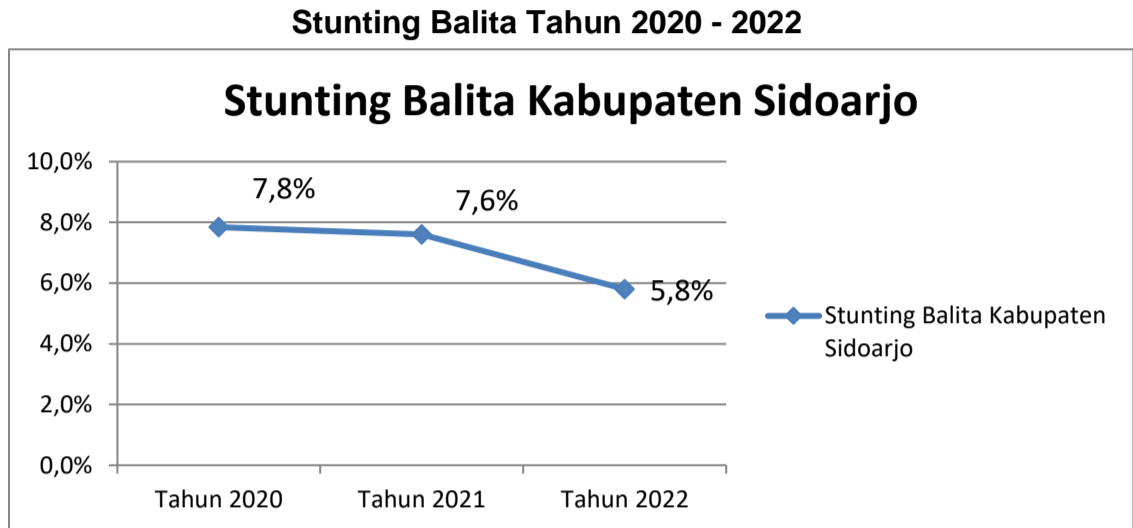
Persentase Balita Stunted Tahun 2022 tercapai 5,8% yaitu sebanyak 4.925 balita dari keseluruhan 85.119 balita di Kabupaten Sidoarjo mengalami stunted berdasarkan data surveilans pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 7,64% maka tercapai 131,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 7,60% maka terdapat penurunan angka 1,8 point atau sekitar 23,68%. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).



Standart Nasional persentase balita stunted adalah 18,4% sehingga dapat dikatakan bahwa persentase balita stunted di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian persentase balita stunted dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 persentase stunted Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1% dari keseluruhan 1.141 balita yang disampling di Kabupaten Sidoarjo mengalami stunted. Apabila dibandingkan dengan hasil SSGI tahun 2021 yaitu 14,8%, maka terdapat peningkatan 1,3%. Peningkatan tersebut terjadi karena diantara balita yang disampling terdapat balita yang jarang datang ke posyandu sehingga tidak terdeteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu adanya balita yang turun berat badannya karena pola asuh yang tidak tepat dan kondisi pemulihan pasca sakit.

Persentase Bangunan Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

Kondisi bangunan RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

RSUD

Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Apabila diproporsi maka RSUD dalam kondis baik100% kondisi bangunan RS Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik



Puskesmas

Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
25 bangunan	6 bangunan	0 bangunan
80,65%	19,35%	-

Apabila diproporsi maka Puskesmas dalam kondisi baik 80,65%

Puskesmas Pembantu

Kabupaten Sidoarjo memiliki 52 puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
26 bangunan	22 bangunan	4 bangunan
50,98%	42,30%	7,69%

Apabila diproporsi maka Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik 50,98%

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin puskesmas, baik bersifat ringan, sedang maupun berat.

Status Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Penilaian akreditasi Rumah Sakit dengan metode penyampaian dokumen dan telusur/ kunjungan lapangan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Penyelenggara akreditasi yang berwenang dalam penilaian akreditasi RSUD Sidoarjo pada Tahun 2022 yaitu Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Standar Akreditasi Rumah Sakit menurut Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*). Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).



- B. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- C. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- D. Kelompok Program Nasional (PROGNAS) sebagai elemen penilaian tambahan.

Hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Hasil Akreditasi	Kriteria
Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
Utama	12 – 15 Bab mendapat nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80%
Madya	8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%
Tidak terakreditasi	a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%

RSUD Sidoarjo telah melaksanakan 3 (tiga) kali akreditasi dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit	Keterangan
2014	Paripurna	Akreditasi ke-I
2017	Paripurna	Akreditasi ke-II
2022	Paripurna	Akreditasi ke-III

Hasil tersebut menunjukkan bahwa RSUD Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi sebanyak tiga kali pada tahun 2014, 2017, dan 2022 dengan hasil Paripurna. Tingkat Paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit dengan pemenuhan standar akreditasi dalam seluruh bab (15 bab dan 1 (satu) elemen tambahan yaitu program nasional) mendapatkan nilai minimal 80%. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan akreditasi ulang. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan akreditasi ulang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga akreditasi ke-III dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan hasil terakreditasi Paripurna.

Adapun 16 bab yang mendapatkan nilai minimal 80% sehingga RSUD Sidoarjo dapat memperoleh status terakreditasi Paripurna pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :



NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
A. Kelompok Manajemen Rumah Sakit			
1.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara Pemilik Rumah Sakit/ Representasi Pemilik/Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan	100%
2.	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)	Rumah sakit membutuhkan staf yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mencapai misinya dan memenuhi kebutuhan pasien. Perekrutan, evaluasi, dan pengangkatan staf dilakukan melalui proses yang efisien.	100%
3.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	Rumah sakit wajib melakukan pengelolaan fasilitas dan lingkungan serta program pengelolaan risiko untuk pemantauan keselamatan di seluruh lingkungan rumah sakit dan mendukung layanan klinis yang disediakan secara aman dan efektif sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien, staf dan pengunjung	100%
4.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien dengan cara melakukan perbaikan dalam memberikan asuhan pasien yang aman dan menurunkan risiko dan pengelolaan utilisasi sumber daya	100%
5.	Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK)	rumah sakit harus memiliki manajemen informasi dengan menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya rumah sakit dan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dalam Pelaksanaan asuhan pasien di rumah sakit	100%
6.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	rumah sakit harus memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga kesehatan, tenaga kontrak, sukarelawan, mahasiswa dan pengunjung maka dari itu dibutuhkan kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pendidikan staf, metode identifikasi risiko infeksi secara proaktif pada individu dan lingkungan serta koordinasi ke semua bagian di rumah sakit.	96,77%
7.	Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)	Rumah sakit pendidikan perlu pengaturan khusus dalam mengadakan pendidikan kesehatan pada peserta didik sebagai upaya menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien	100%
B. Kelompok Pelayanan Berfokus Pada Pasien			
1.	Akses dan Kesenambungan Pelayanan (AKP)	Rumah sakit mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan (PPA) dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan, diharapkan dari proses asuhan di rumah sakit adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit.	100%

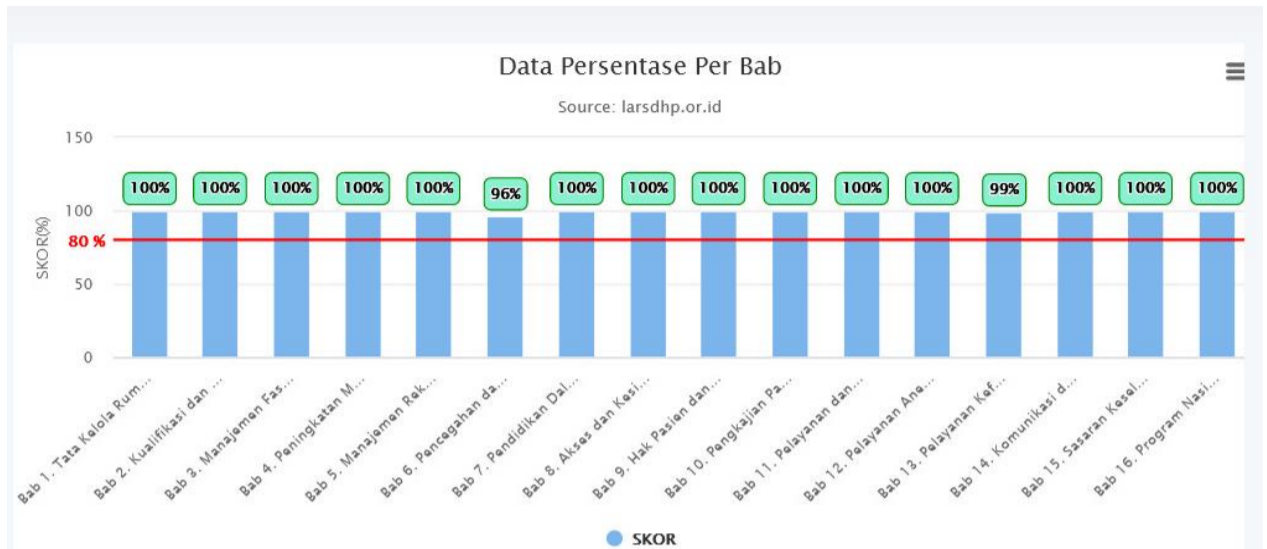


NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
2.	Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPK)	rumah sakit menjamin hak pasien yang dilindungi oleh peraturan perundangan tersebut dengan mengupayakan agar pasien mendapatkan haknya di rumah sakit. pasien dan keluarga atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan.	100%
3.	Pengkajian Pasien (PP)	Pengkajian pasien merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis mulai dari penentuan perawatan, pengobatan dan pelayanan berkelanjutan pasien	100%
4.	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)	Rumah sakit bertanggung jawab memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman mulai dari upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif sehingga penting profesional pemberi asuhan (PPA) memiliki peran yang jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit, atau uraian tugas wewenang	100%
5.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	Rumah sakit dalam memberikan pelayanan pembedahan memerlukan pengkajian pasien yang lengkap dan menyeluruh, Perencanaan asuhan yang terintegrasi dan Pemantauan yang terus menerus sesuai dengan kapasitas pelayanan, standar profesi dan perundang undangan yang berlaku.	100%
6.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit dirancang, diimplementasikan, dan dilakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan terhadap proses-proses: pemilihan, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, persepan/permintaan obat/instruksi pengobatan, penyalinan (<i>transcribing</i>), penyiapan, pemberian dan pemantauan terapi obat. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit harus berupaya mengurangi terjadinya kesalahan obat dengan membuat sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (<i>medication safety</i>).	99,17%
7.	Komunikasi dan Edukasi (KE)	Rumah sakit harus membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien. Komunikasi dan edukasi yang efektif akan membantu pasien untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengobatan yang dijalaninya	100%
C.	Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien		
	Sasaran Keselamatan Pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah		100%
D.	Program Nasional (Elemen Penilaian Tambahan)		
	Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. Salah satu fungsi rumah sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target target pembangunan nasional diantaranya Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, Penurunan angka kesakitan		100%



NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
	Tuberkulosis/TBC, Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.		

Data persentase skor per bab untuk 16 standar akreditasi rumah sakit dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Untuk menuju Status Akreditasi Internasional pada akhir tahun Renstra 2026, upaya yang dilakukan antara lain :

- Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi;
- Melaksanakan *review* dan revisi dokumen akreditasi;
- Mengunggah dokumen ke aplikasi Simarfasyankes (Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
- Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,77	74,36	1. Skrining usia produktif belum tercapai maksimal. Dimana skrining tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat, yang pada akhirnya bisa menekan jumlah kematian ibu dan bayi. 2. Terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya AHH, yang meliputi : kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola	1. Optimalisasi kegiatan posbindu PTM untuk maksimalkan pelaksanaan skrining usia produktif 2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor



					asuh budaya, dan ketersediaan sumber pangan	
2	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan	Indeks infrastruktur kesehatan	71,13	77,21		
3	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. KS (Keluarga Sehat);	24,67 persen	33,7 persen		
		2. Rata-rata nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) di puskesmas	84,84 persen	95,5 persen		
4	Meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit yang bertaraf Internasional	Status Akreditasi Internasional	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna		Untuk menuju Status Akreditasi Internasional pada akhir tahun Renstra 2026, upaya yang dilakukan antara lain: a. Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi; b. Melaksanakan review dan revisi dokumen akreditasi; c. Mengunggah dokumen ke aplikasi Simarfasyankes (Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan); d. Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi.
5	Meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	1. AKI	51,8 per 100.000 KH	37,3 per 100.000 KH	TERCAPAI	
		2. AKB	3,53 per 1.000 KH	2,9 per 1.000 KH	TERCAPAI	
		3. Persentase balita stunting	7,64%	5,8%	TERCAPAI	
		4. Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	56%	55,97%	TERCAPAI	
		5. Persentase keluarga yang disurvei KS	92%	93,40%	TERCAPAI	



		6. Presentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang terakreditasi	23%	23%	TERCAPAI	
		7. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan;	95%	98,86%	TERCAPAI	
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	60%	60%	TERCAPAI	
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	85,64%	Karena sasaran (target) adalah angka proyeksi dimana nilai prevalensinya ditentukan oleh Pusdati Kemenkes RI. yang sebenarnya terjadi adalah orang dengan hipertensi yang ditemukan dari jumlah proyeksi yang ditetapkan menurut hitungan prevalesi hanya 85,64% dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan jika diperlukan.	Tetap menyisir dan aktif jemput bola untuk mencari sasaran yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
		10. Persentase KLB yang tertangani <24 jam	100%	100%	TERCAPAI	
		11. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	TERCAPAI	
		12. Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		13. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1 : 77.384	1 : 77.384	TERCAPAI	



2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	56%	61%	TERCAPAI	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang berijin	100%	100%	TERCAPAI	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	27 per 100.000 penduduk	27 per 100.000 penduduk	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase balita stunting yang ditangani (TB/U atau PB/U);	100%	100%	TERCAPAI	
		2. Persentase Desa/Kelurahan UCI	89%	97,7%	TERCAPAI	
		3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;	> 90%	89%	TERCAPAI	
		4. Persentase Desa ODF;	56%	55,97%	TERCAPAI	
		5. Persentase populasi usia 15-59 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM;	100%	87,91%	Pada dasarnya yang menjadi target sasaran adalah data proyeksi, yang mana dalam penemuan di lapangan bisa saja capaiannya lebih atau kurang. Puskesmas dengan posbindu PTMnya, selalu aktif melakukan layanan kesehatan termasuk skrining kesehatan untuk usia 15 – 59 tahun. Namun karena posbindu PTM buka pada hari-hari efektif, sehingga masih banyak sasaran yang belum ditemukan.	Puskesmas terus bergerak mencari sasaran dengan mengadakan kegiatan posbindu PTM di instansi-instansi pemerintahan.
		6. Presentase Puskesmas yang memiliki akreditasi minimal madya;	70%	70%	TERCAPAI	
		7. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan;	95%	98,86%	TERCAPAI	
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	60%	60%	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1. Persentase Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai	78%	82%	TERCAPAI	



		standar di Puskesmas (akumulasi 60 % sesuai ASPAK)				
		2. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan obat sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		4. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1 : 77.384	1 : 77.384	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan kelas C dan D memiliki izin operasional;	100%	100%	TERCAPAI	
		2. Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	92%	93,40%	TERCAPAI	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	97,50%	97,50%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS	63%	63%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu PURI	75%	85,92%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/tersertifikasi	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1	Jumlah izin edar yang dikeluarkan untuk perusahaan perbekalan kesehatan rumah tangga Alkes / PKRT kelas tertentu	10	10	TERCAPAI	



	Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah yang tercukupi Kebutuhan SDM (ASN) Kesehatannya	75%	75%	TERCAPAI	
	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	95	99,75		
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan medik yang mencapai target	85	81,48	Terdapat beberapa SPM Bidang Pelayanan Medik yang tidak mencapai target antara lain: IGD, rawat inap, persalinan perinatologi dan KB, pelayanan intensif, PPI, dan rekam medik	
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60	68,42		
		Average Length of Stay (ALOS)	3	4,2		
		Turn Over Interval (TOI)	1	1,9		
		Bed Turn Over (BTO)	50	59,9		
		Net Death Rate (NDR)	45	37,1		



		Gross Death Rate (GDR)	70	67,7		
		Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medik dan Non Medik yang mencapai target	100	90,63	Terdapat 2 SPM yang tidak mencapai target yaitu farmasi dan ambulance jenazah	
		Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target	100	80	Terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target dari Subbag Pendidikan dan Pelatihan yaitu Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	
		Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90	100		
		Persentase diselesaikannya penelitian	80	100		
		Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26	94,54		
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	100	75	1 SPM belum mencapai target di Subbag Perbendaharaan yaitu Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	
		Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	100	100		
		Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)	$\leq 0,02$	0,05	Beberapa pengadu tidak dapat dikonfirmasi pada hari yang sama sesuai dengan waktu pelaporan, sehingga tindaklanjut pengaduan baru dapat ditangani lebih dari 1 x 24 jam kerja (namun tidak	



					lebih dari 3 x 24 jam kerja).	
	KEGIATAN: PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase elemen penilaian Tata Kelola Rumah Sakit yang memenuhi standar (TKRS, MFK, KPS, PMKP, PPK, PKPO)	95	99,86		
		Persentase elemen penilaian Tata Kelola Klinis I yang memenuhi standar (AKP, PP, PAP, PAB, PROGNAS)	95	100		
		Persentase elemen penilaian Tata Kelola Klinis 2 yang memenuhi standar (MRMIK, PPI, HPKK, KE, SKP)	95	99,35		
		Persentase indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target	85	71,4	2 Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat dan Kematian pasien ≤24 jam di Gawat Darurat	
		Persentase indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan rekam medik yang mencapai target	85	50	Ada 2 indikator SPM tidak tercapai yaitu kelengkapan berkas rekam medik dan kelengkapan berkas informed consent	
		Persentase perolehan pasien baru (Customer Acquisition)	2	2,3		
		Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)	75	98,06		
		Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target	85	84,61	3 indikator SPM tidak tercapai yaitu Jam visite Dokter Spesialis, Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian, dan Kematian pasien >48 jam	
		Persentase indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target	85	66,7	3 indikator SPM tidak tercapai yaitu Kejadian kematian Ibu karena persalinan sepsis, Kemampuan menanggapi BBLR	



					1500 gr-2500 gr, dan Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	
		Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target	85	66,7	Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Pemberi pelayanan Unit Intensif perawat minimal D3 dan ≥50 perawat dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara D4 belum 100% tersertifikasi	
		Persentase indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target	85	66,7	Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Jumlah anggota tim PPI yang sudah terlatih belum mencapai 75%	
		Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP)	70	70		
		Persentase komponen Laporan Analisa Rawat Inap yang telah dilaporkan secara berkala	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target	100	60	2 indikator SPM belum memenuhi target yaitu Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	
		Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target	100	66,67	SPM Kecepatan memberikan pelayanan ambulance jenazah belum memenuhi target dikarenakan	



					kekurangan tenaga driver ambulance	
		Persentase indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target	100	100		
		Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Jalan dan Khusus	4	4		
		Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Inap	4	4		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target	100	100		
		Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama di bidang pelayanan kesehatan	20	38		
		Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama di bidang non pelayanan kesehatan	24	25		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian SDM yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan yang mencapai target	100	75,8	Di Subbag Diklat terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target yaitu Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	
		Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun	55	63,2		



	Persentase parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur	100	100		
	Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan	100	100		
	Opini Laporan Keuangan	WTP	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Perbendaharaan yang mencapai target	100	91,67	Di Subbag Perbendaharaan terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target yaitu Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Elektromedik Rumah Sakit yang mencapai target	100	100		
	Persentase Laporan Pengelolaan Dokumen Aset yang telah disusun	100	100		
	Penyusunan laporan number of complain	100	100		
	Penyusunan draft rancangan Peraturan Direktur	90	90		



	Penyusunan draft rancangan Keputusan Direktur	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang non klinis (perusahaan)	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang klinis (non perusahaan)	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang institusi pendidikan	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang manajerial	90	90		
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	100		
	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26	94,54		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.446.080.682,00	244.323.590.277,26	97,56%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	295.491.667.554,00	264.534.983.608,00	89,52%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.452.616.500,00	16.589.120.409,00	85,28%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	467.596.495,00	421.093.242,00	90,05%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.338.322.225,00	4.252.028.740,00	79,65%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	644.800.797.308,00	525.699.873.677,00	81,53%

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	95,05%	100,05%



2	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%	105,66%
3	Persentase luasan genangan / banjir tertangani	80,51%	82%	101,85%
4	Persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan	86,5	83,33	96,34

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.021, 373 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
622,747 km	348,046 km	36,112 km	14,468 km
60,972%	34,076%	3,536%	1,417%

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2022 adalah 95,05% dari target 95% sehingga tercapai 100,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 91,93% maka terdapat peningkatan sekitar 3,12 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap.

Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		km	95,05%	km	4,95%
1	Jabon	65,366		8,785	
2	Tanggulangin	66,047		5,767	
3	Sidoarjo	62,353		0,067	
4	Candi	67,589		1,306	
5	Buduran	55,192		0,328	
6	Gedangan	51,853		1,084	
7	Porong	42,906	5,462		



8	Tulangan	76,775		0,000	
9	Krembung	43,559		9,436	
10	Prambon	52,964		5,427	
11	Tarik	52,456		3,160	
12	Balongsendo	45,320		2,770	
13	Krian	79,365		0,000	
14	Taman	34,703		1,890	
15	Wonoayu	49,853		2,013	
16	Sukodono	51,723		1,617	
17	Waru	38,837		0,408	
18	Sedati	33,936		1,060	
	TOTAL	970,793		50,580	

Pada tahun 2022 dilakukan betonisasi jalan sepanjang 23.302 meter dan pembangunan frontage road 3.003,9 meter, diantaranya :

1. Ruas Jalan Pawindo – Jaticalang sepanjang 639,00 m
2. Ruas Jalan Tulangan – Kepadangan, Kepadangan – Bulang, Simpang Tiga Tulangan sepanjang 6.335,00 m
3. Ruas Jalan Betro - Kalanganyar (DAK) sepanjang 922,40 m
4. Ruas Jalan Pilang - Tulangan sepanjang 1.020,10 m
5. Ruas Jalan Kebonagung - Kemasan sepanjang 5.099,50 m
6. Ruas Jalan Pabean - Wadungarisepanjang 532,00 m
7. Ruas Jalan Krian - Kemangsen sepanjang 476,20 m
8. Ruas Jalan Pabean - Ngingas sepanjang 835,00 m
9. Ruas Jalan Wonoayu - Candinegoro sepanjang 875,00 m
10. Ruas Jalan Panjunan - Suko (DAK) sepanjang 1.855,60 m
11. Ruas Jalan Panjunan - Suko sepanjang 556,00 m
12. Ruas Jalan Krembung - Kepadangan sepanjang 469,80 m
13. Ruas Jalan Semambung - Sedatigede (Ljt) sepanjang 302,50 m
14. Ruas Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (Ljt) sepanjang 217,40 m
15. Ruas Jalan Durungbedug - Sidodadi sepanjang 887,20 m
16. Jalan Akses Ex Tol Menuju Tlocor sepanjang 150,36 m
17. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Frontage Road Waru - Buduran (Ljt) sepanjang 576,9 m
18. Ruas Jalan Sidorejo - Barengkrajan sepanjang 1.969,00 m
19. Ruas Jalan Desa Tambak Sawah RT.03 RT.04 Rw.02, Kab. Sidoarjo, Waru, Tambaksawah sepanjang 502,00 m
20. Ruas Jalan Masanganwetan Menuju Dusun Wagir, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Masanganwetan sepanjang 133,00 m
21. Ruas Jalan Sepanjang Jalan RT 13, 14, 15, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 118,75 m



22. Ruas Jalan Sepanjang Jalan Suko RT 15 RW 05, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 105,00
23. Pembangunan Gorong-Gorong Desa Kali Tengah RT.01 RW.01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah sepanjang 205,00 m
24. Jalan Desa Tulangan-Medalem, Kab. Sidoarjo, Tulangan, Tulangan, Seluruh Kelurahan/Desa sepanjang 318,30 m
25. Jalan Dusun Sangangewu RT 04 RW 01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin sepanjang 183,50 m
26. Jalan Masanganwetan RT 03 Menuju Masangankulon, Kab. Sidoarjo, Masanganwetan sepanjang 81,40 m
27. Jalan Ngingas, Waru sepanjang 924,00 m
28. Ruas Jalan Gedangan - Betro sepanjang 531,00 m

Selain itu juga telah dilakukan penggantian 4 buah jembatan, yaitu :

1. Jembatan Ds. Banjarkemantren
2. Jembatan Dsn. Sidomukti RT. 07 RW. 02 Ds. Kraton Krian
3. Jembatan Raya Tropodo dengan Perbatasan Pabean Sedati
4. Jembatan Durungbanjar

serta dilakukan Rehabilitasi Jembatan, yaitu :

1. Pemeliharaan Jembatan Plumbungan
2. Rehabilitasi Jembatan Krebung

Adapun upaya yang telah dilakukan agar jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

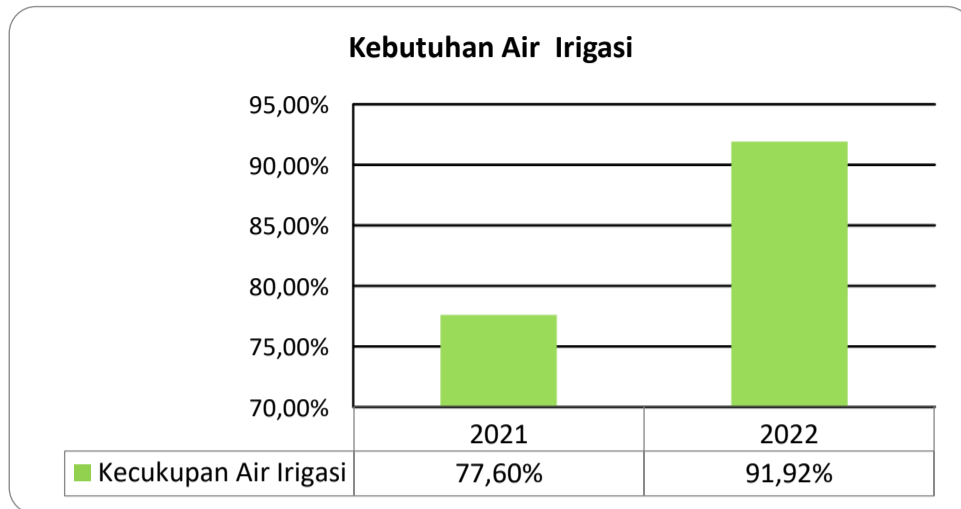
1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan tahun 2022 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.583 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.898 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2022 adalah 106% dari target 87% atau tercapai 91,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 77,60% maka terdapat peningkatan 14,32%.



Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah :

- DI Lintas Provinsi diatas 3000 Ha adalah Pemerintah.
- DI Lintas Kab. diatas 1000 – 3000 Ha adalah Pemerintah Provinsi.
- DI berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Luas daerah kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2022 adalah sepanjang 3.898 Ha sebagai berikut :

NO	DAERAH IRIGASI KEWENANGAN	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS BAKU SAWAH YANG ADA (Ha)	LUAS BAKU SAWAH YANG DIAIRI (Ha)	PENGAMBILAN AIR	WILAYAH UPTD
1	Pemerintah Pusat > 3000 Ha	D.I. Delta Brantas	17,317	17,317	Kali Brantas	UPTD : Sumput, Porong, Trosobo, Prambon
		JUMLAH	17,317	17,317		
2	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo < 1000 Ha	D.I. Kedunguling Kiri	295	240	Afvoer Kedunguling	UPTD Sumput
		D.I. Kedunguling Kanan	654	647	Afvoer Kedunguling	UPTD Sumput
		D.I. Bader	375	252	Afvoer Bader	UPTD Sumput
		D.I. Bulubendo	59	59	Afvoer Bulubendo	UPTD Sumput
		D.I. Buntung	62	59	Afvoer Buntung	UPTD Sumput
		D.I. Kalidawir	440	411	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
		D.I. Gedek	140	140	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
		D.I. Kedungpandan	233	233	Kali Bangil Tak	UPTD Porong
		D.I. Wilayat II	207	183	Afvoer Wilayat	UPTD Sumput
		D.I. Kali Pucang	207	174	Afvoer Pucang	UPTD Sumput
		D.I. Bahgepuk	341	341	Afvoer Bahgepuk	UPTD Porong
		D.I. Kragan	30	30	Afvoer Kragan	UPTD Sumput



	D.I. Jombang	42	42	Afvoer Jombang	UPTD Sumpat
	D.I. Karangbong I	86	86	Afvoer Karangbong	UPTD Sumpat
	D.I. Karangbong II	124	124	Afvoer Karangbong	UPTD Sumpat
	D.I. Wilayat I	29	29	Afvoer Wilayat	UPTD Trosobo
	D.I. Jatianom	417	376	Afvoer Jatianom	UPTD Porong
	D.I. Kedungan	157	157	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
	JUMLAH	3,898	3,583		
	TOTAL	21,215	20,900		

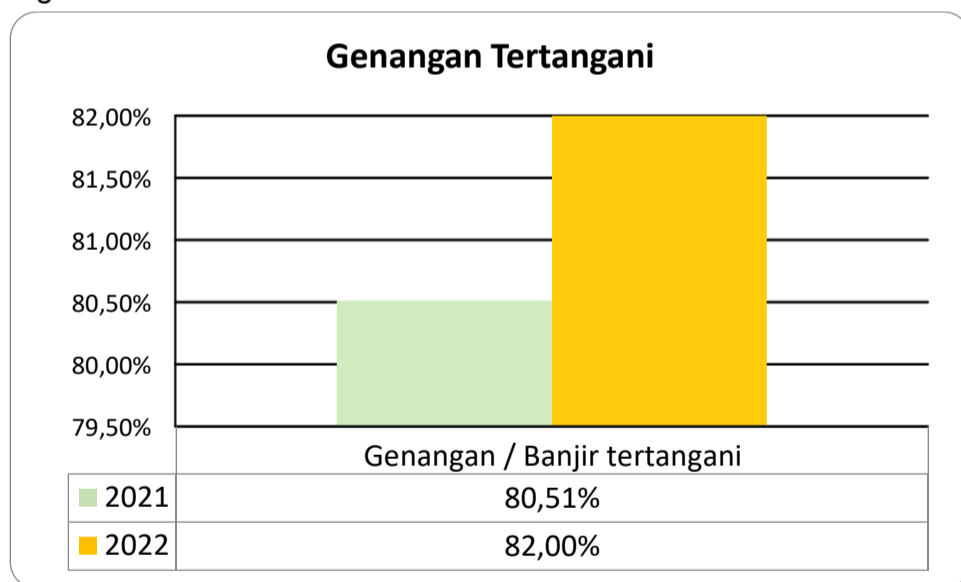
Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Persentase luasan genangan / banjir tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2022 adalah 1,85% dari target 80,51% atau tercapai 101,85%.

Adapun tren capaian persentase luasan genangan / banjir tertangani dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

No	Uraian	Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur (Ha)	Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)
1	Bringinbendo	11	75
2	Pucanganom	26	30



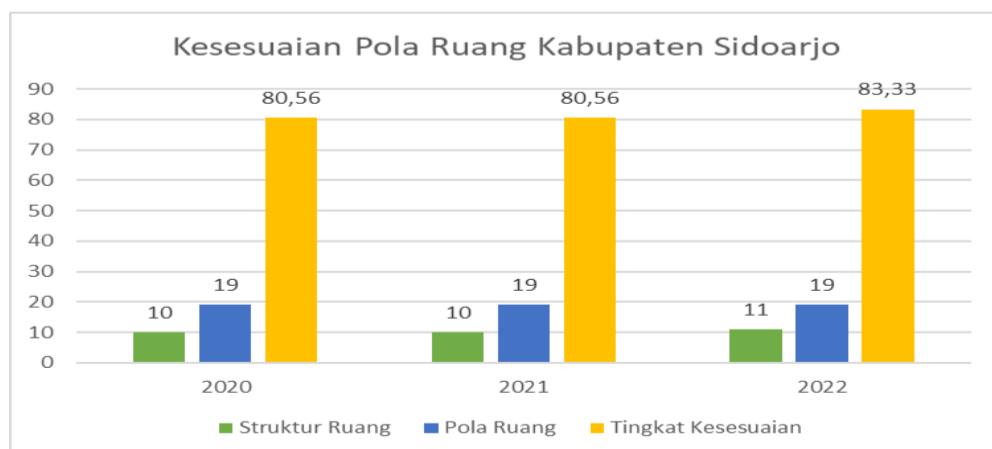
3	Tambak Sawah	55	70
4	Kedungbanteng	17	17
5	Lemahputro	32	32
6	Rangkahkidul	28	40
7	Sidokare	38	38
8	Tambakrejo	49	98
9	Banjarasri	30	30
10	Banjarpanji	10	10
11	Porong	25	30
12	Pesawahan	25	28
13	Candipari	12	18
14	Wunut	8	10
15	Bluru Kidul	14	14
16	Kalitengah	3	7
17	Balongdowo	4	4
18	Kemiri	7	7
	Jumlah	458	558

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan / banjir, antara lain :

1. Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo.
2. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin Pembangunan Rumah Pompa Saluran Gedangrowo.
3. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin.
4. Rehab Bangunan Rumah Panel Dam Pendopo Kec. Buduran.

Persentase Kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 30 program sektoral yang telah sesuai dengan Program RTRW 2019-2024 sekitar 83,3% dari target 86,5% sehingga tercapai 96,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 29 program maka terdapat peningkatan angka 1 program atau sekitar 80,55%. Adapun tren capaian persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut.





Pada tahun 2022 dilakukan Penyediaan lahan baru sebagai bentuk antisipasi perluasan Bandara Juanda yang merupakan sub indikator sistem jaringan transportasi udara pada Program Struktur Ruang RTRW 2019-2024.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang, yaitu akan dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait untuk percepatan penyelesaian program RTRW yang belum sesuai, karena program-program tersebut seharusnya dilaksanakan oleh beberapa OPD yang bersangkutan.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastrukturn secara memadai	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	31,25%	32,64%		
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	95,05%		
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%		
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51%	82%		
3	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan	86,5	83,33	dari 36 Program RTRW hanya 30 program sektoral yang sesuai sampai dengan akhir tahun 2022, sedangkan program-program tersebut seharusnya dilaksanakan oleh beberapa OPD yang bersangkutan	akan dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait untuk percepatan penyelesaian program RTRW yang belum sesuai

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	88%	89,55%		
		Persentase Saprasi Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	100%	100%		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saprasi Pengelolaan SDA yang bisa difungsikan	30 unit	120 unit		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	251.188 m	255.604 m		



	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	26%	28,90%		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	116.038 m	3625.491 m		
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90,50%	95,05%		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	919 km	1006.793 km		
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	65,5	74,79		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan non pemerintah yang sesuai ketentuan	13	944		
		Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai ketentuan	3	3		
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	30	0	Dokumen RTBL telah tersusun pada tahun n, namun penetapan Perbup dapat dilakukan tahun n+1 untuk masing-masing dokumennya	dalam proses penyusunan Perbup untuk RTBL yang telah tersusun pada tahun n+1
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	3	3		
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	a. Prosentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil sesuai target tahun berkenaan	100	100		
		b. Presentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai target tahun berkenaan	80	100		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang lulus dalam Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70	70		



	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	0	0		
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	67	67		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang diterbitkan	0	0		
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterbitkan	50	163		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterapkan	1	1		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.671.869.841,00	22.288.450.788,00	90,34%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.240.569.610,00	17.258.500.622,00	85,27%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	60.704.873.897,00	50.911.873.210,00	83,87%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	446.196.437.924,00	382.332.323.116,00	85,69%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.941.366.088,00	4.444.853.428,00	89,95%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.333.776.830,00	1.267.142.800,00	95,00%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	505.375.000,00	351.173.000,00	69,49%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.618.485.734,00	1.522.705.835,00	94,08%

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase pelayanan air minum aman	41,08	39,84	96,98
2	Persentase akses sanitasi layak	97,4	97,41	100,01

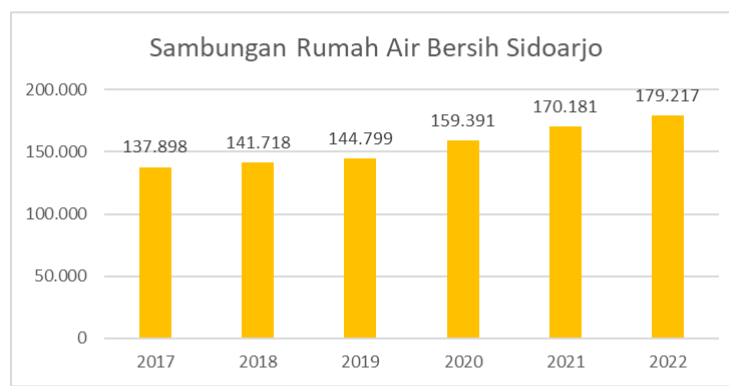


3	Persentase luas kawasan tidak kumuh	99,72	99,7	99,89
---	-------------------------------------	-------	------	-------

Persentase pelayanan air minum aman

Sampai dengan tahun 2022 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan yang dibangun oleh PDAM sebanyak 169.155 SR dan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 10.062 SR. Secara keseluruhan masyarakat yang terlayani air bersih sebanyak 179.217 SR atau sekitar 39,84% dari target 41,08% sehingga tercapai 96,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 37,76% maka terdapat peningkatan sekitar 2,08% . Dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan tahun 2022 hanya terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Seban, Wonokupang, dan Sidomojo.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Jika dijabarkan masing-masing realisasi pelayanan air bersih, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target SR	200	760	430	676	907	754
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898	8.805	10.062
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493	161.376	169.155
SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391	170.181	179.217

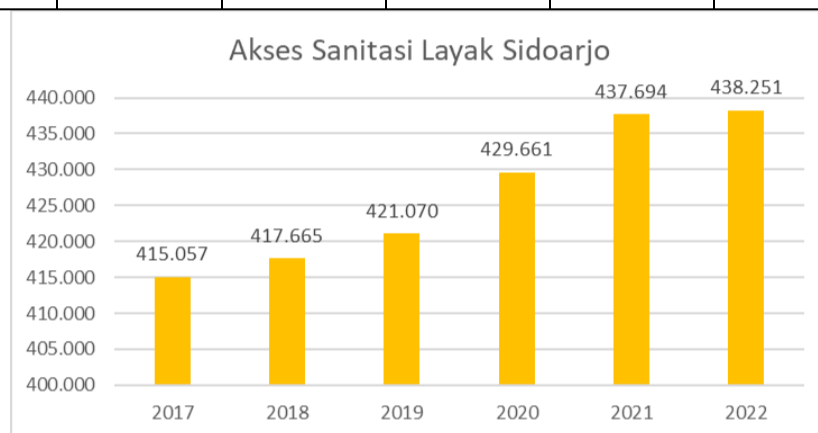
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih, yaitu selain pembangunan akses air bersih, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah air bersih.

**Persentase akses sanitasi layak**

Sampai dengan tahun 2022 rumah tangga bersanitasi sehat di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 438.251 RT atau sekitar 97,41% dari jumlah penduduk, dimana apabila dibandingkan dengan target 97.40% tercapai 100,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 8033 RT atau 97,29% dari jumlah penduduk maka terdapat peningkatan angka 0,11%.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan sanitasi layak dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target RT		3.305	3.450	3.374	8.033	557
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070	429.661	437.694	438.251



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

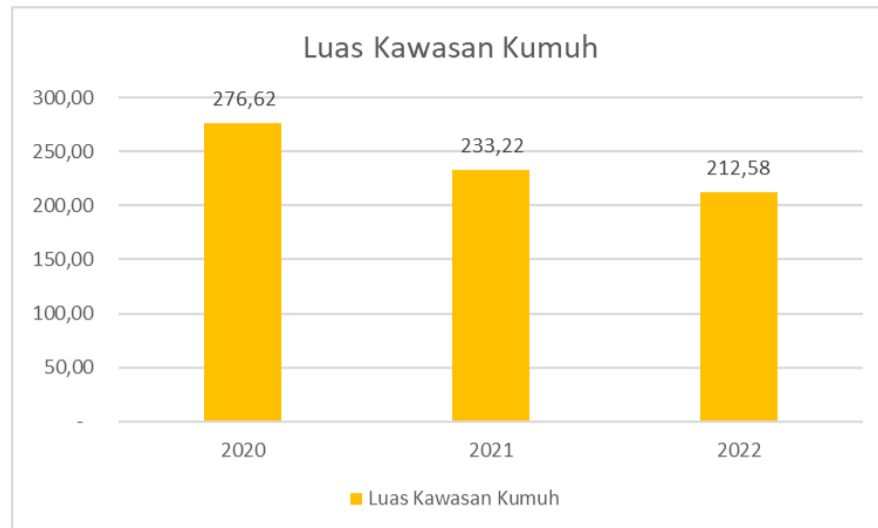
Persentase Luas Kawasan Tidak Kumuh

Sebagaimana SK Kumuh Bupati Nomor 311 Tahun 2021 bahwa Luasan kawasan kumuh sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424 Ha.

Sampai dengan tahun 2022 kawasan kumuh yang telah tertangani adalah 64,04 Ha atau sekitar 23,15%, sehingga luas Kawasan tidak kumuh 99,7%.

Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Luasan Kumuh Awal (Ha)	Capaian Absolut Tahun 2021 (Ha)	Capaian Absolut Tahun 2022 (Ha)	Kumulatif s/d Tahun 2022 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2022 (Ha)
a	b	c	d=b+c	e=a-d
276,62	43,4	20,64	64,04	212,58



Kawasan kumuh yang masih belum tertangani dan harus ditangani di tahun selanjutnya adalah 212,58 Ha, berikut 5 desa/kelurahan dengan luasan kumuh terbesar :

- Desa/Kelurahan Sukodono seluas 13,91 Ha
- Desa/Kelurahan Sumokembangsri seluas 12,93 Ha
- Desa/Kelurahan Pekauman seluas 12 Ha
- Desa/Kelurahan Bligo seluas 11,71 Ha
- Desa/Kelurahan Sidokare seluas 11,31 Ha

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Persentase sarana dasar permukiman dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72	73,57		
2	Meningkatnya layanan dasar keciptakaryaan daerah	Persentase pelayanan air minum aman	41,08	39,84	dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Seban, Wonokupang, dan Sidomojo	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
		Persentase akses sanitasi layak	97,4	97,41		
		Persentase luas tidak kumuh	99,72	99,7		



Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	41,08	39,84	dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Sebani, Wonokupang, dan Sidomojo	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang	7370	6354		
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	97,4	97,41		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	553	557		
3	Program Pengembangan Permukiman	Persentase prasarana perumahan yang disesuaikan sesuai target tahun berkenaan	91	91		
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia	90	90		
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	86	88		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun yang dikelola	5	5		
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	27,73	23,15	salah satu unsur perhitungan luasan kawasan kumuh adalah tersedianya prasarana air bersih, sedangkan target air bersih sendiri tidak tercapai dikarenakan terdapat 3 desa target pembangunan yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pecegahan dan Peningkatan	1	1		



	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang diterapkan				
		Luas Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	34	65		
6	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	11	0	Terdapat rasionalisasi anggaran, dan belum dilakukan penyesuaian target	akan dilakukan teliti ulang dan penyesuaian target pada jika terjadi hal yang sama di tahun berikutnya
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	91	0	Terdapat rasionalisasi anggaran, dan belum dilakukan penyesuaian target	akan dilakukan teliti ulang dan penyesuaian target pada jika terjadi hal yang sama di tahun berikutnya
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	0	0		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	89.191.646.865,00	82.704.621.812,80	92,73%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.446.601.960,00	6.323.681.604,00	98,09%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	27.592.465.749,00	24.294.094.257,00	88,05%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.460.292.080,00	3.107.713.474,00	89,81%
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.438.750.000,00	1.434.316.000,00	99,69%
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	0,00	0,00%

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, dijabarkan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	103%
2	Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT	1:1,25	1:1,25	100%
3	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%
5	Indeks Toleransi	77,92	81,30	104%
6	Indeks Resiko Bencana	98,44	98,73	99,70%
7	Rata – Rata response time tanggap penanganan kebakaran	15 menit	18,12 menit	82,78%

Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks rasa aman Tahun 2022 tercapai 80,77 dari target 77,92 sehingga tercapai 103%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 76,60 maka terdapat peningkatan angka 4,17 atau sekitar 5%. Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 80,77 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	83,13
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	86,59
Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan	57,61
Keamanan dan Kekerasan	83,13
Indeks Rasa Aman	80,77



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman dapat tercapai optimal :

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman
- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten

Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT

Kondisi ideal rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT sebagaimana Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Rasio jumlah anggota linmas terhadap RT Tahun 2022 adalah 1 : 1,12 Hal ini menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Linmas dan berperan aktif dalam kegiatan positif kelinmasan di berbagai tempat.

Pada tahun 2022 terdapat perekrutan anggota linmas sebanyak 9.458 personil. Untuk keseluruhan data personil linmas sebagaimana table berikut :

DATA ANGGOTA LINMAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH			KET
		RT	PRIA	WANITA	
1	TARIK	326	328	0	
2	PRAMBON	351	351	0	
3	KREMBUNG	295	168	0	
4	PORONG	279	344	3	
5	JABON	229	150	0	
6	TANGGULANGIN	358	910	0	
7	CANDI	700	901	1	
8	SIDOARJO	853	1094	2	
9	TULANGAN	468	335	0	
10	WONOAYU	333	326	0	
11	KRIAN	501	517	0	
12	BALONGBENDO	350	283	0	
13	SUKODONO	549	345	1	
14	TAMAN	788	1238	0	
15	BUDURAN	364	816	2	
16	GEDANGAN	491	231	0	
17	SEDATI	400	914	0	
18	WARU	792	928	0	
JUMLAH		8427	10179	9	
TOTAL KESELURUHAN			9458		

sumber : e-linmas 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat memenuhi rasio jumlah anggota linmas terhadap RT, yaitu :

- Sering mengadakan sosialisasi kelinmasan ke desa dan kelurahan
- Mengoptimalkan fungsi koordinator lapangan dalam pengaturan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi linmas.
- Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil linmas dan masyarakat pada umumnya perihal fungsi linmas.



Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan

Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di Tahun 2022 tercapai 100% dari target 100% sehingga tercapai 100% sesuai target. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 150 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 150 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100% maka terdapat kestabilan angka 100% atau sekitar 0% peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk pelanggaran telah dapat terselesaikan melalui sidang tipiring atau yustisi.

Rekapitulasi data pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana tabel berikut :

**REKAP DATA PELANGGAR PERDA 10 TAHUN 2013
TENTANG TIBUMTRANMAS 2022**

NO	KEGIATAN	BULAN												JUMLAH KEGIATAN	KET
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1.	OPS														
	a. PKL	4	4	4	5	6	2		3	2			12	42	100 %
	b. Reklame	3	3			3	3	3				4		19	100 %
	c. Tibumtranmasy:														
	-Pekat				3					1		1	2	7	100 %
	-PMKS				2	3								5	
	-Bangli			4		1	3						1	9	100 %
2.	PAM	6	12	7	2	9	13	5	4	3	1	3	3	68	100 %
	TOTAL	13	19	15	12	22	21	8	7	6	1	8	18	150	100 %

Upaya yang telah dilakukan agar gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat terselesaikan secara optimal, yaitu :

- Pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah
- Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang tertangani di Tahun 2022 tercapai 100% dari target 100% sehingga tercapai 100%. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 224 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 224 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100% maka terdapat kestabilan pencapaian di angka 100% . Hal ini menunjukkan bahwa semua bentuk kasus pelanggaran peraturan daerah telah tertangani di tahun 2022.



Rekapitulasi data pelanggaran perda dan perkada , sebagaimana tabel berikut :

REKAP DATA SIDANG TIPIRING TAHUN 2022

NO	TGL SIDANG	TEMPAT SIDANG	JUMLAH PELANGGAR (ORANG)	DENDA YANG DIBAYAR MELALUI KEJAKSAAN	JUMLAH PELANGGAR YANG DISIDANG TIPIRING
1	17 FEBRUARI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	38	Rp8.500.000	38
2	24 FEBRUARI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	27	Rp6.150.000	27
3	31 MARET 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	42	Rp11.100.000	42
4	06 April 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	3	Rp1.415.000	3
5	18 MEI 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	6	Rp1.562.000	6
6	23 JUNI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	29	Rp4.200.000	29
7	21 JULI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	28	Rp3.850.000	28
8	11 AGUSTUS 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	15	Rp3.630.000	15
9	31 AGUSTUS 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	3	Rp606.000	3
10	29 SEPTEMBER 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	18	Rp2.036.000	18
11	27 OKTOBER 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	13	Rp1.351.000	13
12	09 NOVEMBER 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	1	Rp301.000	1
13	14 DESEMBER 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	1	Rp252.000	1
TOTAL			224	Rp44.953.000	224
Keterangan				100 %	

Upaya yang telah dilakukan agar kasus pelanggaran perda dapat cepat tertangani :

- Melaksanakan sinergi kerjasama Satpol PP dengan dinas lain yang terkait di wilayah Kabupaten Sidoarjo
- Mengoptimalkan fungsi pengawasan, upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda

Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

- Variable persepsi terhadap toleransi
- variable sikap terhadap toleransi
- variable Kerjasama antar suku agama berbeda
- variable sikap Pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- Variabel harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2022 tercapai 81,30 dari target 77,92 sehingga tercapai 104%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 80,18 maka terdapat peningkatan angka 1,12 point atau sekitar 1% . Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 81,30 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi.



Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	86,02
Sikap Terhadap Toleransi	81,45
Kerjasama Antar Suku dan agama yang berbeda	77,14
Sikap Pemerintah daerah Terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda	79,38
Harapan Terhadap Pemerintah	82,53

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
- Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama

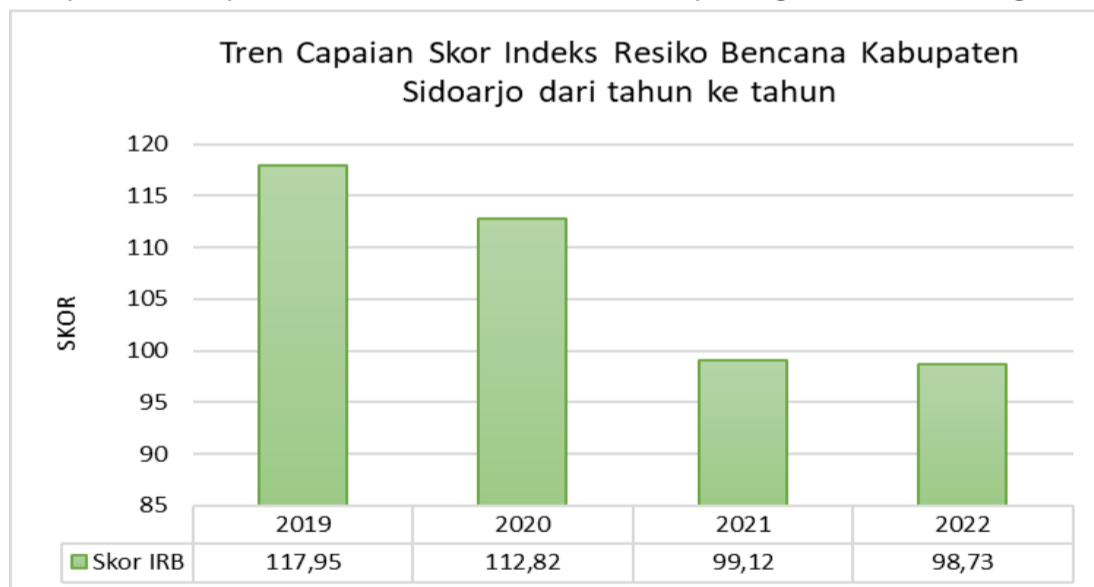
Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks resiko bencana Tahun 2022 berada pada skor 98,74 dari target skor 98,44 sehingga tercapai 99,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu pada skor 99,21 maka terdapat peningkatan angka sebesar 0,48 poin.

Dengan realisasi Indeks resiko bencana sebesar 98,44 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG.

Adapun tren capaian Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :



Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.



Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

- a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH	SKOR
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.97	0,78	SEDANG	
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0.97			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.88			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.85			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.70			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.68			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.85			

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB-IKD Kab. Sidoarjo 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

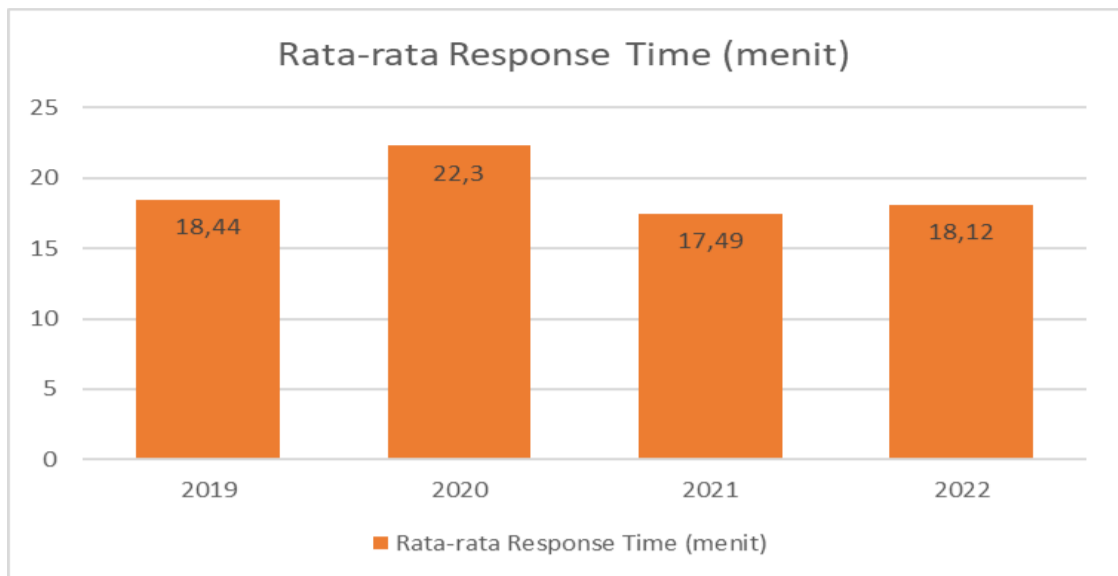
1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System* (EWS) bencana
2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan
3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak
4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana

Rata – Rata Response Time Penanganan Kebakaran

Rata – rata response time penanganan kebakaran di Tahun 2022 tercapai 18,12 menit dari target 15 menit sehingga tercapai 82,78.%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 17,49 menit maka terdapat penurunan angka 0,63. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kejadian kebakaran yaitu sebanyak 197 kejadian pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 terdapat kejadian kebakaran sebanyak 175 kejadian.



Adapun tren capaian rata – rata response time penanganan kebakaran dapat digambarkan sebagai berikut :



Upaya yang telah dilakukan agar kejadian Kebakaran dapat ditangani dalam waktu tanggap, yaitu :

- Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru
- Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
- Pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan
- Peningkatan pelaksanaan inspeksi peralatan pemadam kebakaran di instansi / perusahaan

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib, dan tentram	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses rekrutmen. 2. Kurangnya jumlah personil yang ada dengan luas wilayah. 3. Minimnya pemahaman tugas dan fungsi OPD pada penegakan perda yang dipangku, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil Linmas dan masyarakat perihal fungsi Linmas. 2. Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patroli dan penjagaan titik-titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga trantibum. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda.
2	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	77,92	81,30	-	-



3	Meningkatnya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
4	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Resiko Bencana (IRB)	98,44	98,73	Berdasarkan penilaian IRB, maka yang menyebabkan tidak tercapainya nilai IRB adalah lemahnya unsur pembentuk kapasitas daerah pada aspek : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana , serta Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah 2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana 3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak 4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
		Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	15 menit	18,12 menit	Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh	Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru, pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan yang disertai dengan sarpras penunjangnya (hydrant/ sumur), serta penguatan komitmen dengan instansi lintas sektor seperti PLN
5	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,8			
6	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	55%	0,78	Berdasarkan penilaian IKD, maka komponen untuk meningkatkan ketahanan daerah meliputi aspek : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana , serta Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah 2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana 3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak 4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
		Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non	100%	41,12%	Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan	Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru, pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan yang



	kebakaran yang berhasil dilaksanakan			kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh	disertai dengan sarpras penunjangnya (hydrant/sumur), serta penguatan komitmen dengan instansi lintas sektor seperti PLN
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses rekrutmen. 2. Kurangnya jumlah personil yang ada dengan luas wilayah. 3. Minimnya pemahaman tugas dan fungsi OPD pada penegakan perda yang dipangku, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas	1. Optimalisasi pembinaan terhadap personil Linmas dan masyarakat perihal fungsi Linmas. 2. Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patroli dan penjagaan titik-titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga trantibum. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda.
		2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	100%		
		3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	100%		

2	Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 orang, b. 100 peserta c. 100 Orang	a. 100 orang, b. 100 peserta c. 100 Orang		
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan		



		Ekonomi, Sosial dan Budaya				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekrearian	100%	100%		
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya 2. Jumlah partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	1. 80% 2. 80%	1. 80% 2. 80%		
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal		
8	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Logistik Kebencanaan yang Tersalurkan Tepat Sasaran dan sesuai Kebutuhan	100%	100%		
		2. Persentase Korban Bencana yang Terehabilitasi	100%	100%		
		3. Persentase Bantuan Pasca Bencana yang Terealisasi Berdasarkan Laporan Jitupasna	100%	100%		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase peserta peningkatan kapasitas masyarakat / aparatur di daerah rawan bencana	15%	15%		
		2. Persentase warga yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	100%	100%		



	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Persentase logistik yang disalurkan sesuai kebutuhan	100%	100%		
		2. Persentase petugas dan relawan yang aktif dalam masa status Siaga dan darurat bencana	100%	100%		
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Persentase dokumen PB dan regulasi PB yang dilegal / formalkan	100%	100%		
		2. Persentase laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan PB yang terselesaikan	100%	100%		
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Satuan Petugas PMK yang memiliki Sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi	40%	40%		
		2. Persentase Mobil PMK dengan Kondisi Layak Fungsi	80%	80%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	100%	100%		
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana proteksi kebakaran bangunan/gedung yang memenuhi standar	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Persentase sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran	10%	10%		
		2. Persentase relawan kebakaran dilatih dan dibentuk	100%	100%		

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.909.740.662,00	16.595.332.489,00	98,14%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.805.728.661,00	10.631.187.941,00	98,38%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.158.202.037,00	6.538.468.168,00	91,34%
4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.274.237.776,00	1.187.130.768,00	93,16%
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.114.877.326,00	10.114.684.800,00	100,00%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	49.334.938.043,00	49.311.434.550,00	99,95%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.316.465.500,00	2.267.973.000,00	97,91%
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.735.391.040,00	1.524.435.600,00	87,84%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.538.274.604,00	11.938.310.794,00	95,21%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.780.081.178,00	2.705.985.354,00	97,33%
11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.771.702.597,00	9.489.697.187,00	97,11%

Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

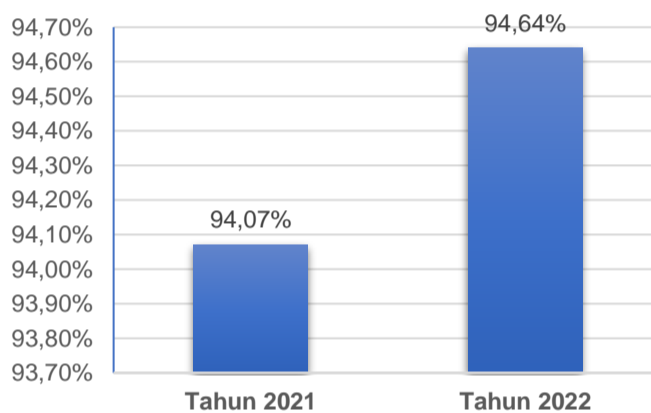
No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	94,00	94,64	100,68
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	80,00	82,38	102,97

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.989.167 jiwa atau sekitar 94,64% dari jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021: 93,78% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan tercapai 94,64%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 94,07% maka terdapat peningkatan angka 11.980 jiwa atau sekitar 0,57%. Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN



Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Yang dimaksud dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Indikator Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dengan target 80% dari jumlah PPKS pada tahun 2022 sebanyak 472.340 jiwa. Realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2022 sebanyak 486.406 jiwa (82,38%). Dari target 80% jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan tercapai 82,38%. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 tercapai 102,97%.

Indikator Dinas sosial 2021 adalah persentase jumlah PMKS yang terlayani. Target PMKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2021 sebanyak 48.718 dan realisasi PPKS sebanyak 48.718. dengan demikian pada tahun 2021 kinerja dinas sosial tercapai 100%. Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun



2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang mendapatkan pelayanan di tahun 2022.

REKAPITULASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS/PMKS) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

NO	JENIS PPKS/PMKS	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
			L	P	JUMLAH
1	Keluarga Fakir Miskin	39,269	272,127	267,828	539,955
2	Anak Jalanan	45	31	13	44
3	Tuna Susila	16	31	20	51
4	Pengemis	85	38	52	90
5	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	39	37	14	51
6	Anak Balita Terlantar	51	24	20	44
7	Anak Terlantar	176	640	671	1,311
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	70	71	3	74
9	Anak dengan Kedisabilitas				-
	a. Tubuh	201	123	98	221
	b. Netra	25	15	12	27
	c. Cacat Wicara	146	82	52	134
	d. Mental	295	171	82	253
	e. Cacat Ganda	112	119	73	192
10	Anak yg menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	3	1	3	4
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	59	50	31	81
12	Lanjut Usia Terlantar	475	12,615	18,069	30,684
13	Penyandang Distabilitas & Penyandang Penyakit Kronis				-
	a. Tubuh	499	929	656	1,585
	b. Netra	192	303	296	599
	c. Cacat Wicara	235	422	454	876
	d. Mental	800	1,179	697	1,876
	e. Cacat Ganda	148	516	372	888
	f. Penderita Penyakit Kronis	938	477	456	933
	Pemulung	381	322	100	422
14	Kelompok Minoritas	20	14	23	37
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLB)	172	219	7	226
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,546	1,186	706	1,892
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	77	81	1	82
18	Korban Trafficing	1			0
19	Korban Tindak Kekerasan/ yang diperlakukan salah	7	1	7	8
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	3	4	2	6
21	Korban Bencana Alam	201	844	341	1,185
22	Korban Bencana Sosial	188			0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1,394		1,809	1,809
24	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	700	568	314	882
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	127	86	55	141
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	22	30	14	44
	JUMLAH PPKS/PMKS	48,718	293,356	293,351	586,707

**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94%	94,64%		-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan	80%	82.38%		-

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	60%	Tidak ada	-
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	6 PSKS	6 PSKS	Tidak ada	-
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS prioritas yang terlayani	59,51%	59,51%	Tidak ada	-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	1311 Orang	1311 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	10 Orang	10 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	120 Orang	120 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani	900 Orang	900 Orang	Tidak ada	-
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	220 Orang	220 Orang	Tidak ada	-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	97%	97,42%	Tidak ada	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	659156 Jiwa	642153 Jiwa	Tidak ada	-
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	Tidak ada	-
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	100%	Tidak ada	-
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	50 Orang	50 Orang	Tidak ada	-



5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	100%	Tidak ada	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik	100%	100%	Tidak ada	-

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.642.410.705,00	6.979.940.339,00	91,33%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.534.086.740,00	2.496.348.625,00	98,51%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.614.514.362,00	7.520.040.356,00	98,76%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	15.946.621.514,00	13.754.816.045,00	86,26%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	750.475.590,00	731.966.750,00	97,53%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	222.659.566,00	221.068.092,00	99,29%



2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI
1	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	89,61	91,2
2	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	57	69,39
3	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	64	66,93
4	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)	22	24,7

Persentase Tenaga Kerja yang terserap di 9 sektor

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di tahun 2022 tercapai 91,2 % dari target 89,61 % atau capaian 100 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 89,13% maka terdapat peningkatan angka 2,07 atau sekitar 2,32 %.

Sembilan sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu :

- Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Listrik, Gas dan Air
- Sektor Bangunan
- Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Dan Jasa Perusahaan
- Sektor Jasa Kemasyarakatan

Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor :

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
- *Link and match* kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja

Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja di tahun 2022 tercapai 69,39 % dari target 57 % atau capaian 100 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 55,81 % maka terdapat peningkatan angka 13,58 % atau sekitar 24,33 %.

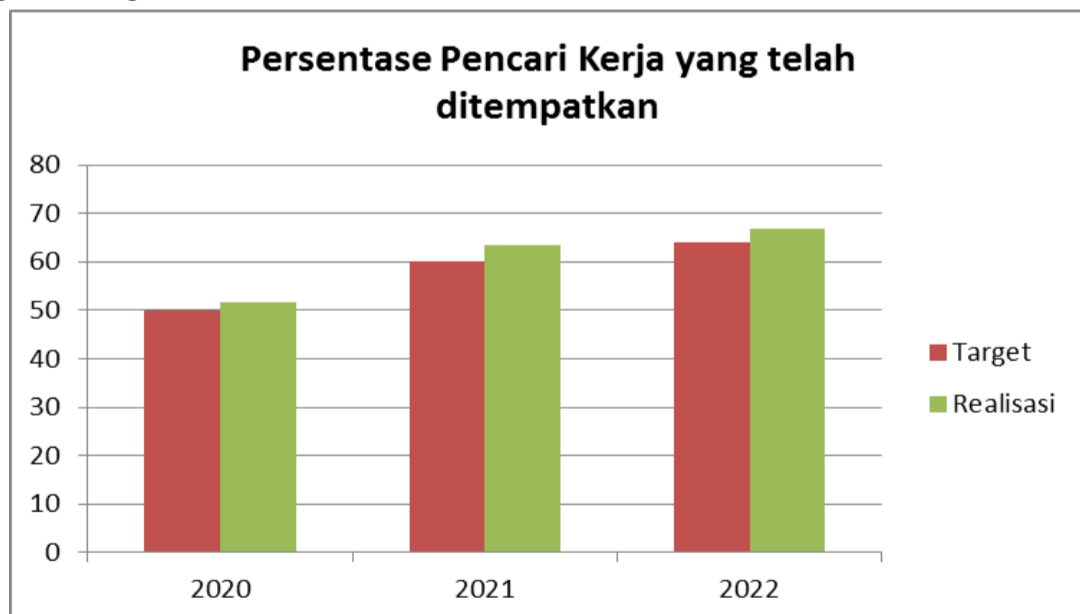
Upaya yang dilakukan agar semakin banyak lulusan pelatihan yang bekerja, yaitu :

1. Sinergitas antara asesor dengan instruktur pelatihan.
2. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
3. Sinergitas pemerintah, apindo, akedimisi dan BPVP melalui pembentukan skill Developmen Centre (SDC)

Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 sebanyak 30.453 orang dari seluruh pencari kerja yang ada sebanyak 46.099 orang, sehingga persentase pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2022 tercapai 66,93 % dari target 64 % atau capaian 107 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 63,48 % maka terdapat peningkatan sekitar 3,45 %.

Perkembangan persentase pencari kerja yang telah ditempatkan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :





Upaya yang dilakukan agar semakin banyak pencari kerja yang ditempatkan, yaitu :

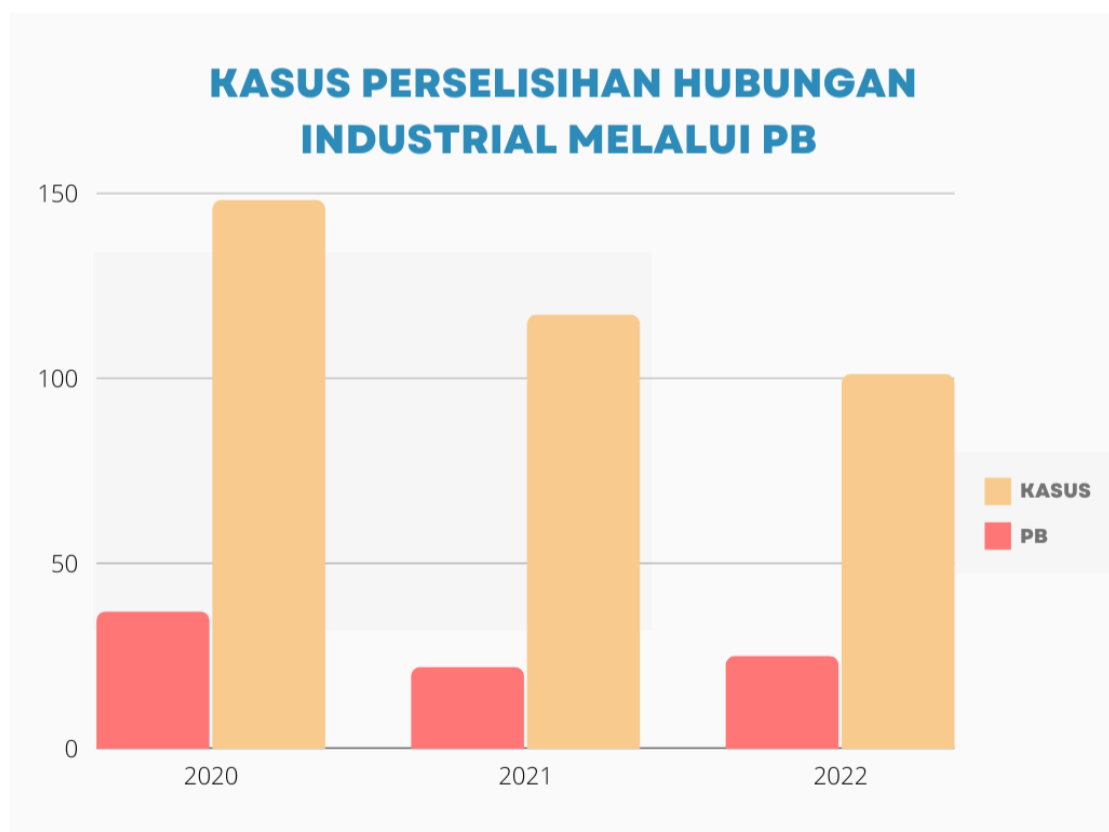
- Optimalisasi fungsi perantara kerja dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, job matching, job fair, konsultasi karir untuk mengetahui minat dan bakat disesuaikan dengan lowongan yang ada.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
- Mendorong pencari kerja yang telah dilatih untuk berwirausaha

Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)

Perjanjian Bersama (PB) merupakan salah satu jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha / perusahaan dan pekerja. Sebagaimana data penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama selama Tahun 2022 dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang melaporkan di tahun 2022 sebanyak 101 kasus dan yang telah terselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 25 kasus, sehingga persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2022 tercapai 24,75.% dari target 22 % atau capaian 112,5 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 18,1 % maka terdapat peningkatan angka 6,65 atau sekitar 36,74 %.

Perkembangan persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :





Upaya yang dilakukan agar perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama, yaitu :

1. Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial sudah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
2. Para Pihak berselisih (Pengusaha dan Pekerja) bersedia hadir memenuhi undangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (tidak menunda jadwal undangan)
3. Para Pihak berselisih (Pengusaha dan Pekerja) sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan perselisihan dengan win win solution
4. Pihak yang berselisih di tingkat mediasi diharuskan untuk diberi kuasa penuh dalam pengambil keputusan.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor (sesuai sektor kewenangan disnaker)	89,91 %	91,2 %		
2	Meningkatnya lapangan kerja baru	Jumlah Lapangan Kerja Baru	24.252 lap kerja	30.856 lap kerja		
3	Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	57 %	69,39 %		
4	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	64%	66,93%		
5	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui perjanjian bersama (PB)	22%	24,75%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegi-atan yang dilak-sanakan yang mengacu ke ren-cana tenaga kerja	100 %	100 %		
	<i>Kegiatan : Penyusunan Rencana Tena-ga Kerja (RTK)</i>	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</i>	100 %	100 %		
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	43 %	43%		
		Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	50 %	50%		
		Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	20 %	20%		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	82 %	78,31%	Ada peserta pelatihan yang	



					tidak lulus uji kompetensi	
	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Persentase peserta pelatihan yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan</i>	82 %	82%		
	<i>Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Persentase peserta pembinaan lembaga pelatihan kerja yang memahami materi pembinaan</i>	80 %	80%		
	<i>Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase peserta yang memahami bimtek produktivitas</i>	51 %	0 %	Anggaran untuk bimtek produktivitas difocusing	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya	64 %	64%		
	<i>Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase peserta yang memahami materi bimtek antar kerja</i>	81 %	81%		
	<i>Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi penempatannya</i>	600 orang	624 orang		
	<i>Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase peserta yang memahami sosialisasi PMI</i>	80 %	80%		
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	22 %	24,75%		
		Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	25 %	33,95%		
		Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	37,5 %	37,29%		
	<i>Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase persyaratan kerja yang disahkan</i>	100 %	100 %		
		<i>Persentase peserta yang memahami materi persyaratan kerja</i>	76 %	76%		
	<i>Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diproses</i>	100 %	100 %		
		<i>Persentase peserta bimbingan teknis/sosialisasi yang memahami materi</i>	76 %	76%		



5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	49 %	Lokasi daerah tujuan UPT Saluandeang Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar blm sesuai dengan naskah kesepakatan bersama anata Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Sidoarjo, blm diterbitkannya STP (Siap Terima Penempatan) dr Gubernur SulBar bahwa lokasi penempatan tersebut siap layak dan 2c (clean and clear) sehingga 2 KK tdk berangkat	
	<i>Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatannya</i>	2 KK	0 KK		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.469.084.311,00	8.966.196.658,00	94,69%
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.700.000,00	9.215.000,00	86,12%
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9.467.466.767,00	5.983.106.540,00	63,20%
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.477.022.353,00	1.389.772.400,00	94,09%
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.098.204.972,00	1.076.273.050,00	98,00%
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.751.400,00	14.600.000,00	49,07%

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Desa Mandiri	12,42%	22,67%	182,91%

Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah



sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Desa di Kabupaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri di Tahun 2022 sebanyak 73 Desa dari 322 Desa yang ada atau tercapai 22,67% dari target 12,42% atau 40 desa, sehingga capaian 182,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 10,25% atau 33 desa, maka terdapat peningkatan angka 40 desa atau sekitar 12,42%. Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun 2022, antara lain :

1. Kecamatan Tarik Terdapat 0 Desa
2. Kecamatan Prambon Terdapat 0 Desa
3. Kecamatan Krembung Terdapat 11 Desa
4. Kecamatan Porong Terdapat 1 Desa
5. Kecamatan Jabon Terdapat 0 Desa
6. Kecamatan Tanggulangin Terdapat 2 Desa
7. Kecamatan Candi Terdapat 10 Desa
8. Kecamatan Sidoarjo Terdapat 0 Desa
9. Kecamatan Tulangan Terdapat 2 Desa
10. Kecamatan Wonoayu Terdapat 2 Desa
11. Kecamatan Krian Terdapat 3 Desa
12. Kecamatan Balongbendo Terdapat 1 Desa
13. Kecamatan Taman Terdapat 3 Desa
14. Kecamatan Sukodono Terdapat 12 Desa
15. Kecamatan Buduran Terdapat 2 Desa
16. Kecamatan Gedangan Terdapat 4 Desa
17. Kecamatan Sedati Terdapat 3 Desa
18. Kecamatan Waru Terdapat 17 Desa

Perkembangan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut :

**CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2021				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	TARIK	20	0	1	19	0	0
2	PRAMBON	20	0	7	13	0	0
3	KREMBUNG	19	4	10	5	0	0
4	PORONG	13	1	11	0	1	0
5	JABON	15	0	3	12	0	0
6	TANGGULANGIN	19	1	6	11	0	1
7	CANDI	24	1	19	4	0	0
8	SIDOARJO	10	0	8	2	0	0
9	TULANGAN	22	0	11	11	0	0
10	WONOAYU	23	1	19	3	0	0
11	KRIAN	19	3	12	4	0	0
12	BALONGBENDO	20	0	5	15	0	0
13	TAMAN	16	3	6	7	0	0
14	SUKODONO	19	9	4	6	0	0

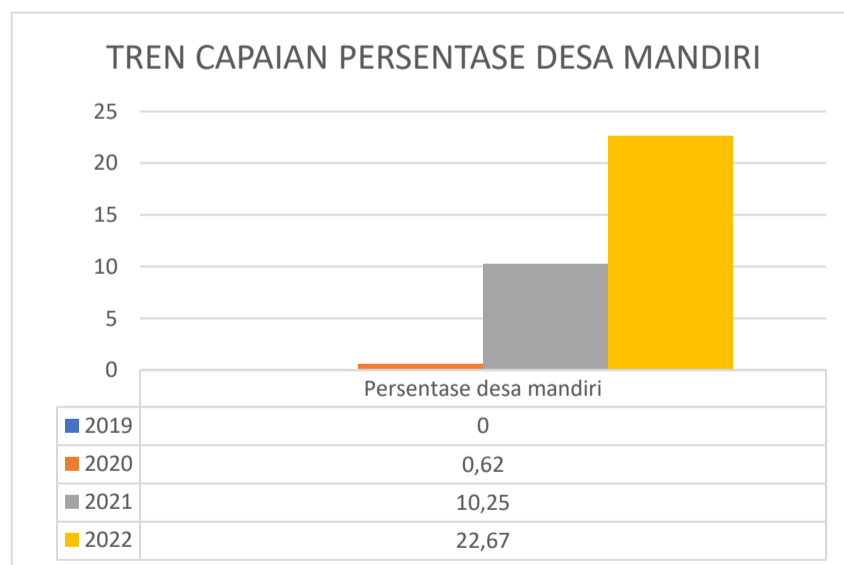


NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2021				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
15	BUDURAN	15	0	13	2	0	0
16	GEDANGAN	15	1	8	6	0	0
17	SEDATI	16	0	7	9	0	0
18	WARU	17	9	7	1	0	0
JUMLAH		322	33	157	130	1	1

**CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022
KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2022				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	TARIK	20	0	2	18	0	0
2	PRAMBON	20	0	12	8	0	0
3	KREMBUNG	19	11	8	0	0	0
4	PORONG	13	1	11	0	1	0
5	JABON	15	0	5	10	0	0
6	TANGGULANGIN	19	2	7	9	0	1
7	CANDI	24	10	14	0	0	0
8	SIDOARJO	10	0	10	0	0	0
9	TULANGAN	22	2	12	8	0	0
10	WONOAYU	23	2	21	0	0	0
11	KRIAN	19	3	15	1	0	0
12	BALONGBENDO	20	1	6	13	0	0
13	TAMAN	16	3	12	1	0	0
14	SUKODONO	19	12	5	2	0	0
15	BUDURAN	15	2	13	0	0	0
16	GEDANGAN	15	4	11	0	0	0
17	SEDATI	16	3	7	6	0	0
18	WARU	17	17	0	0	0	0
JUMLAH		322	73	171	76	1	1

Adapun tren capaian persentase desa mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :





Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu :

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kapasitas RT/RW bertujuan untuk pemahaman tugas dan fungsi dari RT/RW.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan status indeks desa membangun	Persentase Desa Mandiri	12,42%	22,67%	meskipun capaian di tahun 2022 sudah melebihi 100%, tetapi jumlah desa yang berstatus mandiri masih relatif kecil (73 desa) dari jumlah seluruh desa (322 desa)	perlu dukungan sumber daya untuk pembinaan desa
2	Meningkatnya Peningkatan Status Desa	Persentase Desa Maju yang meningkat statusnya ke Desa Mandiri	9,32%	11,80%		
3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	94,06%	100%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	1,55%	1,86%		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	1,55%	1,86%		
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama	21,12%	23,29%		
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	21,12%	23,29%		
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki Bumdes	68,32%	72,67%		
		Persentase peningkatan status desa	27,95%	28,57%		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	95%	100%		
		Persentase desa yang memiliki Bumdes	68,32%	72,67%		



		Persentase kelengkapan administrasi desa	95%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	80,75%	81,69%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga desa yang dibina	80,75%	88,74%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.910.643.564,00	7.487.838.999,00	94,66%
2	PROGRAM PENATAAN DESA	33.775.700,00	20.400.700,00	60,40%
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	85.113.880,00	84.951.150,00	99,81%
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.411.578.661,00	9.777.611.323,00	93,91%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.582.777.698,00	2.427.788.175,00	94,00%

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pembangunan Gender	94,53	94,53 *)	100
2	Indeks Pemberdayaan Gender	67,22	67,22 *)	100
3	Persentase kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100

Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki.

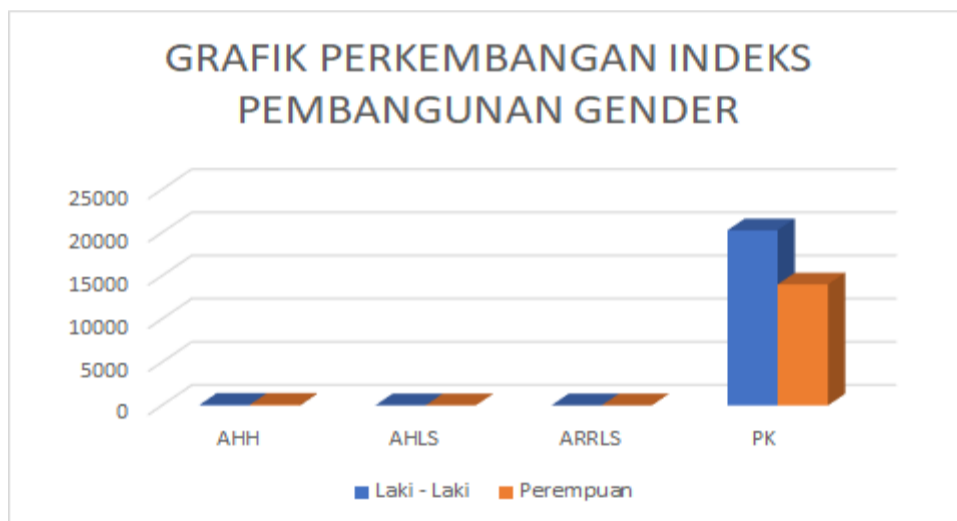


Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo adalah 94,53 * (100%) bila dibandingkan dengan target 94,53, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mencapai sebesar 94,26 (99,58%) bila dibandingkan dengan target 94,65 maka terdapat kenaikan sebesar 0,27 %. Capaian IPG tahun 2022 merupakan realisasi perhitungan proyeksi dikarenakan dari BPS baru sekitar bulan Agustus baru dirilis capaian indeksinya.

Adapun perhitungan masing-masing komponen Indeks Pembangunan Gender, adalah sebagai berikut :

Indikator	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,15	75,83
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,84	15,07
Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,95	10,27
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan	20.278	14.005

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan

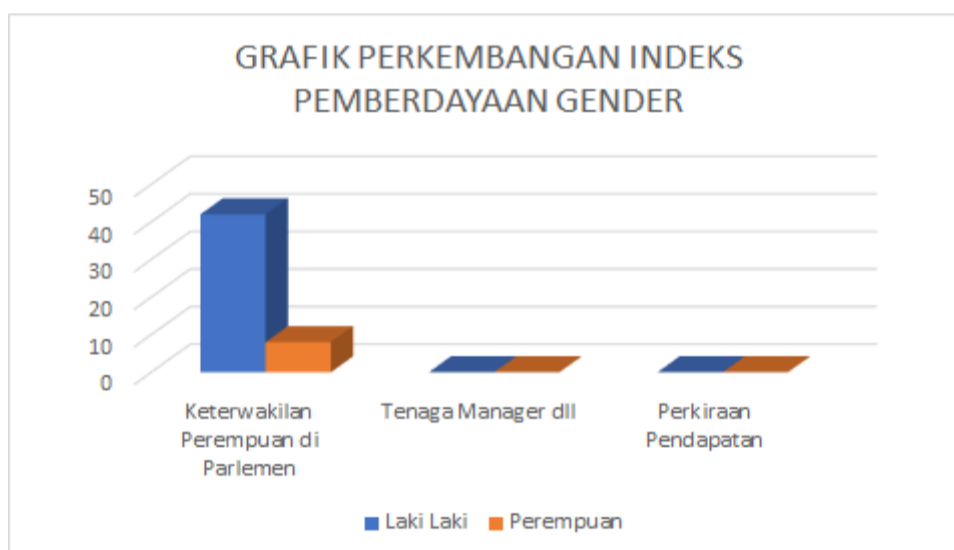
dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sidoarjo mencapai 67,10* (99,85) bila dibandingkan dengan target 67,20, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mencapai sebesar 67,10 (99,85%) bila dibandingkan dengan target 67,20 maka tidak terdapat kenaikan.

Adapun perhitungan masing-masing komponen Indeks Pemberdayaan Gender, adalah sebagai berikut :

Indikator	Laki-Laki	Perempuan
Keterwakilan Perempuan di Parlemen	42	8
Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi	-	-
Perkiraan Pendapatan	-	-

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi



Persentase kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan

Pada tahun 2022 jumlah kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 180 kasus dan sebanyak 180. kasus telah terselesaikan, atau sekitar 100%. Apabila dibandingkan dengan target 100% maka tercapai 100%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 163 kasus telah terselesaikan 100% dari target 100% kasus maka tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

Berikut data rincian kasus kekerasan dan trafficking beserta penyelesaiannya yang dilaporkan pada tahun 2022 :

No.	Kategori Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	KDRT	56	63	81
2	KTA	19	16	13
3	KDK	0	0	0
4	KDP	1	1	3
5	KE	10	8	11
6	PELECEHAN SEKSUAL	7	12	3
7	PENCABULAN	15	34	29
8	PERKOSAAN	0	0	3
9	TRAFIKING	4	0	1
10	PENGANIAYAAN	3	0	5
11	LAIN - LAIN	25	29	31
	JUMLAH	140	163	180

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan penyelesaian kasus kekerasan dan trafficking pada perempuan dan anak dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan agar kasus kekerasan dan trafficking pada perempuan dan anak tidak terjadi, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Melaksanakan kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
- Melakukan kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi



- Melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53	94,53 *)	Mengingat angka release keluar di Bulan Agustus 2023, maka memakai angka proyeksi	
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,22	67,22 *)	Mengingat angka release keluar di Bulan Agustus 2023, maka memakai angka proyeksi	
		Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	67,1	67,1		
		Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi	193	193		
		Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	24	3		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah instansi / lembaga yang dibina / diberdayakan	260	260		
		Jumlah Program / kegiatan yang dievaluasi PUG nya	48	48		
	Pemberdayaan Perempuan, Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perempuan dalam partisipasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang dibina	150	150		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penguatan / pengembangan kelembagaan perlindungan perempuan	100	100		

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	775.797.980,00	725.522.170,00	93,52%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.223.055.058,00	1.058.154.748,00	86,52%
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	483.777.500,00	478.274.500,00	98,86%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	242.456.000,00	202.565.935,00	83,55%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.696.950.774,00	7.187.807.344,00	93,39%

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PUS yang ikut KB	66,66 %	77,44%	116,17%
2	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0,85%	1,3%	65,38%
3	Total Fertility Rate (TFR)	1,95	2,02%	96,53%

Persentase PUS yang ikut KB

Sasaran utama pelayanan Keluarga Berencana adalah pasangan usia subur (PUS) yang berusia 15 s.d 49 tahun.

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 315.140 pasangan sedangkan yang aktif mengikuti program Keluarga Berencana sebanyak 244.047 pasangan atau sekitar 77,44%. Apabila dibandingkan dengan target yaitu 66,66% maka tercapai 79,96%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 97,92% maka terdapat penurunan sekitar 17,96%. Penurunan tersebut disebabkan adanya permasalahan dalam aplikasi new siga yang digunakan untuk melaporkan Pasangan Usai Subur yang ikut KB.

Adapun alasan yang masih ditemukan pada Pasangan Usia Subur yang tidak aktif mengikuti Program Keluarga Berencana, yaitu :

- Kurang informasi mengenai KB
- Salah informasi mengenai KB
- Pemahaman nilai agama yang masih diartikan lain

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Pasangan Usia Subur yang aktif mengikuti Program Keluarga Berencana dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak Pasangan Usia Subur yang aktif mengikuti Program Keluarga Berencana, antara lain :

- Aktif melaksanakan promosi KB
- Melakukan pembinaan terhadap petugas KB di lapangan
- Memberikan pelayanan yang semakin mendekat ke masyarakat

Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.

Pada tahun 2022 jumlah perempuan di Kabupaten Sidoarjo yang pada perkawinan pertamanya masih berusia dibawah 20 tahun sebanyak 130 orang, sehingga persentase pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sidoarjo adalah 1,3% dari target 0,85% sehingga tercapai 65,39%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 40% maka terdapat peningkatan sekitar 25,39%.

Adapun perkawinan yang masih di bawah usia dimaksud, paling banyak dilatarbelakangi oleh alasan, sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan
2. Edukasi yang kurang mengenai PUP
3. Menghindari zina (latar belakang agama)
4. Pengaruh Media Massa
5. Tidak sinkron antara UU Perkawinan dengan komitmen BKKBN terkait usia kawin pertama pada wanita (Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 batas usia minimal 19 tahun sedangkan usia ideal versi BKKBN minimal wanita 21 tahun dan pria 25 tahun)

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan agar tidak ada lagi perkawinan yang masih berada di bawah umur, antara lain :

- Menggiatkan edukasi mengenai PUP
- Kegiatan sosialisasi mengenai PUP ditingkatkan lagi

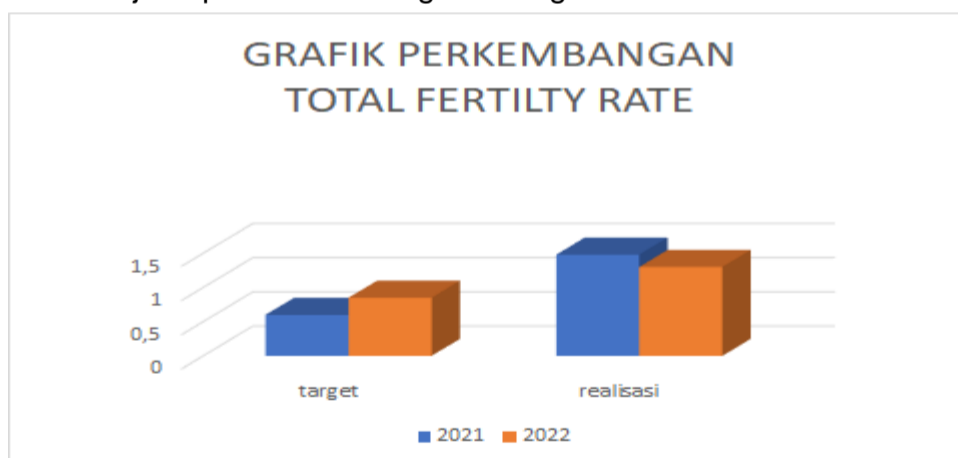
Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya

Tujuan dari pengukuran Total Fertility Rate adalah merupakan salah satu indikator untuk membandingkan keberhasilan wilayah dalam melaksanakan pembangunan program Keluarga Berencana (KB)

Pada tahun 2022 Total Fertility Rate di Kabupaten Sidoarjo tercapai 2,02 dari target 1,95 sehingga capaian 96,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 2,02 ada kesamaan capaian karena untuk TFR tahun 2022 belum direlease oleh BPS.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Total Fertility Rate di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penduduk, antara lain :

- Sosialisasi tentang isu isu kependudukan permasalahan dan bahayanya terhadap pembangunan kependudukan
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait tentang program pengendalian penduduk dan KB secara berjenjang dan berkesinambungan



Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	TFR (Total Fertility Rate)	1,95	2,02	Memakai angka perhitungan mandiri dari Koalisi Kependudukan	
2	Meningkatnya pencapaian Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/McPr)	66,20%	77,44%		
		Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0,85%	1,30%	1. Ketidakesesuaian antara kebijakan undang - undang perkawinan dengan kebijakan pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN 2. Karena dipengaruhi oleh kebebasan informasi dan komunikasi melalui media sosial	Sosialisasi dan Advokasi kepada masyarakat
		Presentase putus pemakaian kontrasepsi	25%	19,99%		
		Presentase UNMEETNEED	7,47%	8,75%	Pasangan Usia Subur Ingin Anak Ditunda dan Tidak ingin anak lagi	KIE dan konseling kepada calon akseptor
		CBR (Crude Berth Rate)	14,2	14,2		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengendalian Penduduk	Presentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	3	3		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Data Kependudukan Yang Terupdate	100	100		
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pengolahan Data Kependudukan	1396	139		
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Pengendalian Penduduk	3	3		
		Jumlah Lembaga Siaga Kependudukan yang di fasilitasi	48	48		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	Angka Prevalensi Modern (Modern Kontrasepsi Prevalence Rate / mCPR)	66,20	77,44		
		Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Droup Out)	25	19,99		
		Persentase Unmeet Need	7,47	8,75		



Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta Kegiatan	300 orang	300 orang		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah peserta kegiatan pembinaan kampung KB	84 orang	84 orang		
Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakholder dan mitra kerja yang diadvokasi Jumlah sarana KIE yang tersedia dan didistribusikan	100 mitra 100 unit	100 mitra 100 unit		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah penyuluh yang hadir Jumlah PPKBD yang dibina Jumlah Sub PPKBD yang dibina	77 349 4051	77 349 4051		
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	7	7		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan lokal	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1	1		
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	100	100		
Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media	3	3		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan (RAkorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakoredes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi Kecamatan (Rokorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)	18	18		
Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	2	2		
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	18	18		



3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0,85%	1,3%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilatih	8	7		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Bina Keluarga Yang Dibina	5991	5991		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	877.875.779,00	859.911.771,00	97,95%
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.742.160.238,00	9.995.249.267,00	85,12%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.509.670.000,00	4.813.733.192,00	50,62%

Urusan Pangan

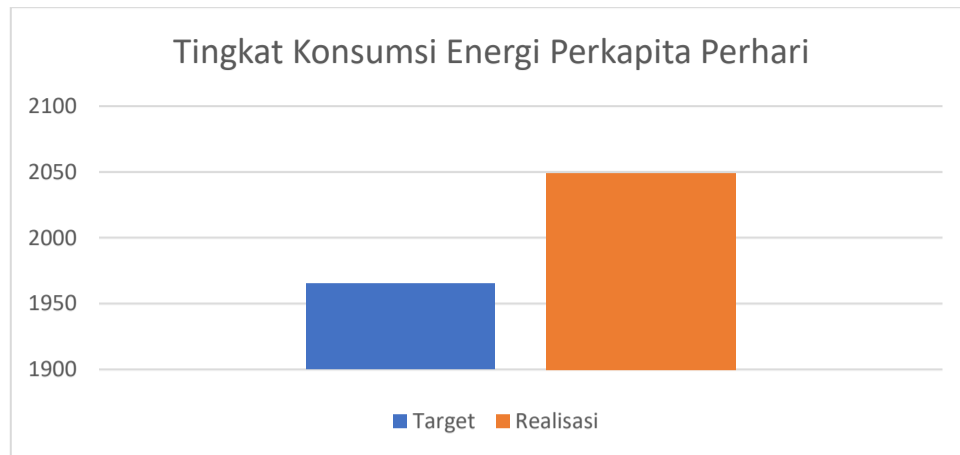
Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI
1	Tingkat Konsumsi Energi Perkapita Perhari	1965	2049
2	Tingkat Ketersediaan Energi Perkapita Perhari	2320	2354

Tingkat Konsumsi Energi Perkapita Perhari

Tingkat Konsumsi Energi merupakan penilaian pola konsumsi pangan dari sisi kuantitas yaitu ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Untuk tahun 2022 Tingkat Konsumsi Energi Perkapita Perhari di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2049 Kkal/Kapita/Hari, sedangkan suatu wilayah dikategorikan tahan pangan jika konsumsi energi Perkapita Perhari nya berkisar 90-119% dari Kebutuhan Energi 2000 Kkal/Kapita/Hari. Sehingga dengan tingkat energi sebesar 2049 Kkal/Kapita/Hari, Kabupaten Sidoarjo dikategorikan sebagai daerah yang tahan pangan. Realisasi Tingkat Konsumsi Energi Perkapita Perhari Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 melebihi target, dimana target 1965 Kkal/Kapita/Hari dan realisasinya sebesar 2049 Kkal/Kapita/Hari. Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka Tingkat Konsumsi Energi dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun data konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Energi	
		Kkal/kapita/hari	%
1	Padi-padian	885,6	43,2
2	Umbi-umbian	101,5	5,0
3	Pangan Hewani	383,7	18,7
4	Minyak dan Lemak	313,3	15,3
5	Buah/Biji Berminyak	19,3	0,9
6	Kacang-kacangan	69,5	3,4
7	Gula	87,1	4,3
8	Sayur dan Buah	119,9	5,9
9	Lain-lain	68,6	3,3
	Total	2048,5	100,0

Berdasarkan uraian tersebut diatas, upaya yang telah dilakukan adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsumsi kelompok pangan yang masih kurang dan mengurangi konsumsi kelompok pangan yang berlebih. Kegiatan dilakukan dengan cara edukasi melalui sosialisasi, pelatihan pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal.
3. Kegiatan pemberdayaan kelompok Wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Tingkat Ketersediaan Energi Perkapita Perhari

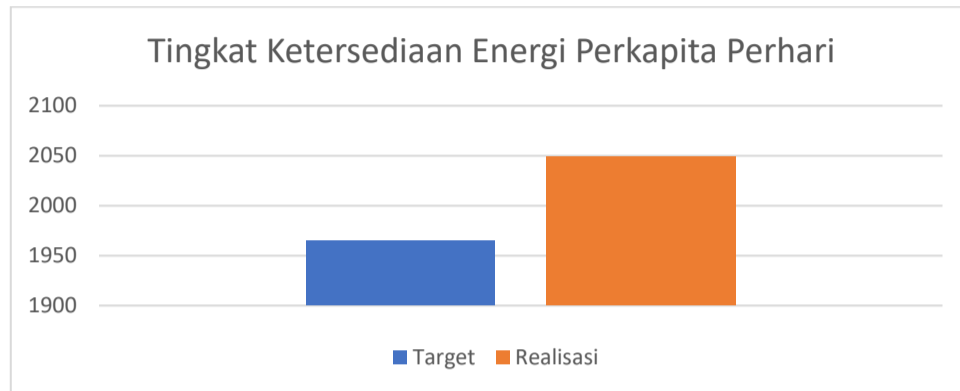
Ketersediaan Energi adalah ketersediaan zat gizi perkapita yang terkadang dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk untuk suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk energi. Adapun Ketersediaan Energi diperoleh dari sumber energi yaitu :

- Padi-padi
- Umbi-umbian
- Pagan Hewani
- Minyak dan Lemak
- Buah/Biji Berminyak
- Kacang-kacangan
- Gula
- Sayur dan Buah



Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 terealisasi sebesar 2354 Kkal/Kapita/Hari dari target 2320 Kkal/Kapita/Hari. Ketersediaan energi ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan energi ketersediaan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Sumbangan Ketersediaan Energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian yaitu sebesar 1227,68 Kkal/Kapita/Hari.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka Tingkat Ketersediaan Energi Perkapita Perhari dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Adapun Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidoarjo pada Analisa NBM Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Energi	
		Kkal/kapita/hari	%
1	Padi-padian	1227,68	52,16
2	Umbi-umbian	34,12	1,45
3	Pangan Hewani	251,14	10,67
4	Minyak dan Lemak	374,98	15,93
5	Buah/Biji Berminyak	122,14	5,19
6	Kacang-kacangan	106,16	4,51
7	Gula	109,35	4,65
8	Sayur dan Buah	128,27	5,45
9	Lain-lain	0,00	0,00
	Total	2353,84	100,00

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan energi ketersediaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi umbi-umbian, sayur & buah, kacang-kacangan. Sedangkan untuk daging dan telur ketersediaannya tergantung dari pasokan yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo
2. Mempertahankan produksi padi, gula, dan ikan

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90	90,2		
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	90,48	90,49		
2	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Tingkat Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari	1965	2049		
		Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari	2320	2354		

**Capaian Program dan Kegiatan**

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelasnya	2,30%	2,35%	Nihil	Nihil
2	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase luas lahan yang dikembangkan melalui metode penyuluhan	0%	0%	Nihil	Nihil

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.835.994.391,00	28.468.303.253,00	95,42%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.199.980.000,00	1.196.196.750,00	99,68%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	889.406.057,00	883.344.139,00	99,32%
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	106.400.000,00	105.637.120,00	99,28%
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	913.914.216,00	800.095.420,00	87,55%

Urusan Lingkungan Hidup

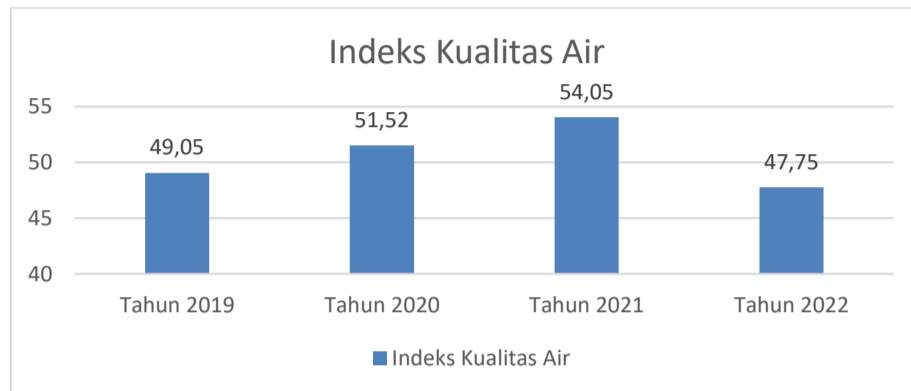
Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	TAHUN 2022		% CAPAIAN 2022
		TARGET	REALISASI	
1. Indeks Kualitas Air	54,05	51,53	47,75	92,7
2. Indeks Kualitas Udara	84,67	85,15	84,96	99,7
3. Indeks Kualitas Lahan	23,72	27,11	23,63	87,2

Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif. Terkait penurunan nilai IKA tahun 2022 yang cukup drastis dapat diperkirakan selain karena posisi diatas juga masa pandemi Covid-19 yang

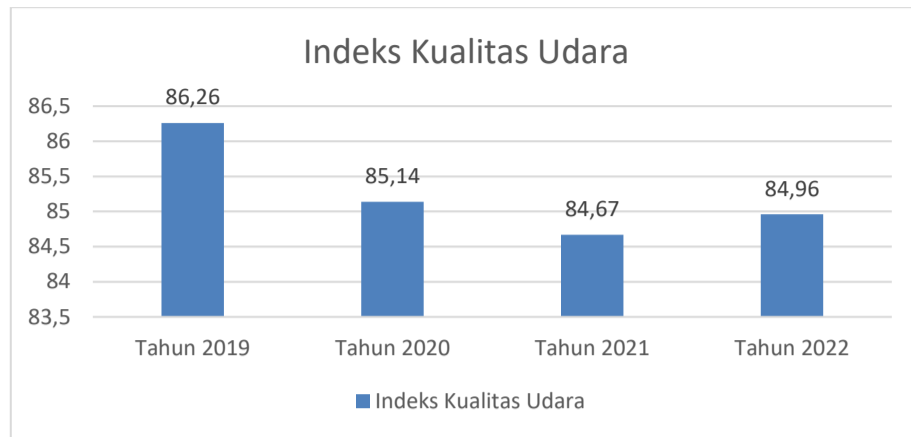
sudah selesai serta adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai). Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2019-2022 yaitu :



Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2022 diatas (sebesar 47,75) masuk dalam **kategori kurang** (yakni dalam rentang $25 \leq x < 50$).

Indeks Kualitas Udara

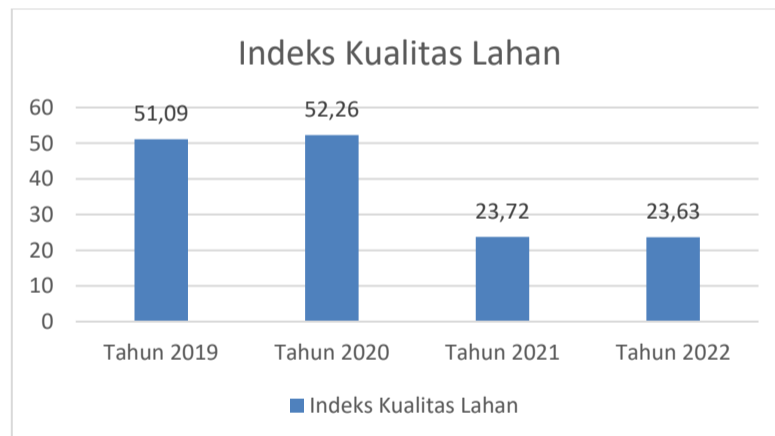
Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target tahun 2022 namun mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Selain itu, rata-rata nilai parameter NO_2 di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan Kawasan Permukiman mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Kemungkinan tidak tercapainya target Indeks Kualitas Udara dan peningkatan rata-rata nilai parameter NO_2 diatas adalah diperkirakan terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah **pandemi Covid-19**, peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan terhadap pemenuhan baku mutu udara emisi dan udara ambien, serta masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Sampah dan Penghijauan. Sebagaimana perlu diketahui bahwa sumber pencemar utama NO_2 adalah dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran batubara dan industri. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2019-2022 yaitu :



Adapun nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 diatas (sebesar 84,96) masuk dalam **kategori baik** (yakni dalam rentang $70 \leq x < 90$).

Indeks Kualitas Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target tahun 2022 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan proses verifikasi tutupan lahan pada website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh> dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan ulang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2019-2022 yaitu :



Adapun nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022 diatas (sebesar 23,63) masuk dalam **kategori sangat kurang** (yakni dalam rentang $0 \leq x < 25$).

Permasalahan :

- Website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh> belum secara otomatis mengakomodir inputan tutupan lahan pada tahun 2021 maka dilakukan penginputan ulang pada tahun 2022;



- Hasil verifikasi tutupan lahan oleh KLHK bahwa terdapat pengurangan luas hutan mangrove dan perhitungan ulang sehingga menyebabkan berkurangnya tutupan lahan yang diperoleh;
- Perubahan fungsi lahan di area pesisir yang kurang terkendali yang menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove;
- Legalitas lahan dari proses fasum perumahan yang masih belum diserahkan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo lainnya yang belum memperhatikan aspek penghijauan atau belum mempertahankan fungsi RTH nya;
- Tidak tertatanya pemanfaatan/pefungsian di bantaran sungai menyebabkan fungsi konservasi penghijauan di bantaran atau sempadan sungai belum maksimal.

Solusi :

- Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Sidoarjo serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
- Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;
- Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
- Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan;
- Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada dan menghindari/meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk;
- Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkannya sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air.



Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	51,53	47,75	1) Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu; 2) Keterbatasan sumber daya yang menyebabkan intervensi DLHK terhadap limbah rumah tangga belum optimal	1) Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air dan menentukan Daya Dukung dan Daya Tampung; 2) Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran air; 3) Menambah jumlah SDM atau meningkatkan kemampuan SDM yang ada dalam pengelolaan air limbah.
		Indeks Kualitas Udara	85,15	84,96	1) Terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor; 2) Aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak memperhatikan kualitas lingkungan 3) Alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan proporsi RTH yang memadai.	1) Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor secara berkala dan melaksanakan serta memperbanyak area Car Free Day; 2) Melakukan upaya penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan; 3) Melakukan kegiatan pengawasan dan memperketat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara baik udara emisi maupun udara ambien; 4) Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan dan menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas lahan utamanya penyediaan tanaman penyerap polutan termasuk kebisingan dan dituangkan dalam Dokumen Lingkungan



		Indeks Kualitas Lahan	27,11	23,63	<p>1) Hasil verifikasi tutupan lahan oleh KLHK bahwa terdapat pengurangan luas hutan mangrove;</p> <p>2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan;</p>	<p>1) Melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK, melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu serta dilakukan verifikasi terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan RTH dengan stakeholder terkait;</p> <p>2) Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH, pengayaan dan pemeliharaan RTH;</p> <p>3) Mempertahankan area hijau yang sudah ada dan meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan.</p>
Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara		Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD (mg/L)	6,38	15,096	<p>Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu</p>	<p>1) Pemantauan air badan air di 13 saluran/ sungai secara periodik (termasuk parameter BOD);</p> <p>2) Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai dan pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;</p> <p>3) Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran air.</p>
		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO ₂ (µg/ Nm ³)	7,84	7,26	<p>1) Penurunan SO₂ disebabkan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (kandungan sulfur dalam BBM menurun) sehingga proses pembakaran BBM lebih sedikit menghasilkan SO₂ sehingga parameter SO₂ memenuhi target yang ditentukan. Sampai saat nilai SO₂ dan NO₂ selalu memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;</p> <p>2) Peningkatan NO₂ dalam</p>	<p>1) Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala;</p> <p>2) Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala (termasuk parameter SO₂ dan NO₂);</p> <p>3) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya</p>



		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO ₂ (µg/ Nm ³)	13,68	15,13	udara ambien tidak dapat dihindarkan jika terjadi proses pembakaran. Proses pembakaran ini kemungkinan ada peningkatan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat dan peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara; 3) Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan udara sesuai standar teknis.	pengendalian pencemaran udara
	Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase luasan RTH yang terkelola (%)	5,14	1,37	Belum tersedianya lahan yang diajukan perluasan RTH	Melaksanakan identifikasi lahan pada fasum perumahan yang dapat digunakan untuk perluasan RTH
		Persentase sampah yang terkelola (%)	71	73	1) Permintaan pelayanan angkutan sampah semakin meningkat namun sarana dan prasarana angkutan sampah belum memadai 2) Belum optimal kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah 3) Belum optimal peran serta pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampah	1) Mengajukan penambahan sarana dan prasarana yang ada dan mengatur ulang ritasi agar sampah di Kabupaten Sidoarjo dapat tertangani 2) Memprioritaskan upaya pengurangan sampah melalui KIE, serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya dalam melakukan sosialisasi 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk hasil inovasi pemanfaatan kembali sampah

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	43%	20%	Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu	1) Pemantauan air badan air di 13 saluran/ sungai secara periodik (termasuk parameter BOD); 2) Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai dan pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah; 3) Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya



						pengendalian pencemaran air.
		Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	45%	38%	<p>1) Penurunan SO2 disebabkan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (kandungan sulfur dalam BBM menurun) sehingga proses pembakaran BBM lebih sedikit menghasilkan SO2 sehingga parameter SO2 memenuhi target yang ditentukan. Sampai saat nilai SO2 dan NO2 selalu memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;</p> <p>2) Peningkatan NO2 dalam udara ambien tidak dapat dihindarkan jika terjadi proses pembakaran. Proses pembakaran ini kemungkinan ada peningkatan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat dan peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara;</p> <p>3) Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan udara sesuai standar teknis.</p>	<p>1) Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala;</p> <p>2) Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala (termasuk parameter SO2 dan NO2);</p> <p>3) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara</p>
Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	81%	88%	<p>Permohonan Izin PPLH dan PUU LH (SKKL Amdal, PKPLH UKL-UPL, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi) yang masuk lebih banyak daripada yang diterbitkan dikarenakan beberapa permohonan masih dalam proses belum diselesaikan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, beberapa permohonan ditolak dan beberapa harus melakukan pengajuan permohonan ulang.</p>	<p>Permohonan Izin PPLH dan PUU LH (SKKL Amdal, PKPLH UKL-UPL, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi) yang masih dalam proses untuk dapat dikomunikasikan dengan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan agar segera ditindaklanjuti dan dapat segera disetujui.</p>	



		Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	80%	92%	Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang masuk lebih banyak daripada yang diterbitkan dikarenakan beberapa permohonan masih dalam proses belum diselesaikan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, beberapa permohonan ditolak dan beberapa harus melakukan pengajuan permohonan ulang.	Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang masih dalam proses untuk dapat dikomunikasikan dengan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan agar segera ditindaklanjuti dan dapat segera disetujui dan senantiasa memberikan konsultasi dan dan asistensi baik secara langsung maupun melalui email atau whatsapp.
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbunan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	100%	100%	Tidak ada kendala yang berarti karena asistensi/fasilitasi terhadap permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sudah cukup baik	Mempertahankan/ meningkatkan kinerja terhadap pelayanan dan senantiasa memberikan konsultasi dan dan asistensi baik secara langsung maupun melalui email atau whatsapp.
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/disetujui	160 Rincian Teknis	192 Rincian Teknis	Permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang masuk lebih banyak daripada yang diterbitkan dikarenakan beberapa permohonan masih dalam proses belum diselesaikan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, beberapa permohonan ditolak dan beberapa harus melakukan pengajuan permohonan ulang.	Permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang masih dalam proses untuk dapat dikomunikasikan dengan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan agar segera ditindaklanjuti dan dapat segera disetujui dan senantiasa memberikan konsultasi dan dan asistensi baik secara langsung maupun melalui email atau whatsapp.



3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	3,3%	6,4%	1) Masih adanya pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan air limbah (tidak memiliki IPAL) yang dihasilkan 2) Masih adanya pelaku usaha yang tidak melakukan pemantauan air limbah sesuai ketentuan yaitu satu bulan sekali 3) Adanya perubahan kewenangan terhadap beberapa pelaku usaha dan atau kegiatan	1) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum melakukan pengelolaan air limbah (tidak memiliki IPAL) yang dihasilkan 2) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan agar rutin melakukan pemantauan air limbah 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang kewenangannya masih berada dibawah DLHK Sidoarjo
	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	93,6%	89,0%	1) Kurangnya kepedulian penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2) Banyaknya regulasi-regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terbaru	1) Menjadwalkan pelaksanaan pembinaan melalui sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan 2) Menjadwalkan pelaksanaan pembinaan melalui sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terbaru
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,5%	0,6%	Keterbatasan Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)	Mengajukan pengusulan PPLHD ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	1,0%	1,7%	Kurang meratanya pengetahuan masyarakat terkait adanya program desa/kelurahan berseri	Mengadakan sosialisasi terkait program desa/kelurahan kepada masyarakat secara menyeluruh
		Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	0,8%	0,8%	Banyaknya program yang melibatkan sekolah, sehingga sekolah harus bisa memilih mana program yang diprioritaskan	Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah agar terkait pentingnya menanamkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah



	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	5,50%	6,32%	Kurangnya minat masyarakat baik di sekolah maupun desa untuk melakukan pengelolaan lingkungan di lingkungan masing masing	Memberikan sosialisasi secara intens kepada desa / sekolah terkait pentingnya kesadaran warga baik di desa maupun sekolah untuk mengelola lingkungannya masing-masing
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	Kurangnya personil PNS sebagai tim verifikasi lapang	Telah diusulkan pengusulan, namun belum ada tindak lanjut
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	Sulitnya mencari lokasi pencemaran saat verifikasi lapangan akibat data pengaduan tidak lengkap.	Berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk mencari lokasi pencemaran.
6	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	47%	48%	Permintaan pelayanan angkutan sampah semakin meningkat namun sarana dan prasarana angkutan sampah belum memadai	Mengajukan penambahan sarana dan prasarana yang ada dan mengatur ulang ritasi agar sampah di Kabupaten Sidoarjo dapat tertangani
		Persentase pengurangan sampah	28%	25%	1) Belum optimal kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah 2. Belum optimal peran serta pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampah	1. Memprioritaskan upaya pengurangan sampah melalui KIE, serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya dalam melakukan sosialisasi 2. Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk hasil inovasi pemanfaatan kembali sampah
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang terkelola	990 Ton / hari	905 Ton / hari	1) Permintaan pelayanan angkutan sampah semakin meningkat namun sarana dan prasarana angkutan sampah belum memadai 2) Belum optimal kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah 3) Belum optimal	1) Mengajukan penambahan sarana dan prasarana yang ada dan mengatur ulang ritasi agar sampah di Kabupaten Sidoarjo dapat tertangani 2) Memprioritaskan upaya pengurangan sampah melalui KIE, serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya dalam melakukan sosialisasi 3) Melakukan



					peran serta pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampah	kerjasama dengan pihak lainnya dalam mengembangkan produk hasil inovasi pemanfaatan kembali sampah
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH yang terkelola	2,28%	2,35%	Belum tersedianya lahan yang diajukan perluasan RTH	Melaksanakan identifikasi lahan pada fasum perumahan yang dapat digunakan untuk perluasan RTH
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	61%	56%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.196.799.724,00	34.001.717.261,00	96,60%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.185.133.091,00	3.616.775.628,00	86,42%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	28.596.753.605,00	26.972.417.761,00	94,32%
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	162.944.366,00	80.623.260,00	49,48%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	229.175.200,00	218.551.136,00	95,36%
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	404.791.000,00	398.997.954,00	98,57%
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00%
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	307.864.295,00	294.130.468,00	95,54%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	38.709.819.951,00	32.742.383.218,00	84,58%



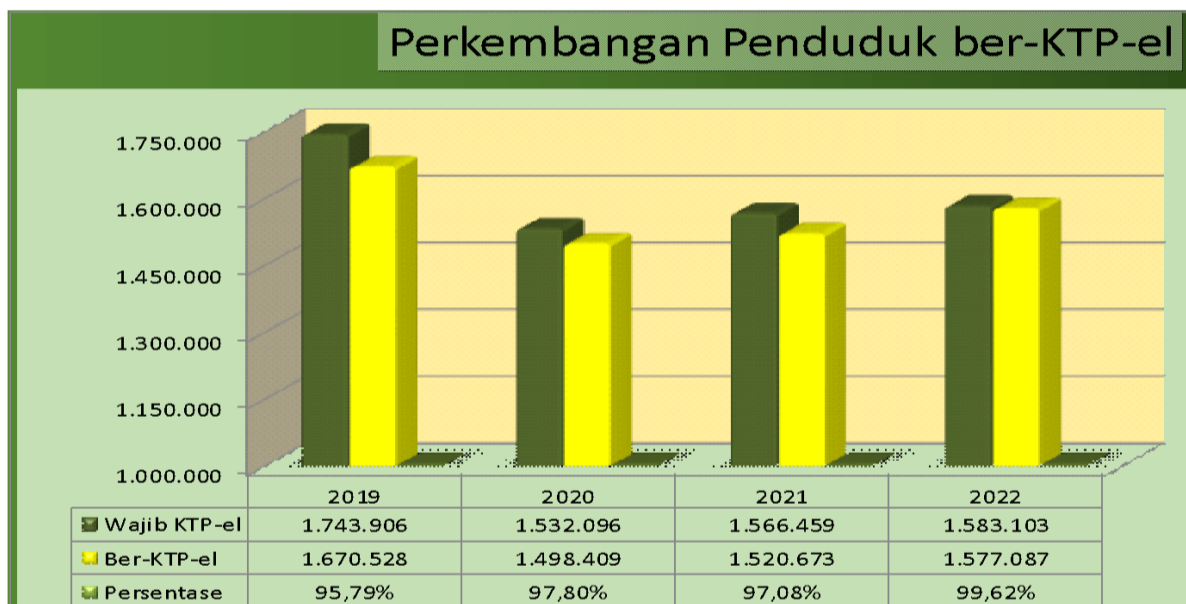
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	97%	99,62%	102,7%
2	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-Akta Kelahiran	97%	98%	101,03%
3	Persentase penduduk usia 0 s.d <17 ber-KIA	46%	47,22%	102,65%

Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Sidoarjo :



Jumlah penduduk yang ber-KTP Elektronik di tahun 2022 sebanyak 1.577.087 jiwa dari yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.583.103 jiwa atau tercapai 99,62% dari target 97% dengan capaian 99,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 97,08% maka terdapat peningkatan angka 56.414 atau sekitar 2,54%.

Permasalahan dalam meningkatkan penduduk yang memiliki KTP elektronik :

- Beberapa alat rekam KTP el mengalami kerusakan dan diperlukan perbaikan/pemeliharaan ataupun penggantian alat
- Masih ada wajib KTP el yang belum melakukan perekaman KTP el, khususnya pemula
- Masih banyak masyarakat yang tidak memperbarui biodata setelah terjadi peristiwa penting (kawin, cerai, mati)
- Keterbatasan blangko KTP el dari pusat



Upaya yang dilakukan agar semakin banyak penduduk yang memiliki KTP Elektronik serta peningkatan kualitas pelayanan KTP Elektronik, yaitu :

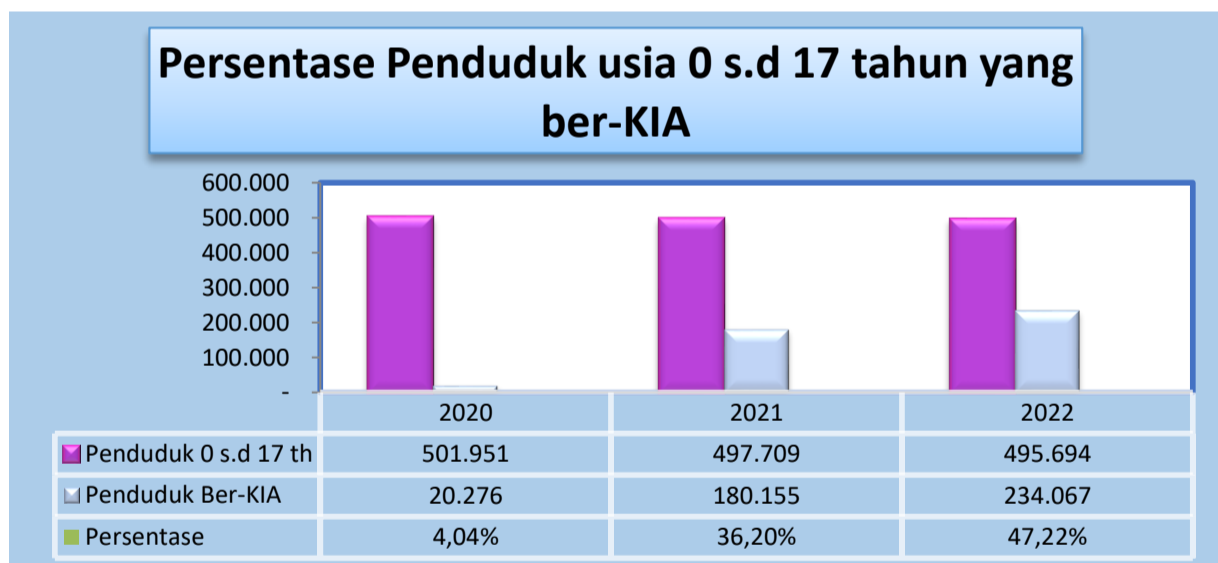
- Mengagendakan kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP el untuk pemula di sekolah-sekolah (SMA/SMK).
- Mengoptimalkan inovasi Peduli Dilan (Disabilitas, ODGJ, dan Lansia) dalam kepemilikan identitas kependudukan.
- Menggambarkan alat perekam KTP el (mobile enrollment) pada Tahun Anggaran 2023 untuk menambah jumlah perangkat yang digunakan pada layanan jemput bola.
- Memperbarui informasi untuk masyarakat di setiap media, baik media elektronik maupun non elektronik dan Dukcapil Sapa Masyarakat (DSM), agar masyarakat mendapat informasi bahwa layanan Dukcapil mudah, cepat dan gratis via plavon.sidoarjokab.go.id.
- Melaksanakan sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada seluruh ASN-Non ASN Dan Perangkat Desa.

Persentase Penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang ber-KIA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Maka penduduk sidoarjo usia 0 s.d <17 tahun diharapkan memiliki KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi yang dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri, yaitu :

1. Usia 0 sd < 5 Tahun KIA tanpa foto
2. Usia >5 sd < 17 Tahun, KIA dengan foto.

Perkembangan penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang ber-KIA dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :



Jumlah Penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang ber-KIA di tahun 2022 sebanyak 234.067 jiwa dari seluruh penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang ada sebanyak 495.694 jiwa atau tercapai 47,22% dari target 46% dengan capaian 47,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 36,20% maka terdapat peningkatan angka 53.909 atau sekitar 11,02%.

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang memiliki KIA, yaitu :

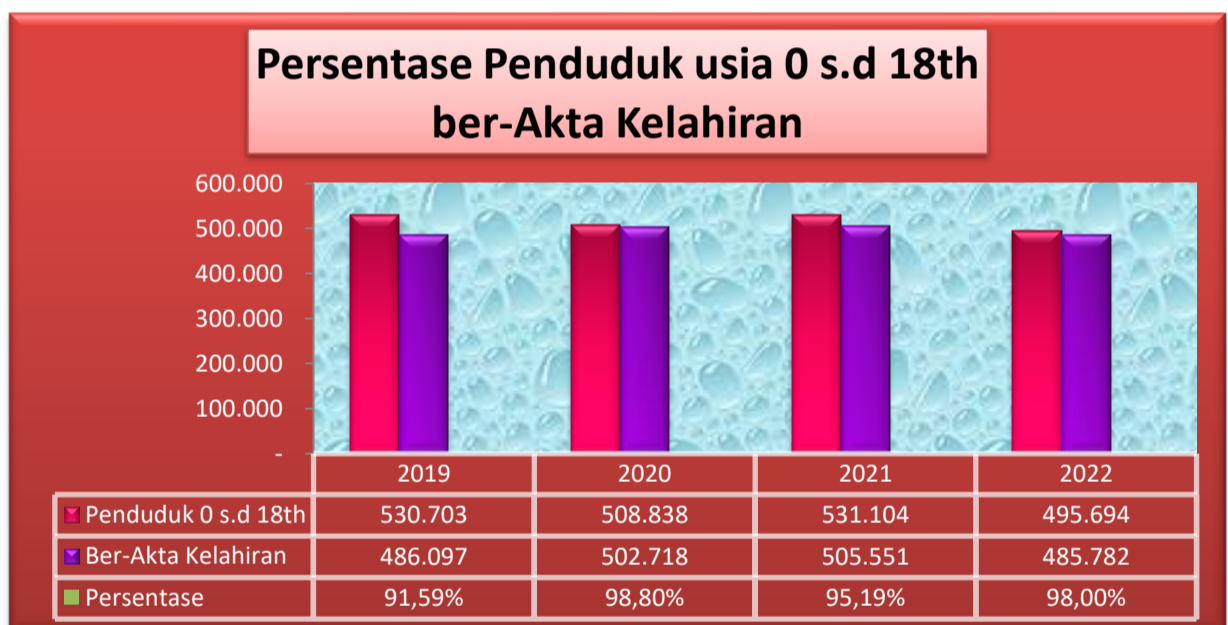
- Layanan pengurusan KIA ke sekolah TK/PAUD dan SD secara kolektif.
- Melaksanakan kegiatan Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang) dan Sosialisasi ke desa/kecamatan dengan paket Akta Kelahiran, KK dan KIA.
- Melakukan kerjasama pemanfaatan KIA dengan lembaga-lembaga/stakeholder terkait.
- Memperbarui informasi untuk masyarakat di setiap media, baik media elektronik maupun non elektronik dan Dukcapil Sapa Masyarakat (DSM), agar masyarakat mendapat informasi bahwa layanan Dukcapil mudah, cepat dan gratis via plavon.sidoarjokab.go.id.

Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-Akta Kelahiran

Untuk mendaftarkan penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 485.782 Jiwa atau 98% dari jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan target 97% maka tercapai 98%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 95,19% maka terdapat peningkatan angka sebesar 15.641 atau sekitar 2,81%.

Perkembangan kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0 s.d 18 tahun dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :



Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran serta peningkatan kualitas pelayanan Akta Kelahiran, yaitu :

- Melaksanakan kegiatan Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang) dan Sosialisasi ke desa/kecamatan dengan paket Akta Kelahiran, KK dan KIA.
- Melakukan kerjasama paket pelayanan akta kelahiran, KK dan KIA dengan kemitraan, yaitu RSUD/RS Swasta, Puskesmas, Fatayat, Aisyiah maupun *stake holder* lainnya.
- Memperbarui informasi untuk masyarakat di setiap media, baik media elektronik maupun non elektronik dan Dukcapil Sapa Masyarakat (DSM), agar masyarakat mendapat informasi bahwa layanan Dukcapil mudah, cepat dan gratis via plavon.sidoarjokab.go.id.

**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan yang berkualitas	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97%	102,12%		
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,5	90,50		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan admindukcapil sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	97%	99,62%		
		Persentase penduduk usia 0 s.d <17 tahun yang ber-KIA	46%	47,22%		
		Prosentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	97%	98%		
		Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		
		Persentase penduduk berstatus kawin berakta perkawinan	100%	100%		
		Persentase penduduk status cerai hidup berakta perceraian	100%	100%		
3	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga	50%	50%		
		Persentase fasilitasi kerjasama layanan adminduk	34%	34%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	100%	100%		
		Persentase pelaporan penduduk rentan yang dapat diselesaikan	100%	100%		
		Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%		
		Persentase penduduk ber-KTP-EI	97%	99,62%		
		Persentase penduduk usia 0 s/d 17 tahun ber-KIA	30%	47,22%		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Identitas Penduduk (KTP-EL, KIA, KK, Surat Pindah) yang dapat diselesaikan	100%	100%		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kegiatan Jemput Bola yang dilaksanakan	100%	100%		
		Persentase Kegiatan Layanan Peduli Dilan yang dilaksanakan	100%	100%		



2	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk status cerai hidup ber-akta perceraian	5%	100%		
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	95%	100%		
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	96%	98%		
		Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan akta kelahiran yang dapat diselesaikan	100%	100%		
		Persentase pelayanan akta kematian yang dapat diselesaikan	100%	100%		
		Persentase pelayanan akta perceraian yang dapat diselesaikan	100%	100%		
		Persentase pelayanan akta perkawinan yang dapat diselesaikan	100%	100%		
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah arsip pencatatan sipil yang dikelola dan terdigitalisasi	140.000 arsip	140.000 arsip		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu	100%	100%		
		Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	100%	100%		
	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan data kependudukan rutin yang disusun tepat waktu	100%	100%		
		Jumlah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	17 MoU	17 MoU		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media informasi, komunikasi, dan edukasi yang tersampaikan pada masyarakat	5 jenis	5 jenis		
		Jumlah MOU pemanfaatan data yang dilaksanakan	24 MoU	24 MoU		
		Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan terpelihara	9 paket	9 paket		
	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase rekomendasi pengelolaan profil kependudukan terhadap kebijakan daerah	100%	100%		
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil Kependudukan yang disusun	1 buku	1 buku		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.987.268.401,00	11.538.986.557,00	96,26%



2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.005.150.158,00	953.675.118,00	94,88%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	854.411.400,00	850.368.728,00	99,53%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.558.457.373,00	1.493.213.572,00	95,81%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	0,00	0,00%

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	61,00	64,14

Indeks Infrastruktur Perhubungan

Indikator ini menggambarkan tentang kawasan yang tertib dalam berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dan terminal sebagai tempat parkir untuk angkutan umum dalam mengangkut dan menurunkan penumpang. kecukupan sarpras perkeretaapian sebagai wujud keselamatan dalam berlalu lintas.

Komposit dari indikator infrastruktur perhubungan, antara lain :

- i. Jumlah titik lokasi tertib lalu lintas yang terjaga
- ii. Jumlah terminal angkutan penumpang tipe C terkelola dengan baik
- iii. Jumlah kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Sidoarjo

Capaian dari masing-masing komposit indikator dimaksud, sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi 2022	Sat	Persen	bobot	indeks
1	Jumlah titik lokasi tertib lalu lintas yang terjaga	16	8	Titik	50,00	0.30	15,00
2	Jumlah terminal tipe c terkelola dengan baik	7	4	Titik	57,14	0.30	17,14
3	Jumlah kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kab Sidoarjo	20	16	Titik	80,00	0.40	0.32
	TOTAL :					1.00	64.14



Upaya untuk peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, antara lain :

- Menambah kawasan tertib lalu lintas yang terjaga
- pengelolaan terminal tipe C yang sesuai dengan standart
- Pemeliharaan terhadap pintu perlintasan kereta api

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan merata	Indeks Infrastruktur Bidang Perhubungan	0.61	0.79	Tercapai	
		Jumlah titik lokasi tertib lalu lintas yang terjaga	0.18	0.30	Tercapai	
		Jumlah terminal angkutan penumpang tipe C terkelola dengan baik	0.11	0.17	Tercapai	
		Jumlah Kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewajiban/ kewenangan pemerintah kabupaten Sidoarjo	0.32	0.32	Tercapai	

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Atau Llj	Persentase kendaraan uji yang memenuhi persyaratan tekni dan laik jalan			Tercapai	-
		Persentase pelayanan/ pengelolaan terminal tipe c				
		Persentase perlengkapan jalan kondisi baik				
		persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi baik				
2	Program Pengelolaan Pelayaran				Tercapai	-
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah di bangun fasilitas pengaman			Tercapai	-

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.289.705.560,00	16.603.214.888,00	96,03%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	124.964.671.107,00	117.932.626.341,00	94,37%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24.059.780,00	22.179.000,00	92,18%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.593.975.580,00	3.574.292.204,00	99,45%

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TAHUN 2022		
	2021	TARGET	REALISASI	%
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	2,37	3,35	2,29	68%

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Keandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2022, berdasarkan hasil **KEMENPAN-RB**, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 2,29 dari target 3,35. atau tercapai 68% dan apabila dibandingkan dengan capain tahun 2021 penurunan sebesar 0,08

Capaian kinerja SPBE tahaun 2021 berdasarkan KEMENPAN-RB :

Indeks SPBE: 2,37 dengan Predikat SPBE: Cukup dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terjadi penurunan dengan nilai 0,08



Upaya yang dilakukan agar penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo meningkat, yaitu:

- Menyusun draft Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo direncanakan pada program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pemenuhan SPBE	Nilai Indeks SPBE	3,35	2,29	<p>1. Metode penilaian hanya berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, tidak ada wawancara sehingga peserta evaluasi tidak dapat menyampaikan jawaban/penjelasan terhadap progress atau capaian implementasi dari tahun sebelumnya. (proses penilaian menjadi satu arah dan terkesan subjektif tidak seperti tahun-tahun sebelumnya). Hal ini dikeluhkan oleh seluruh pemangku di berbagai instansi pemerintah daerah (dokumentasi terlampir).</p> <p>2. Tim Evaluator Kementerian PANRB adalah tim internal/pegawai Kementerian PANRB tanpa melibatkan pihak eksternal saat penilaian Evaluasi SPBE berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga menimbulkan stigma kurangnya obyektivitas dalam penilaian khususnya dalam Analisa data dukung/capaian dari tahun sebelumnya sehingga banyak dikeluhkan oleh peserta evaluasi atas mekanisme penilaian tersebut.</p> <p>3. Penyampaian nilai indeks SPBE melewati tahun anggaran 2022 dan hanya disampaikan melalui pesan pribadi ke Kepala Dinas Kominfo berupa nilai indeks akhir bukan nilai masing-masing indikator sehingga sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan pemetaan nilai</p>	<p>1. Segera menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sidoarjo sebagai dokumen perencanaan implementasi SPBE serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional</p> <p>2. Melaksanakan harmonisasi internal dengan seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sidoarjo dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo</p> <p>3. Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.</p>



					masing-masing indikator untuk perbaikan kedepannya 4. Sidoarjo Belum menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo	
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase PD yang memiliki keterisian SPBE	35%	53%	-	Dari Total 49 OPD di Sidoarjo, ada 26 OPD yang telah memenuhi keterisian SPBE : Bagian PJ Sekretariat Daerah, Bakesbang, Bappeda, BKD, BPBD, BPKAD, BPPD, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas P2CKTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan, Dinas PMD, Dinas PTSP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo, Dispendukcapil, Diperindang, DLHK, Inspektorat, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Waru, RSUD, Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	85 (Baik)	90,12 (Sangat Baik)	-	

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	Hanya 1 OPD yang belum mengkases internet yang difasilitasi oleh DISKOMINFO yaitu RSUD SIBAR, karena mereka baru terbentuk Maret 2022	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	51%	Tidak semua OPD memiliki layanan publik misal kecamatan, mereka tidak memiliki/mengelola layanan publik sendiri tapi menggunakan layanan publik yang sudah disediakan oleh instansi lainnya seperti SIAK oleh Kemendagri, SIPRAJA oleh Bagian Pemerintahan, Plavon oleh Disdukcapil	
	<i>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tingkat kematangan pada kapabilitas proses</i>	<i>Terkelola</i>	<i>Terkelola</i>		



		<i>Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan</i>	<i>Kolaborasi</i>	<i>Kolaborasi</i>		
	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah yang ditetapkan</i>	160	103		
		<i>Jumlah up-time dalam 1 tahun</i>	98%	98%		
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	85	91,77		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	100%	100%		
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti</i>	2	2		
		<i>Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti</i>	3	3		
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	20%	20%		
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa</i>	3	3		
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Cukup Baik	Cukup Baik (537)		



Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	7	7		
	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	7	7		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.375.403.642,00	10.358.272.930,00	91,06%
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.363.618.912,00	5.750.873.340,00	90,37%
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	19.282.403.420,00	19.031.195.761,00	98,70%

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	23,20%	23,20%	100%
2	Persentase usaha mikro yang mandiri	1,93%	1,93%	100%

Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

- Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi risiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.

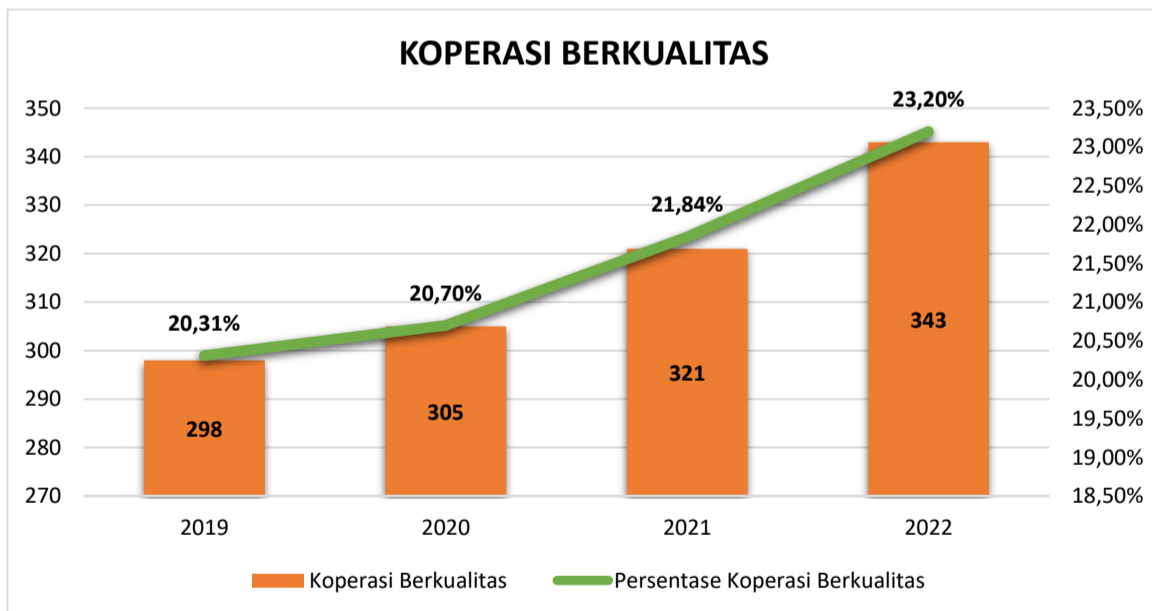


- Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Pada tahun 2022 jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 343 koperasi setara dengan 23,20% dari total keseluruhan 1.470 koperasi sehingga tercapai 100% dari target 23,20%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 21,84% atau sebanyak 321 koperasi sehingga terdapat peningkatan sebanyak 1,36% atau setara 22 koperasi. Untuk tahun 2023 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi.

Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun sebagian besar koperasi belum mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan peningkatan usaha koperasi.

Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Upaya yang dilakukan agar semakin koperasi yang masuk kategori koperasi berkualitas, yaitu :

- Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian



- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi
- Memberikan fasilitas pemasaran produk koperasi
- Menyediakan klinik konsultasi koperasi
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi

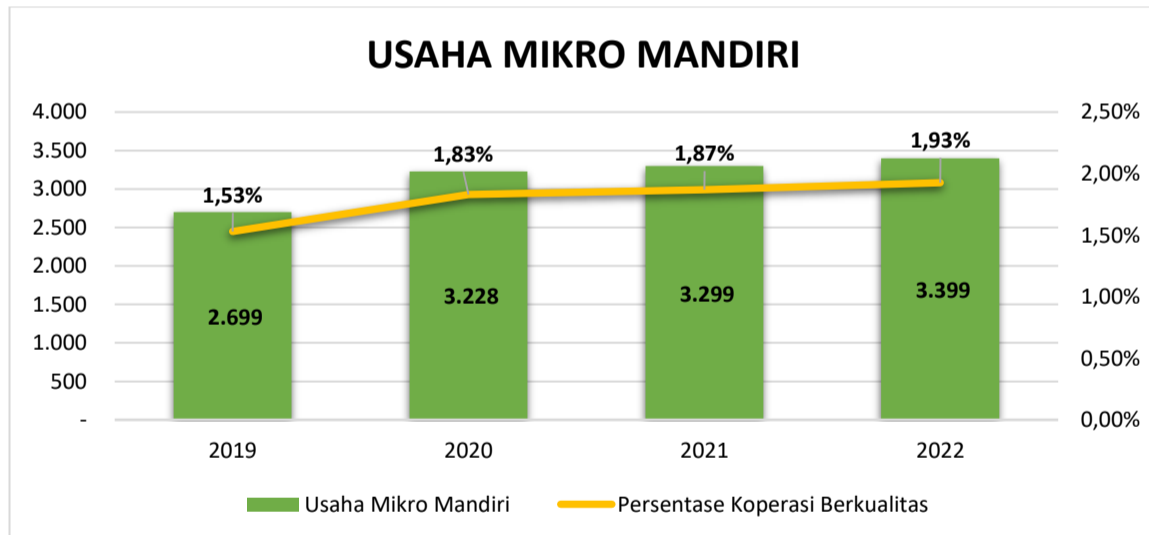
Persentase usaha mikro yang mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.399 usaha mikro setara dengan 1,93% dari total keseluruhan 176.425 usaha mikro sehingga tercapai 100% dari target 1,93%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 1,87% atau sebanyak 3.299 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 0,056% atau setara 100 usaha mikro.

Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antara usaha mikro yang dengan fasilitas peningkatan usaha mikro tidak seimbang. Namun demikian hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan usaha mikro contohnya melalui fasilitasi NIB gratis, pendampingan, pelatihan secara online maupun offline dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.

Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021, terbanyak adalah dari kelompok usaha mikro, sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI USAHA MIKRO	PRESENTASE
1.	PERDAGANGAN	48,18%
2.	KULINER	30,03%
3.	JASA	9,05%
4.	LAIN-LAIN	6,93%
5.	FASHION	4,19%
6.	AGRIBISNIS	1,27%



Upaya yang dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu :

- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.
- Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
- Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan potensi lokal untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif	Persentase koperasi berkualitas	23,20%	23,20%	Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun sebagian besar koperasi belum mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi	Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan usaha koperasi
		Persentase usaha mikro mandiri	1,93%	1,93%	Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antusias mikro yang dengan fasilitas peningkatan usaha mikro tidak seimbang	mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan usahamikro contohnya melalui fasilitasi NIB gratis, pendampingan, pelatihan secara online maupun offline dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	6,23%	6,85%		
	Meningkatnya usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	1,82%	3,03%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase Koperasi yang mendapat Fasilitasi Pendampingan Ijin Usaha Simpan Pinjam	0,68%	0,51%		



Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	12	12		
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan	20	0	KSP Rahayu Pondok Mutiara-Sidoarjo Cabang KSP Rahayu Jatim. Dalam proses pengurusan izin pembukaan kantor cabang karena adanya moratorium peraturan perkoperasian.	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	83	83,03		
Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	18,18	18,18		
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	43,02	44,79		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang dinilai kesehatannya	16,67	19,337		
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Didiklat	59,4	64,73		
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang terlatih	16,26	21,136		
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Direvitalisasi	3,11	3,11		
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terupdate	1475	1478		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	4,84	21,43		
Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	810	2610		



	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,93	1,93		
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	100	465		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.446.622.467,00	8.087.220.963,00	95,75%
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	54.402.500,00	49.247.500,00	90,52%
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	226.553.054,00	218.603.180,00	96,49%
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	277.372.876,00	271.612.236,00	97,92%
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	684.232.475,00	668.964.730,00	97,77%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	396.927.495,00	379.955.380,00	95,72%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	21.095.507.125,00	17.356.775.155,00	82,28%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.654.603.550,00	3.206.484.764,00	87,74%

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Nilai Investasi Daerah	Rp. 7.108.130.220.834	Rp. 14.086.231.612.109,5	198,17 %

Nilai Investasi Daerah

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pada tahun 2022 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 14.086.231.612.109,5 dari target Rp. 7.108.130.220.834 maka tercapai 198,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 9.773.158.275.830 maka terdapat peningkatan senilai Rp. 4.313.073.336.279,5 atau sekitar 44,13%.



Upaya yang dilakukan agar nilai investasi semakin meningkat, yaitu antara lain :

- Letak geografis kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis
- Infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pusat perindustrian dan pergudangan
- Regulasi yang mendukung dimulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, sampai dengan turunannya serta inovasi dalam menerapkan aturan-aturan tersebut
- Adanya regulasi daerah yang mendukung investasi seperti Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup Pemberian Insentif
- Adanya inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional
- DPMPTSP berinovasi dengan memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan
- Kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian
- Pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha, berkomunikasi dan hubungan yang baik kepada pelaku usaha, dengan adanya kegiatan Pengawasan Perusahaan secara rutin
- Tim dari DPMPTSP yang komit dan sangat kompetitif.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	97,39	Hambatan dan permasalahan yang muncul, masih dapat dikendalikan dengan baik	Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada
2	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	7.108.130.219.000	14.086.231.612.110	Hambatan dan permasalahan yang muncul, masih dapat dikendalikan dengan baik	Pelaksanaan temu usaha, FGD, sosialisasi dilakukan melalui pendampingan pelaku usaha, jemput bola ke kecamatan, monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha terkait regulasi baru dan konsultasi terkait permasalahan penanaman modal dan aplikasinya, baik dilaksanakan sendiri oleh tim DPMPTSP ataupun bekerjasama dan berkolaborasi dengan instansi teknis lainnya, perguruan tinggi serta badan swasta lainnya



Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	a. Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	a. 94,22%	a. 94,22%	Kendala dan permasalahan masih dapat dikendalikan	Melaksanakan anggaran DAK-NF dan program prioritas Bupati & wabup terpilih sesuai peraturan perundang-undangan
		b. Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit diterbitkan	b. 97,11%	b. 97,11%		
		c. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap total retribusi	c. 44,61% (26.036.852.222)	c. 44,61% (26.036.852.222)		
		d. Jumlah Penagihan Piutang dan Denda Retribusi Perizinan & Non Perizinan	d. 50 kegiatan	d. 50 kegiatan		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase kebijakan penanaman modal daerah yang disusun	100%	100%	a. Kendala dan permasalahan masih dapat dikendalikan	a. Menyesuaikan kondisi yang ada
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi kepeminatan investasi	100%	100%	Kendala dan permasalahan masih dapat dikendalikan	Memprioritaskan kebutuhan sesuai dengan skala super prioritas
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	a. Nilai Realisasi Investasi PMA	1.391.921.280.000	4.719.984.730.000	a. Kendala dan permasalahan masih dapat dikendalikan	1. Pelaksanaan temu usaha, FGD, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha, jemput bola ke Kecamatan, monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha terkait regulasi baru, dan konsultasi terkait permasalahan penanaman modal dan aplikasinya, baik dilaksanakan sendiri oleh tim DPMPSTSP ataupun bekerjasama dengan instansi teknis lainnya, perguruan tinggi serta badan swasta lainnya
		b. Nilai Realisasi Investasi PMDN	5.645.831.413.895	7.592.721.100.000		



				realisasi investasi untuk triwulan IV. Namun demikian, sampai dengan triwulan III telah tercapai 12,3 T dari target 7,1 T	kolaborasi lainnya dalam rangka menjangkau minat kerjasama Pemerintah dan Pelaku Usahanya
--	--	--	--	---	---

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.997.646.701,00	11.413.526.374,00	95,13%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	185.748.699,00	179.496.000,00	96,63%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	271.625.000,00	240.409.188,00	88,51%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.011.803.500,00	960.860.000,00	94,97%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	223.248.800,00	215.573.300,00	96,56%

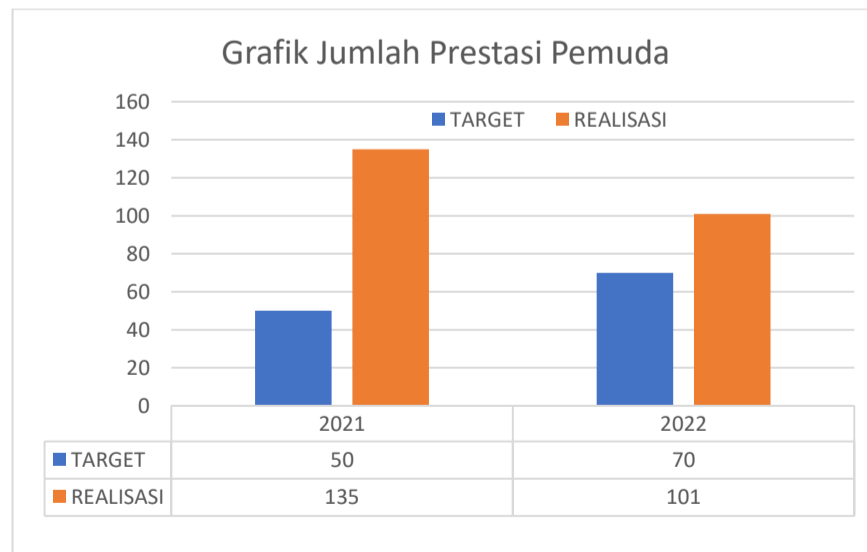
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh :	70	101	144
2	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh :	75	352	469

Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh

Secara kumulatif jumlah prestasi pemuda yang diperoleh untuk semua tingkat sebanyak 101 prestasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 135 prestasi maka terdapat penurunan. Adapun tren capaian Prestasi di bidang Kepemudaan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



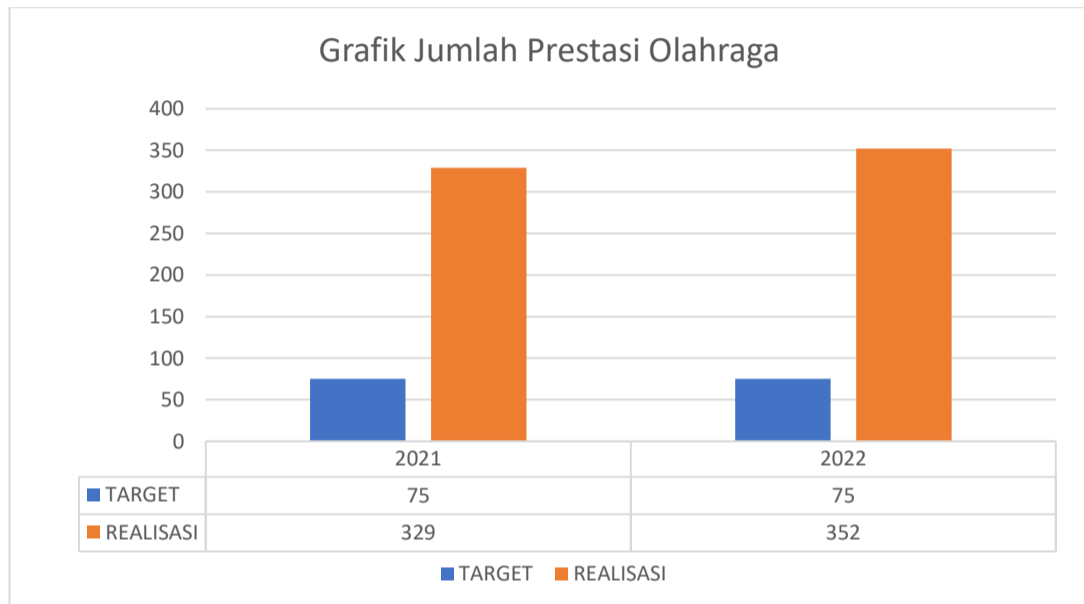


Adapun upaya yang dilakukan agar prestasi di bidang Kepemudaan terus meningkat, yaitu melaksanakan kegiatan dengan konsisten dan melakukan evaluasi kegiatan berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih baik.

Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh

Secara kumulatif jumlah prestasi olahraga yang diperoleh untuk semua tingkat sebanyak 352 prestasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 329 prestasi maka terdapat peningkatan.

Adapun tren capaian Prestasi di bidang Olahraga dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan agar prestasi di bidang Olahraga terus meningkat, yaitu :

- Tetap mempersiapkan kondisi atlet tetap prima
- Lebih banyak mengikuti kompetisi Olahraga di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional
- Menyelenggarakan kompetisi olahraga
- Menyiapkan penghargaan lebih baik lagi

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dibidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	70	101		
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dengan Berolahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diraih di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	75	352		



Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	70	101		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	35	35		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	10	10		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase organisasi kepramukaan yang berkembang	10	10		
	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1	1		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	75	352		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah even olahraga di tingkat Provinsi yang diikuti	5	5		
		Jumlah cabang olahraga yang dibina	38	38		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan	5	5		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.974.728.495,00	10.390.415.145,00	94,68%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.291.904.717,00	7.178.592.846,00	98,45%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	28.557.175.184,00	27.427.166.643,00	96,04%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00%

**URUSAN KEBUDAYAAN**

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah di Kabupaten Sidoarjo.

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pelestarian Budaya	60,55	90,46	149,40%

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya apresiasi terhadap pemajuan kebudayaan dan pelestarian bahasa	Cakupan obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	68,00%	72,72%		
		Jumlah penutur muda bahasa daerah	5	8		
		Persentase guru mengikuti uji kemahiran Bahasa Indonesia	5,00%	12,92%		
		Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	5	8		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	68	72,72		
		Jumlah penutur muda bahasa daerah	5	5		
		Persentase guru mengikuti uji kemahiran bahasa Indonesia	5	12,92		
	Keg : Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	68	140,72		
	Keg : Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok seni yang dibina	55	55		
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kelompok seni yang memenuhi Standarisasi	50	50		

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	204.758.490,00	204.020.650,00	99,64%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	669.343.400,00	661.400.500,00	98,81%

Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sebanyak 7 pengajuan dari keseluruhan total 7 pengajuan atau sekitar 100%

Adapun permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah, dimaksud yaitu belum adanya sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo, sedangkan telah dilakukan pengumpulan dokumen kelengkapan pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dari Bulan November Tahun 2020 sebanyak 16 pengajuan sertifikat.

Upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah, antara lain yaitu telah dilakukan koordinasi dan follow-up secara berkala pada Kantor Pertanahan Sidoarjo namun memang belum ada tindak lanjut hingga saat ini.

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur	41,08	39,84	dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambuangan rumah yaitu Desa Seban, Wonokupang, dan Sidomojo	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai prosedur yang terfasilitasi				
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosesur				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan pendukung kebutuhan daerah yang sudah dibebaskan				



3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur				
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai prosedur yang terfasilitasi				
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosesur				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan pendukung kebutuhan daerah yang sudah dibebaskan				

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	99.465.000,00	83.929.000,00	84,38%
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	139.681.600,00	78.802.936,00	56,42%

Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan persandian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengembangan implementasi teknologi informatika dalam kondisi aman.

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Cukup Baik	Cukup Baik (537)		
	<i>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013</i>	7	7		
		<i>Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</i>	7	7		

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.342.360.000,00	1.310.207.450,00	97,60%

Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan statistik dilaksanakan dalam rangka meningkatnya kualitas data statistik.

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	20%	20%		
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa</i>	3	3		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	663.302.159,00	661.456.600,00	99,72%

Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	61,40	81,89	133,37%
2	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang tertib arsip	31,25%	87,5%	280%



Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Di dalam Undang-undang Kearsipan No 43 Tahun 2009 dibahas secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya

Indeks kearsipan diukur melalui kegiatan pengawasan kearsipan, yang menilai kesesuaian prinsip, serta kaidah dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal di seluruh OPD menjadi acuan dalam menentukan indeks penyelenggaraan kearsipan.

Indek penyelenggaraan kearsipan diukur melalui pengawasan kearsipan yg menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian keberhasilan program reformasi birokrasi di kabupaten sidoarjo. Indeks Penyelenggaraan Kearsipan yaitu 60% Hasil Pengawasan Eksternal (dari ANRI) + 40% Hasil Pengawasan Internal

Adapun indeks penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 81,89

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidoarjo adalah 61,40, maka capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidoarjo telah tercapai sebesar 133,37%.

Dimensi / variabel pengukuran indeks penyelenggaraan kearsipan, sebagai berikut :

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a. Penciptaan arsip
 - b. Penggunaan arsip
 - c. Pemeliharaan arsip
 - d. Penyusutan arsip
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan
 - a. SDM kearsipan
 - b. Prasarana dan sarana arsip

REKAPITULASI HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

NO.	OPD	UNIT PENGOLAH		UNIT KEARSIPAN		TOTAL	KATEGORI	PREDIKAT	PERINGKAT
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI				
1.	Inspektorat Daerah	83,5	A	73	BB	78,25	BB	Sangat Baik	1
2.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	91	AA	64	B	77,5	BB	Sangat Baik	2
3.	Badan Kepegawaian Daerah	79,5	BB	67	B	73,25	BB	Sangat Baik	3
4.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78,5	BB	66	B	72,25	BB	Sangat Baik	4
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	76	BB	68	B	72	BB	Sangat Baik	5
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88	A	53	CC	70,5	BB	Sangat Baik	
7.	Sekretariat Daerah	87,5	A	52,5	CC	70	BB	Sangat Baik	
8.	Dinas Kesehatan	85	A	49	C	67	B	Baik	
9.	Dinas Perhubungan	74	BB	60	CC	66,7	B	Baik	
10.	Sekretariat DPRD	76	BB	56	CC	66	B	Baik	
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80,75	A	49	C	64,8	B	Baik	
12.	Kecamatan Sidoarjo	82,5	A	46	C	64,25	B	Baik	
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76	BB	47	C	61,5	B	Baik	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,25	BB	47,5	C	61,37	B	Baik	
15.	PD ANEKA USAHA	74	BB	44	C	59	CC	Cukup	
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	55	CC	59	CC	57	CC	Cukup	

Hasil Pengawasan Eksternal dari ANRI Tahun 2022 sebesar 84,56 kategori A (Memuaskan). Hasil Pengawasan Internal Tahun 2022 dengan nilai 77,88 kategori BB (Sangat Baik) maka perhitungan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan :

Indeks Penyelenggaraan Kearsipan = 60% Hasil Pengawasan Eksternal (dari ANRI) + 40% Hasil Pengawasan Internal

$$= 60 \% (84,56) + 40 \% (77,88)$$

$$= 50,74 + 31,15$$

$$= 81,89 \text{ kategori A (Memuaskan)}$$

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Penyelenggaraan Kearsipan dapat tercapai optimal, yaitu :

- Kegiatan monev dilakukan secara terus menerus agar semua lembaga di Kabupaten Sidoarjo bisa melakukan penataan arsip dengan baik sesuai dengan aturan kearsipan
- Melakukan kerjasama dengan lembaga yang menjadi sasaran pengawasan kearsipan internal, agar saat pelaksanaan pengawasan kearsipan hasilnya maksimal sesuai yang diharapkan
- Pengawasan / kontrol dan pengendalian yang rutin
- Pembinaan kearsipan yang kontinyu dan sekaligus pendampingan langsung ke OPD
- melakukan sosialisasi dan bintek kearsipan Kepala OPD dan Pengelola Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang tertib arsip

Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang tertib arsip adalah Jumlah PD yang mengelola arsip dengan baik (dari hasil pengawasan) dibanding dengan jumlah PD yang dilakukan pengawasan x 100%

Jumlah OPD yang telah menyelenggarakan kearsipan dengan tertib di tahun 2022 sebanyak 14 Perangkat Daerah dari jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan sebanyak 16 Perangkat Daerah pada Tahun 2022 sehingga tercapai 87,5%.



Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang tertib arsip adalah 31,25%, maka capaian Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang tertib arsip telah tercapai sebesar 280%.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak OPD yang tertib arsip, yaitu :

1. Melakukan pembinaan arsip secara rutin kpd OPD
2. Melakukan sosialisasi kearsipan kpd pimpinan OPD dan pengelola arsip OPD
3. Melakukan bimtek kpd para pengelola arsip yg ada di OPD
4. Melakukan pengawasan kearsipan internal secara rutin

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan mutu Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	61,40	81,89		
	Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidoarjo	Prosentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	31,25%	87,5		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	1250 Berkas	2194 Berkas		
		Jumlah lembaga yang telah mengelola arsip dengan baik	5 PD	5 PD		
		Jumlah pengguna layanan arsip	68 Orang	90 Orang		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	250 Berkas	250 Berkas		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	1250 Berkas	2194 Berkas		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	779.065.163,00	776.413.133,00	99,66%

**Urusan Perpustakaan**

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	56,05	431,153 %
2	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo	62	63,1	101,77%

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan sistem sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan pembinaan perpustakaan-perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo, serta sebagai strategi pengembangan perpustakaan, dan dasar penyusunan arah kebijakan perpustakaan. Selain itu, skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan potret fenomena perkembangan dan pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo.

Indeks Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi perpustakaan baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka dan anggota perpustakaan yang ada di kabupaten Sidoarjo

Adapun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Sidoarjo, yaitu : **56,05** (termasuk dalam kategori Sedang).

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah 13. , maka capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) telah tercapai sebesar 431,153%.

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 tercapai sebesar 56,05 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 156,5225.

Dimensi / variabel pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat, yaitu :

- Pemerataan Layanan Perpustakaan sebaran perpustakaan.
- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, ketercukupan Koleksi Perpustakaan, diantaranya: Jumlah koleksi (judul dan eksemplar buku), Judul koleksi digital/e-resources, berkala yang dilanggan, sirkulasi perbulan dalam 1 tahun, dan anggaran pengadaan koleksi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio penduduk: Koleksi bahan perpustakaan berbasis wilayah.
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk. Sehingga tergambar rasio Rasio penduduk dengan tenaga berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga.
- Rasio ketermanfaatan perpustakaan/ Pengunjung perpustakaan, diantaranya; jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka, jumlah kunjungan tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga. Sehingga tergambar



rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan berbasis wilayah, rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan basis lembaga.

- Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dibidang perpustakaan
- Jumlah Anggota Perpustakaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Mengaktifkan kembali perpustakaan desa yang “mati suri”
2. Melakukan pembinaan tenaga perpustakaan agar dapat mengelola perpustakaan dengan baik dalam hal : penataan koleksi dan ruangan yang layak pakai.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa jurusan perpustakaan untuk magang sebagai tenaga perpustakaan di desa/ kelurahan
4. melibatkan masyarakat dalam lomba-lomba, mendongeng, dan sebagainya dengan sarana perpustakaan desa/kelurahan
5. Meningkatkan frekuensi dan pemerataan kehadiran perpustakaan keliling ke desa/kelurahan
6. Memperbaiki sarana dan prasarana Perpustakaan
7. Meningkatkan jumlah dan jenis koleksi
8. Menyelenggarakan dan aktif mempromosikan adanya kegiatan secara rutin, misalnya berupa lomba-lomba, pelatihan gratis, dongeng, dan sebagainya

Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo

Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.

Adapun Nilai kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu : **63,1** (termasuk dalam kategori Tinggi).

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 dalam Renstra untuk Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo adalah 62, maka capaian Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo telah tercapai sebesar 101,77%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 60,06 maka realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,24 atau 2,04%.

Apabila dibandingkan dengan Nilai Kegemaran Membaca Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 60,05 (termasuk dalam kategori Tinggi). Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo berada diatas Nilai Kegemaran Membaca Provinsi Jawa Timur.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai kegemaran membaca dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Dilaksanakannya promosi/ sosialisasi melalui gerakan gemar membaca dengan mengadakan lomba mendongeng, lomba perpustakaan sekolah/desa/kelurahan



2. membentuk perpustakaan percontohan di Desa/ Kelurahan
3. Mengembangkan desain tata ruang perpustakaan yang lebih nyaman dan kekinian
4. Menyediakan atau menambah koleksi bacaan digital

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan budaya Literasi Masyarakat Sidoarjo	Nilai Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat Sidoarjo	13	56,05		
	Meningkatnya Literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai dengan meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan dan Kegemaran Membaca	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Sidoarjo	62	63,1		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi perpustakaan	137955 Eksemplar	149656 Eksemplar		
		Jumlah pengunjung perpustakaan	170000 Orang	174855 Orang		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	8500 Eksemplar	8819 Eksemplar		
		Jumlah perpustakaan yang berkategori baik	113 Perpus	113 Perpus		
		Sensus pembangunan literasi masyarakat	1 Kali	1 Kali		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.222.860.510,00	7.949.446.980,00	96,67%
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.062.460.217,00	2.049.543.156,00	99,37%

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

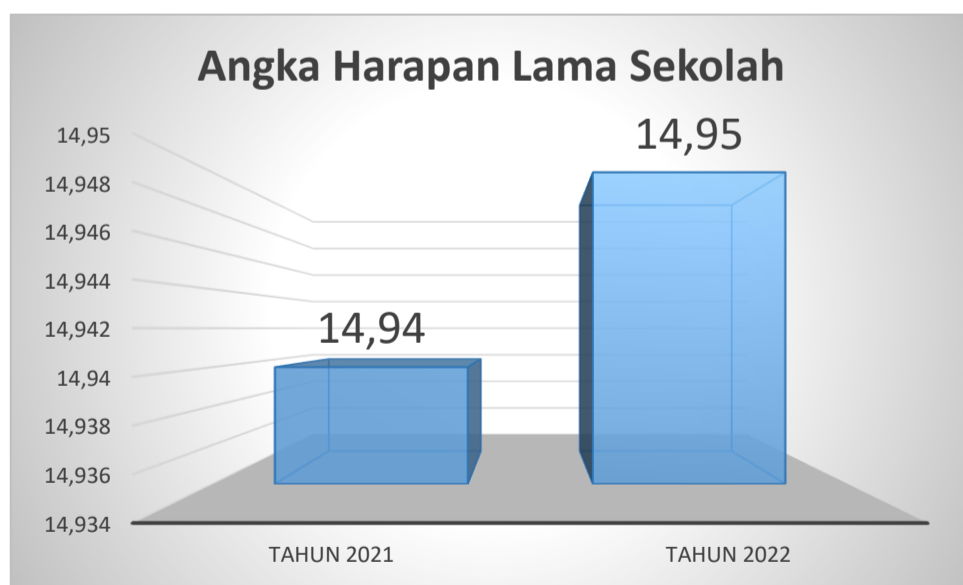
No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	14,95	97%
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23	10,77	96%
3a	APK PAUD	93,20%	102,51%	109,99%
3b	APK SD sederajat	104,75%	110,77%	105,75%
3c	APK SMP sederajat	99,15%	100,68%	101,54%
4a	Persentase Bangunan Ruang Kelas SD kategori Baik	95,30%	90,46%	94,92%
4b	Persentase Bangunan Ruang Kelas SMP kategori Baik	95,50%	90,92%	95%

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 tercapai 14,95 tahun dari target 15,41 tahun sehingga tercapai 97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 14,94 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,01 Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,95 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Diploma 2

Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

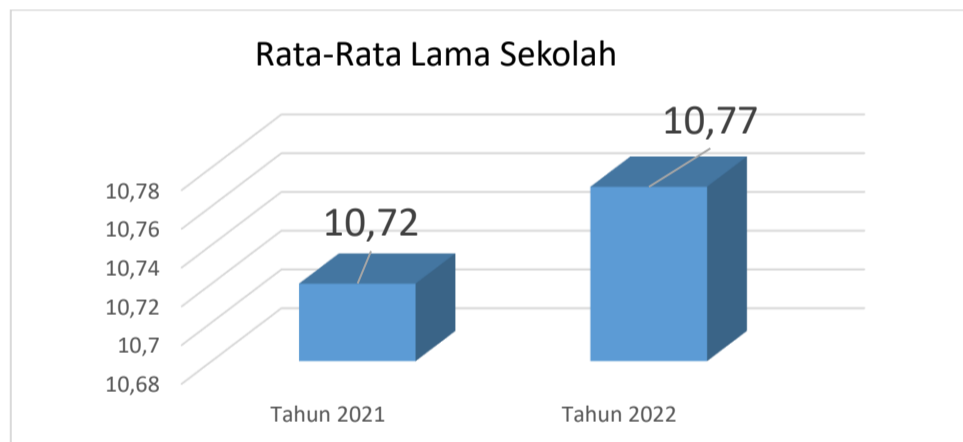
- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan Memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo

Rata – Rata Lama Sekolah

Rata – Rata Lama Sekolah (RTL) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2022 tercapai 10,77 tahun dari target 11,23 tahun sehingga tercapai 96 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 10,72 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,05. Dengan realisasi Rata – Rata Lama Sekolah 10,77 tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang pendidikan SMA/SMK atau setara SMA/SMK kelas XI

Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

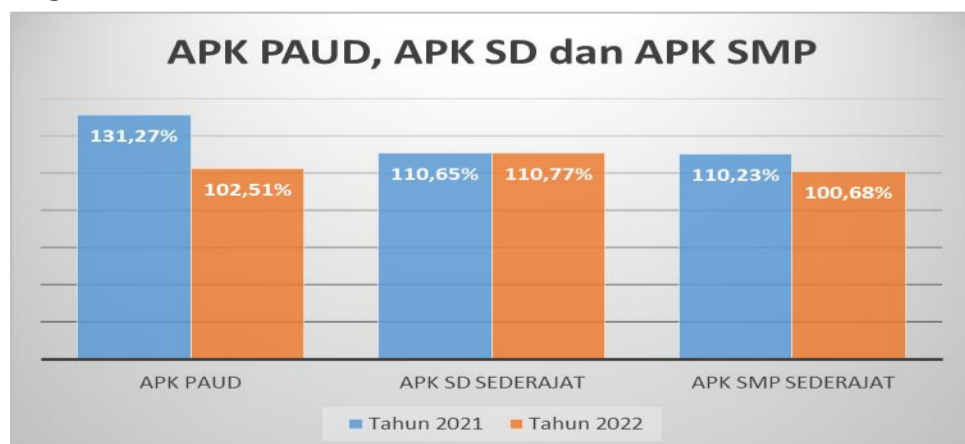
- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, yaitu :

1. APK PAUD Tahun 2022 tercapai 102,51% dari target 93,20% sehingga tercapai 109,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 131,27% maka terdapat penurunan sekitar 28,76%. Namun demikian penurunan tersebut bukanlah suatu preseden yang buruk dalam bidang pendidikan, hal tersebut dikarenakan pencapaian APK PAUD telah terlampaui 100 % yang artinya bahwa penduduk Sidoarjo pada usia 5 – 6 tahun telah seluruhnya menempuh pendidikan PAUD. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun di Sidoarjo tahun 2022 sebanyak 56.494 orang sedangkan peserta didik usia 5 – 6 tahun 57.913 orang yang sedang bersekolah di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat selisih 1.419 siswa bukan dari penduduk Sidoarjo atau penduduk urban.
2. APK SD sederajat Tahun 2022 tercapai 110,77% dari target 104,75% sehingga tercapai 105,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 110,65% maka terdapat peningkatan sekitar 0,12%. Jika di lihat dari banyaknya penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2022 sebanyak 187.795 orang sedangkan siswa usia 7 – 12 tahun sebanyak 208.032 maka terdapat selisih 20.237 anak yang bukan penduduk Sidoarjo namun bersekolah di Sidoarjo.
3. APK SMP sederajat Tahun 2022 tercapai 100,68% dari target 99,15% sehingga tercapai 101,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 110,23% maka terdapat penurunan sekitar 9,55%. Namun penurunan realisasi APK SMP Sederajat tersebut bukanlah merupakan preseden yang buruk dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dikarenakan pencapaian APK SMP sederajat telah terlampaui 100 % yang artinya bahwa penduduk Sidoarjo pada usia 13 – 15 tahun telah seluruhnya menempuh pendidikan SMP sederajat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Sidoarjo 98.389 orang sedangkan peserta didik usia 13 – 15 tahun yang sedang bersekolah di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 99.062 orang sehingga terdapat selisih 673 siswa bukan dari penduduk Sidoarjo atau penduduk urban.

Adapun tren capaian APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022



Adapun upaya yang telah dilakukan agar APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memberikan layanan pendidikan yang optimal
- Meningkatkan infrastruktur pendidikan untuk pemerataan pendidikan
- Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dengan melakukan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai wilayah, serta
- Memberikan dukungan biaya pendidikan yang optimal melalui BOSDA

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SDN maupun jenjang SMPN, adalah sebagai berikut :

SD Negeri

Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
1.256 bangunan (R.Kelas)	2.268 bangunan (R.Kelas)	155 bangunan (R.Kelas)
34,14%	61,65%	4,21%

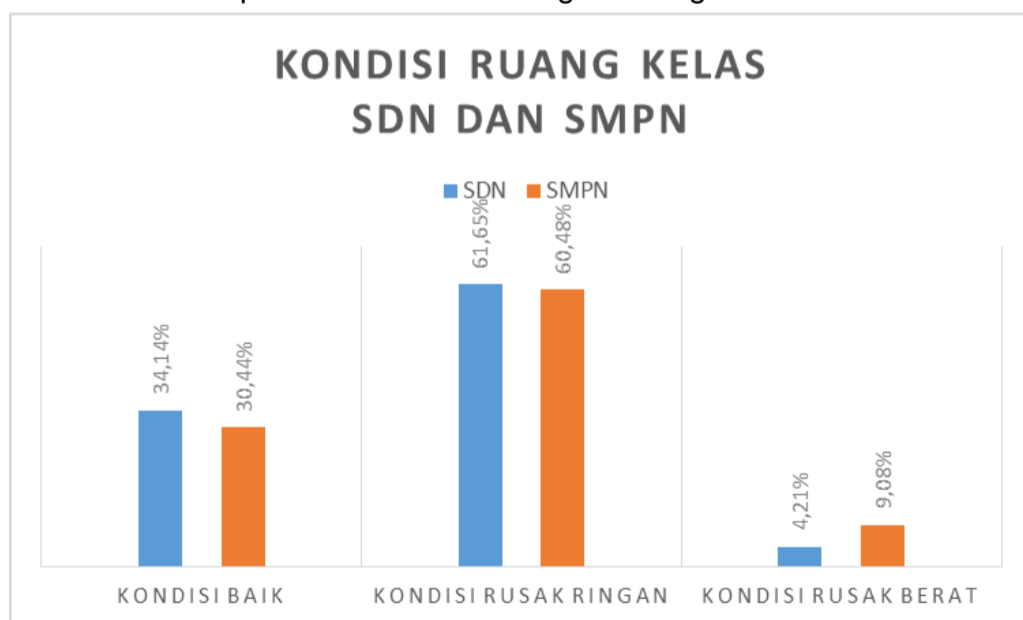
Apabila diproporsi maka sebagian besar kondisi bangunan ruang kelas belajar untuk jenjang SDN adalah dalam kondisi rusak ringan

SMP Negeri

Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
379 bangunan (R.Kelas)	753 bangunan (R.Kelas)	113 bangunan (R.Kelas)
30,44%	60,48%	9,08%

Apabila diproporsi maka sebagian besar kondisi bangunan ruang kelas belajar untuk jenjang SMPN adalah dalam kondisi rusak ringan.

Adapun tren persentase bangunan ruang kelas belajar dalam kondisi baik untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2022



Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu :

- Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanakan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusat Berat.
- Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biayai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi.
- Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya pemerataan akses pendidikan melalui infrastruktur yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan dasar yang memenuhi SPM	88,05%	98,05%		
		Persentase satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang difasilitasi	81,69%	100,00%		
		Persentase satuan pendidikan PAUD/TK yang difasilitasi	76,38%	98,94%		
2	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	14,95	Berdasar UU no 23 tahun 2014 pasal 12 berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang Pendidikan Menengah, agar capaian kinerja selaras
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23	10,77	Berdasar UU no 23 tahun 2014 pasal 12 berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang Pendidikan Menengah, agar capaian kinerja selaras
		Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi ijin operasional	68,00%	69,00%		
3.	Terwujudnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan bahasa	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	70,00%	84,02%		



		Persentase seni tradisional yang dilestarikan	77,11%	87,90%		
4.	Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan melalui infrastruktur yang berkualitas di seluruh jenjang	APK PAUD	93,20%	102,51%		
		APK SD sederajat	104,75%	110,77%		
		APK SMP sederajat	99,15%	100,68%		
		Persentase bangunan ruang kelas SD katagori baik	95,30%	90,46%	adanya rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada program pembangunan infrastruktur bidang pendidikan pada jenjang sekolah SD yang bertujuan meningkatkan persentase bangunan ruan kelas SD kategori baik.	mengusulkannya kembali program dan kegiatan yang berdampak rasionalisasi anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023
		Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	37,00%	37,94%		
		Persentase SD yang telah terakreditasi A	73,75%	73,92%		
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	66,95%	93,62%		
		Persentase pendidikan noformal/kesetaraan yang memenuhi standart	35,00%	35,00%		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	01:32	01:32		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	01:32	01:32		
5.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 dalam pendidikan kesetaraan	98,04%	100,00%		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	60,25%	67,67%		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	29,00%	60,33%		



6.	Menguatnya pendidikan karakter peserta didik	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	5,00%	76,00%		
		Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	5,00%	95,87%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	93,2	102,51		
		APK SD	104,75	110,77		
		APK SMP	99,15	100,68		
		Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	95,3	90,46	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik	95,5	90,92	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Persentase PAUD akreditasi A	37	37,94		
		Persentase Pendidikan nonformal / kesetaraan yang memenuhi standar	35	35		
		Persentase SD yang telah terakreditasi A	73,75	73,92		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	60,25	67,67		
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	29	60,33		
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	66,95	93,62		
		Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	5	95,87		
		Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	5	76		
		Prosentase bangunan dan ruang kelas SMP kategori baik	95,5	90,92	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Prosentase bangunan dan ruang kelas SD kategori baik	95,85	90,46	Rasionalisasi anggaran	Diusulkan kembali th. 2023
		Rasio guru terhadap murid jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio guru terhadap murid jenjang SMP	01:30	01:30		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa jenjang SD	01:28	01:28		
		Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa jenjang SMP	01:30	01:30		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	98.04	100		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK SD/MI	110,77	110,77		
		1. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	90,46	90,46		



		1. Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	76	76		
		2. Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	67,67	67,67		
		3. Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	95,87	95,87		
		4. Persentase SD yg update data pokok pendidikan.	100	100		
		5. Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori sangat tinggi)	0	0		
		6. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	59	59		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/MTs	99,15	100,68		
		1. Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	37,25	76		
		2. Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	60,45	67,67		
		3. Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	28,85	60,33		
		4. Persentase SMP yg update data pokok pendidikan	100	100		
		5. Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sangat tinggi)	0	0		
		6. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	60	81		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD	93,2	102,51		
		2. Persentase data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan	94,13	98,68		
		3. Persentase PAUD yang telah terakreditasi	45	82,22		
		4. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1.	82	86,86		
		5. Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat.	51,9	69		
	Keg : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standar	40	40		
2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SD yang dilayani perizinannya	20	20		
	Keg : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase lembaga SD yang mendapatkan ijin operasional	75	100		
		2. Persentase lembaga SMP yang mendapatkan ijin operasional	75	100		
	Keg : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan	1. Persentase PAUD yang mendapatkan ijin operasional	26	26		



	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		2. Persentase Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang mendapatkan ijin operasional	22	22	

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	724.165.758.281,00	694.677.469.822,00	95,93%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	683.147.543.071,00	652.704.134.722,00	95,54%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.269.300,00	3.643.500,00	23,86%

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,77	74,36	99,45%
2	Persentase Keluarga Sehat (KS)	24,67%	33,7%	136,6%
3	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	51,8 per 100.000 KH	37,31 per 100.000 KH	138,83%
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,53 per 1.000 KH	2,41 per 1.000 KH	146,47%
5	Persentase Balita Stunting (Versi E-PPGM)	7,64%	5,8%	131,72%
6a	Persentase bangunan RSUD dalam kondisi baik	100%	100%	100%
6b	Persentase bangunan Puskesmas dalam kondisi baik	96,30%	76,67%	79,61%
6c	Persentase bangunan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik	80,36%	54,72%	68,09%
7	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna	100%

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

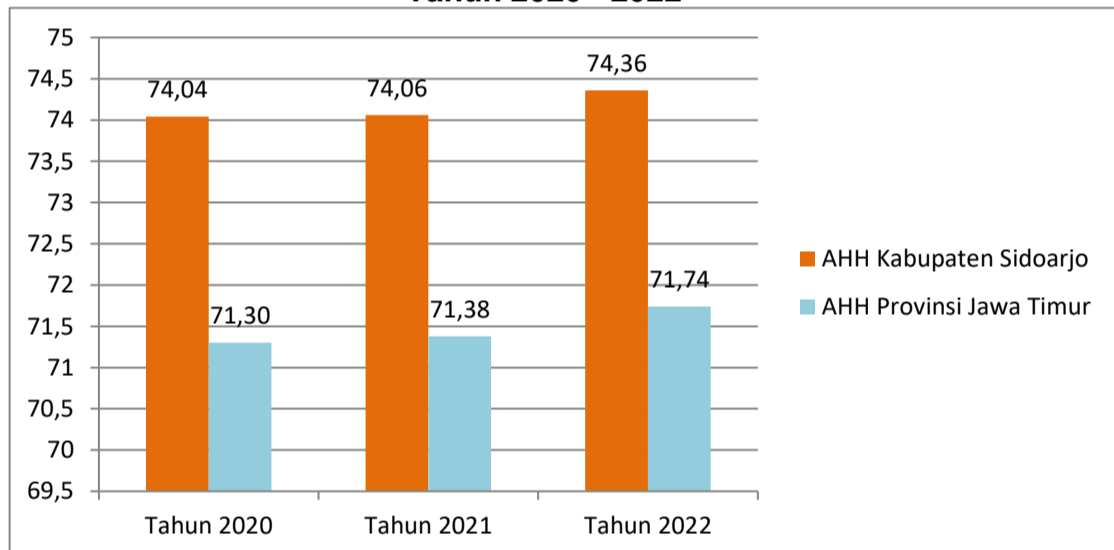
Angka Harapan Hidup Tahun 2022 tercapai 74,36 tahun dari target 74,77 tahun sehingga tercapai 99,45%. Capaian AHH Tahun 2022 belum bisa 100% karena skrening kesehatan pada usia produktif belum tercapai maksimal. Dimana skrening tersebut merupakan salah



satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan skrening tersebut, jumlah kematian ibu dan bayi dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya AHH, antara lain faktor kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola asuh, budaya, dan ketersediaan sumber pangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 74,06 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,27 point atau sekitar 0,4%. Dengan realisasi Angka Harapan Hidup 74,36 tahun ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup yang dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

**Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur
Tahun 2020 - 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

Persentase Keluarga Sehat (KS)

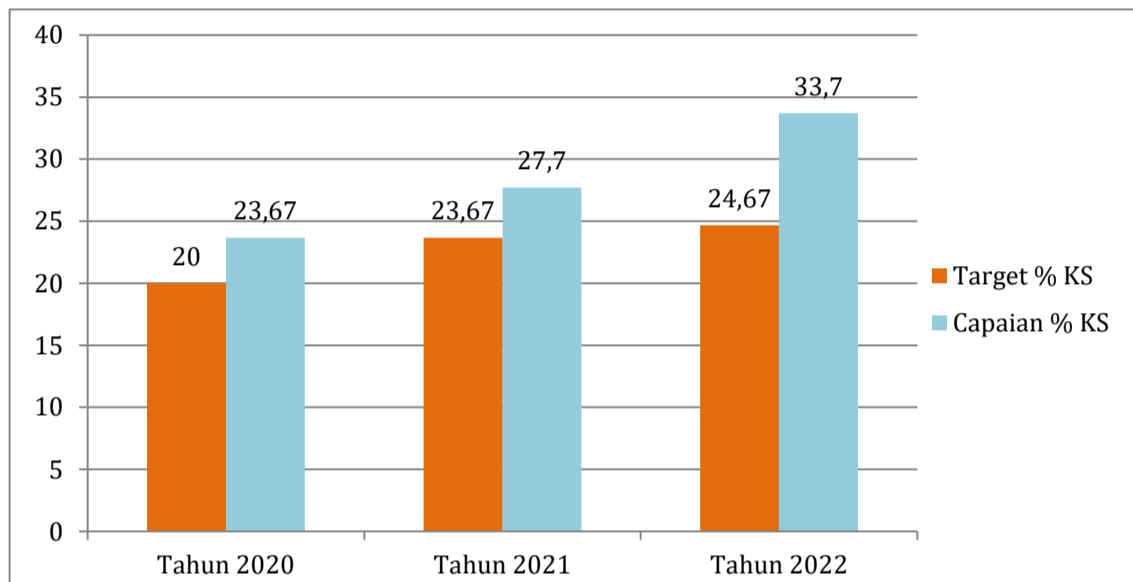
Persentase keluarga sehat Tahun 2022 tercapai 33,7% dari target 24,67% sehingga tercapai 136,6%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 27,7% maka terdapat peningkatan angka 6 point atau sekitar 21%. Hal ini menunjukkan adanya



keberhasilan dan kesinambungan program-program bidang kesehatan, juga karena adanya program KOIPU (Konseling Dari Pintu Ke Pintu), yang terintegrasi dengan program KS, yang akhirnya ikut mendongkrak kunjungan keluarga rawan. Selain itu, koordinasi antar program juga telah dilaksanakan di puskesmas untuk kroscek dan *update* data sehingga data pada aplikasi tervalidasi.

Adapun tren capaian Persentase Keluarga Sehat dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

**Persentase Keluarga Sehat (KS) Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2022**



Sumber : Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kab. Sidoarjo

Permasalahan yang timbul dalam meningkatkan keluarga sehat, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Koordinator PISPK dengan Koordinator program lainnya untuk validasi dan updating data.
2. Aplikasi PISPK sering error dan tidak secara otomatis *update* data apabila proses edit dan intervensi sudah dilakukan.
3. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum entri data survey awal karena kurangnya koordinasi dan tenaga.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan keluarga sehat, yaitu :

- Optimalisasi peran/ kerjasama lintas sektor, dalam hal ini organisasi masyarakat dan kader untuk melaksanakan intervensi lanjut.
- Dukungan anggaran yang cukup memadai untuk kunjungan intervensi.
- Koordinasi dan kerjasama antar program di Puskesmas untuk sinkronisasi dan validasi data PISPK.
- *Cleaning* data untuk memastikan kevalidan data untuk kemudian dilakukan analisis sehingga tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami keluarga



- Pemantauan *update* data di aplikasi Keluarga Sehat sehingga dapat dilakukan pengunduhan *raw* data sebagai data dasar untuk analisis dan intervensi.

Angka Kematian Ibu

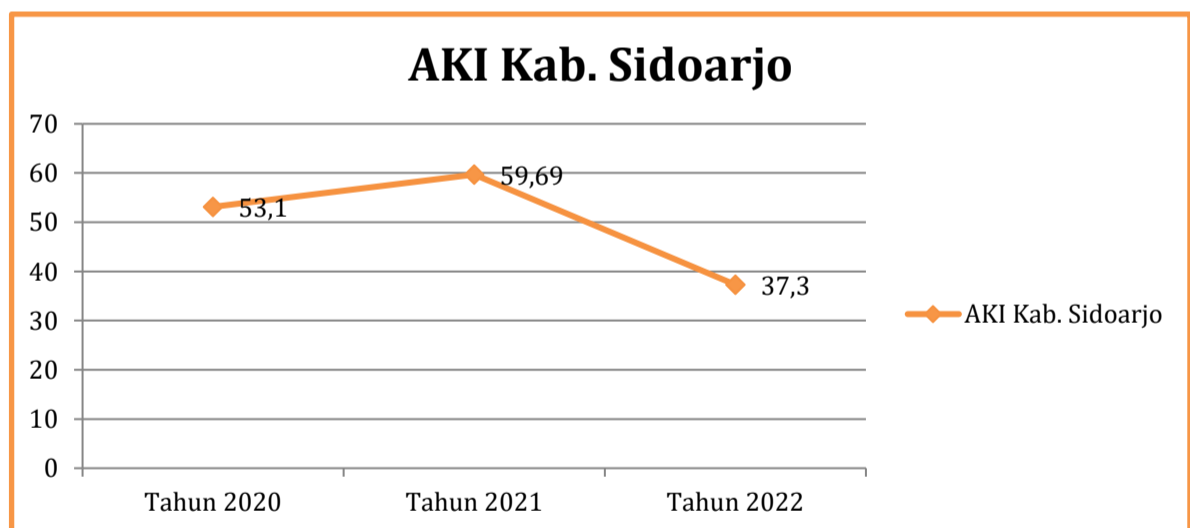
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2022 tercapai 37,31 per 100.000 kelahiran hidup dari target 51,8 per 100.000 kelahiran hidup sehingga tercapai 138,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 59,69 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat penurunan angka 22,38 point atau sekitar 37,49%. Penurunan tersebut disebabkan karena komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan jumlah kematian ibu dengan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Standart Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo berada jauh dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 – 2022



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review Asuhan Persalinan Normal*), kelas ibu, kegawatdaruratan;



- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja 1 (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Angka Kematian Bayi Tahun 2022 tercapai 2,41 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,53 per 1.000 kelahiran hidup sehingga tercapai 146,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 3,01 per 1.000 kelahiran hidup maka terdapat penurunan angka 0,6 point atau sekitar 19,9%. Penurunan tersebut disebabkan karena Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan terus berupaya menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;

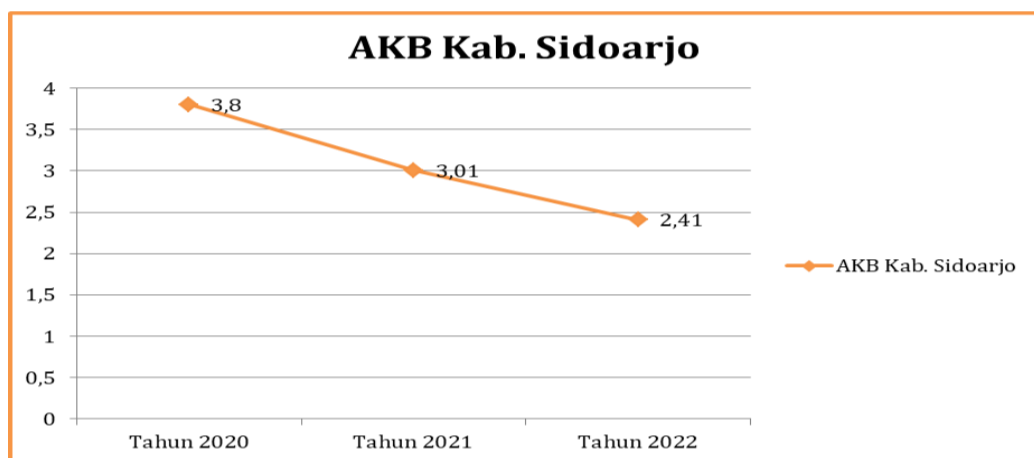


- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Standart Nasional angka kematian bayi adalah 14 per 1.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :

Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2022



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Persentase Balita Stunted

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

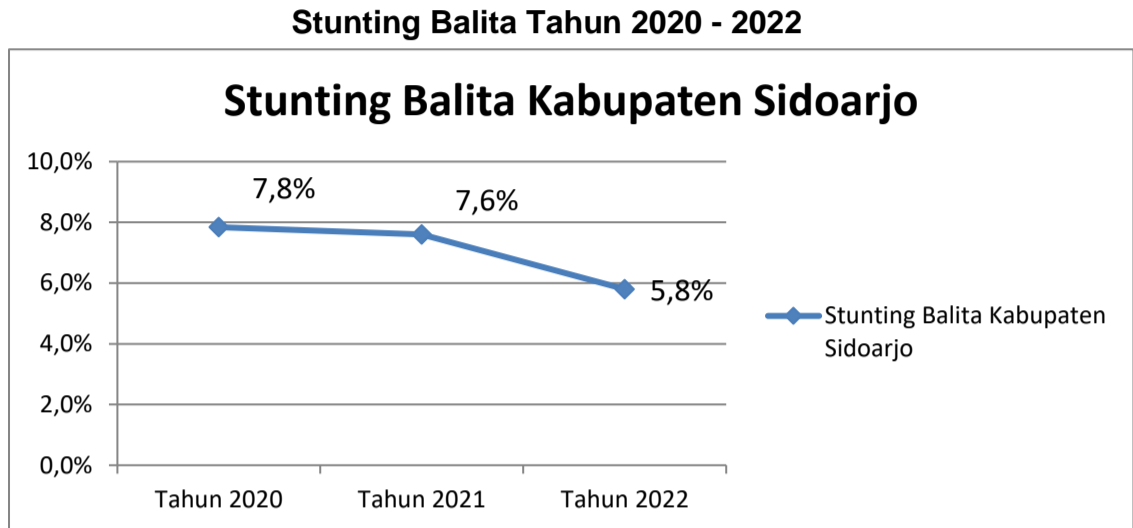
Persentase Balita Stunted Tahun 2022 tercapai 5,8% yaitu sebanyak 4.925 balita dari keseluruhan 85.119 balita di Kabupaten Sidoarjo mengalami stunted berdasarkan data surveilans pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 7,64% maka tercapai 131,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 7,60% maka terdapat penurunan angka 1,8 point atau sekitar 23,68%. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).



Standart Nasional persentase balita stunted adalah 18,4% sehingga dapat dikatakan bahwa persentase balita stunted di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian persentase balita stunted dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 persentase stunted Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1% dari keseluruhan 1.141 balita yang disampling di Kabupaten Sidoarjo mengalami stunted. Apabila dibandingkan dengan hasil SSGI tahun 2021 yaitu 14,8%, maka terdapat peningkatan 1,3%. Peningkatan tersebut terjadi karena diantara balita yang disampling terdapat balita yang jarang datang ke posyandu sehingga tidak terdeteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu adanya balita yang turun berat badannya karena pola asuh yang tidak tepat dan kondisi pemulihan pasca sakit.

Persentase Bangunan Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

Kondisi bangunan RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

RSUD

Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Apabila diproporsi maka RSUD dalam kondis baik100% kondisi bangunan RS Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik



Puskesmas

Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
25 bangunan	6 bangunan	0 bangunan
80,65%	19,35%	-

Apabila diproporsi maka Puskesmas dalam kondisi baik 80,65%

Puskesmas Pembantu

Kabupaten Sidoarjo memiliki 52 puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2022

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
26 bangunan	22 bangunan	4 bangunan
50,98%	42,30%	7,69%

Apabila diproporsi maka Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik 50,98%

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin puskesmas, baik bersifat ringan, sedang maupun berat.

Status Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Penilaian akreditasi Rumah Sakit dengan metode penyampaian dokumen dan telusur/ kunjungan lapangan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Penyelenggara akreditasi yang berwenang dalam penilaian akreditasi RSUD Sidoarjo pada Tahun 2022 yaitu Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Standar Akreditasi Rumah Sakit menurut Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*). Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).



- B. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- C. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- D. Kelompok Program Nasional (PROGNAS) sebagai elemen penilaian tambahan.

Hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Hasil Akreditasi	Kriteria
Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
Utama	12 – 15 Bab mendapat nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80%
Madya	8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%
Tidak terakreditasi	a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%

RSUD Sidoarjo telah melaksanakan 3 (tiga) kali akreditasi dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit	Keterangan
2014	Paripurna	Akreditasi ke-I
2017	Paripurna	Akreditasi ke-II
2022	Paripurna	Akreditasi ke-III

Hasil tersebut menunjukkan bahwa RSUD Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi sebanyak tiga kali pada tahun 2014, 2017, dan 2022 dengan hasil Paripurna. Tingkat Paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit dengan pemenuhan standar akreditasi dalam seluruh bab (15 bab dan 1 (satu) elemen tambahan yaitu program nasional) mendapatkan nilai minimal 80%. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan akreditasi ulang. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan akreditasi ulang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga akreditasi ke-III dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan hasil terakreditasi Paripurna.

Adapun 16 bab yang mendapatkan nilai minimal 80% sehingga RSUD Sidoarjo dapat memperoleh status terakreditasi Paripurna pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :



NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
A. Kelompok Manajemen Rumah Sakit			
1.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara Pemilik Rumah Sakit/ Representasi Pemilik/Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan	100%
2.	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)	Rumah sakit membutuhkan staf yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mencapai misinya dan memenuhi kebutuhan pasien. Perekrutan, evaluasi, dan pengangkatan staf dilakukan melalui proses yang efisien.	100%
3.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	Rumah sakit wajib melakukan pengelolaan fasilitas dan lingkungan serta program pengelolaan risiko untuk pemantauan keselamatan di seluruh lingkungan rumah sakit dan mendukung layanan klinis yang disediakan secara aman dan efektif sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien, staf dan pengunjung	100%
4.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien dengan cara melakukan perbaikan dalam memberikan asuhan pasien yang aman dan menurunkan risiko dan pengelolaan utilisasi sumber daya	100%
5.	Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK)	rumah sakit harus memiliki manajemen informasi dengan menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya rumah sakit dan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dalam Pelaksanaan asuhan pasien di rumah sakit	100%
6.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	rumah sakit harus memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga kesehatan, tenaga kontrak, sukarelawan, mahasiswa dan pengunjung maka dari itu dibutuhkan kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pendidikan staf, metode identifikasi risiko infeksi secara proaktif pada individu dan lingkungan serta koordinasi ke semua bagian di rumah sakit.	96,77%
7.	Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)	Rumah sakit pendidikan perlu pengaturan khusus dalam mengadakan pendidikan kesehatan pada peserta didik sebagai upaya menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien	100%
B. Kelompok Pelayanan Berfokus Pada Pasien			
1.	Akses dan Kesenambungan Pelayanan (AKP)	Rumah sakit mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan (PPA) dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan, diharapkan dari proses asuhan di rumah sakit adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit.	100%

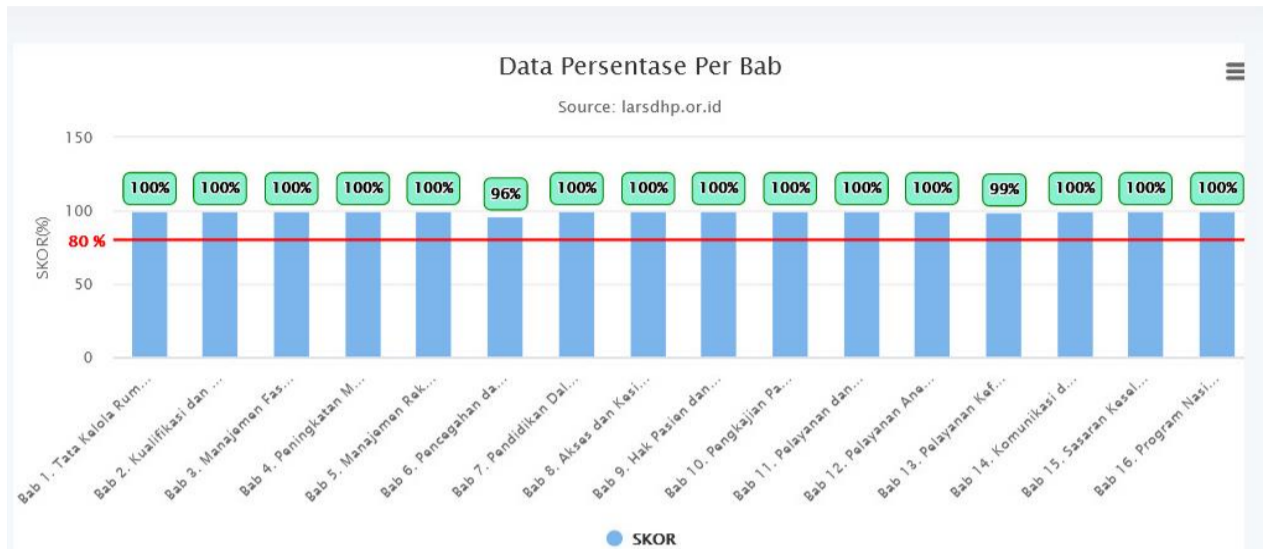


NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
2.	Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPK)	rumah sakit menjamin hak pasien yang dilindungi oleh peraturan perundangan tersebut dengan mengupayakan agar pasien mendapatkan haknya di rumah sakit. pasien dan keluarga atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan.	100%
3.	Pengkajian Pasien (PP)	Pengkajian pasien merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis mulai dari penentuan perawatan, pengobatan dan pelayanan berkelanjutan pasien	100%
4.	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)	Rumah sakit bertanggung jawab memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman mulai dari upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif sehingga penting profesional pemberi asuhan (PPA) memiliki peran yang jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit, atau uraian tugas wewenang	100%
5.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	Rumah sakit dalam memberikan pelayanan pembedahan memerlukan pengkajian pasien yang lengkap dan menyeluruh, Perencanaan asuhan yang terintegrasi dan Pemantauan yang terus menerus sesuai dengan kapasitas pelayanan, standar profesi dan perundang undangan yang berlaku.	100%
6.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit dirancang, diimplementasikan, dan dilakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan terhadap proses-proses: pemilihan, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, persepsan/permintaan obat/instruksi pengobatan, penyalinan (<i>transcribing</i>), penyiapan, pemberian dan pemantauan terapi obat. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit harus berupaya mengurangi terjadinya kesalahan obat dengan membuat sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (<i>medication safety</i>).	99,17%
7.	Komunikasi dan Edukasi (KE)	Rumah sakit harus membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien. Komunikasi dan edukasi yang efektif akan membantu pasien untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengobatan yang dijalaninya	100%
C.	Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien		
	Sasaran Keselamatan Pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah		100%
D.	Program Nasional (Elemen Penilaian Tambahan)		
	Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. Salah satu fungsi rumah sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target target pembangunan nasional diantaranya Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, Penurunan angka kesakitan		100%



NO	STANDAR AKREDITASI	MAKSUD DAN TUJUAN	SKOR
	Tuberkulosis/TBC, Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.		

Data persentase skor per bab untuk 16 standar akreditasi rumah sakit dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Untuk menuju Status Akreditasi Internasional pada akhir tahun Renstra 2026, upaya yang dilakukan antara lain :

- Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi;
- Melaksanakan *review* dan revisi dokumen akreditasi;
- Mengunggah dokumen ke aplikasi Simarfasyankes (Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
- Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,77	74,36	1. Skrining usia produktif belum tercapai maksimal. Dimana skrining tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat, yang pada akhirnya bisa menekan jumlah kematian ibu dan bayi. 2. Terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya AHH, yang meliputi : kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola	1. Optimalisasi kegiatan posbindu PTM untuk maksimalkan pelaksanaan skrining usia produktif 2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor



					asuh budaya, dan ketersediaan sumber pangan	
2	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan	Indeks infrastruktur kesehatan	71,13	77,21		
3	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. KS (Keluarga Sehat);	24,67 persen	33,7 persen		
		2. Rata-rata nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) di puskesmas	84,84 persen	95,5 persen		
4	Meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit yang bertaraf Internasional	Status Akreditasi Internasional	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna		Untuk menuju Status Akreditasi Internasional pada akhir tahun Renstra 2026, upaya yang dilakukan antara lain: a. Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi; b. Melaksanakan review dan revisi dokumen akreditasi; c. Mengunggah dokumen ke aplikasi Simarfasyankes (Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan); d. Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi.
5	Meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	1. AKI	51,8 per 100.000 KH	37,3 per 100.000 KH	TERCAPAI	
		2. AKB	3,53 per 1.000 KH	2,9 per 1.000 KH	TERCAPAI	
		3. Persentase balita stunting	7,64%	5,8%	TERCAPAI	
		4. Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	56%	55,97%	TERCAPAI	
		5. Persentase keluarga yang disurvei KS	92%	93,40%	TERCAPAI	



		6. Presentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang terakreditasi	23%	23%	TERCAPAI	
		7. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan;	95%	98,86%	TERCAPAI	
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	60%	60%	TERCAPAI	
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	85,64%	Karena sasaran (target) adalah angka proyeksi dimana nilai prevalensinya ditentukan oleh Pusdati Kemenkes RI. yang sebenarnya terjadi adalah orang dengan hipertensi yang ditemukan dari jumlah proyeksi yang ditetapkan menurut hitungan prevalesi hanya 85,64% dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan jika diperlukan.	Tetap menyisir dan aktif jemput bola untuk mencari sasaran yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
		10. Persentase KLB yang tertangani <24 jam	100%	100%	TERCAPAI	
		11. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	TERCAPAI	
		12. Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		13. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1 : 77.384	1 : 77.384	TERCAPAI	



3. URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Urusan Perikanan dan Kelautan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

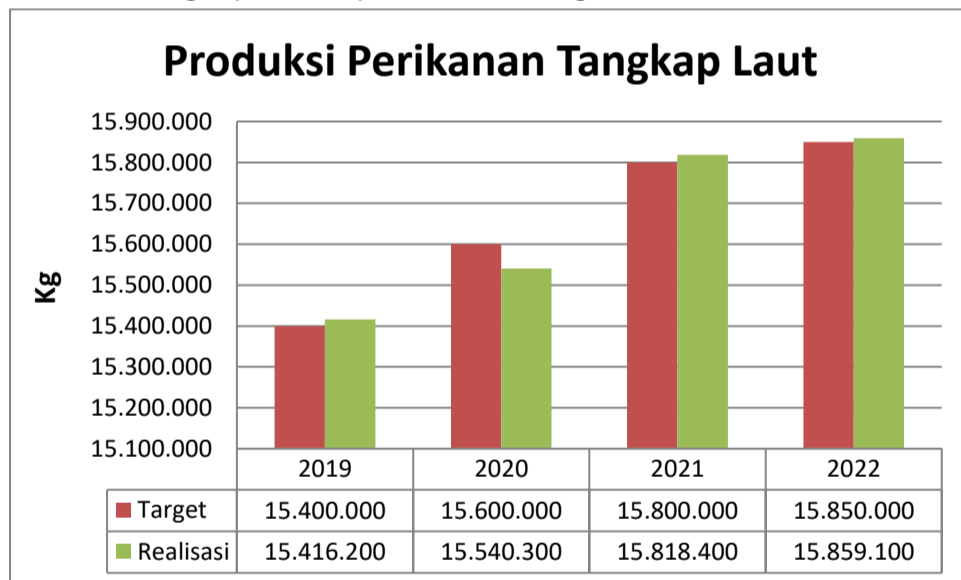
Produksi Perikanan Tangkap Laut

Pada tahun 2022 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15.859.100 kilogram dari target 15.850.000 kilogram atau tercapai 100,06 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 15.818.400 kilogram maka terdapat peningkatan 40.700 kilogram atau sekitar 0,26 %.

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut, sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2019	15.400.000 Kg	15.416.200 Kg	196.400 kg	1,29%
2.	2020	15.600.000 Kg	15.540.300 Kg	124.100 kg	0,80%
3.	2021	15.800.000 Kg	15.818.400 Kg	278.100 kg	1,79%
4.	2022	15.850.000 Kg	15.859,100 Kg	40.700 kg	0,26%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu :

- Perbaikan / Pengadaan sarana prasarana nelayan tangkap
- Pembinaan / Pelatihan untuk nelayan tangkap



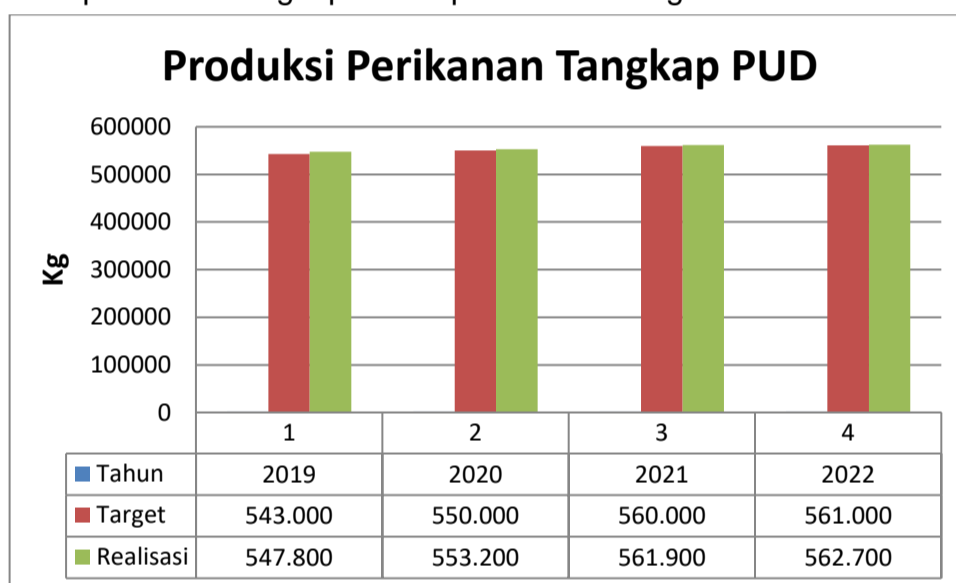
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan

Pada tahun 2022 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 562.700 kilogram dari target 561.000 kilogram atau tercapai 1,003 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 561.900 kilogram maka terdapat peningkatan 800 kilogram atau sekitar 0,14 %.

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap Perairan Umum Daratan, sebagaimana tabel berikut :

Perairan Umum Daratan (PUD)					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2019	543.000 Kg	547.800 Kg	11.700 Kg	2,18%
2.	2020	550.000 Kg	553.200 kg	5.400 kg	0,98%
3.	2021	560.000 Kg	561.900 kg	8.700 kg	1,57%
4.	2022	561.000 Kg	562.700 Kg	800 Kg	0,14%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu:

- Perbaikan / Pengadaan sarana prasarana nelayan tangkap
- Pembinaan / Pelatihan untuk nelayan tangkap

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Pada tahun 2022 hasil produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 81.767.100 kilogram dari target 78.966.373 kilogram atau tercapai 2,4 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 79.825.238 kilogram maka terdapat peningkatan 1.941.862 kilogram.

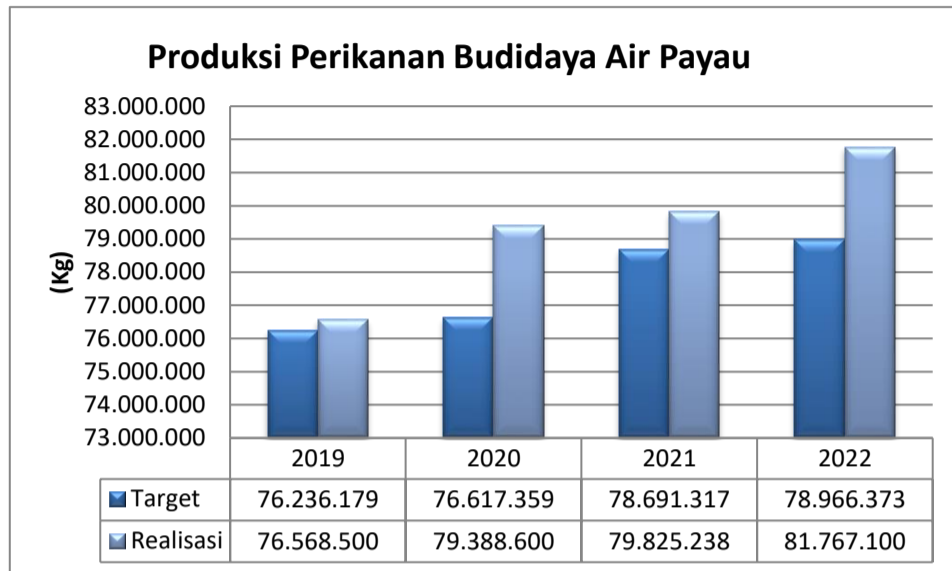
Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air payau, sebagaimana berikut :

Perikanan Budidaya Air Payau						
No	Tahun	Target (Kg)	Presentase (%)	Realisasi (kg)	Kenaikan (kg)	Persentase (%)
1.	2019	76.236.179	0,47	76.568.500	636.050	0,83
2.	2020	76.617.359	0,50	79.388.600	2.182.300	2,85



3.	2021	78.691.317	0,55	79.825.238	436.638	1,38
4	2022	78.966.373	0,51	81.767.100	1.941.862	2,4

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Melakukan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang budidaya
- Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya (fisik) yang meliputi normalisasi/rehab saluran tambak, pembangunan jalan produksi, pembangunan jembatan produksi dan pembangunan tanggul / bronjong
- Memberikan fasilitasi hibah kepada pembudidaya air payau
- Memberikan bantuan permodalan kepada pembudidaya ikan

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

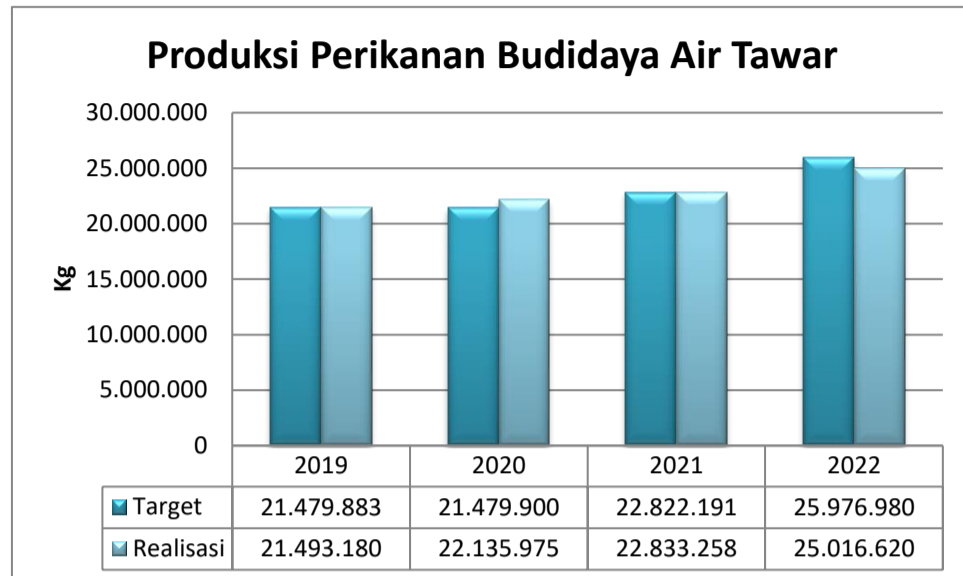
Pada tahun 2022 hasil produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 25.016.620 kilogram dari target 25.976.980 kilogram atau tercapai %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 22.833.258 kilogram maka terdapat peningkatan 777.780 Kilogram.

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air tawar, sebagaimana tabel berikut :

Perikanan Budidaya Air Tawar						
No	Tahun	Target (Kg)	Prosentase (%)	Realisasi (Kg)	Kenaikan (Kg)	Prosentase (%)
1.	2019	21.479.883	5,35	21.493.180	839.446	4,06
2.	2020	21.479.900	0,01	22.135.975	642.795 Kg	3
3.	2021	22.822.191	5	22.833.258	697.283 Kg	3,15
4	2022	25.976.980	3,10	25.016.620	777.780	3,20



Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air tawar dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air tawar semakin meningkat, yaitu :

- Melakukan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang budidaya
- Memberikan fasilitasi hibah kepada pembudidaya air tawar
- Memberikan bantuan permodalan kepada pembudidaya ikan

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers

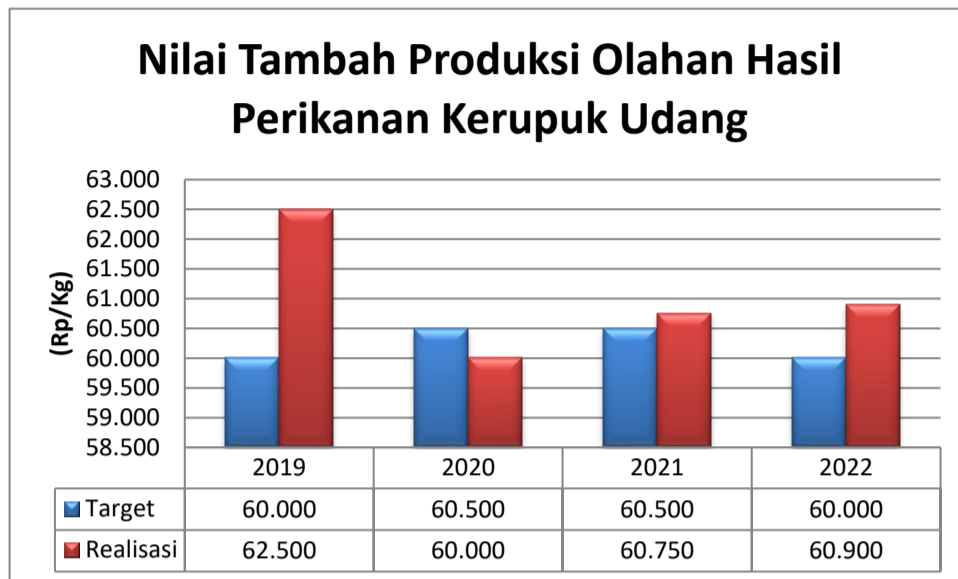
Pada tahun 2022 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers senilai Rp. 60.900/Kg dari target Rp. 60.000/Kg atau tercapai 1,50 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp. 60.750/Kg maka terdapat peningkatan Rp. 150/Kg atau sekitar 0,30 %.

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers, sebagaimana tabel berikut :

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang						
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan (Rp)	Penurunan (%)	Persentase (%)
1.	2019	60.000 / Kg	62.500 / Kg	2.500 / Kg	-	4,16
2.	2020	60.500/ Kg	60.000/Kg	-	500 / Kg	-0,83
3.	2021	60.500/ Kg	60.750/Kg	250 / kg	-	0,41
4	2022	60.000/kg	60.900/kg	900/kg	-	1,50



Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers semakin meningkat, yaitu:

- Lebih meningkatkan packaging hasil olahan krupuk udang agar lebih menarik saat dipromosikan/dijual.
- Memberikan fasilitasi legalitas usaha seperti halal, PIRT,dll.
- Memberikan fasilitasi hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan produksi

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish

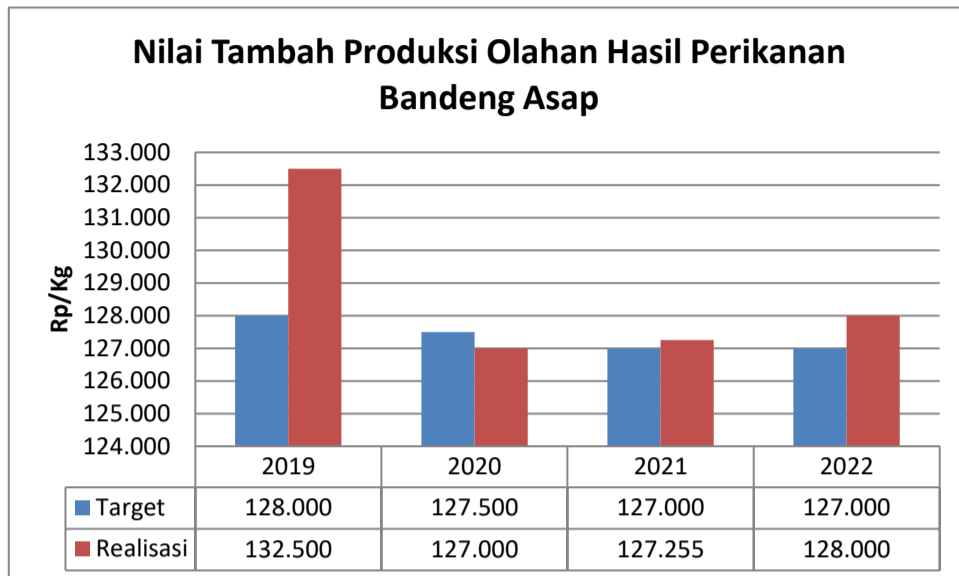
Pada tahun 2022 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish senilai Rp.128.000/Kg dari target Rp.127.000/Kg atau tercapai 0,80%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp.127.255/Kg maka terdapat peningkatan Rp.745/Kg atau sekitar 0,60%.

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish, sebagaimana tabel berikut :

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap						
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan (Rp)	Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1.	2019	128.000 /Kg	132.500/ Kg	2.500/ Kg	-	1,95%
2.	2020	127.500/ Kg	127.000/ Kg	-	500 /Kg	-0,39%
3.	2021	127.000 / kg	127.255 / kg	255 / kg	-	0,20 %
4	2022	127.000 / Kg	128.000 / Kg	1000 / Kg	-	0,80 %



Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Mikfish semakin meningkat, yaitu :

- Lebih meningkatkan packaging hasil olahan perikanan bandeng asap dengan system vacuum yang lebih baik sehingga lama dan awet saat penyimpanan
- Memberikan inovasi terhadap produk olahan bandeng asap dengan memberikan sentuhan variase rasa seperti daun salam, daun jeruk, dll agar lebih menarik konsumen
- Memberikan fasilitasi hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk membantu dalam produktivitas olahan bandeng asap yang dibuat.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Berkembangnya Sub sektor Perikanan	Prosentase peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1,50 %	1,59% (Rp. 2.597.300,-)		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,55%	0,77%		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	0,51%	2,40%		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar	3,10%	3,20%		
		Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan krupuk udang	Rp.60.000/Kg	Rp.60.900/Kg		
		Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan bandeng asap	Rp. 127.000/Kg	Rp.128.000/Kg		



Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	15.850.000 Kg	15.859.100 Kg		
		Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan	561.000 Kg	562.700 Kg		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan yang disediakan/layak fungsi	1 Unit	1 Unit		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan kecil yang menerapkan pembinaan/ pelatihan	5 Persen	5 Persen		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya air payau	77.039.755 Kg	81.767.100 Kg		
		Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	23.917.109 Kg	25.016.620 Kg		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok		
		Jumlah pembudidaya ikan yang direkomendasikan untuk mendapat sertifikat CBIB	9 Orang	9 Orang		
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang diterbitkan rekomendasi usulan TDPIK	25 Pembudidaya	33 Pembudidaya		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih yang terjual	153.000 Ekor	153.000 Ekor		
		Jumlah produksi ikan yang dihasilkan tambak dinas (Bandeng & Udang)	9.350 Kg	9.350 Kg		



3.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran yang ditemukan di wilayah perairan	6 Pelanggaran	6 Pelanggaran		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah monev yang dilaksanakan di wilayah sungai	1 Laporan	1 Laporan		
		Jumlah POKMASWAS yang dibina/ dilatih	2 POKMASWAS	2 POKMASWAS		
		Jumlah sungai yang diawasi	2 Sungai	2 Sungai		
4.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	8.630.000 Kg	8.630.000 Kg		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	jumlah SKAI yang diterbitkan	25 Berkas	76 Berkas		
		jumlah tanda daftar STDUP yang dikeluarkan	21 Berkas	21 Berkas		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah ikan yang terjual dalam kegiatan penyediaan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha	6.550.000 Kg	6.550.000 Kg		
		jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi pemasaran yang omsetnya meningkat	5 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.092.787.132,00	7.510.497.183,00	92,80%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	464.792.334,00	390.893.800,00	84,10%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	19.965.828.411,00	18.609.048.885,00	93,20%



4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	158.595.371,00	133.332.204,00	84,07%
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.867.344.799,00	1.735.198.249,00	92,92%

Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Produktivitas Pertanian :	%	%	
	- Padi	0,015	0,020	133%
	- Jagung	0,100	0,140	140%
	- Kacang Hijau	0,200	0,210	105%
	- Kedelai	0,200	0,360	180%
	- Sawi	0,010	0,010	100%
	- Bayam	0,010	0,011	110%
	- Kangkung	0,010	0,011	110%
2	Produktivitas Tebu	0,100	0,150	150%
3	Produktivitas Peternakan :			
	- Daging	0,500	0,509	101,80%
	- Telur	0,750	0,868	115,73%
	- Susu	0,500	0,207	41,40%

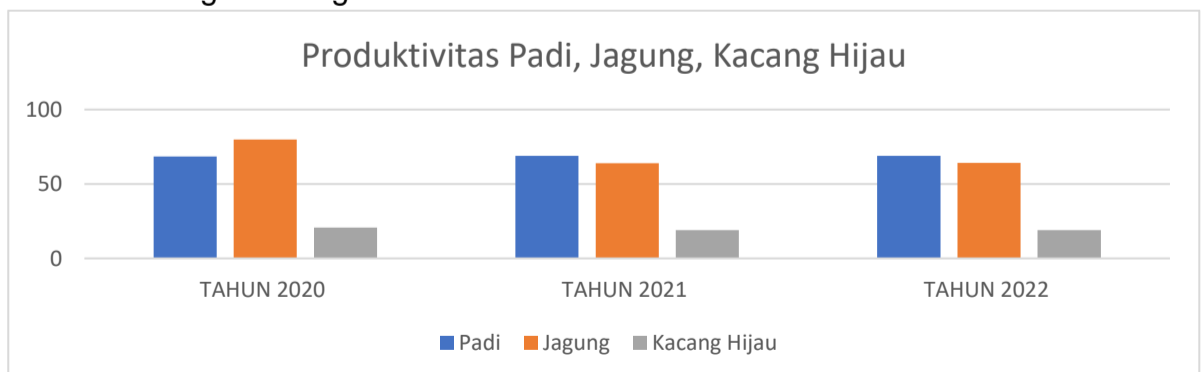
Produktivitas Pertanian

Perkembangan produktivitas pertanian sampai dengan tahun 2022, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

NO	TANAMAN PANGAN	TAHUN 2020 (Kw/Ha)	TAHUN 2021 (Kw/Ha)	TAHUN 2022 (Kw/Ha)
1	Padi	68,51	68,90	68,91
2	Jagung	79,87	64,03	64,12
3	Kacang Hijau	20,64	19,03	19,07
4	Kedelai	18,25	16,54	16,60
5	Sawi	105,11	105,12	105,13
6	Bayam	91,23	91,24	91,25
7	Kangkung	61,30	61,31	61,32
8	Tebu	749,00	749,42	750,52

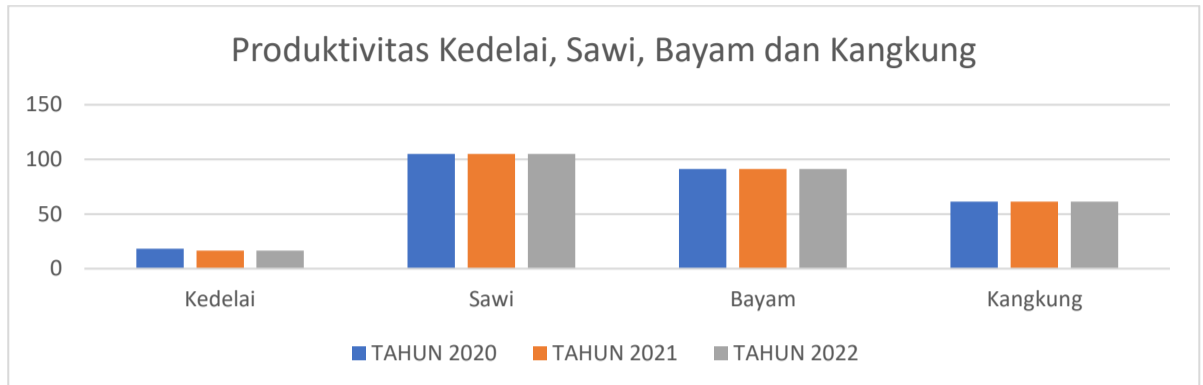
Sebagaimana tabel dimaksud, maka untuk tanaman padi, jagung, kacang hijau, kedelai, sawi, bayam dan kangkung mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2021.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produktivitas pertanian dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :





PRODUKTIVITAS	TAHUN 2020 (Kw/Ha)	TAHUN 2021 (Kw/Ha)	TAHUN 2022 (Kw/Ha)
Padi	68,51	68,90	68,91
Jagung	79,87	64,03	64,12
Kacang Hijau	20,64	19,03	19,07



PRODUKTIVITAS	TAHUN 2020 (Kw/Ha)	TAHUN 2021 (Kw/Ha)	TAHUN 2022 (Kw/Ha)
Kedelai	18,25	16,54	16,60
Sawi	105,11	105,12	105,13
Bayam	91,23	91,24	91,25
Kangkung	61,30	61,31	61,32

Perkembangan produktivitas pada tahun 2020 - 2022 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan pada beberapa komoditi baik tanaman pangan dan hortikultura. Peningkatan produktivitas yang terjadi pada komoditas tanaman pangan terjadi pada

1. Padi

Pada komoditas padi terjadi peningkatan sebesar 0,022 % atau sebesar 0,015 kw/ha dibanding tahun 2021. Hal yang mendukung peningkatan produktivitas tersebut antara lain :

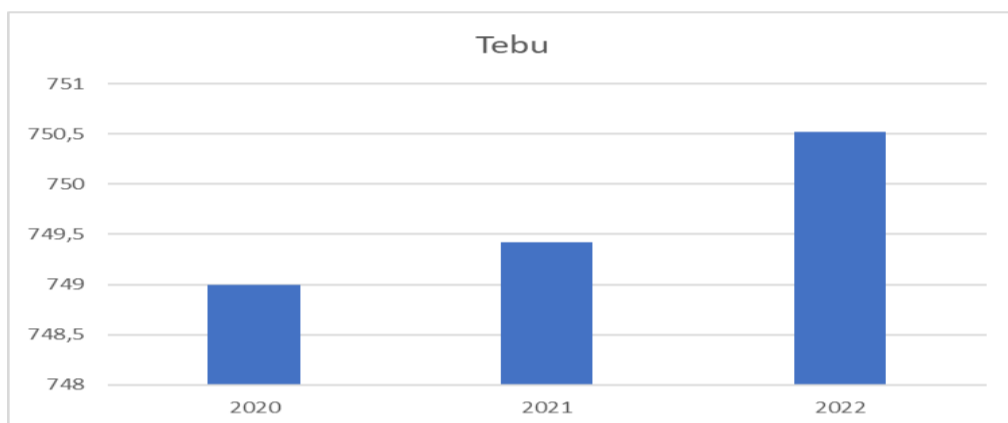
- Penggunaan varietas yang unggul dan bersertifikat serta berumur lebih pendek dari sebelumnya.
 - Bantuan Pemerintah baik melalui APBN dan APBD II berupa benih padi Inpari Zinc yang memiliki provitas lebih tinggi dan digunakan untuk penanganan stunting, serta benih padi berumur genjah/pendek sehingga akan mendukung peningkatan pertanaman padi.
 - Pengawasan intens oleh petugas pertanian dalam mengawal produksi dan produktivitas pada periode 2022 ini serta dukungan gerakan pengendalian OPT di seluruh wilayah kecamatan.
- Jagung, terjadi peningkatan sebesar 0,141 % atau sekitar 0,09 kw/ha. Hal ini didukung dengan bantuan benih APBD II dengan varietas unggul yaitu P36 dan banyaknya petani mulai melakukan pemanenan jagung pipil bukan lagi jagung sebagai sayuran.
 - Kedelai yaitu terjadi peningkatan sebesar 0,363 % atau sekitar 0,06 kw/ha. Kedelai pada musim tahun 2022 mengalami peningkatan karena adanya pelaksanaan musim tanam palawija termasuk kedelai yang tepat waktu dan harga panen kedelai pipil yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga hal tersebut menarik minat petani untuk menanam kedelai.
 - Kacang hijau terjadi peningkatan sebesar 0,210 % atau sekitar 0,04 kw/ha. Tanam tepat waktu yaitu sebelum musim hujan mendukung peningkatan provitas tersebut.



Kacang hijau terjadi peningkatan karena ada dukungan dari bantuan pemerintah APBN kegiatan Sarana Produksi Kacang Hijau pada tahun 2022 dan kacang hijau merupakan palawija yang masih diminati oleh petani.

5. Sawi, kangkung dan bayam memiliki peningkatan provitas sebesar 0,10 %, 0,11 % dan 0,11 % atau sekitar 0,011 kw/ha pada sawi, 0,01 kw/ha pada bayam dan kangkung. Peningkatan tersebut didukung adanya perluasan tanam di beberapa kecamatan yang sebelumnya belum pernah menanam sayuran.
6. Produktivitas tanaman tebu di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 tercapai 750,52 apabila dibandingkan dengan target yaitu 750,5 maka capaian 100%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 749,42 maka terdapat peningkatan angka 1,1. Peningkatan tersebut disebabkan oleh petani tebu sudah banyak melakukan budidaya sesuai petunjuk teknis yang dianjurkan.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



TAHUN	TAHUN 2020 (Kw/Ha)	TAHUN 2021 (Kw/Ha)	TAHUN 2022 (Kw/Ha)
Tebu	749	749.42	750.52

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu, antara lain :

- Penggunaan benih unggul dan bermutu
- Melakukan kegiatan bongkar ratoon
- Pengelolaan lahan dengan baik
- Pelaksanaan tanam tepat waktu
- Pemupukan dan pengairan yang cukup
- Hama dan penyakit tanaman yang terkendali

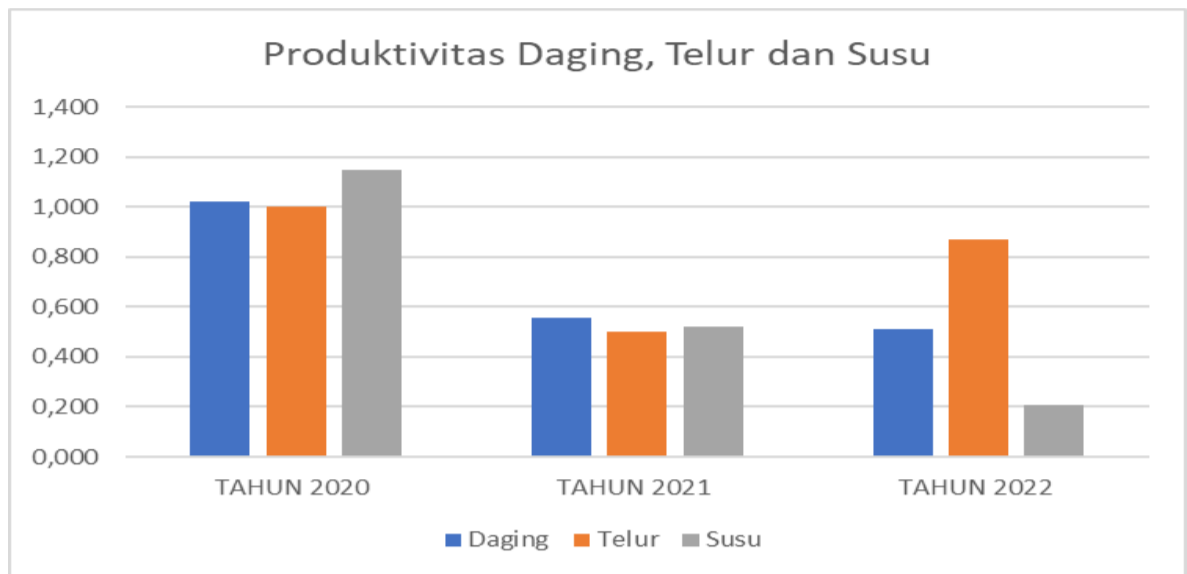
Produktivitas Perternakan

Perkembangan produksi pertanian sampai dengan tahun 2022, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

NO.	HASIL TERNAK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Daging	1,024	0,558	0,509
2	Telur	1,000	0,501	0,868
3	Susu	1,149	0,520	0,207



Sebagaimana tabel dimaksud, maka untuk produksi telur mengalami peningkatan produksi di tahun 2022. Namun, daging mengalami penurunan 0,0488% dikarenakan adanya wabah PMK, untuk susu mengalami penurunan 0,3132% di karenakan adanya wabah PMK sedangkan telur meningkat 0,3671%. Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produksi peternakan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



NO.	HASIL TERNAK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Daging	1,024	0,558	0,509
2	Telur	1,000	0,501	0,868
3	Susu	1,149	0,520	0,207

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

1. Penurunan Produksi populasi sapi potong, sapi perah, kambing, domba dampak wabah PMK karena kematian, potong paksa dan penjualan
2. Penurunan target produksi daging dan susu akibat wabah PMK dari 0,75% menjadi 0,5%
3. Sapi perah yang sembuh dari PMK masih belum bisa berproduksi seperti sebelum terkena PMK.
4. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu : Perlu dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi susu dengan pakan konsentrat

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi peternakan, yaitu :

- Memberikan pelayanan IB dan PKB ternak.
- Melaksanakan pelatihan budidaya ternak baik ternak besar maupun ternak kecil dan unggas.
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak.
- Memfasilitasi terhadap kebutuhan peternak melalui hibah.

Nilai lebih yang didapat dari peningkatan produksi hasil peternakan, yaitu :

- Ketersediaan bahan pangan asal hewani melalui peningkatan populasi.
- Kualitas bahan pangan asal hewani yang lebih baik
- Terbentuknya kelompok peternak yang lebih terampil dan meningkat pengetahuannya dalam melakukan budidaya ternak
- Tersedianya ternak yang berkualitas

**Upaya yang dilakukan Urusan Pertanian :**

- Pelaksanaan *Corporate Farming* dikembangkan dengan sasaran mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan dalam menjalankan roda ekonomi pedesaan dan membantu peningkatan produksi;
- Pelaksanaan *Urban Farming* dengan kegiatan penanaman tanaman hortikultura sebagai alternatif budidaya untuk lahan-lahan yang kurang produktif.
- Telah dilakukan kesepakatan bersama Penyerapan Gula Petani Tebu di Kabupaten Sidoarjo pada periode giling tahun 2022 oleh PT.Indomarco Prismatama (Indomaret) sesuai dengan kesepakatan para pihak, dalam hal kualitas, kuantitas dan harga. Realisasi penjualan gula dengan PT Indomarco Prismatama sebesar 150 Ton.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		%	%		
	Produktivitas Pertanian :	Padi	0,015	0,020	- Adanya serangan OPT dan dampak perubahan iklim	- Gerakan pengendalian OPT yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian, POPT dan Kelompok Tani - Meningkatkan koordinasi dengan BMKG terkait cuaca di Kabupaten Sidoarjo
		Jagung	0,100	0,140		
		Kacang Hijau	0,200	0,210		
		Kedelai	0,200	0,360		
		Sawi	0,010	0,010		
		Bayam	0,010	0,011		
		Kangkung	0,010	0,011		
	Produktivitas Perkebunan :	Tebu	0,100	0,150		
	Produktivitas Peternakan :	Daging	0,500	0,509	- Adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak (Sapi dan Kambing) sehingga berdampak pada penurunan produktivitas daging dan susu	- Dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak - Dilakukan pengawasan lalu lintas ternak - Dilakukan <i>biosecurity</i> kandang ternak
		Telur	0,750	0,868		
		Susu	0,500	0,207		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Peternakan (susu,daging, telur)	35.973.000 Kg	40.177.438 Kg	- Adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak (Sapi dan Kambing) sehingga berdampak pada penurunan produktivitas daging dan susu	- Dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak - Dilakukan pengawasan lalu lintas ternak - Dilakukan <i>biosecurity</i> kandang ternak
		Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	426,37 Kw/Ha	426,40 Kw/Ha		



		Produktivitas Tanaman Tebu	750,5 Kw/ha	750,52 Kw/ha		Kelompok Tani - Meningkatkan koordinasi dengan BMKG terkait cuaca di Kabupaten Sidoarjo
		Prosentase peningkatan populasi ternak besar dan kecil	0,75%	0%	- Adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak (Sapi dan Kambing)	- Dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak - Dilakukan pengawasan lalu lintas ternak - Dilakukan biosecurity kandang ternak
		Prosentase penyaluran pupuk bersubsidi	94,2	95,85	Nihil	Nihil
2	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luasan lahan yang mendapatkan pengawasan (Ha)	18.600	18.728	Nihil	Nihil
		Jumlah luasan lahan yang mendapatkan dukungan sarana pertanian (Ha)	350	350	Nihil	Nihil
3	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak	111.000	105.869	- Adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak (Sapi dan Kambing)	- Dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak - Dilakukan pengawasan lalu lintas ternak - Dilakukan biosecurity kandang ternak
		Jumlah kelompok ternak yang dibina	2	2	Nihil	Nihil
4	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah kegiatan pengawasan obat hewan di Kabupaten Sidoarjo	24	24	- Anggaran difokusing	- Anggaran difokusing
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	82%	90%	Nihil	Nihil
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pendukung pertanian dalam kondisi baik	10 Unit	10 Unit	Nihil	Nihil
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana Pertanian	2 Unit	2 Unit	Nihil	Nihil
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	85	86,85	Nihil	Nihil



		Prosentase hewan yang mendapatkan Tindakan penjaminan Kesehatan hewan	20%	20%	Nihil	Nihil
		Prosentase unit usaha yang telah menghasilkan produk pangan dan non pangan asal hewan yang dinyatakan asuh	5%	5%	Nihil	Nihil
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan ternak yang telah mendapatkan penjamin Kesehatan hewan	49.000	49.000	Nihil	Nihil
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	350 Sampel	353 Sampel	Nihil	Nihil
		Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	430 Ekor	430 Ekor	Nihil	Nihil
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang didampingi dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	Nihil	Nihil
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan penerapan, pengawasan teknis kesejahteraan hewan	2 RPH 8 RPU	2 RPH 8 RPU	Nihil	Nihil
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura	11%	32,14%	- Meningkatnya serangan OPT di berbagai wilayah Kab. Sidoarjo	- Melakukan gerakan pengendalian secara serempak bersama Dinas Pertanian, POPT dan Kelompok Tani - Meningkatkan koordinasi antara petugas pertanian dengan petani terkait serang OPT - Meningkatkan pengendalian hama secara terpadu
		Prosentase lahan tanaman yang terkendali dari serangan	8%	12,45%		



		hama dan penyakit pada perkebunan				
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dikendalikan dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	3.300 Ha	9.640,50 Ha		
		Luas lahan yang dikendalikan dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	320 Ha	489,10 Ha		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.835.994.391,00	28.468.303.253,00	95,42%
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.669.922.730,00	3.474.893.826,00	94,69%
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.080.346.296,00	2.743.019.226,00	89,05%
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.489.113.847,00	1.480.069.696,00	99,39%
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	381.154.245,00	351.327.148,00	92,17%
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	913.914.216,00	800.095.420,00	87,55%

Urusan Pariwisata

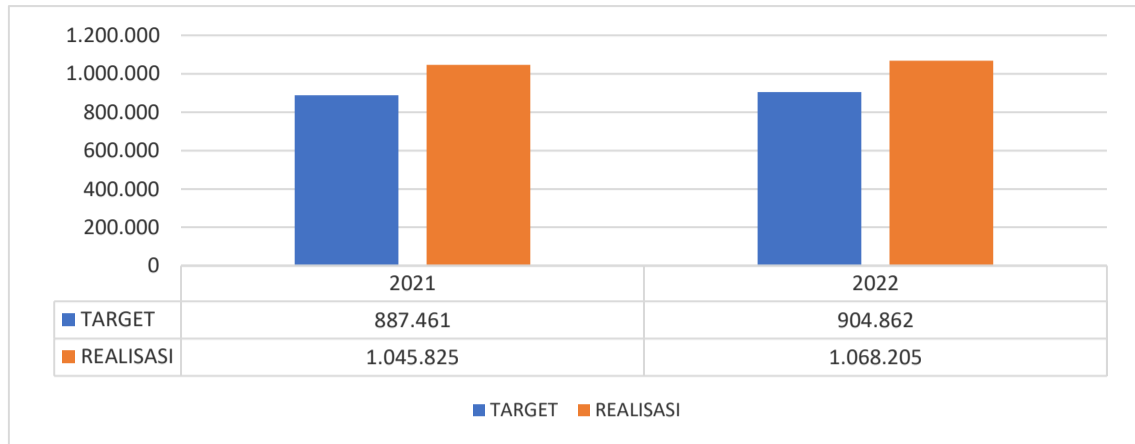
Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kunjungan wisatawan	904.862 Orang	1.068.205 Orang	118,05
2	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	2 Hari	200

Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.068.205 orang dari target orang atau capaian 118,05%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 1.045.825 orang maka terdapat peningkatan angka 22.380.

Adapun tren jumlah kunjungan wisatawan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :

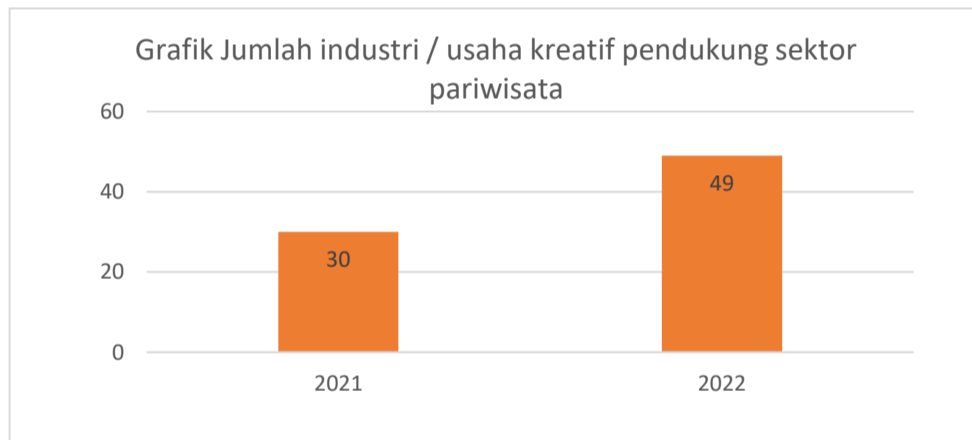


Adapun upaya yang dilakukan agar kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, yaitu :

- Pengembangan obyek wisata dan destinasi agar lebih menarik
- Meningkatkan promosi pariwisata dengan membuat even lomba vlog serta pembuatan video promosi pariwisata
- Mengikuti event pariwisata dengan melibatkan UMKM sektor pariwisata.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata adalah dengan meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 49 industri kreatif yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

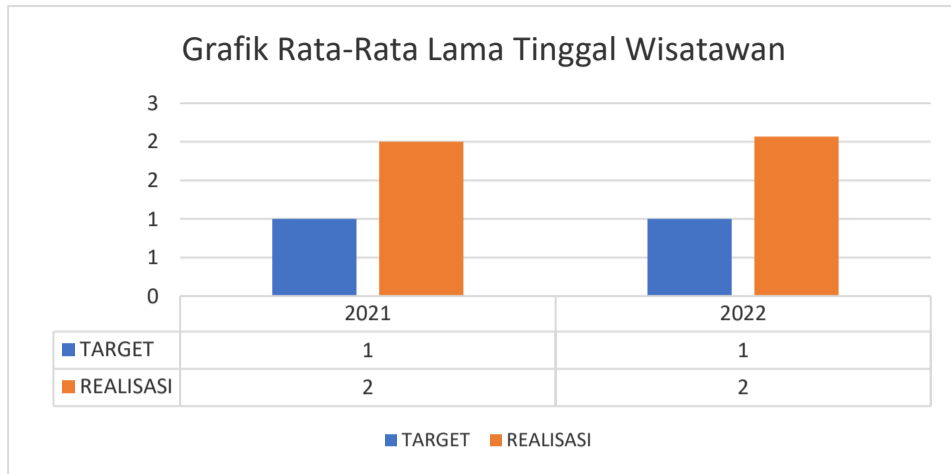
Adapun tren dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 adalah 2 hari dari target 1 hari atau capaian 200%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 selama 2 hari maka tidak ada peningkatan yang signifikan.

Adapun tren rata – rata lama tinggal wisatawan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang dilakukan agar rata-rata lama tinggal wisatawan dapat terus meningkat, yaitu Penyelenggaraan even budaya di malam hari serta melakukan pembinaan serta pelatihan kepada pelaku pariwisata guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempromosikan wisata pada event olahraga yang diselenggarakan.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	2 Hari	2 Hari		
		Jumlah kunjungan wisatawan	1.055. 825	1.068.205	Belum ada event dan objek wisata di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki daya tarik / diferensiasi yang tinggi	Penyumbang terbesar obyek wisata adalah sektor olahraga, sehingga GOR Delta Sidoarjo perlu perbaikan sarana prasarana yang memadai agar dapat menyelenggarakan event yang besar

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	904.862,00	1.067.525		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	3	3		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	1	1		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	1	1		



2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	1	2		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	2	2		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata	25	25		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	135	135		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.297.342.430,00	1.265.701.830,00	97,56%
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	120.750.000,00	118.182.700,00	97,87%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	560.402.626,00	513.012.321,00	91,54%

Urusan Industri

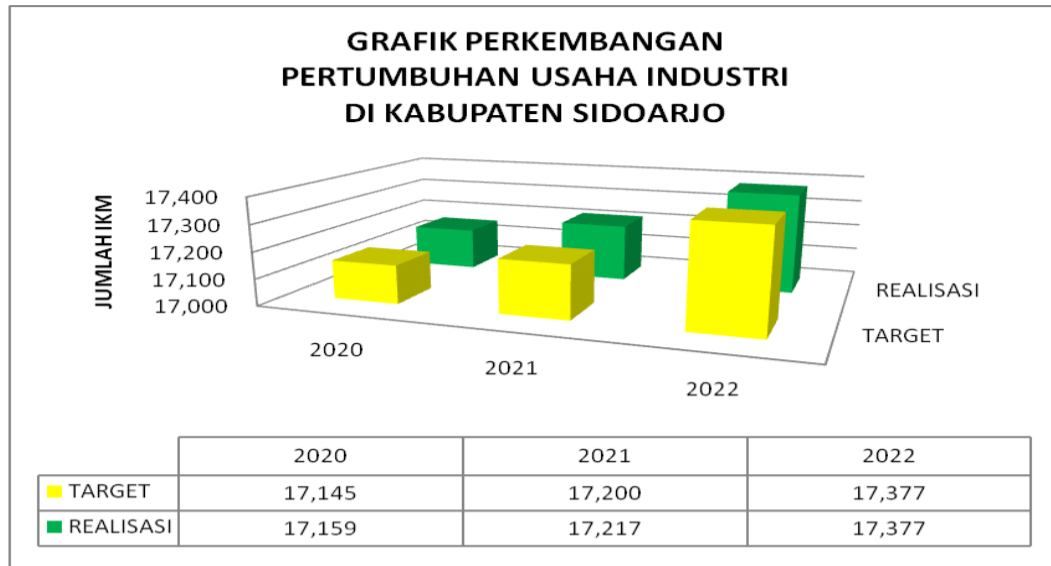
Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	IKM Naik kelas	300 IKM	300 IKM	100%
2	Persentase pertumbuhan usaha industri	0.93%	0.93%	100%

Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

Capaian kinerja **Persentase Pertumbuhan Usaha Industri** pada tahun 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 0.93% atau sebanyak 160 IKM dari target 0.93% atau sebanyak 160 IKM. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 100%. hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan IKM dan memberikan rekomendasi verifikasi teknis pengurusan perizinan usaha industri.

Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebanyak 17.377 unit/usaha. Jumlah ini meningkat 160 unit/usaha atau meningkat sebesar 0.93 persen dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2021 yang sebanyak 17.217 unit/usaha.



Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu :

- Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
- Memetakan pembangunan / pembentukkan *cluster* baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka klestarian produk dan menaikkan omzet;
- Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

IKM naik kelas

IKM naik kelas adalah upaya yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong dan meningkatkan IKM agar mampu meningkatkan penjualan dan atau modal menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada tahun 2022, IKM Naik kelas sebanyak 300 IKM, apabila dibandingkan dengan target 300 IKM, maka tercapai 100%





Upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas, yaitu :

- Fasilitasi pelatihan desain produk, sertifikasi produk, inovasi produk, dan sistem manajemen mutu produk bagi IKM;
- Fasilitasi Standarisasi Produk IKM.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	IKM Naik Kelas	300 IKM	300 IKM		
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	0,93%	0,93%		
2	Meningkatnya UMKM yang naik kelas	Jumlah UMKM yang naik kelas	650 UMKM	650 UMKM		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan	2,00%	2,32%		
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	100,00%	100,00%		
		Jumlah indikator pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	5 Indikator	5 Indikator		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terstandarisasi	285 IKM	297 IKM		
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	0,17%	0,21%		
		Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/ dikeluarkan	35 Rekomendasi	35 Rekomendasi		
3	Program Pengelolaan Sistem	Persentase Database IKM yang Terupdate	0,46%	0,74%		



	Informasi Industri Nasional					
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang diupdate datanya	120 IKM	129 IKM		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.433.830.501,00	25.702.596.227,00	97,23%
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.570.656.305,00	3.233.717.155,00	90,56%
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	86.400.000,00	82.200.000,00	95,14%
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90%

Urusan Perdagangan

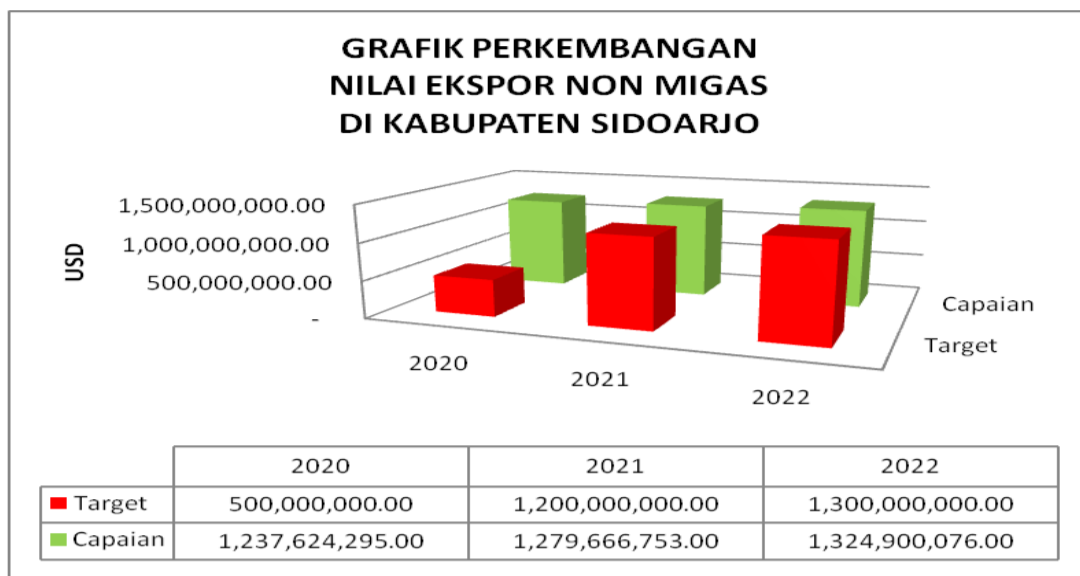
Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Pertumbuhan ekspor non migas	USD 1.300.000.000	USD 1.324.900.076	101,92%
2	Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang	0,5%	23,74%	4.748%
3	Nilai SKM terhadap layanan pasar	77	95,89	124,53%

Pertumbuhan ekspor non migas

Nilai Ekspor Non Migas Daerah Tahun 2022 sebesar USD 1.324.900.076 Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2022, maka capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 101,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar USD 1.300.000.000

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021, maka capaian kinerja Tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar 3,53% dari capaian 2021 sebesar USD 1.279.666.753.



Hal-hal yang mengakibatkan dampak peningkatan Ekspor Non Migas adalah sebagai berikut :

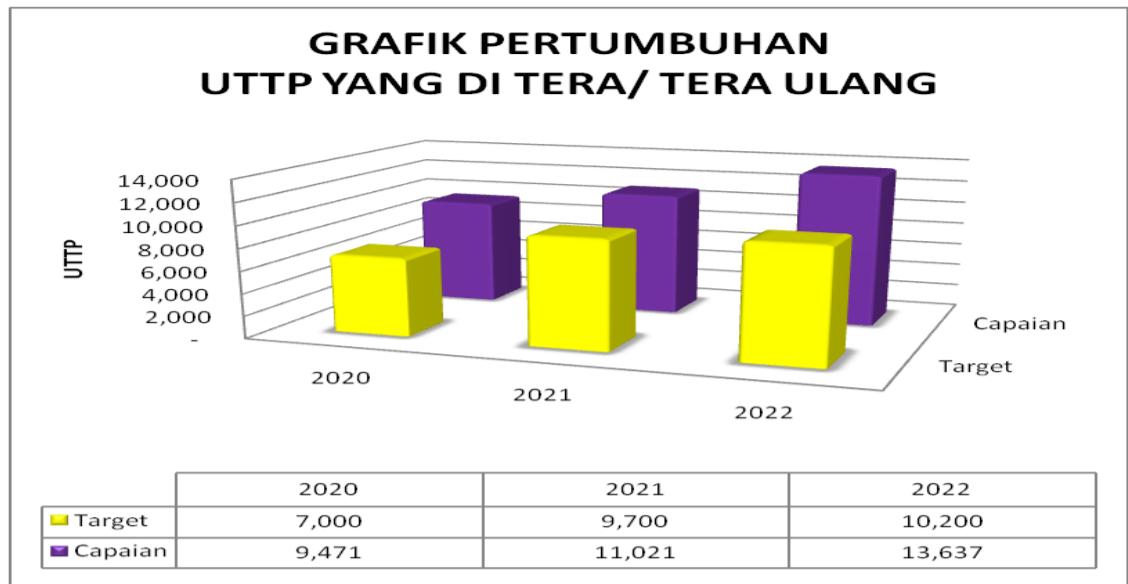
1. Meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan
2. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor
3. Melaksanakan/program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
4. Pendampingan IKM dalam memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) IKM

Upaya optimalisasi pencapaian target kinerja meningkatkan ekspor:

- Melakukan Pameran dagang ditingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo;
- Melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM yang berorientasi Ekspor;
- Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan ekspor;
- Memberikan pelatihan ekspor bagi UKM/IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor

Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang

Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang Tahun 2022 sebesar 23,74% Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2022, maka capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 4.748% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,5%. Dapat diketahui bahwa realisasi UTTP Tera/ Tera Ulang Tahun 2022 sebesar 13.637 UTTP atau meningkat sebesar **23,74%** apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 11.021 UTTP.



Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pasar

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar. Dinamakan dengan UPTD Pasar Daerah yang terbagi atas 4 (empat) Wilayah, antara lain :

- Wilayah Sidoarjo
- Wilayah Porong
- Wilayah Taman
- Wilayah Krian

Pada Tahun 2022, hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar mendapatkan hasil **95,89 (sangat baik)**. Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar.

Salah satu aspek yang dijadikan tolak ukur adalah perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat yang masuk dalam 44 kriteria pasar SNI, yaitu :

1	Jumlah Pedagang yang terdaftar	23	Tinggi anak tangga
2	Ukuran luas ruang dagang	24	Tinggi meja tempat berjualan
3	Jumlah pos	25	Akses untuk kursi roda
4	Zonasi	26	Jalur evakuasi
5	Area parkir	27	Tabung pemadam kebakaran
6	Area bongkar muat barang	28	Hidran air
7	Akses keluar masuk kendaraan	29	Pengujian kualitas air bersih
8	Lebar koridor	30	Pengujian limbah cair
9	Kantor pengelola	31	Ketersediaan tempat sampah



10	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara laki2 dan perempuan)	32	Alat angkut sampah
11	Jumlah toilet pada satu lokasi	33	TPS sementara
12	Tempat menyimpan bahan pangan basah	34	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
13	Tempat cuci tangan	35	Sarana telekomunikasi
14	Ruang menyusui	36	Informasi identitas pedagang
15	CCTV	37	Informasi kisaran harga
16	Ruang peribadatan	38	Informasi zonasi pasar
17	Ruang bersama	39	Prosedur kerja / sop
18	Pos kesehatan	40	Struktur pengelola
19	Pos keamanan	41	Jumlah pengelola
20	Area merokok	42	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
21	Ruang disinfektan	43	Program pengembangan pasar
22	Area penghijauan	44	Program pemberdayaan komunitas pasar

Dari 44 parameter kriteria Pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat di Tahun 2020 terdapat 1 pasar yang ditetapkan sebagai Pasar SNI yaitu Pasar Sukodono, dan 2 pasar lainnya yang berparameter sangat tinggi adalah Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya pembenahan pasar kearah pasar dengan para meter tinggi dan sangat tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna pasar.

Pemenuhan Kriteria Pasar SNI

No	Kriteria Pemenuhan Target SNI Tahun	Jumlah Pasar	Rendah (10 Indikator)	Sedang (11-20 Indikator)	Tinggi (21-30 Indikator)	Potensi Sangat Tinggi (31-44 Indikator)
1	2019	19	0	10	6	3
2	2020	19	0	10	6	3
3	2021	19	0	10	6	3
4	2022	19	0	10	6	3

Pasar rakyat dengan parameter rendah adalah pasar rakyat yang memenuhi Kriteria Pasar SNI 1-10 indikator. Pasar Rakyat dengan Parameter sedang adalah pasar yang memenuhi 11-20 Kriteria Pasar SNI. Pada Tahun 2021 terdapat 10 Pasar yang berada pada parameter sedang. Pasar Rakyat dengan Parameter tinggi adalah pasar yang memenuhi 21-30 Kriteria Pasar SNI, pada Tahun 2021 terdapat 6 pasar yang berparameter tinggi. Sedangkan pasar yang berpotensi sangat tinggi adalah pasar rakyat yang memenuhi kriteria Pasar SNI sebanyak 31-44 Kriteria Pasar SNI, dan pada Tahun



2021 terdapat 3 pasar yang berparameter sangat tinggi yaitu Pasar Sukodono, Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka SKM layanan pasar meningkat:

1. Optimalisasi tertib pasar, keamanan dan kebersihan pasar dalam rangka memberikan kenyamanan pasar bagi para penjual dan pembeli;
2. Peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan
3. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Daya Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	USD 1.300.000.000	USD 1.324.900.075,54		
		Persentase Peningkatan UTTP yang di Tera/Tera Ulang	0.5 %	23,74%		
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	77	95,89		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	<9	0,6		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	80,00%	90,88%		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok yang terupdate harga dan stoknya	15 Produk	15 Produk		
		Persentase operasi pasar yang terealisasi dalam satu tahun	100,00%	100,00%		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan pestisida bersubsidi yang tersalurkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan	5 Jenis	5 Jenis		
2	Program Pengembangan Ekspor bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Non Migas	USD 1.300.000.000	USD 1.324.900.076		
		Persentase produk unggulan yang difalitisasi ekspor melalui promosi dan misi dagang	5,00%	5,00%		



		Persentase produk unggulan yang difasilitasi dengan mitra strategis perdagangan	5,00%	5,00%		
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang terstandarisasi	95,00%	163,80%		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan ditera ulang dalam tahun berjalan/tahun berkenaan	2,00%	2,00%		
		Persentase UTTP yang terawasi	10,00%	10,00%		
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar SNI	15,78%	15,78%		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang memenuhi 50% kriteria SNI	4	4		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar dengan kategori pelayanan baik	2	18		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.500.489.263,00	12.394.359.216,00	99,15%
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	812.300.000,00	806.790.500,00	99,32%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.578.874.230,00	2.498.886.566,00	96,90%
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	603.521.575,00	569.975.540,00	94,44%



2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	56%	61%	TERCAPAI	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang berijin	100%	100%	TERCAPAI	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	27 per 100.000 penduduk	27 per 100.000 penduduk	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase balita stunting yang ditangani (TB/U atau PB/U);	100%	100%	TERCAPAI	
		2. Persentase Desa/Kelurahan UCI	89%	97,7%	TERCAPAI	
		3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;	> 90%	89%	TERCAPAI	
		4. Persentase Desa ODF;	56%	55,97%	TERCAPAI	
		5. Persentase populasi usia 15-59 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM;	100%	87,91%	Pada dasarnya yang menjadi target sasaran adalah data proyeksi, yang mana dalam penemuan di lapangan bisa saja capaiannya lebih atau kurang. Puskesmas dengan posbindu PTMnya, selalu aktif melakukan layanan kesehatan termasuk skrining kesehatan untuk usia 15 – 59 tahun. Namun karena posbindu PTM buka pada hari-hari efektif, sehingga masih banyak sasaran yang belum ditemukan.	Puskesmas terus bergerak mencari sasaran dengan mengadakan kegiatan posbindu PTM di instansi-instansi pemerintahan.
		6. Presentase Puskesmas yang memiliki akreditasi minimal madya;	70%	70%	TERCAPAI	
		7. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan;	95%	98,86%	TERCAPAI	
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	60%	60%	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1. Persentase Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai	78%	82%	TERCAPAI	



		standar di Puskesmas (akumulasi 60 % sesuai ASPAK)				
		2. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan obat sesuai perencanaan	90%	90%	TERCAPAI	
		4. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1 : 77.384	1 : 77.384	TERCAPAI	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan kelas C dan D memiliki izin operasional;	100%	100%	TERCAPAI	
		2. Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	92%	93,40%	TERCAPAI	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	97,50%	97,50%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS	63%	63%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu PURI	75%	85,92%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/tersertifikasi	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1	Jumlah izin edar yang dikeluarkan untuk perusahaan perbekalan kesehatan rumah tangga Alkes / PKRT kelas tertentu	10	10	TERCAPAI	



	Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100%	100%	TERCAPAI	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah yang tercukupi Kebutuhan SDM (ASN) Kesehatannya	75%	75%	TERCAPAI	
	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	95	99,75		
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan medik yang mencapai target	85	81,48	Terdapat beberapa SPM Bidang Pelayanan Medik yang tidak mencapai target antara lain: IGD, rawat inap, persalinan perinatologi dan KB, pelayanan intensif, PPI, dan rekam medik	
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60	68,42		
		Average Length of Stay (ALOS)	3	4,2		
		Turn Over Interval (TOI)	1	1,9		
		Bed Turn Over (BTO)	50	59,9		
		Net Death Rate (NDR)	45	37,1		



		Gross Death Rate (GDR)	70	67,7		
		Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medik dan Non Medik yang mencapai target	100	90,63	Terdapat 2 SPM yang tidak mencapai target yaitu farmasi dan ambulance jenazah	
		Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target	100	80	Terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target dari Subbag Pendidikan dan Pelatihan yaitu Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	
		Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90	100		
		Persentase diselesaikannya penelitian	80	100		
		Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26	94,54		
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100	100		
		Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	100	75	1 SPM belum mencapai target di Subbag Perbendaharaan yaitu Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	
		Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	100	100		
		Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)	$\leq 0,02$	0,05	Beberapa pengadu tidak dapat dikonfirmasi pada hari yang sama sesuai dengan waktu pelaporan, sehingga tindaklanjut pengaduan baru dapat ditangani lebih dari 1 x 24 jam kerja (namun tidak	



					lebih dari 3 x 24 jam kerja).	
	KEGIATAN: PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase elemen penilaian Tata Kelola Rumah Sakit yang memenuhi standar (TKRS, MFK, KPS, PMKP, PPK, PKPO)	95	99,86		
		Persentase elemen penilaian Tata Kelola Klinis I yang memenuhi standar (AKP, PP, PAP, PAB, PROGNAS)	95	100		
		Persentase elemen penilaian Tata Kelola Klinis 2 yang memenuhi standar (MRMIK, PPI, HPKK, KE, SKP)	95	99,35		
		Persentase indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target	85	71,4	2 Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat dan Kematian pasien ≤24 jam di Gawat Darurat	
		Persentase indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan rekam medik yang mencapai target	85	50	Ada 2 indikator SPM tidak tercapai yaitu kelengkapan berkas rekam medik dan kelengkapan berkas informed consent	
		Persentase perolehan pasien baru (Customer Acquisition)	2	2,3		
		Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)	75	98,06		
		Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target	85	84,61	3 indikator SPM tidak tercapai yaitu Jam visite Dokter Spesialis, Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian, dan Kematian pasien >48 jam	
		Persentase indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target	85	66,7	3 indikator SPM tidak tercapai yaitu Kejadian kematian Ibu karena persalinan sepsis, Kemampuan menanggapi BBLR	



					1500 gr-2500 gr, dan Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	
		Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target	85	66,7	Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Pemberi pelayanan Unit Intensif perawat minimal D3 dan ≥50 perawat dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara D4 belum 100% tersertifikasi	
		Persentase indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target	85	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target	85	66,7	Indikator SPM yang tidak tercapai yaitu Jumlah anggota tim PPI yang sudah terlatih belum mencapai 75%	
		Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP)	70	70		
		Persentase komponen Laporan Analisa Rawat Inap yang telah dilaporkan secara berkala	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target	100	60	2 indikator SPM belum memenuhi target yaitu Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	
		Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target	100	66,67	SPM Kecepatan memberikan pelayanan ambulance jenazah belum memenuhi target dikarenakan	



					kekurangan tenaga driver ambulance	
		Persentase indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target	100	100		
		Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Jalan dan Khusus	4	4		
		Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Inap	4	4		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target	100	100		
		Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama di bidang pelayanan kesehatan	20	38		
		Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama di bidang non pelayanan kesehatan	24	25		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian SDM yang mencapai target	100	100		
		Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan yang mencapai target	100	75,8	Di Subbag Diklat terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target yaitu Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	
		Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun	55	63,2		



	Persentase parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur	100	100		
	Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan	100	100		
	Opini Laporan Keuangan	WTP	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Perbendaharaan yang mencapai target	100	91,67	Di Subbag Perbendaharaan terdapat 1 SPM yang tidak mencapai target yaitu Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	
	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target	100	100		
	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Elektromedik Rumah Sakit yang mencapai target	100	100		
	Persentase Laporan Pengelolaan Dokumen Aset yang telah disusun	100	100		
	Penyusunan laporan number of complain	100	100		
	Penyusunan draft rancangan Peraturan Direktur	90	90		



	Penyusunan draft rancangan Keputusan Direktur	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang non klinis (perusahaan)	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang klinis (non perusahaan)	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang institusi pendidikan	90	90		
	Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang manajerial	90	90		
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	100		
	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26	94,54		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.446.080.682,00	244.323.590.277,26	97,56%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	295.491.667.554,00	264.534.983.608,00	89,52%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.452.616.500,00	16.589.120.409,00	85,28%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	467.596.495,00	421.093.242,00	90,05%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.338.322.225,00	4.252.028.740,00	79,65%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	644.800.797.308,00	525.699.873.677,00	81,53%

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	95,05%	100,05%



2	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%	105,66%
3	Persentase luasan genangan / banjir tertangani	80,51%	82%	101,85%
4	Persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan	86,5	83,33	96,34

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.021, 373 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
622,747 km	348,046 km	36,112 km	14,468 km
60,972%	34,076%	3,536%	1,417%

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2022 adalah 95,05% dari target 95% sehingga tercapai 100,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 91,93% maka terdapat peningkatan sekitar 3,12 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap.

Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		km	95,05%	km	4,95%
1	Jabon	65,366		8,785	
2	Tanggulangin	66,047		5,767	
3	Sidoarjo	62,353		0,067	
4	Candi	67,589		1,306	
5	Buduran	55,192		0,328	
6	Gedangan	51,853		1,084	
7	Porong	42,906	5,462		



8	Tulangan	76,775		0,000	
9	Krembung	43,559		9,436	
10	Prambon	52,964		5,427	
11	Tarik	52,456		3,160	
12	Balongsendo	45,320		2,770	
13	Krian	79,365		0,000	
14	Taman	34,703		1,890	
15	Wonoayu	49,853		2,013	
16	Sukodono	51,723		1,617	
17	Waru	38,837		0,408	
18	Sedati	33,936		1,060	
	TOTAL	970,793		50,580	

Pada tahun 2022 dilakukan betonisasi jalan sepanjang 23.302 meter dan pembangunan frontage road 3.003,9 meter, diantaranya :

1. Ruas Jalan Pawindo – Jaticalang sepanjang 639,00 m
2. Ruas Jalan Tulangan – Kepadangan, Kepadangan – Bulang, Simpang Tiga Tulangan sepanjang 6.335,00 m
3. Ruas Jalan Betro - Kalanganyar (DAK) sepanjang 922,40 m
4. Ruas Jalan Pilang - Tulangan sepanjang 1.020,10 m
5. Ruas Jalan Kebonagung - Kemasan sepanjang 5.099,50 m
6. Ruas Jalan Pabean - Wadungarisepanjang 532,00 m
7. Ruas Jalan Krian - Kemangsen sepanjang 476,20 m
8. Ruas Jalan Pabean - Ngingas sepanjang 835,00 m
9. Ruas Jalan Wonoayu - Candinegoro sepanjang 875,00 m
10. Ruas Jalan Panjunan - Suko (DAK) sepanjang 1.855,60 m
11. Ruas Jalan Panjunan - Suko sepanjang 556,00 m
12. Ruas Jalan Krembung - Kepadangan sepanjang 469,80 m
13. Ruas Jalan Semambung - Sedatigede (Ljt) sepanjang 302,50 m
14. Ruas Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (Ljt) sepanjang 217,40 m
15. Ruas Jalan Durungbedug - Sidodadi sepanjang 887,20 m
16. Jalan Akses Ex Tol Menuju Tlocor sepanjang 150,36 m
17. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Frontage Road Waru - Buduran (Ljt) sepanjang 576,9 m
18. Ruas Jalan Sidorejo - Barengkrajan sepanjang 1.969,00 m
19. Ruas Jalan Desa Tambak Sawah RT.03 RT.04 Rw.02, Kab. Sidoarjo, Waru, Tambaksawah sepanjang 502,00 m
20. Ruas Jalan Masanganwetan Menuju Dusun Wagir, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Masanganwetan sepanjang 133,00 m
21. Ruas Jalan Sepanjang Jalan RT 13, 14, 15, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 118,75 m



22. Ruas Jalan Sepanjang Jalan Suko RT 15 RW 05, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 105,00
23. Pembangunan Gorong-Gorong Desa Kali Tengah RT.01 RW.01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah sepanjang 205,00 m
24. Jalan Desa Tulangan-Medalem, Kab. Sidoarjo, Tulangan, Tulangan, Seluruh Kelurahan/Desa sepanjang 318,30 m
25. Jalan Dusun Sangangewu RT 04 RW 01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin sepanjang 183,50 m
26. Jalan Masanganwetan RT 03 Menuju Masangankulon, Kab. Sidoarjo, Masanganwetan sepanjang 81,40 m
27. Jalan Ngingas, Waru sepanjang 924,00 m
28. Ruas Jalan Gedangan - Betro sepanjang 531,00 m

Selain itu juga telah dilakukan penggantian 4 buah jembatan, yaitu :

1. Jembatan Ds. Banjarkemantren
2. Jembatan Dsn. Sidomukti RT. 07 RW. 02 Ds. Kraton Krian
3. Jembatan Raya Tropodo dengan Perbatasan Pabean Sedati
4. Jembatan Durungbanjar

serta dilakukan Rehabilitasi Jembatan, yaitu :

1. Pemeliharaan Jembatan Plumbungan
2. Rehabilitasi Jembatan Krembung

Adapun upaya yang telah dilakukan agar jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

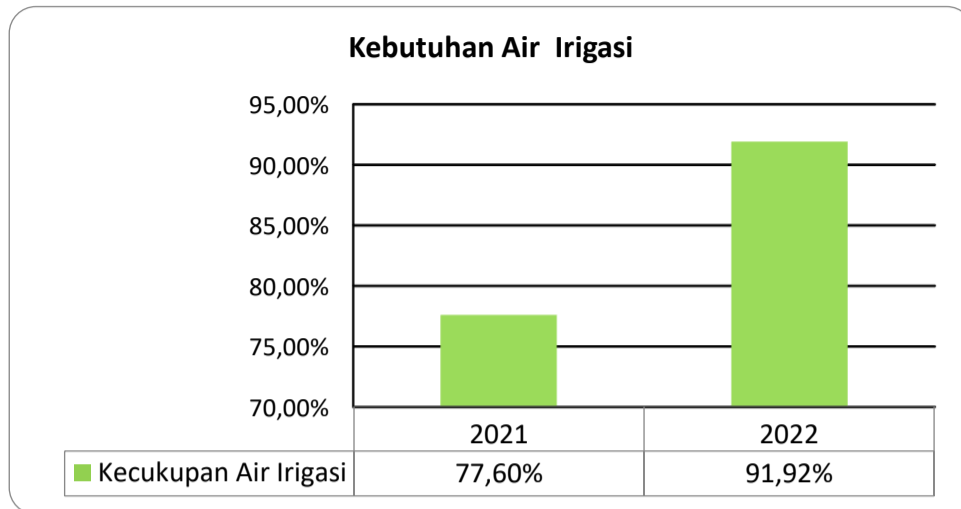
1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan tahun 2022 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.583 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.898 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2022 adalah 106% dari target 87% atau tercapai 91,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 77,60% maka terdapat peningkatan 14,32%.



Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah :

- DI Lintas Provinsi diatas 3000 Ha adalah Pemerintah.
- DI Lintas Kab. diatas 1000 – 3000 Ha adalah Pemerintah Provinsi.
- DI berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Luas daerah kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2022 adalah sepanjang 3.898 Ha sebagai berikut :

NO	DAERAH IRIGASI KEWENANGAN	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS BAKU SAWAH YANG ADA (Ha)	LUAS BAKU SAWAH YANG DIAIRI (Ha)	PENGAMBILAN AIR	WILAYAH UPTD
1	Pemerintah Pusat > 3000 Ha	D.I. Delta Brantas	17,317	17,317	Kali Brantas	UPTD : Sumput, Porong, Trosobo, Prambon
		JUMLAH	17,317	17,317		
2	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo < 1000 Ha	D.I. Kedunguling Kiri	295	240	Afvoer Kedunguling	UPTD Sumput
		D.I. Kedunguling Kanan	654	647	Afvoer Kedunguling	UPTD Sumput
		D.I. Bader	375	252	Afvoer Bader	UPTD Sumput
		D.I. Bulubendo	59	59	Afvoer Bulubendo	UPTD Sumput
		D.I. Buntung	62	59	Afvoer Buntung	UPTD Sumput
		D.I. Kalidawir	440	411	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
		D.I. Gedek	140	140	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
		D.I. Kedungpandan	233	233	Kali Bangil Tak	UPTD Porong
		D.I. Wilayat II	207	183	Afvoer Wilayat	UPTD Sumput
		D.I. Kali Pucang	207	174	Afvoer Pucang	UPTD Sumput
		D.I. Bahgepuk	341	341	Afvoer Bahgepuk	UPTD Porong
		D.I. Kragan	30	30	Afvoer Kragan	UPTD Sumput



	D.I. Jomblong	42	42	Afvoer Jomblong	UPTD Sumpat
	D.I. Karangbong I	86	86	Afvoer Karangbong	UPTD Sumpat
	D.I. Karangbong II	124	124	Afvoer Karangbong	UPTD Sumpat
	D.I. Wilayat I	29	29	Afvoer Wilayat	UPTD Trosobo
	D.I. Jatianom	417	376	Afvoer Jatianom	UPTD Porong
	D.I. Kedungan	157	157	Afvoer Kedungan	UPTD Porong
	JUMLAH	3,898	3,583		
	TOTAL	21,215	20,900		

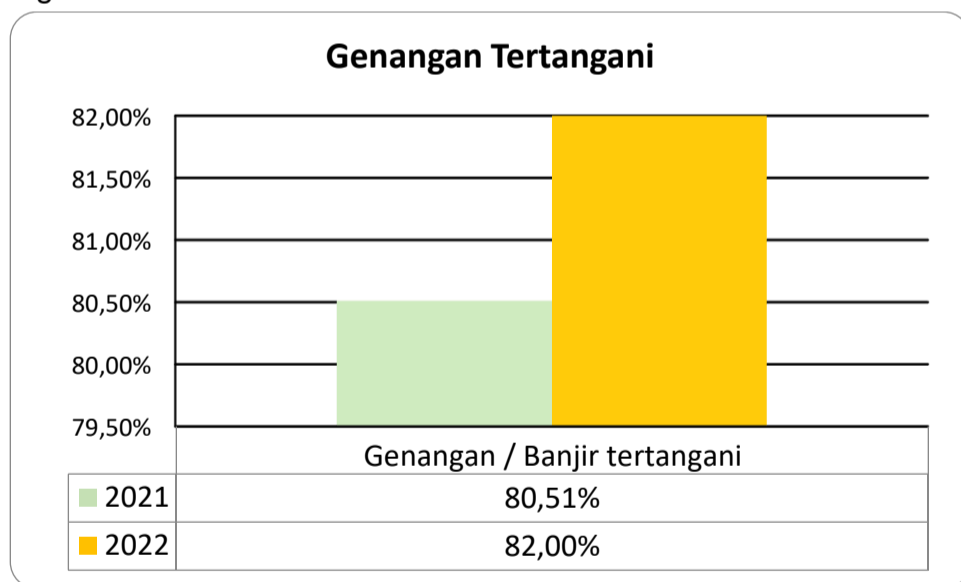
Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Persentase luasan genangan / banjir tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2022 adalah 1,85% dari target 80,51% atau tercapai 101,85%.

Adapun tren capaian persentase luasan genangan / banjir tertangani dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

No	Uraian	Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur (Ha)	Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)
1	Bringinbendo	11	75
2	Pucanganom	26	30



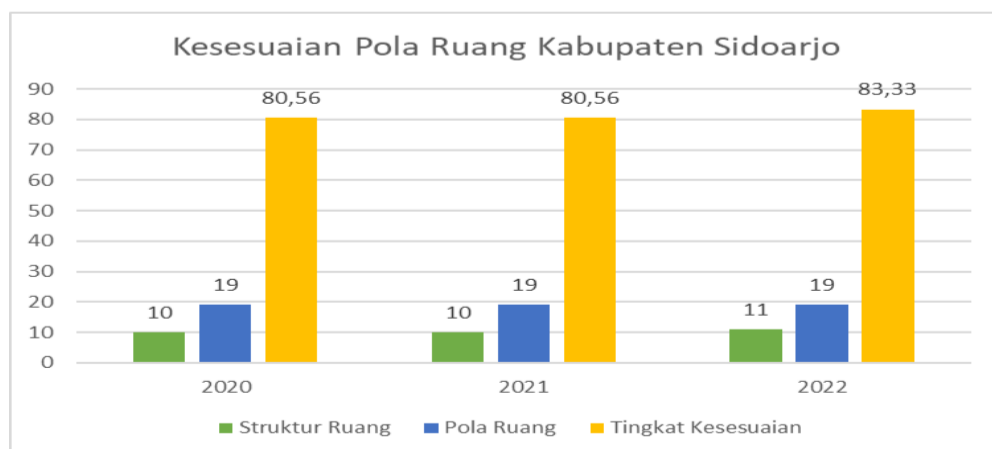
3	Tambak Sawah	55	70
4	Kedungbanteng	17	17
5	Lemahputro	32	32
6	Rangkahkidul	28	40
7	Sidokare	38	38
8	Tambakrejo	49	98
9	Banjarasri	30	30
10	Banjarpanji	10	10
11	Porong	25	30
12	Pesawahan	25	28
13	Candipari	12	18
14	Wunut	8	10
15	Bluru Kidul	14	14
16	Kalitengah	3	7
17	Balongdowo	4	4
18	Kemiri	7	7
	Jumlah	458	558

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan / banjir, antara lain :

1. Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo.
2. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin Pembangunan Rumah Pompa Saluran Gedangrowo.
3. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin.
4. Rehab Bangunan Rumah Panel Dam Pendopo Kec. Buduran.

Persentase Kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 30 program sektoral yang telah sesuai dengan Program RTRW 2019-2024 sekitar 83,3% dari target 86,5% sehingga tercapai 96,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 29 program maka terdapat peningkatan angka 1 program atau sekitar 80,55%. Adapun tren capaian persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut.





Pada tahun 2022 dilakukan Penyediaan lahan baru sebagai bentuk antisipasi perluasan Bandara Juanda yang merupakan sub indikator sistem jaringan transportasi udara pada Program Struktur Ruang RTRW 2019-2024.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang, yaitu akan dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait untuk percepatan penyelesaian program RTRW yang belum sesuai, karena program-program tersebut seharusnya dilaksanakan oleh beberapa OPD yang bersangkutan.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastrukturn secara memadai	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	31,25%	32,64%		
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	95,05%		
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%		
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51%	82%		
3	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan	86,5	83,33	dari 36 Program RTRW hanya 30 program sektoral yang sesuai sampai dengan akhir tahun 2022, sedangkan program-program tersebut seharusnya dilaksanakan oleh beberapa OPD yang bersangkutan	akan dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait untuk percepatan penyelesaian program RTRW yang belum sesuai

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	88%	89,55%		
		Persentase Saprasi Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	100%	100%		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saprasi Pengelolaan SDA yang bisa difungsikan	30 unit	120 unit		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	251.188 m	255.604 m		



	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	26%	28,90%		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	116.038 m	3625.491 m		
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90,50%	95,05%		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	919 km	1006.793 km		
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	65,5	74,79		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan non pemerintah yang sesuai ketentuan	13	944		
		Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai ketentuan	3	3		
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	30	0	Dokumen RTBL telah tersusun pada tahun n, namun penetapan Perbup dapat dilakukan tahun n+1 untuk masing-masing dokumennya	dalam proses penyusunan Perbup untuk RTBL yang telah tersusun pada tahun n+1
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	3	3		
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	a. Prosentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil sesuai target tahun berkenaan	100	100		
		b. Presentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai target tahun berkenaan	80	100		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang lulus dalam Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70	70		



	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	0	0		
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	67	67		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang diterbitkan	0	0		
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterbitkan	50	163		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterapkan	1	1		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.671.869.841,00	22.288.450.788,00	90,34%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.240.569.610,00	17.258.500.622,00	85,27%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	60.704.873.897,00	50.911.873.210,00	83,87%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	446.196.437.924,00	382.332.323.116,00	85,69%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.941.366.088,00	4.444.853.428,00	89,95%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.333.776.830,00	1.267.142.800,00	95,00%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	505.375.000,00	351.173.000,00	69,49%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.618.485.734,00	1.522.705.835,00	94,08%

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase pelayanan air minum aman	41,08	39,84	96,98
2	Persentase akses sanitasi layak	97,4	97,41	100,01

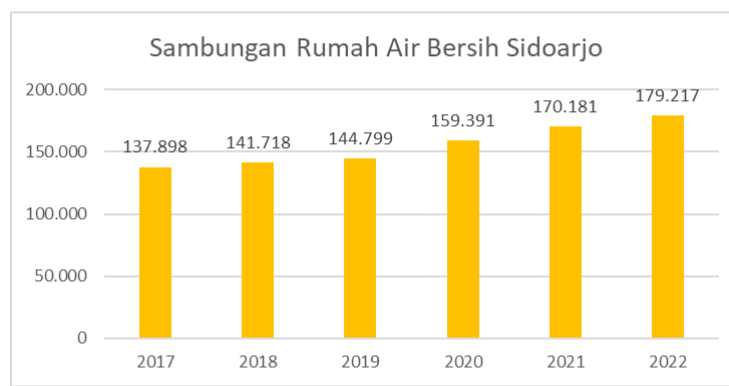


3	Persentase luas kawasan tidak kumuh	99,72	99,7	99,89
---	-------------------------------------	-------	------	-------

Persentase pelayanan air minum aman

Sampai dengan tahun 2022 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan yang dibangun oleh PDAM sebanyak 169.155 SR dan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 10.062 SR. Secara keseluruhan masyarakat yang terlayani air bersih sebanyak 179.217 SR atau sekitar 39,84% dari target 41,08% sehingga tercapai 96,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 37,76% maka terdapat peningkatan sekitar 2,08% . Dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan tahun 2022 hanya terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Seban, Wonokupang, dan Sidomojo.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Jika dijabarkan masing-masing realisasi pelayanan air bersih, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target SR	200	760	430	676	907	754
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898	8.805	10.062
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493	161.376	169.155
SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391	170.181	179.217

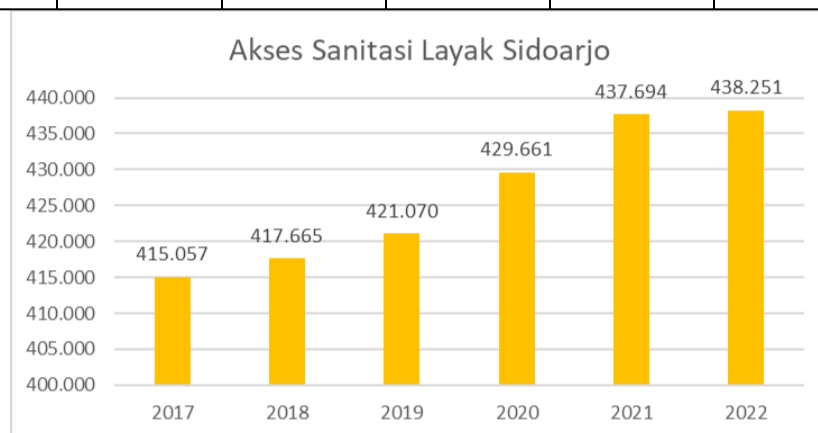
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih, yaitu selain pembangunan akses air bersih, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah air bersih.

**Persentase akses sanitasi layak**

Sampai dengan tahun 2022 rumah tangga bersanitasi sehat di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 438.251 RT atau sekitar 97,41% dari jumlah penduduk, dimana apabila dibandingkan dengan target 97.40% tercapai 100,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 8033 RT atau 97,29% dari jumlah penduduk maka terdapat peningkatan angka 0,11%.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan sanitasi layak dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target RT		3.305	3.450	3.374	8.033	557
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070	429.661	437.694	438.251



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

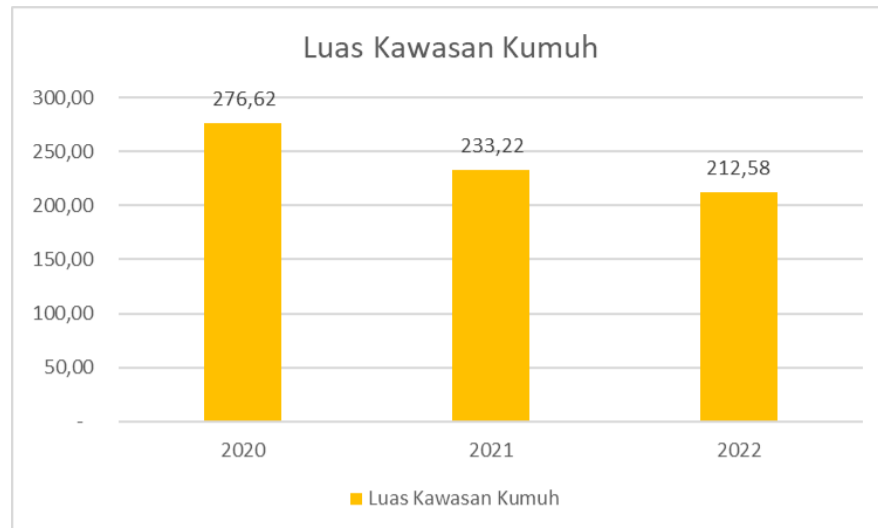
Persentase Luas Kawasan Tidak Kumuh

Sebagaimana SK Kumuh Bupati Nomor 311 Tahun 2021 bahwa Luasan kawasan kumuh sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424 Ha.

Sampai dengan tahun 2022 kawasan kumuh yang telah tertangani adalah 64,04 Ha atau sekitar 23,15%, sehingga luas Kawasan tidak kumuh 99,7%.

Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Luasan Kumuh Awal (Ha)	Capaian Absolut Tahun 2021 (Ha)	Capaian Absolut Tahun 2022 (Ha)	Kumulatif s/d Tahun 2022 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2022 (Ha)
a	b	c	d=b+c	e=a-d
276,62	43,4	20,64	64,04	212,58



Kawasan kumuh yang masih belum tertangani dan harus ditangani di tahun selanjutnya adalah 212,58 Ha, berikut 5 desa/kelurahan dengan luasan kumuh terbesar :

- Desa/Kelurahan Sukodono seluas 13,91 Ha
- Desa/Kelurahan Sumokembangsri seluas 12,93 Ha
- Desa/Kelurahan Pekauman seluas 12 Ha
- Desa/Kelurahan Bligo seluas 11,71 Ha
- Desa/Kelurahan Sidokare seluas 11,31 Ha

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Persentase sarana dasar permukiman dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72	73,57		
2	Meningkatnya layanan dasar keciptakarya daerah	Persentase pelayanan air minum aman	41,08	39,84	dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Seban, Wonokupang, dan Sidomojo	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
		Persentase akses sanitasi layak	97,4	97,41		
		Persentase luas tidak kumuh	99,72	99,7		



Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	41,08	39,84	dari 25 Desa yang menjadi target pembangunan terdapat 3 desa yang sebagian besar warga tidak berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah yaitu Desa Sebani, Wonokupang, dan Sidomojo	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang	7370	6354		
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	97,4	97,41		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	553	557		
3	Program Pengembangan Permukiman	Persentase prasarana perumahan yang disesuaikan sesuai target tahun berkenaan	91	91		
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia	90	90		
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	86	88		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun yang dikelola	5	5		
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	27,73	23,15	salah satu unsur perhitungan luasan kawasan kumuh adalah tersedianya prasarana air bersih, sedangkan target air bersih sendiri tidak tercapai dikarenakan terdapat 3 desa target pembangunan yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah	kekurangan pemenuhan target pembangunan akan dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meninjau lokasi baru lain yang membutuhkan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pecegahan dan Peningkatan	1	1		



	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang diterapkan				
		Luas Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	34	65		
6	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	11	0	Terdapat rasionalisasi anggaran, dan belum dilakukan penyesuaian target	akan dilakukan teliti ulang dan penyesuaian target pada jika terjadi hal yang sama di tahun berikutnya
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	91	0	Terdapat rasionalisasi anggaran, dan belum dilakukan penyesuaian target	akan dilakukan teliti ulang dan penyesuaian target pada jika terjadi hal yang sama di tahun berikutnya
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	0	0		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	89.191.646.865,00	82.704.621.812,80	92,73%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.446.601.960,00	6.323.681.604,00	98,09%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	27.592.465.749,00	24.294.094.257,00	88,05%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.460.292.080,00	3.107.713.474,00	89,81%
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.438.750.000,00	1.434.316.000,00	99,69%
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	0,00	0,00%

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, dijabarkan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	103%
2	Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT	1:1,25	1:1,25	100%
3	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%
5	Indeks Toleransi	77,92	81,30	104%
6	Indeks Resiko Bencana	98,44	98,73	99,70%
7	Rata – Rata response time tanggap penanganan kebakaran	15 menit	18,12 menit	82,78%

Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks rasa aman Tahun 2022 tercapai 80,77 dari target 77,92 sehingga tercapai 103% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 76,60 maka terdapat peningkatan angka 4,17 atau sekitar 5% Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 80.77 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	83,13
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	86,59
Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan	57,61
Keamanan dan Kekerasan	83,13
Indeks Rasa Aman	80,77



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman dapat tercapai optimal :

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tenang dan aman
- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten

Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT

Kondisi ideal rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT sebagaimana Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Rasio jumlah anggota linmas terhadap RT Tahun 2022 adalah 1 : 1,12 Hal ini menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Linmas dan berperan aktif dalam kegiatan positif kelinmasan di berbagai tempat.

Pada tahun 2022 terdapat perekrutan anggota linmas sebanyak 9.458 personil. Untuk keseluruhan data personil linmas sebagaimana table berikut :

DATA ANGGOTA LINMAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH			KET
		RT	PRIA	WANITA	
1	TARIK	326	328	0	
2	PRAMBON	351	351	0	
3	KREMBUNG	295	168	0	
4	PORONG	279	344	3	
5	JABON	229	150	0	
6	TANGGULANGIN	358	910	0	
7	CANDI	700	901	1	
8	SIDOARJO	853	1094	2	
9	TULANGAN	468	335	0	
10	WONOAYU	333	326	0	
11	KRIAN	501	517	0	
12	BALONGBENDO	350	283	0	
13	SUKODONO	549	345	1	
14	TAMAN	788	1238	0	
15	BUDURAN	364	816	2	
16	GEDANGAN	491	231	0	
17	SEDATI	400	914	0	
18	WARU	792	928	0	
JUMLAH		8427	10179	9	
TOTAL KESELURUHAN			9458		

sumber : e-linmas 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat memenuhi rasio jumlah anggota linmas terhadap RT, yaitu :

- Sering mengadakan sosialisasi kelinmasan ke desa dan kelurahan
- Mengoptimalkan fungsi koordinator lapangan dalam pengaturan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi linmas.
- Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil linmas dan masyarakat pada umumnya perihal fungsi linmas.



Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan

Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di Tahun 2022 tercapai 100% dari target 100% sehingga tercapai 100% sesuai target. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 150 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 150 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100% maka terdapat kestabilan angka 100% atau sekitar 0% peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk pelanggaran telah dapat terselesaikan melalui sidang tipiring atau yustisi.

Rekapitulasi data pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana tabel berikut :

**REKAP DATA PELANGGAR PERDA 10 TAHUN 2013
TENTANG TIBUMTRANMAS 2022**

NO	KEGIATAN	BULAN												JUMLAH KEGIATAN	KET
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1.	OPS														
	a. PKL	4	4	4	5	6	2		3	2			12	42	100 %
	b. Reklame	3	3			3	3	3				4		19	100 %
	c. Tibumtranmasy:														
	-Pekat				3					1		1	2	7	100 %
	-PMKS				2	3								5	
	-Bangli			4		1	3						1	9	100 %
2.	PAM	6	12	7	2	9	13	5	4	3	1	3	3	68	100 %
	TOTAL	13	19	15	12	22	21	8	7	6	1	8	18	150	100 %

Upaya yang telah dilakukan agar gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat terselesaikan secara optimal, yaitu :

- Pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah
- Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang tertangani di Tahun 2022 tercapai 100% dari target 100% sehingga tercapai 100%. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 224 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 224 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100% maka terdapat kestabilan pencapaian di angka 100% . Hal ini menunjukkan bahwa semua bentuk kasus pelanggaran peraturan daerah telah tertangani di tahun 2022.



Rekapitulasi data pelanggaran perda dan perkada , sebagaimana tabel berikut :

REKAP DATA SIDANG TIPIRING TAHUN 2022

NO	TGL SIDANG	TEMPAT SIDANG	JUMLAH PELANGGAR (ORANG)	DENDA YANG DIBAYAR MELALUI KEJAKSAAN	JUMLAH PELANGGAR YANG DISIDANG TIPIRING
1	17 FEBRUARI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	38	Rp8.500.000	38
2	24 FEBRUARI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	27	Rp6.150.000	27
3	31 MARET 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	42	Rp11.100.000	42
4	06 April 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	3	Rp1.415.000	3
5	18 MEI 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	6	Rp1.562.000	6
6	23 JUNI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	29	Rp4.200.000	29
7	21 JULI 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	28	Rp3.850.000	28
8	11 AGUSTUS 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	15	Rp3.630.000	15
9	31 AGUSTUS 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	3	Rp606.000	3
10	29 SEPTEMBER 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	18	Rp2.036.000	18
11	27 OKTOBER 2022	Ruang Sidang Satpol PP Kab. Sidoarjo	13	Rp1.351.000	13
12	09 NOVEMBER 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	1	Rp301.000	1
13	14 DESEMBER 2022	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo	1	Rp252.000	1
TOTAL			224	Rp44.953.000	224
Keterangan				100 %	

Upaya yang telah dilakukan agar kasus pelanggaran perda dapat cepat tertangani :

- Melaksanakan sinergi kerjasama Satpol PP dengan dinas lain yang terkait di wilayah Kabupaten Sidoarjo
- Mengoptimalkan fungsi pengawasan, upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda

Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

- Variable persepsi terhadap toleransi
- variable sikap terhadap toleransi
- variable Kerjasama antar suku agama berbeda
- variable sikap Pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- Variabel harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2022 tercapai 81,30 dari target 77,92 sehingga tercapai 104%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 80,18 maka terdapat peningkatan angka 1,12 point atau sekitar 1% . Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 81,30 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi.



Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	86,02
Sikap Terhadap Toleransi	81,45
Kerjasama Antar Suku dan agama yang berbeda	77,14
Sikap Pemerintah daerah Terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda	79,38
Harapan Terhadap Pemerintah	82,53

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
- Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama

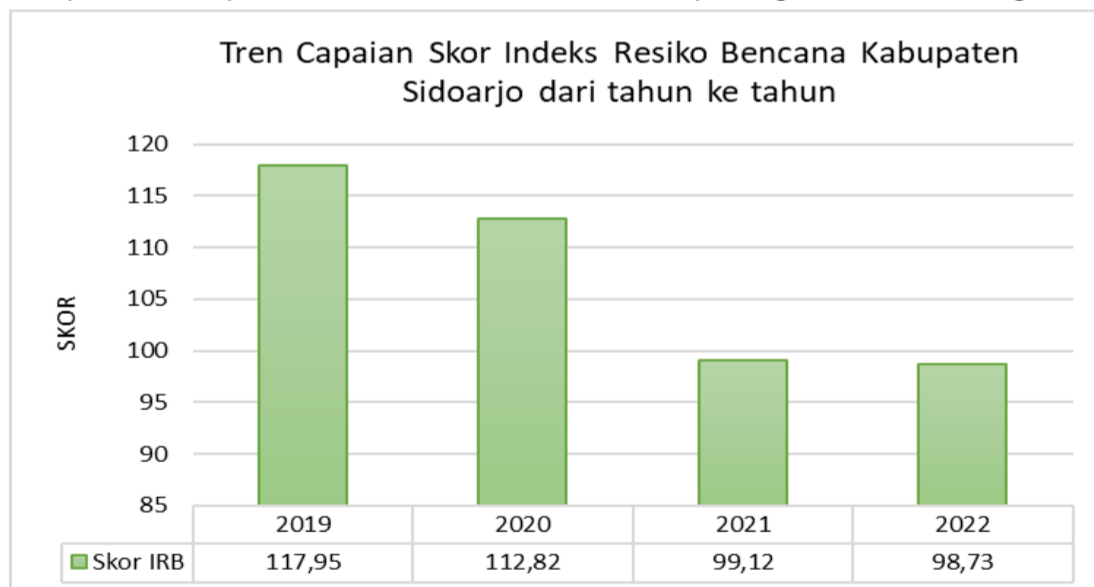
Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks resiko bencana Tahun 2022 berada pada skor 98,74 dari target skor 98,44 sehingga tercapai 99,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu pada skor 99,21 maka terdapat peningkatan angka sebesar 0,48 poin.

Dengan realisasi Indeks resiko bencana sebesar 98,44 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG.

Adapun tren capaian Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :



Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.



Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

- a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH	SKOR
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.97	0,78	SEDANG	
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0.97			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.88			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.85			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.70			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.68			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.85			

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB-IKD Kab. Sidoarjo 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

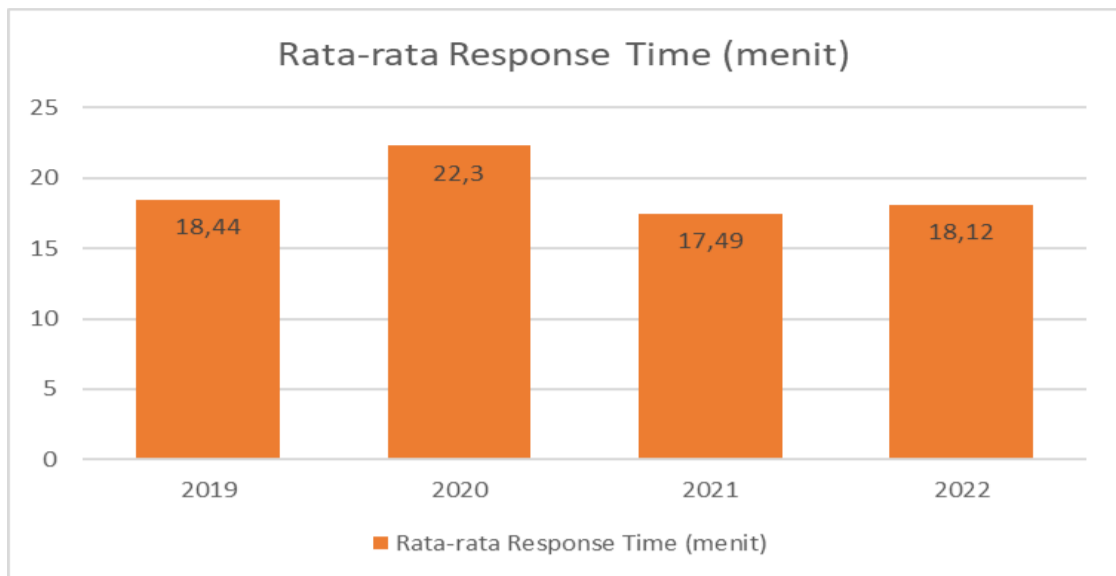
1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System* (EWS) bencana
2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan
3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak
4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana

Rata – Rata Response Time Penanganan Kebakaran

Rata – rata response time penanganan kebakaran di Tahun 2022 tercapai 18,12 menit dari target 15 menit sehingga tercapai 82,78.%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 17,49 menit maka terdapat penurunan angka 0,63. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kejadian kebakaran yaitu sebanyak 197 kejadian pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 terdapat kejadian kebakaran sebanyak 175 kejadian.



Adapun tren capaian rata – rata response time penanganan kebakaran dapat digambarkan sebagai berikut :



Upaya yang telah dilakukan agar kejadian Kebakaran dapat ditangani dalam waktu tanggap, yaitu :

- Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru
- Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
- Pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan
- Peningkatan pelaksanaan inspeksi peralatan pemadam kebakaran di instansi / perusahaan

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib, dan tentram	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses rekrutmen. 2. Kurangnya jumlah personil yang ada dengan luas wilayah. 3. Minimnya pemahaman tugas dan fungsi OPD pada penegakan perda yang dipangku, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil Linmas dan masyarakat perihal fungsi Linmas. 2. Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patroli dan penjagaan titik-titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga trantibum. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda.
2	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	77,92	81,30	-	-



3	Meningkatnya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
4	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Resiko Bencana (IRB)	98,44	98,73	Berdasarkan penilaian IRB, maka yang menyebabkan tidak tercapainya nilai IRB adalah lemahnya unsur pembentuk kapasitas daerah pada aspek : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana , serta Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah 2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana 3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak 4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
		Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	15 menit	18,12 menit	Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh	Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru, pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan yang disertai dengan sarpras penunjangnya (hydrant/ sumur), serta penguatan komitmen dengan instansi lintas sektor seperti PLN
5	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,8			
6	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	55%	0,78	Berdasarkan penilaian IKD, maka komponen untuk meningkatkan ketahanan daerah meliputi aspek : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana , serta Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah 2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana 3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak 4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
		Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non	100%	41,12%	Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan	Mengupayakan terbentuknya pos damkar unit baru, pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan yang



	kebakaran yang berhasil dilaksanakan			kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh	disertai dengan sarpras penunjangnya (hydrant/sumur), serta penguatan komitmen dengan instansi lintas sektor seperti PLN
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100% 100% 100%	100% 100% 100%	1. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses rekrutmen. 2. Kurangnya jumlah personil yang ada dengan luas wilayah. 3. Minimnya pemahaman tugas dan fungsi OPD pada penegakan perda yang dipangku, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas	1. Optimalisasi pembinaan terhadap personil Linmas dan masyarakat perihal fungsi Linmas. 2. Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patroli dan penjagaan titik-titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga trantibum. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda.

2	Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 orang, b. 100 peserta c. 100 Orang	a. 100 orang, b. 100 peserta c. 100 Orang		
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan		



		Ekonomi, Sosial dan Budaya				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekrearian	100%	100%		
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya 2. Jumlah partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	1. 80% 2. 80%	1. 80% 2. 80%		
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal		
8	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Logistik Kebencanaan yang Tersalurkan Tepat Sasaran dan sesuai Kebutuhan	100%	100%		
		2. Persentase Korban Bencana yang Terehabilitasi	100%	100%		
		3. Persentase Bantuan Pasca Bencana yang Terealisasi Berdasarkan Laporan Jitupasna	100%	100%		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase peserta peningkatan kapasitas masyarakat / aparatur di daerah rawan bencana	15%	15%		
		2. Persentase warga yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	100%	100%		



	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Persentase logistik yang disalurkan sesuai kebutuhan	100%	100%		
		2. Persentase petugas dan relawan yang aktif dalam masa status Siaga dan darurat bencana	100%	100%		
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Persentase dokumen PB dan regulasi PB yang dilegal / formalkan	100%	100%		
		2. Persentase laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan PB yang terselesaikan	100%	100%		
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Satuan Petugas PMK yang memiliki Sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi	40%	40%		
		2. Persentase Mobil PMK dengan Kondisi Layak Fungsi	80%	80%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	100%	100%		
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana proteksi kebakaran bangunan/gedung yang memenuhi standar	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Persentase sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran	10%	10%		
		2. Persentase relawan kebakaran dilatih dan dibentuk	100%	100%		

**Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.909.740.662,00	16.595.332.489,00	98,14%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.805.728.661,00	10.631.187.941,00	98,38%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.158.202.037,00	6.538.468.168,00	91,34%
4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.274.237.776,00	1.187.130.768,00	93,16%
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.114.877.326,00	10.114.684.800,00	100,00%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	49.334.938.043,00	49.311.434.550,00	99,95%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.316.465.500,00	2.267.973.000,00	97,91%
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.735.391.040,00	1.524.435.600,00	87,84%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.538.274.604,00	11.938.310.794,00	95,21%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.780.081.178,00	2.705.985.354,00	97,33%
11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.771.702.597,00	9.489.697.187,00	97,11%

Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

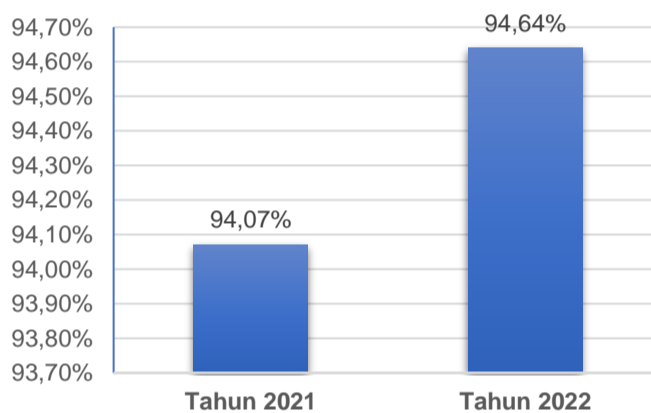
No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	94,00	94,64	100,68
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	80,00	82,38	102,97

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.989.167 jiwa atau sekitar 94,64% dari jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021: 93,78% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan tercapai 94,64%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 94,07% maka terdapat peningkatan angka 11.980 jiwa atau sekitar 0,57%. Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN



Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Yang dimaksud dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Indikator Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dengan target 80% dari jumlah PPKS pada tahun 2022 sebanyak 472.340 jiwa. Realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2022 sebanyak 486.406 jiwa (82,38%). Dari target 80% jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan tercapai 82,38%. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 tercapai 102,97%.

Indikator Dinas sosial 2021 adalah persentase jumlah PMKS yang terlayani. Target PMKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2021 sebanyak 48.718 dan realisasi PPKS sebanyak 48.718. dengan demikian pada tahun 2021 kinerja dinas sosial tercapai 100%. Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun



2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang mendapatkan pelayanan di tahun 2022.

**REKAPITULASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS/PMKS) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

NO	JENIS PPKS/PMKS	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
			L	P	JUMLAH
1	Keluarga Fakir Miskin	39,269	272,127	267,828	539,955
2	Anak Jalanan	45	31	13	44
3	Tuna Susila	16	31	20	51
4	Pengemis	85	38	52	90
5	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	39	37	14	51
6	Anak Balita Terlantar	51	24	20	44
7	Anak Terlantar	176	640	671	1,311
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	70	71	3	74
9	Anak dengan Kedisabilitas				-
	a. Tubuh	201	123	98	221
	b. Netra	25	15	12	27
	c. Cacat Wicara	146	82	52	134
	d. Mental	295	171	82	253
	e. Cacat Ganda	112	119	73	192
10	Anak yg menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	3	1	3	4
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	59	50	31	81
12	Lanjut Usia Terlantar	475	12,615	18,069	30,684
13	Penyandang Distabilitas & Penyandang Penyakit Kronis				-
	a. Tubuh	499	929	656	1,585
	b. Netra	192	303	296	599
	c. Cacat Wicara	235	422	454	876
	d. Mental	800	1,179	697	1,876
	e. Cacat Ganda	148	516	372	888
	f. Penderita Penyakit Kronis	938	477	456	933
	Pemulung	381	322	100	422
14	Kelompok Minoritas	20	14	23	37
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLB)	172	219	7	226
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,546	1,186	706	1,892
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	77	81	1	82
18	Korban Trafficing	1			0
19	Korban Tindak Kekerasan/ yang diperlakukan salah	7	1	7	8
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	3	4	2	6
21	Korban Bencana Alam	201	844	341	1,185
22	Korban Bencana Sosial	188			0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1,394		1,809	1,809
24	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	700	568	314	882
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	127	86	55	141
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	22	30	14	44
	JUMLAH PPKS/PMKS	48,718	293,356	293,351	586,707

**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94%	94,64%		-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan	80%	82.38%		-

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	60%	Tidak ada	-
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	6 PSKS	6 PSKS	Tidak ada	-
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS prioritas yang terlayani	59,51%	59,51%	Tidak ada	-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	1311 Orang	1311 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	10 Orang	10 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	120 Orang	120 Orang	Tidak ada	-
		Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani	900 Orang	900 Orang	Tidak ada	-
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	220 Orang	220 Orang	Tidak ada	-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	97%	97,42%	Tidak ada	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	659156 Jiwa	642153 Jiwa	Tidak ada	-
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	Tidak ada	-
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	100%	Tidak ada	-
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	50 Orang	50 Orang	Tidak ada	-



5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	100%	Tidak ada	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik	100%	100%	Tidak ada	-

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.642.410.705,00	6.979.940.339,00	91,33%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.534.086.740,00	2.496.348.625,00	98,51%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.614.514.362,00	7.520.040.356,00	98,76%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	15.946.621.514,00	13.754.816.045,00	86,26%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	750.475.590,00	731.966.750,00	97,53%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	222.659.566,00	221.068.092,00	99,29%



3. Unsur Penunjang Pemerintahan

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	Tidak Tercapai
2	Indeks Kualitas Kebijakan	70	75,02	107,17%
3	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	87,5	95	108,57%
4	Indeks Pelayanan Publik	Pelayanan Prima	4,52 (A) Pelayanan Prima	Tercapai

Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo memperoleh kategori **BB (Sangat Baik)**. Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu kategori **A (Memuaskan)**.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

- Menyempurnakan Aplikasi e-Kinerja sebagai mekanisme manajemen kinerja untuk mengukur kinerja individu, dan menjadi tools untuk keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun register resiko sampai dengan level Kegiatan dan membentuk Satgas SPIP ke seluruh OPD
- Peningkatan kualitas implementasi SAKIP OPD dengan merubah struktur penilaian SAKIP OPD, menjadi 95% komponen LKE SAKIP dan 5% komponen LKE SPIP



- Penguatan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD melalui pengendalian secara elektronik melalui Aplikasi e-Kenda
- Optimalisasi Aplikasi e-Monev untuk evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,31
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,81
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,34
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,96
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan Kompetisi Regional maupun Nasional.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 mendapatkan nilai sebagai berikut :

Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	Pelayanan Prima (A+)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-	Sangat Baik (A)
Kabupaten Sidoarjo	A	Pelayanan Prima (A+)

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB



Indeks Kualitas Kebijakan

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan penilaian indeks kualitas kebijakan (IKK) sehingga belum dapat diketahui penilaian tahun 2021, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai pedoman penilaian IKK tahun 2022. Pada tahun 2022 ini telah dilakukan penilaian mulai dari perencanaan, implementasi serta hasil kebijakan yang dinilai mandiri oleh perangkat daerah, dan diverifikasi oleh tim kabupaten yang berada di Sekretariat Daerah dan pendampingan dari Pihak Ketiga dalam pengukuran IKK tersebut. dan capaian IKK tahun 2022 dengan target untuk Indeks kualitas Kebijakan adalah 70 dengan realisasi 75,02 telah tercapai 107,7 %. Hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah benar benar menerapkan Fungsi Kebijakan dan Koordinasi dengan tik para analis kebijakan ahli muda dan masing-masing asisten sebagai fungsi koordinasi, sebagaimana dalam Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat daerah pada Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022.

Monitoring Center for Prevention (MCP)

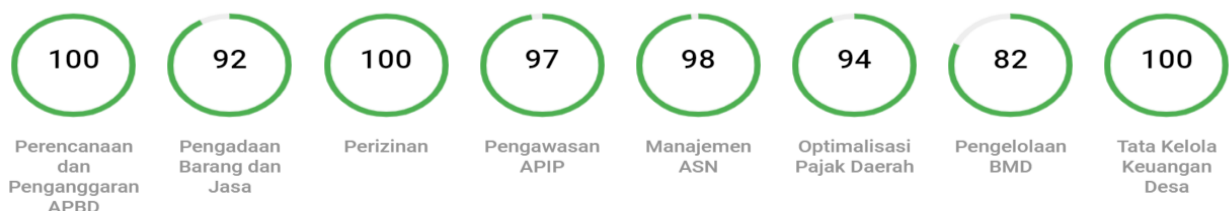
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Tahun 2022 hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah 95 dari rentang nilai 0 s.d. 100 dengan nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

No.	Variabel	Nilai
1	Perencanaan dan penganggaran	100
2	Pengadaan barang dan jasa	92
3	Perizinan	100
4	Pengawasan APIP	97
5	Manajemen ASN	98
6	Optimalisasi pajak daerah	94
7	Manajemen aset daerah	82
8	Tata kelola keuangan desa	100

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi.

Progres Keberhasilan Pemda Sidoarjo





Adapun upaya yang dilakukan agar capaian MCP optimal, yaitu Asistensi dan monitoring terhadap 8 area intervensi yang difokuskan pada area intervensi yang nilainya rendah yaitu pengelolaan aset daerah melalui :

- Memotivasi sertifikasi atas aset daerah
- Memotivasi dan mendorong persetujuan DPRD atas Perda tentang pengelolaan aset daerah

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Indeks kualitas Kebijakan	70	75,02		-
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 %	46 %		
		Persentase Kinerja Urusan Tercapai	80 %	100%		
		Persentase IPP PD kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70	79,86		
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Adibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	60 %	30 %		
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	80 %	100 %		
		Nilai Tata kelola Keuangan Desa (Area intervensiMCP)	93	100		
		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasiAsisten Pemerintahan dan Kesra	90 %	91,78 %		
		Persentase capaian program prioritas	80 %	87,5 %		
a.	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	100 %	100 %		
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100 %	100 %		
		Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	100 %	100 %		
		Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	100 %	100 %		



		Jumlah Kajian produk hukum daerah	5	11		
b.	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	70	75,02		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, SatpolPP, BPBD, Kecamatan)	60 %	30 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	80 %	100 %		
		Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	A-	A-		
c.	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam naskah kerjasama daerah	100 %	100 %		
d.	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	70	75,02		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	77,78 %	56 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	80 %	100 %		
		Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	A-	A		
		Persentase serapan anggaran (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	90 %	90 %		
		Persentase capaian program prioritas	80 %	87,5 %		
		Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	500 orang	357 orang		
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70	58,67		
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85	91,01		



		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	100 %	70 %		
		Persentase Kinerja Urusan Tercapai dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	80 %	100 %		
		Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area intervensi MCP)	85	92		
		Nilai Perijinan (Area intervensi MCP)	100	100		
		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	90 %	89,58 %		
		Persentase capaian program prioritas	80 %	85,71%		
a.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	70	67,5		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100 %	100 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100 %	100 %		
		Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian(DPMPTSP)	A-	A		
b.	Pemantauan Kebijakan SumberDaya Alam	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	70	75,02		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA(Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100 %	100 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA(Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100 %	100 %		
c.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	70	75,02		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	25 %	40 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	100 %	100 %		
		Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	100 %	100 %		



		Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		
		Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	85 %	89,35 %		
d.	Pengelolaan Pengadaan Barangdan Jasa	Indeks Kualitas PBJ	Level 3	Level 3		
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah dibawah koordinasiAsisten Adm.Umum	70	77,70		
		Persentase IPP PD role model dengan kategoripelayanan Sangat Baik (A-)	66 %	100 %		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A dibawahkoordinasi Asisten Adm.Umum	100 %	75 %		
		Persentase kinerja urusan tercapai dibawah koordinasiAsisten Adm.Umum	80 %	100 %		
		Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	95	97		
		Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	96	98		
		Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	88	94		
		Nilai Manajemen Aset daerah (Area Intervensi MCP)	68	82		
		Persentase serapan anggaran dibawah koordinasiAsisten Adm.Umum	90 %	95,62 %		
		Persentase capaian program prioritas	80 %	100 %		
a	Penataan Organisasi	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi	70	75,02		
		Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidangorganisasi	100 %	100 %		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidangorganisasi	100 %	100 %		
		Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	40 %	40 %		
		Persentase unit kerja yang pelayanan publik yangprima	30 %	30 5		
		Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhanberkategori Zona Hijau	30 %	84,46		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.523.040.122,00	67.531.962.965,00	97,14%



2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.732.132.008,00	17.236.160.593,00	87,35%
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	13.613.363.614,00	13.185.620.010,00	96,86%

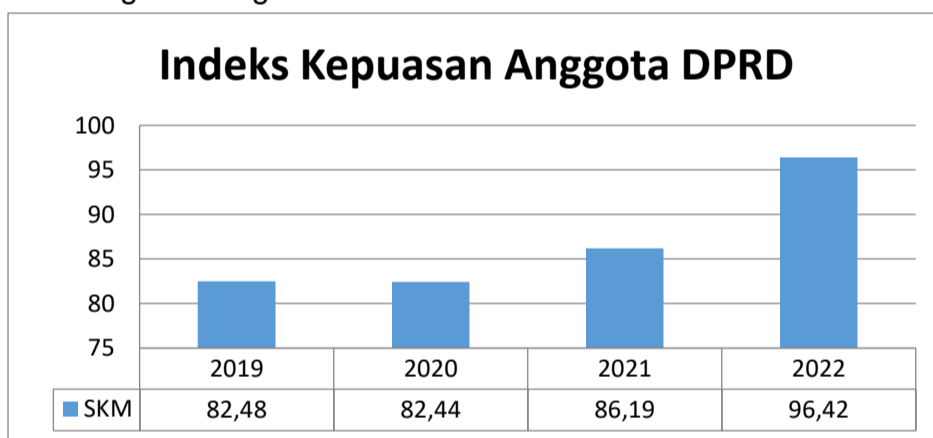
Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	82,46 Baik	96,42 Sangat Baik	116,93%

Indeks Kepuasan Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Anggota DPRD Tahun 2022 tercapai angka 96,42 (Sangat Baik) dari target angka 82,46 (Baik) sehingga tercapai 116,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu pada angka 86,19 maka terdapat peningkatan angka 10,23 atau sekitar 3,52%. Adapun tren capaian Indeks Kepuasan Anggota DPRD dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

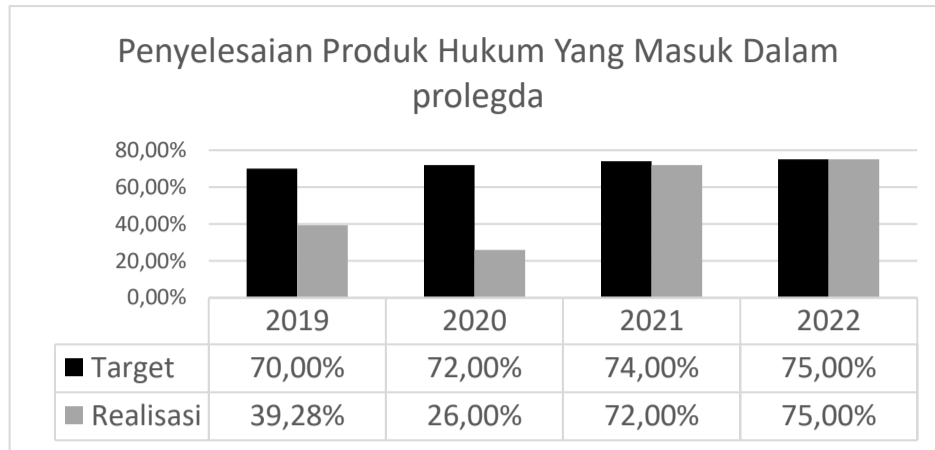


Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Kepuasan Anggota DPRD dapat tercapai optimal, yaitu :

- Hak-hak keuangan dan kesejahteraan DPRD terpenuhi tepat waktu.
- Saran dan prasarana rapat-rapat disesuaikan dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Peningkatan kualitas SDM khususnya pendamping alat kelengkapan DPRD.

Persentase Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda

Penyelesaian produk hukum yang masuk dalam prolegda Tahun 2022 tercapai 75% dari target 75% sehingga capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 97,30% maka terdapat peningkatan 2,70%. Adapun tren capaian penyelesaian prosuk hukum yang masuk dalam prolegda dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Untuk penyelesaian Produk Hukum yang masuk dalam Prolegda, Sekretariat DPRD menargetkan 16 Raperda di Tahun 2022 yang dapat ditetapkan, namun pada kenyataannya Raperda yang dapat ditetapkan menjadi Perda di Tahun 2022 yaitu sebanyak 12 Raperda, sehingga menyisakan 4 Raperda yang masih dalam proses pembahasan oleh Anggota Pansus DPRD. Raperda yang belum ditetapkan di Tahun 2021 yaitu :

1. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2042
3. Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4. Raperda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sidoarjo

Adapun permasalahan yang menyebabkan keempat Raperda tersebut diatas tidak dapat ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- Pansus pembahasan Raperda tersebut baru ditetapkan pada awal bulan Nopember 2022. Pelaksanaan pembahasan Raperda sampai dengan ditetapkannya Perda biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, sehingga target ditetapkannya keempat Raperda tersebut yaitu akhir Februari 2023.
- Pelaksanaan pembahasan keempat Raperda sudah berlangsung sejak awal Nopember 2022. Pembahasan tahap I dengan agenda Pansus DPRD dengan OPD terkait diperkirakan sudah mencapai progress pembahasan sebesar 60% untuk selanjutnya dilakukan pembahasan tahap II yaitu hasil keputusan Gubernur baru setelah itu dilakukan penetapan Perda.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar penyelesaian Produk Hukum yang masuk dalam Prolegda dapat tercapai optimal, yaitu :

- Merencanakan dan mengusulkan kegiatan pembahasan dan penyelesaian produk hukum DPRD dimasukkan dalam Renja Badan Musyawarah.
- Mengupayakan produk-produk hukum DPRD tersebut selesai tepat waktu sesuai yang telah ditentukan



Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya fasilitasi dukungan Sekretariat DPRD terhadap Trifungsi DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih	Nilai Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	86,00 Baik	96,42 Baik	keterlibatan anggota DPRD dalam mengisi kuisioner masih relatif kecil, yaitu 26 anggota dari 50 anggota	mengoptimalkan keterlibatan anggota DPRD dalam mengisi kuisioner melalui kegiatan-kegiatan DPRD

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%	Program dan kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Bulanan DPRD	Sekretaris DPRD memberikan usulan terkait perencanaan kegiatan DPRD pada saat rapat Badan Musyawarah DPRD tentang Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bulanan DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase pembentukan, pembahasan dan penetapan Perda dan Produk hukum DPRD yang difasilitasi	100%	100%		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100%	100%		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi	100%	100%		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	6 jenis	6 jenis		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun difasilitasi	100%	100%		
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100%	0%	Tidak adanya usulan perubahan kode etik DPRD dari Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan DPRD	Sekretaris DPRD memberikan saran dalam rapat Badan Musyawarah
	Pembahasan Kerjasama Daerah	Prosentase Jumlah Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100%	0%	Tidak adanya surat masuk terkait kerjasama daerah dari Bagian	



					Kerjasama Sekretariat Daerah kepada DPRD	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.350.900.210,00	50.990.715.180,00	93,82%
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	35.236.991.163,00	21.776.801.439,00	61,80%

Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	100
2	Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100

Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Tahun 2022 telah dilaksanakan *self assessment* atas maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai 3,938 yang berarti bahwa capaian telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan organisasi, namun belum pada sasaran



strategis OPD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan.

Berikut tren capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Level Maturitas SPIP
2020	Terdefinisi
2021	Terdefinisi
2022	Terdefinisi

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat pengendalian intern optimal, yaitu :

- Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi SPIP
- Meningkatkan kualitas pengawasan melalui reviu, evaluasi, dan pendampingan terhadap manajemen risiko tidak hanya pada tataran operasional tetapi pada tataran sasaran strategis OPD.
- Melaksanakan sosialisasi dan implementasi secara masif terkait kegiatan anti korupsi yang mencakup tiga hal yaitu cegah, deteksi, dan respon.

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Berdasarkan hasil *self assessment* atas Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah 3,430 ini berarti Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo sudah pada level 3 (*Integrated*).

Capaian Kapabilitas APIP level 3 (*Integrated*) mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo sudah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.



Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Kapabilitas APIP
2020	Level 2 (<i>Infrastruktur</i>)
2021	Level 2 (<i>Infrastruktur</i>)
2022	Level 3 (<i>Integrated</i>)

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
- Memuatkhirkan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengawasan yang efektif	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Nilai kinerja masih bersumber pada penilaian mandiri, sambil menunggu penilaian dari BPKP	
		Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	-	Belum rilis dari KPK dan Kementerian PANRB	
2	Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	Nilai kinerja masih bersumber pada penilaian mandiri, sambil menunggu penilaian dari BPKP	

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%		
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	31,00%	45,83%		
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	86,00%	92,19%		
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	91,00%	91,33%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	314 Laporan	318 Laporan		
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	36 Laporan	39 Laporan		



2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100%	100%	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	8 Laporan	14 Laporan	

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.033.314.398,00	16.226.260.033,00	95,26%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.352.985.500,00	1.244.348.500,00	91,97%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	111.300.000,00	109.200.000,00	98,11%

Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD	100	100	%

Persentase kesesuaian RKPD terhadap dokumen RPJMD

Penjelasan kesesuaian antara RKPD terhadap RPJMD adalah Kesesuaian nomenklatur dan indikator program, antara dokumen RKPD dan RPJMD.

Hasil analisis konsistensi antara dua dokumen adalah rata-rata jumlah program dalam RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastwil sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik dan rata-rata konsistensi jumlah indikator program sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata secara keseluruhan PD di bawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100% dalam kategori sangat baik.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistinsi	Jumlah Indikator Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistinsi
		RPJMD	RKPD P			RPJMD	RKPD P		
1	Dinas PU Bina Marga dan SDA	2	2	2	100%	15	15	15	100%
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	100%	8	8	8	100%
3	Dinas Kominfo	4	4	4	100%	10	10	10	100%
4	DLHK	10	10	10	100%	16	16	16	100%
5	Dinas Perhubungan	3	3	3	100%	7	7	7	100%



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi	Jumlah Indikator Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi
		RPJMD	RKPD P			RPJMD	RKPD P		
6	Dinas Perkim CKTR	11	11	11	100%	16	16	16	100%
RATA-RATA					100%				100%

Hasil analisis konsistensi antara dua dokumen adalah rata-rata jumlah program dalam RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik dan rata-rata konsistensi jumlah indikator program sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata secara keseluruhan PD di bawah koordinasi Bidang Ekonomi dan SDA sebesar 100% dalam kategori sangat baik

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi	Jumlah Indikator Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi
		RPJMD	RKPD P			RPJMD	RKPD P		
1	Badan Pelayanan Pajak Daerah	1	1	1	100%	3	3	3	100%
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	2	100%	6	6	6	100%
3	Dinas Koperasi dan UM	7	7	7	100%	8	8	8	100%
4	Dinas Pangan dan Pertanian	10	10	10	100%	1	1	1	100%
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	4	4	100%	10	10	10	100%
6	Dinas Perikanan	4	4	4	100%	7	7	7	100%
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	7	7	100%	11	11	11	100%
RATA-RATA					100%				100%

Hasil analisis konsistensi antara dua dokumen adalah rata-rata jumlah program dalam RPJMD dengan RKPD Bidang PPM sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik dan rata-rata konsistensi jumlah indikator program sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata secara keseluruhan PD di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100% dalam kategori sangat baik

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi	Jumlah Indikator Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi
		RPJMD	RKPD P			RPJMD	RKPD P		
1	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2	100%	6	6	6	100%
5	Bakesbangpol	5	5	5	100%	10	10	10	100%
3	Bappeda	3	3	3	100%	6	6	6	100%
4	Disporapar	7	7	7	100%	9	9	9	100%
5	Dispendukcapil	4	4	4	100%	10	10	10	100%



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi	Jumlah Indikator Program		Jumlah Konsistensi	%Tingkat Konsistitensi
		RPJMD	RKPD P			RPJMD	RKPD P		
6	Dinas Kesehatan	4	4	4	100%	15	15	15	100%
7	Dinas PMD	4	4	4	100%	5	5	5	100%
8	Dinas P3AKB	6	6	6	100%	9	9	9	100%
9	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	4	4	4	100%	21	21	21	100%
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3	3	100%	6	6	6	100%
11	Dinas Sosial	5	5	5	100%	10	10	10	100%
12	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	100%	9	9	9	100%
13	Inspektorat	2	2	2	100%	7	7	7	100%
14	Kecamatan Balongbendo	4	4	4	100%	9	9	9	100%
15	Kecamatan Buduran	4	4	4	100%	9	9	9	100%
16	Kecamatan Candi	5	5	5	100%	10	10	10	100%
17	Kecamatan Gedangan	4	4	4	100%	9	9	9	100%
18	Kecamatan Jabon	4	4	4	100%	9	9	9	100%
19	Kecamatan krembung	4	4	4	100%	9	9	9	100%
20	Kecamatan Krian	5	5	5	100%	10	10	10	100%
21	Kecamatan Porong	5	5	5	100%	10	10	10	100%
22	Kecamatan Prambon	4	4	4	100%	9	9	9	100%
23	Kecamatan Sedati	4	4	4	100%	9	9	9	100%
24	Kecamatan Sidoarjo	5	5	5	100%	10	10	10	100%
25	Kecamatan Sukodono	4	4	4	100%	9	9	9	100%
26	Kecamatan Taman	5	5	5	100%	10	10	10	100%
27	Kecamatan Tanggulangin	4	4	4	100%	9	9	9	100%
28	Kecamatan Tarik	4	4	4	100%	9	9	9	100%
29	Kecamatan Tulangan	4	4	4	100%	9	9	9	100%
30	Kecamatan Waru	4	4	4	100%	9	9	9	100%
31	Kecamatan Wonoayu	4	4	4	100%	9	9	9	100%
32	Satpol PP	1	1	1	100%	5	5	5	100%
33	Sekretariat Daerah	3	3	3	100%	17	17	17	100%
34	Sekretariat DPRD	1	1	1	100%	6	6	6	100%
RATA-RATA					100%				100%



Analisis konsistensi dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD tahun 2022 aspek yang dicermati adalah konsistensi nomenklatur antara program dan indikator program. Dari Hasil analisis konsistensi antara dua dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu antara RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 adalah rata-rata konsistensi jumlah program dan indikator program yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD sudah konsisten dengan kriteria sangat baik. Dan untuk seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki tingkat konsistensi Program dan Indikator Program rata-rata 100 % (Kategori Sangat Baik).

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD terhadap dokumen RPJMD	100	100	Persentase kesesuaian RKPD terhadap dokumen RPJMD tercapai sangat baik mengingat semua program yang terdapat dalam RPJMD terdapat pula dalam dokumen RKPD dan Renja PD.	Verifikasi dan monitoring saat input Renja dan KUA-PPAS, APBD agar keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat meningkat lebih baik dan tercapai sesuai target.
		Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah	100	90	Adanya fitur salin renstra sehingga pada saat entri SIPD program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya langsung menyesuaikan dengan renstra sehingga tidak adanya crosscheck ulang terhadap isian dalam renja PD, KUA-PPAS dan APBD yang berakibat pada adanya perbedaan variasi pada nomenklatur saat mengisi SIPD yang berdampak pada inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Melakukan sosialisasi dan pendampingan bersama antara Mitra Bappeda dan PD dalam rangka input renja PD; Melakukan verifikasi dan monitoring terkait indikator dan target yang diinput pada tahapan Renja dan KUA-PPAS
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	2	2	Adanya dana transfer dari pusat DAK, DBHCT yang baru terinformasikan pada saat pembahasan APBD sehingga mempengaruhi konsistensi sub kegiatan pada Renja, KUA-PPAS dan APBD	Penyesuaian anggaran dan kapasitas fiskal, sehingga mempengaruhi konsistensi antara dokumen target kinerja antara dokumen perencanaan dan



						penganggaran, Perangkat Daerah.
					Penyesuaian anggaran dan kapasitas fiskal, sehingga mempengaruhi konsistensi antara dokumen target kinerja antara dokumen perencanaan dan penganggaran, Perangkat Daerah.	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD	100	100		
		Persentase konsistensi antara dokumen RKPD terhadap dokumen KUA-PPAS dan APBD	100	100	Adanya fitur "salin renstra" sehingga pada saat entri SIPD program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya langsung menyesuaikan dengan renstra sehingga tidak adanya crosscheck ulang terhadap isian dalam Renja PD, KUA-PPAS dan APBD yang berakibat pada adanya perbedaan atau variasi pada nomenklatur saat mengisi SIPD yang berdampak pada inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran.	Melakukan verifikasi dan monitoring terkait indikator dan target yang diinput pada tahapan Renja dan KUA-PP,AS
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	Pada tahun 2021 adalah masa transisi dikarenakan adanya penerapan Penerapan SIPD sesuai Permendagri 70 dan 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri 050-3708 th 2020 terkait indikator kinerja sehingga Perangkat Daerah untuk menyesuaikannya dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD sesuai ketentuan.	
		Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	100	100		
		Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra,PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	100		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		



		pembangunan manusia				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	100	100		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	100		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.707.987.134,00	11.384.998.331,00	97,24%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.438.665.538,00	1.396.906.870,00	97,10%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.954.653.418,00	2.939.934.053,00	99,50%

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)	70%	70,65%	100,93

Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)

Pada tahun 2022 terdapat 65 Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID) dari keseluruhan 92 inovasi yang disampaikan atau sekitar 70,65 %

Adapun inovasi yang memenuhi kriteria IID antara lain :

No	NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
1	Sistem Informasi Menyampaikan Tender Melalui Aplikasi Lokal Barang/Baja (SiMentalBaja)	91
2	SIPRAJA 3.0	102
3	KECAMATAN NGARTIS (Kecamatan Antar Gratis)	93
4	Sinergitas Kecamatan Kabupaten Sidoarjo	91
5	Kampung Tangguh Covid-19	92
6	Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	90
7	KURDA SAYANG (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo yang Gemilang)	91
8	E-BUDDY Teman Kerjaku	108



No	NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
9	e-Kenda (Pengendalian Pembangunan Daerah secara Elektronik)	105
10	PEDULI DILAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lanjut Usia (Lansia) >> UPGRADE	105
11	JEBETE (Jemput Bola Terpadu)	105
12	GAPURA DELTA (Garda Petugas Registrasi Adminduk Desa/ Kelurahan di Kota Delta)	100
13	YANTIS (Layanan Antar Gratis)	100
14	PLAVON DUKCAPIL (Pelayanan via Online Dukcapil)	102
15	LISENSI ONE (Legalisasi Ijazah Siswa Online)	93
16	KATULISTIWA CERIA (Karya Tulis Ilmiah Siswa untuk Indonesia Berwawasan Cerdas Berintegritas)	94
17	Skrining Anak Berkebutuhan Khusus di Posyandu	92
18	Jayaschool Learning Management System	94
19	House System	100
20	Aplikasi Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Puskesmas Krian (ALPEN-LAB)	93
21	Sistem Pemantauan Kedaluwarsa Obat Puskesmas Krian (Si PaKDe)	90
22	SIP Online (Surat Ijin Praktek Online)	96
23	e-PANWASI Absen Online Minum Vitamin Puskesmas Kedungsolo	91
24	Petik Mandiri Buah Naga - Puskesmas Tanggulangin	91
25	Sejiwa Dengan Jempol Puskesmas Jabon	93
26	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Sidoarjo (SIMASKOT) Puskesmas Sidoarjo	94
27	SICANTIK (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu Dan Anak)	98
28	Kartu Kesehatan Gigi Ibu Hamil & Anak (KETAN GULA) Puskesmas Sidoarjo	90
29	KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting)	96
30	Wisata Kampung Kelengkeng Dan Kopi Biji Kelengkeng	108
31	Griya Sinau Digital (GSD)	99
32	SiKompLek	91
33	Program Sosialisasi Satgas Peduli Sungai (SIDO RESIK)	97
34	Lestari	97
35	SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library)	94
36	DRIVE THRU UJI KIR -upgrade	96
37	SIPPADU 2.0 (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) -upgrade	107
38	DITAKOPUM (Digital Data Koperasi dan Usaha Mikro)	96
39	Takdol.shop sebagai Aplikasi Online Pemasaran Produk IKM Binaan Dekranasda Sidoarjo	92
40	SSC (Self Service Community)	94
41	Sistem Informasi Non ASN (SINOP)	93
42	SIGAP 300 S 2.0	98
43	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA)	95
44	Pengembangan Sistem Paperless dengan fitur Tandatangani Elektronik pada Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA)	97
45	Pekan Penguatan Inovasi Daerah	95
46	Drive Thru Pembayaran Pajak Daerah	96
47	E-BPHTB (Elektronik Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)--> upgrade	92
48	e-PBB ((eCT-PBB (Cek Tagihan PBB Elektronik), eMonKas-PBB (Monitoring Berkas PBB Elektronik), eSPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Elektronik)) --> upgrade	95
49	e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) -upgrade	91
50	Inovasi Pembayaran Pajak Daerah --> upgrade penambahan VA, BUMDES	98
51	Konfirmasi Status Wajib Pajak Elektronik (eKSWP & Integrasi BPN, DPMPSTP & Kecamatan)	98
52	E-LINMAS	91
53	ARTIS KECAMATAN BALONGBENDO	96
54	Lomba Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) Tingkat Kecamatan Balongbendo	90



No	NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
55	Pengelolaan Sampah Berbasis Budidaya Larva BSF (Maggot)	106
56	Pos Pay (BUMDesa "Lestari" Desa Krembung Kecamatan Krembung)	98
57	Kecamatan Porong Ngartis	91
58	Bangga Tulangan Peduli Dilan	94
59	LADEN (Aplikasi Pendaftaran Penduduk Non Permanen) (Update)	96
60	KIA Back To School	95
61	SEGATA BERKAH (Sedekah Gaya Hidup Kita Menuju Berkah) JUM'AT BERKAH	90
62	JEBOL KIA PELAJAR KECAMATAN SIDOARJO (Jemput Bola KIA Pelajar Kecamatan Sidoarjo)	93
63	Mini Mall Pelayanan Publik	99
64	Pelayanan Inovatif (Perubahan SOP) Kecamatan Sukdono	95
65	KORAN (KOMunitas RAntai iNformasi)	94

Sumber: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Pada tahun 2022 terdapat inovasi yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan, yaitu :

- SIPRAJA meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia;
- PEDULI DILAN meraih penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur Tahun 2022;
- Bappeda Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Perangkat Daerah Kreatif dalam ajang Inotek Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
- Mesin Pengupas Bawang (inovasi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) meraih Juara II Inotek Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 untuk Kategori III.

Berdasarkan hasil penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Sidoarjo masuk kategori **SANGAT INOVATIF**.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar inovasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yaitu :

- Melaksanakan Pekan Inovasi guna menginventarisasi inovasi yang ada;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan menjalin komunikasi dengan *stakeholders* terkait;
- Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2022;
- Melakukan asistensi dan pendampingan terhadap inovasi perangkat daerah.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah	Persentase Inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	70%	70.65%	Beberapa inovasi belum memenuhi kriteria IID karena kurangnya bukti dukung sehingga berpengaruh terhadap tingkat kematangan inovasi	Melakukan pendampingan/asistensi terhadap bukti dukung inovasi yang diajukan

**Capaian Program dan Kegiatan**

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	70	71.43	Masih ditemukan PD yang kurang memahami inovasi yang dapat mendukung IID sehingga tidak melaporkan	Melakukan pendampingan/asistensi terhadap PD sehingga mampu mengidentifikasi inovasi yang dimiliki untuk berkontribusi dalam IID
		Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	90	90	Masih ditemukan beberapa kajian yang tidak membuat policy brief	Berkoordinasi dengan PD pelaksana kajian untuk mencantumkan policy brief sebagai salah satu output
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah policy brief bidang penyelenggaraan pemerintahan yang disusun	1			
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian/ Pengembangan/ Perencanaan Bidang Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	90			

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	982.281.825,00	952.446.512,00	96,96%

Unsur Penunjang Keuangan

Unsur penunjang Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase peningkatan pajak daerah	10,28%	18,24%	100%
2	Persentase Laporan Keuangan PD yang sesuai SAP	100%	100%	100
3	Persentase Aset Tetap yang terdokumentasi Legal	99,85%	99,56%	99,70

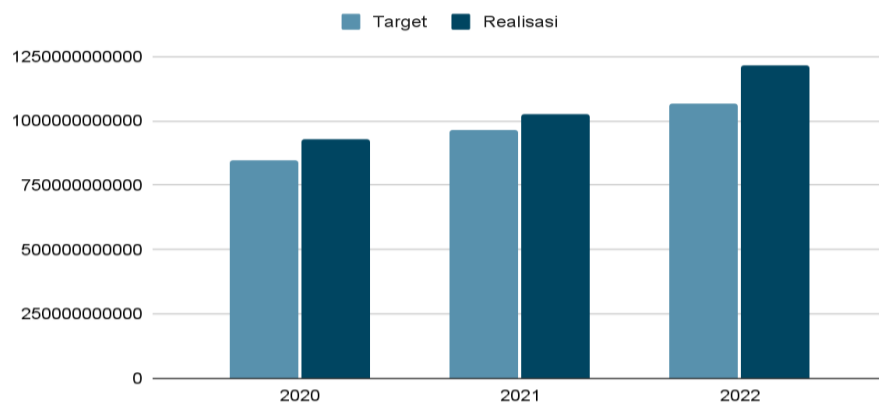
Persentase peningkatan pajak daerah

Pada tahun 2022 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.215.303.165.454 dari target Rp1.068.000.000.000 sehingga tercapai 113,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp1.027.822.704.720 maka terdapat peningkatan senilai Rp187.480.460.734,49 atau sekitar 18,24%.



Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2023, dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Target & Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2022



Tahun	Target	Realisasi
2020	849.455.000.000	929.261.529.986
2021	962.962.000.000	1.027.822.704.720
2022	1.068.000.000.000	1.215.303.165.454

Adapun penerimaan pajak untuk masing-masing sektor pajak tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
A	PAJAK DAERAH	1.068.000.000.000	1.215.303.165.454
1	Pajak Hotel	17.500.000.000	19.993.670.874
2	Pajak Restoran	82.500.000.000	89.623.187.239
3	Pajak Hiburan	5.500.000.000	6.359.422.711
4	Pajak Reklame	15.000.000.000	15.903.462.071
5	Pajak Penerangan Jalan	330.500.000.000	332.411.739.624
6	Pajak Parkir	15.000.000.000	17.980.663.027
7	Pajak Air Tanah	3.000.000.000	3.301.094.440
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	267.000.000.000	289.171.697.663
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	332.000.000.000	440.558.227.805

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, yaitu :

- Penerbitan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;
- Adanya penangguhan ketetapan atas objek yang terdapat piutang di atas 5 tahun



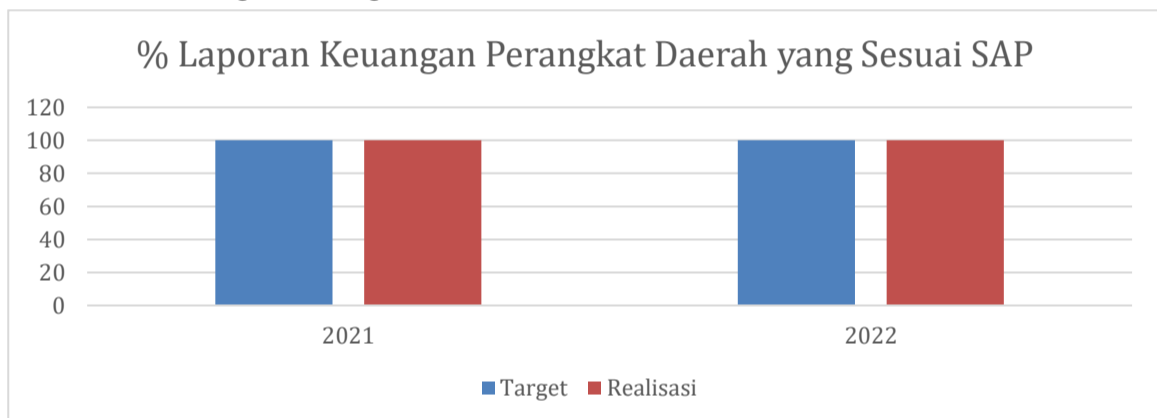
untuk ketetapan dibawah Rp2.000.000 dan 10 tahun untuk ketetapan di atas Rp2.000.000;

- Mendorong berdirinya BUMDes untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- Bekerja sama dengan APH dalam rangka penindakan kepada wajib pajak;
- Pemasangan alat perekam transaksi untuk memudahkan pengawasan transaksi objek pajak;
- Meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses kepada Wajib pajak lebih mudah;

Persentase Laporan Keuangan PD yang sesuai SAP

Jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP adalah 48 OPD dari 48 OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, atau tercapai 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100% maka tidak terdapat perubahan realisasi.

Perkembangan jumlah OPD yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak OPD yang melaporkan Laporan Keuangannya sesuai SAP, yaitu :

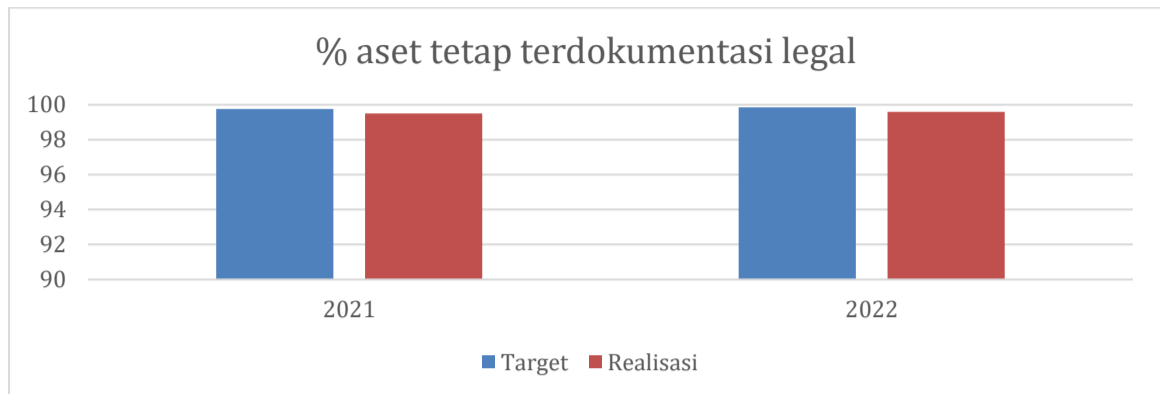
1. Pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD;
2. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
3. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja setiap bulan;
4. Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan;
5. Penyusunan kebijakan akuntansi yang efektif;
6. Bimbingan teknis keuangan daerah;
7. Pengembangan dan optimalisasi SIKSDA.

Persentase Aset Tetap yang terdokumentasi Legal

Jumlah aset tetap yang terdokumentasi legal sampai dengan tahun 2022 sebanyak 450.036 aset dari keseluruhan yang seharusnya terdokumentasi legal sebanyak 452.005 aset atau tercapai 99,56% dari target 99,85% dengan capaian 99,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 99,50% maka terdapat peningkatan angka 0,06 atau sekitar 0,006%.



Perkembangan jumlah aset tetap yang terdokumentasi legal, dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sedangkan apabila ditampilkan dalam bentuk tabel, maka rincian dokumentasi legal untuk aset tetap, sebagai berikut :

Total Aset Tetap	Aset Tetap Berupa Tanah	Tanah Telah Bersertifikat	Tanah Belum Bersertifikat	Total Aset Tetap terdokumentasi Legal	% Aset Tetap Terdokumentasi Legal
452.005	2.678	709	1.969	450.036	99,56

*) unaudited

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan proses legalisasi aset tanah melalui BPN Kabupaten Sidoarjo, dengan perkembangan berkas yang dalam proses setiap tahunnya sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Berkas
2014	1
2019	8
2020	14
2021	606
2022	80
Total	709

Adapun upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak aset tetap yang terdokumentasi legal, yaitu :

1. Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
2. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
3. Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
4. Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN;
5. Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
A	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	10,28%	18,24%		



1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	SKM terhadap layanan pajak daerah	87	94,08		
		Prosentase peningkatan penerimaan PBB P2	4,85%	13,56%		
		Prosentase peningkatan penerimaan BPHTB	14,86%	25,57%		
		Prosentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah Lainnya	11,05%	14,98%		
B	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas audit BPK	WTP	WTP		
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	
		Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	99,85%	99,60%	1)Koordinasi dalam proses pensertifikatan;	Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
					2)Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.	Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN;

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase capaian penerimaan PBB-P2 terhadap target	100%	108,30%		
		Prosentase capaian penerimaan BPHTB terhadap target	100%	132,70%		
		Prosentase capaian penerimaan PDL	100%	103,53%		
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah WP/OP PDL yang terverifikasi	11000	15675		
		Jumlah WP/OP PBB P2 yang terverifikasi	8000	9418		
		Jumlah WP/OP BPHTB yang terlayani	56500	63392		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		



		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,20%		
		Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%		
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	100%	100%		
		2. Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	100%	100%		
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%		
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%		
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,20%		
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	49,45%	28%	1)Koordinasi dalam proses pensertifikatan; 2)Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa	1)Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan; 2)Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan kecamatan dan BPN
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%		
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%		
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%		
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	100%	100%		
		Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	100%	100%		
		Jumlah OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	48 OPD	48 OPD		
		Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.332.794.598,00	39.720.872.668,00	98,48%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.654.408.780,00	7.170.181.844,00	93,67%



1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.547.884.868,00	14.082.953.753,00	96,80%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	713.020.222.240,00	697.376.712.328,00	97,81%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00	72,64%

Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat

Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Profesionalitas ASN	80	68,25	85 %
2	Indeks Sistem Merit	300	314,5	104%

Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Indeks Profesionalitas ASN dihitung menggunakan 4 dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai), bobot 25%;
2. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti) bobot 40%;
3. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS), bobot 30%;
4. Disiplin (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami), bobot 5%

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan perhitungan mandiri Indeks Profesionalitas ASN dengan hasil nilai 68,25 sebagaimana berikut :

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN
12.41	26.67	24.22	4.96	68.25

Capaian tersebut sebesar 85% dari target 80 pada tahun 2022, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 79,39 maka terjadi penurunan senilai 11,14 atau sekitar 14 %.

Penurunan dimaksud terjadi karena :

1. Sumber data yang digunakan untuk perhitungan berbeda. Tahun sebelumnya adalah SAPK dari BKN sedangkan untuk tahun 2022 menggunakan data Simpeg Pemkab Sidoarjo, dikarenakan pada tahun 2022-2023 sedang dilakukan migrasi data dari SAPK ke SIASN.



2. Adanya upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi diperkuat dengan penyederhanaan struktur organisasi melalui kebijakan pengalihan beberapa jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tertentu menyebabkan perubahan juga pada faktor penghitung atas kepemilikan sertifikasi kompetensi. ASN yang dialihkan/disetarakan ke jabatan fungsional saat ini belum mempunyai sertifikat fungsional. Sedangkan penyelenggaraan kediklatan fungsional diselenggarakan /difasilitasi oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional, yang dalam penyelenggaraanya dibatasi kuota. Hal ini mempengaruhi dalam hal perhitungan unsur kompetensi dalam Indek Profesionalitas ASN.
3. Untuk pelaksanaan diklat teknis yang dilaksanakan secara mandiri, ada potensi pegawai sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan tetapi belum melaporkan kepada BKD Kab. Sidoarjo
4. Perubahan regulasi berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengukuran kinerja.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1. Integrasi Sistem Data ;

- Migrasi menuju Simpeg Nasional dalam integrasi data

2. Kebijakan Peningkatan Kualifikasi Kompetensi ASN ,

- Peningkatan Kualitas Diklat dan Lembaganya
- Kebijakan Diklat alternatif
- Peningkatan Kualitas Diklat Mandiri
- Pengembangan aplikasi kediklatan

3. Penyempurnaan Ukuran Kinerja ,

- Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja sesuai PP 30/2019
- Penguatan Peta Strategi Pencapaian Outcome Puncak

4. Penguatan Disiplin dan Talent Angegment ,

Penguatan Evaluasi Disiplin dan budaya kerja yang mendorong Talent Enggement Profesionalitas ASN dicapai melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka dan obyektif, penempatan ASN sesuai kualifikasi dankompetensi, meningkatnya kompetensi ASN, meningkatnya kinerjaASN, meningkatnya motivasi & talent engagement, sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit dan PERMENPAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta.



Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Indeks Sistem Merit sebagaimana Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah meliputi 8 aspek, yaitu :

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan
2. Aspek Pengadaan
3. Aspek Pengembangan Karir
4. Aspek Promosi dan Mutasi
5. Aspek Manajemen Kinerja
6. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan
8. Aspek Sistem Informasi

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengukuran Indeks Sistem Merit oleh KASN dengan nilai capaian 314.5 dari target 300 sehingga tercapai 104 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 297,5 maka terdapat peningkatan senilai 14,5 atau sekitar 4,83 %.

Adapun upaya yang dilakukan agar implementasi sistem merit di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yaitu :

- a. Perencanaan Kebutuhan
 1. Menyusun dan menetapkan peta jabatan terbaru dalam keputusan PPK
 2. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data disiplin dan kinerja pegawai
 3. Menyediakan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam SIMPEG untuk 5 tahun kedepan dan diperbarui secara otomatis
- b. Pengadaan Pegawai
 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan
 2. Melaksanakan evaluasi pasca latsar sebagaimana diatur dalam PERLAN 1/2021 dan KEPKALAN 93/2021
- c. Pengembangan Karir
 1. Memperbarui dan menetapkan SKJ sesuai dengan peta jabatan terbaru
 2. Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir pemetaan talenta dan rencana suksesi
 3. Menyusun analisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi seluruh pegawai yang diperbarui secara berkala
 4. Menyusun analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala
 5. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang 5 tahun
 6. Melaksanakan diklat berdasarkan analisis kesenjangan pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan individu dan organisasi



7. Melaksanakan program praktek kerja dan/atau pertukaran pegawai secara terjadwal dan dievaluasi
 8. Menyusun pedoman dan melaksanakan program coaching dan mentoring secara terjadwal serta dievaluasi
- d. Promosi dan Mutasi
1. Menetapkan rancangan peraturan pola karir yang telah disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi
 2. Menyusun dan menetapkan peraturan tentang tata cara pengisian JPT dan tata cara promosi dan mutasi, serta disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi
- e. Manajemen Kinerja
1. Melaksanakan penilaian kinerja berkala sebulan sekali dengan disertai dialog kinerja
 2. Menyusun analisis permasalahan kinerja berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja pegawai dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
1. Menjadikan aspek kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pemberian TPP
 2. Mengintegrasikan data penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku dengan sistem BKN
- g. Sistem Informasi
1. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data disiplin, kinerja dan pembinaan pegawai
 2. Mengintegrasikan e-kinerja dengan perhitungan TPP dan system pengembangan karir pegawai

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	ASN yang Profesional Berbasis Sistem Merit	Indek Profesionalitas ASN	80	68,25	1. Dimensi KinerjaPerubahan regulasi berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengukuran kinerja2. Dimensi Kompetensi• Kebijakan penyetaraan/pengalihan jabatan, Perubahan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi penghitungan Indeks Profesionalitas ASN. Peralihan jabatan dari struktural eselon IV ke jabatan fungsional tertentu menyebabkan perubahan juga pada faktor penghitung kepemilikam sertifikasi kompetensi. ASN yang terkena dampak kebijakan penyetaraan	1. Integrasi Sistem Data ;• Migrasi menuju Simpeg Nasional dalam integrasi data2. Kebijakan Peningkatan Kualifikasi Kompetensi ASN ,• Peningkatan Kualitas Diklat dan Lembaganya• Kebijakan Diklat alternatif• Peningkatan Kualitas Diklat Mandiri• Pengembangan aplikasi kediklatan3. Penyempurnaan Ukuran Kinerja ,• Penyempurnaan Sistem Penilaian



					jabatan harus mengikuti diklat fungsional sebagai legalisasi kompetensi. Diklat Fungsional belum dapat diselenggarakan/difasilitasi untuk jabatan fungsional tertentu hasil penyetaraan jabatan disebabkan instansi pembina juga belum semuanya siap dengan banyaknya pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional• Pelaporan dan pencatatan diklat teknis mandiriUntuk pelaksanaan diklat teknis yang dilaksanakan secara mandiri, ada potensi Pegawai sudah mengikuti pelatihan tetapi belum melaporkan kepada BKD Kab. Sidoarjo.	Kinerja sesuai PP 30/2019• Penguatan Peta Strategi Pencapaian Outcome Puncak• Membangun IKI ASN yang berdampak4. Penguatan Disiplin dan Talent Anegement , Penguatan Evaluasi Disiplin dan budaya kerja yang mendorong Talent Engegment Profesionalitas ASN dicapai melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka dan obyektif,penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi, meningkatnya kompetensi ASN, meningkatnya kinerja ASN, meningkatnya motivasi & talent engagement, sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit dan PERMENPAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta
2	Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit	Nilai Sistem Merit	300	314,5		
3	Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang profesional	Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	25	26,67	Pendataan dan Rekapitulasi Data kompetensi ASN yang masih belum secara optimal mengakomodir pelaksanaan peningkatan kompetensi secara mandiri	Pengembangan aplikasi kediklatan guna mengakomodir data kediklatan dan kompetensi tiap ASN

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	50,1	52		
		Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi	100	100		



		Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	81	81		
		Prosentase pegawai berkinerja minimal baik	80	99,69		
		Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85	85		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	50,1	52		
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100	100		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase PNS berkinerja baik dan sangat baik	81	99,69		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Motivasi Pegawai	85	85		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 2(JP per tahun	40%	43,72%		
	Pengembangan Kompetensi Tcknls	Persentase PNs yang berdayaguna setelah mengikuti diklat	70%	98%		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	80%	99%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2022	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.247.953.561,00	11.659.473.681,00	95,20%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.105.954.030,00	2.492.807.492,00	60,71%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.244.712.072,00	3.139.502.245,00	96,76%

**E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN SEBELUMNYA****A. Urusan Pendidikan**

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.	Pemerintah Daerah diharapkan segera memperbaiki gedung-gedung sekolah tingkat SD dan SMP yang dalam kondisi rusak berat maupun rusak ringan	1. Rehabilitasi 8 (delapan) kerusakan gedung kelas SD kondisi rusak berat 2. Optimalisasi BOSREG dan BOSDA untuk pemeliharaan rusak ringan SD/MI dan SMP/MTs
2.	Membangun sekolah SMPN Prambon yang pada tahun 2021 belum terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19	1. Pembebasan lahan dalam proses FGD dengan masyarakat setempat yang kemudian dilanjutkan dengan proses appraisal dan pengurusan 2. Pelaksanaan pembangunan gedung SMPN 2 Prambon diusulkan pada renja 2023

B. Urusan Kesehatan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Kesehatan		
1.	Dalam pemenuhan kebutuhan data untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat, Pemerintah Daerah harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait data dan kebijakan program/kegiatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan yang ada di pusat	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemegang program Kabupaten, Provinsi dan Pusat terkait indikator-indikator yang menjadi parameter pemberian DID (balita stunting, imunisasi balita lengkap, penanganan persalinan oleh nakes)
2.	Untuk menjaga perekonomian daerah pada tahun 2022 terus meningkat dan adanya pemulihan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan terus melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan boosternya bagi seluruh masyarakat	Dinas Kesehatan sampai saat ini tetap melaksanakan percepatan penanganan pandemic covid-19 dengan berbagai upaya antara lain : <ul style="list-style-type: none">o Pelaksanaan tracing dengan rasio 1 kasus konfirmasi. Kontak erat yang ditracing minimal 15 orang (1:15)o Memberikan treatment yang sesuai standaro Melaksanakan semua testing pada kasus suspect dan kontak erat (3T)o Selalu melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). Saat ini dalam 3 pekan terakhir, penambahan konfirmasi terpantau turun setiap harinya antara 0-10 kasus.o Dinas kesehatan selalu berusaha meningkatkan capaian program vaksinasi disetiap tahapan
3.	Peningkatan fasilitas kesehatan serta pelayanan yang ada di seluruh Puskesmas ataupun Fasilitas Kesehatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka :	a. Skrining yang dikemas dalam kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) setiap bulan b. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dilakukan pemeriksaan kesehatan, konseling jiwa dan pemberian obat jiwa serta kunjungan ke rumah pasien jiwa yang dilakukan



	<p>a. Mengurangi angka kematian yang tinggi dengan melakukan screening awal di fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas);</p> <p>b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)</p> <p>c. Tidak membedakan pelayanan kesehatan untuk pasien JKMM maupun pasien umum</p>	<p>sesuai standar. Selain itu, telah dibangun beberapa posyandu jiwa di beberapa puskesmas. Beberapa puskesmas memberikan inovasi terkait pengelolaan kesehatan jiwa antara lain: Kopisemel (komunitas peduli kesehatan mental) oleh puskesmas krian dan Perempuan Cahaya Jiwa oleh Puskesmas Candi yang bekerja sama dengan badan kotak amal yang memberikan bantuan support dan mencari bantuan dana sehingga ODGJ bisa bekerja secara mandiri.</p> <p>c. Selama ini tidak ada perbedaan antara pasien umum dan pasien JKMM. Seluruh RS yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sudah ditekankan bahwa meskipun tidak membawa persyaratan saat merujuk, tetap dilayani dan diberi toleransi waktu untuk melengkapi berkas selama 3 X 24 jam</p>
4.	Percepatan mekanisme administratif untuk pelayanan JKMM	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk diketahui bahwa alur pelayanan JKMM tidak hanya di Dinas Kesehatan namun lintas sektor, terstruktur dan berjenjang kecuali kasus gawat darurat. Mulai dari pengurusan SKTM (surat Keterangan Tidak Mampu) di desa/ kelurahan, mengetahui kecamatan, kemudian rujukan ke puskesmas, lalu rekom dari Dinas Sosial, terakhir rekom dari Dinas Kesehatan untuk dirujuk ke dr. Soetomo dan RS. Menur Surabaya. Administrasi terkait pelayanan JKMM yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan langsung dilayani dan dapat dipakai saat itu juga saat pasien mengurus administrasi di Dinas Kesehatan, sehingga perlu berkomunikasi dengan dinsos untuk percepatan administrasi yang menjadi tupoksi dinsos • koordinasi dengan Dinsos (terkait aplikasi SIKSNG untuk update DTKS) dan Bagian Pemerintahan (terkait aplikasi SIPRAJA untuk pengurusan SKTM) untuk mempercepat alur proses administrasi pengurusan JKMM
5.	Terkait dengan pengadaan tanah di Puskesmas Sekardangan, pada tahun 2022 bisa dialihkan untuk pembangunan gedung Puskesmas Sekardangan menjadi 2 (dua) lantai	pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas Sekardangan menjadi 2 (dua) lantai yang diusulkan pada renja 2024

C. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Satuan Polisi Pamong Praja		
1.	Pemerintah Daerah harus terus menegakan Peraturan Daerah, salah satunya dengan cara sosialisasi dan publikasi dengan melibatkan Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak spanduk, pamflet, leaflet untuk mensosialisasikan perda / perbup • Optimalisasi publikasi melalui media sosial



2.	Memposisikan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam pembangunan daerah termasuk dalam bidang pendapatan daerah	Optimalisasi operasi yustisi dengan menambah titik operasi
OPD Pelaksana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
3.	Dalam rangka penurunan resiko bencana, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat tanggap bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana pada tingkat desa untuk 15 desa di tahun 2022 • Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada desa-desa yang berisiko tinggi bencana dari tahun 2017, sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 11 Desa, rencana 2022 ada 1 Desa yang membentuk Desa Tangguh Bencana • Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada sekolah/madrasah/pesantren yang berada pada area berisiko tinggi bencana dari tahun 2020, sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 4 sekolah, rencana 2022 menambah 1 sekolah
4.	Perlu adanya himbauan terkait sarana dan prasarana pengendalian bencana (kebakaran) di gedung pemerintah maupun swasta	Melaksanakan Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

D. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		
1.	Membuat inovasi dalam percepatan pemeliharaan jalan yang setiap tahunnya menjadi permasalahan di masyarakat	Pada tahun 2022 akan dilakukan pembentukan satgas dan juga call center PUBMSDA (yang bersinergi dengan call center 112 Diskominfo) dengan berbasis wilayah untuk membantu Quick respons pelayanan pemeliharaan/peningkatan jalan dan sumber daya air
2.	Normalisasi saluran irigasi dari hulu ke hilir dan membuang tanah/sedimen hasil normalisasi bekerjasama dengan pihak ketiga	Akan kami tindak lanjuti proses pembuangan sedimentasi dengan pihak ketiga, khususnya kepada pihak ketiga atau masyarakat yang membutuhkan buangan tanah sedimentasi. Hal ini mengingat tanah sedimentasi secara teknis tidak dapat serta merta untuk pengurukan atau kepadatan
3.	Melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pekerjaan pembangunan jalan-jalan beton dan Frontage Road di tahun 2021	Mengidentifikasi melalui manajemen resiko, dimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan pekerjaan infrastruktur ada 5 faktor, sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> Tenaga Kerja (Man) Jumlah tenaga yang hadir di lapangan dan yang sesuai persyaratan administrasi tidak sesuai. Peralatan (Machine) Keterlambatan Pembebasan Lahan untuk Frontage Road, mempengaruhi persiapan dan manuver alat dalam pengerjaan.



		<p>c. Bahan (Material) Teknis di lapangan, target per hari seharusnya dilakukan pengurukan dengan 12 Dump Truck, namun di lapangan yang ada hanya 3 hingga 4 Dump truck.</p> <p>d. Keuangan (Money) Ketidakmampuan financial kontraktor/ penyedia menjadi salah satu faktor utama keterlambatan suatu pekerjaan.</p> <p>e. Metode yang digunakan (Methode) Penerapan metode yang digunakan dalam pekerjaan infrastruktur.</p>
OPD Pelaksana : Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
4.	Menetapkan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Sidoarjo	<p>Melakukan updating data yang disepakati berdasarkan Berita Acara kesepakatan verifikasi aktual penyelesaian LSD tidak sesuai peruntukan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Pertahanan Kab. Sidoarjo, yang dihadiri oleh Ditjen PPTR – ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, Bappeda Kab. Sidoarjo, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo (DPMPTSP) dengan hasil LSD terkoreksi:</p> <p>a) Yang disepakati untuk dipertahankan : 6.036, 39 Ha</p> <p>b) Yang masih perlu disepakati : 10.845,56 Ha</p> <p>c) Yang tidak dapat dipertahankan : 922,63 Ha</p>

E. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.	Pemerintah Daerah perlu mengkaji dan membuat regulasi (Perda) dalam penanganan Kawasan kumuh di Sidoarjo, sehingga bisa mendapatkan tambahan anggaran dari pusat dalam penanganannya	Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, regulasi terkait penanganan kawasan kumuh akan dilakukan kajian pembahasan
2.	Melakukan inovasi dalam menuntaskan masalah sanitasi atau jamban sehat dan air bersih di Sidoarjo yang non PDAM	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan pembangunan jamban di seluruh Kecamatan melalui CSR Membangun SPAM baru di 13 Desa yang diusulkan melalui CRS

F. Urusan Sosial

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Sosial		
1.	Dalam rangka pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah harus melakukan pemberian bantuan sosial kepada	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/103/438.1.1.3/2022 tentang penerima bantuan sosial pangan non tunai



	masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian bansos pangan non tunai untuk 2.700 orang setiap bulannya dengan nilai Rp.150.000,-
2.	Mempertimbangkan bantuan makanan yang diberikan kepada panti / yayasan sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang awalnya berupa natura / sembako menjadi dalam bentuk uang tunai	untuk sementara di tahun 2022 masih berupa natura / sembako, namun untuk usulan tahun 2023 berupa uang tunai yang sudah diakomodir pada renja tahun 2023
3.	Melakukan inovasi strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda penyelenggaraan kesejahteraan sosial, progres sedang dalam pengajuan bagian hukum • optimalisasi KUBE (kelompok usaha bersama) melalui 1 kecamatan 1 KUBE

G. Urusan Tenaga Kerja

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja		
1.	Pemerintah Daerah perlu membentuk tim Satuan Tugas Lintas Sektor untuk menangani angka pengangguran terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun draft Peraturan Bupati tentang Pembentukan Skill Development Centre sebagai Tim Satuan Tugas Lintas Sektor untuk menangani angka pengangguran terbuka • Membentuk forum Skill Development Centre yang terdiri dari unsur akademisi, bisnis (APINDO, KADIN), komunity / masyarakat, pemerintah / government, yang diketuai oleh Bupati, dengan tujuan sinergitas pelatihan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi awal SDC oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Sosialisasi SDC oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI 3. Studi komparasi ke Kabupaten/Kota yang telah membentuk SDC 4. Penyusunan SK / Peraturan Bupati tentang Pembentukan SDC 5. Pembahasan SK / Peraturan Bupati tentang Pembentukan SDC 6. Pengesahan SDC Kabupaten Sidoarjo
2.	Mengidentifikasi minat dan potensi para pencari kerja di setiap wilayah sebagai dasar dilaksanakannya pelatihan kerja	Membangun aplikasi SIAP KERJA untuk memetakan potensi pencari kerja
3.	Terkait kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi peserta pelatihan yang telah mendapatkan pekerjaan maupun yang telah berwirausaha	memetakan peserta pelatihan yang sudah dilatih apakah sudah bekerja berwirausaha atau belum pada renja 2023



4.	Mewujudkan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Sidoarjo bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi untuk menyusun RTK Mikro • menyusun database RTK Mikro
----	---	---

H. Urusan Pangan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Pangan dan Pertanian		
1.	Membuat Lumbung	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Kebijakan teknis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai rumusan Perda • pembuatan Lumbung oleh Gapoktan Tri Bakti Desa Segodobancang Kecamatan Tarik • mengusulkan pembuatan lumbung Desa Simogirang Kecamatan Prambon pada kegiatan DAK 2023
2.	Memprioritaskan penanganan desa yang rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penyusunan peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2021 • Menindaklanjuti peta FSVA pada penanganannya
3.	Memperbaiki kualitas pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan uji pangan segar dengan rapid test pestisida namun terbatas pada sayur dan buah dengan jumlah sample 50 komoditas dan 3 sampel buah diuji di Laboratorium terakreditasi karena keterbatasan anggaran. • diusulkan pengadaan rapid tes untuk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) serta penyusunan skor PPH Konsumsi.

I. Urusan Pertanian

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Pangan dan Pertanian		
1.	Membuat kebijakan untuk melindungi kelompok tani saat panen	untuk merumuskan kebijakan perlindungan kelompok tani saat panen perlu berkoordinasi dengan TPID
2.	Membangun sumur pompa, pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berupa excavator mini dan mesin panen (combo)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Combinne harvester sudah dilaksanakan (APBD) sebanyak 1 Unit • Melakukan pengadaan combine harvester di TA 2022, sebanyak 5 unit • Mengusulkan pengadaan alsintan pada kegiatan DAK tahun 2023 • Sudah mengusulkan pengadaan sumur pompa dan excavator mini pada kegiatan APBN dan DAK untuk TA 2023
3.	Membangun laboratorium pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> • telah diusulkan pembangunan laboratorium pakan ternak pada Renja 2023 dan kegiatan DAK tahun 2023 ke Kementerian Pertanian • sudah melakukan kajian/ Feasibility study pendirian Laboratorium Pakan Ternak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 untuk memantau kualitas pakan yang beredar di



		masyarakat, serta keberadaan 9 pabrik Pakan ternak di kabupaten Sidoarjo
4.	Mempertahankan lahan Produktif (LP2B)	Penyusunan kajian pemetaan ulang LP2B pada 7 kecamatan Kabupaten Sidoarjo
5.	Sosialisasi kepada generasi muda dalam rangka mempertahankan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan alat mesin pertanian kepada petani milenial Pemberdayaan HIPPA
6.	Menyelesaikan persoalan ketersediaan air untuk irigasi	optimalisasi koordinasi melalui kegiatan Koordinasi Komisi Irigasi (Komir)
7.	Pemetaan fungsi UMKM yang berkaitan dengan potensi produksi pertanian di setiap daerah	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Pemetaan komoditi unggulan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Telah disusun aplikasi pelayanan untuk pelaku pangan yang akan mengajukan registrasi PSAT
8.	Intensifikasi strategi pertanian yang perlu di sahkan oleh Eksekutif dan Legislatif	mereview kembali LP2B melalui kajian
9.	Pengawasan terhadap subsidi pupuk hingga bisa sampai ke petani/konsumen secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Sidoarjo nomor : 188/662/438.1.1.3/2020 tentang KP3 dan SK Kepala Dinas Pangan nomor : 188/214/438.5.10/2022 tentang Verval Pupuk Bersubsidi melakukan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke para petani, serta koordinasi dengan kios pupuk bersubsidi

J. Urusan Lingkungan Hidup

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
1.	Pemerintah Daerah melakukan peningkatan penghijauan dengan menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di perkotaan dan permukiman yang padat serta di wilayah Barat Sidoarjo	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak ada penambahan luasan RTH namun melakukan revitalisasi RTH sejumlah 7 RTH, meliputi : alun-alun, abhirama, jalan perumahan pondok chandra waru, taman aloha s.d juanda, taman median jalan pahlawan, taman median jalan waru, tugu babalayar
2.	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di setiap desa untuk difungsikan kembali	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pendampingan dan evaluasi kinerja pengelolaan persampahan dengan skala layanan 1 desa pada seluruh Desa Melaksanakan revitalisasi TPST Kawasan untuk 4 TPST, yaitu : TPST Kawasan Lingkar Timur, TPST Kawasan Barengkrajan Krian, TPST Kawasan Taman, TPST Kawasan Banjarbendo Sidoarjo
3.	Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dalam penanganan sampah di lingkungan masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Kecamatan terkait pengelolaan persampahan dengan menjadi narasumber kegiatan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh desa/kelurahan Mengusulkan rencana kegiatan sosialisasi kepada seluruh Desa dalam hal penanganan sampah pada Renja 2023



K. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1.	Salah satu penyebab terkendalanya layanan kependudukan adalah kurang lancarnya koneksi internet di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu DPRD merekomendasikan agar ada tambahan bandwidth fasilitas internet sebagai cadangan selain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengusulkan anggaran penambahan bandwidth sebesar Rp.200.000.000,- pada renja 2023

L. Urusan Perhubungan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perhubungan		
1.	Memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perbub Nomor 53 Tahun 2020 tentang tatacara kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran dalam rangka memenuhi target ditahun 2021	Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Perparkiran
2.	Mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memberlakukan karcis parkir sebagai pengganti parkir berlangganan sambil menunggu kerja sama dengan pihak ketiga dan rekomendasi BPK	Persediaan karcis parkir yang ada masih mencukupi sampai dengan pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sehingga tidak perlu lagi untuk cetak karcis parkir, dan sudah diberlakukan / dilaksanakan
3.	Membentuk Satuan Tugas yang bertugas dalam Pemeliharaan PJU yang rusak/mati yang didukung dengan kendaraan skymaster, sehingga pelayanan dapat berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none">• SK Tim 008/366/438.5.13/2022 tentang Tim Reaksi Cepat Penanganan Jalan Umum (TRC PJU), yang bertugas menjadi satgas• Pengadaan Truk Skylift 2 Unit dan pengadaan Pick Up Skylift 1 Unit
4.	Segera membangun tempat uji kir di lahan milik Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) di Lingkar Timur	Menunggu penyelesaian Keluasan tanah dari pasar unggas yang akan diserahkan ke dinas perhubungan dari disperindag
5.	Membuat pemetaan (grand design) terkait sarana dan prasarana dalam urusan Perhubungan misalnya pemenuhan pemasangan rambu-rambu jalana, marka jalan dan CCTV;	Dokumen Laporan Akhir Jasa Konsultansi Pendampingan dan database Perlengkapan Jalan dan Pertumbuhan Arus Lalu Lintas Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
6.	Membuat manajemen rekayasa lalu lintas di titik kemacetan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.	Dokumen Laporan Akhir Rencana Induk Transportasi Kabupaten Sidoarjo untuk 5 tahun ke depan



M. Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Komunikasi dan Informatika		
1.	Terkait permasalahan koneksi jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih belum bisa optimal, diharapkan Pemerintah Daerah membuat perencanaan dan inovasi untuk mengembangkan infrastruktur jaringannya (bandwidth) secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">Menjaga koneksi jaringan ke OPD tetap terhubung dengan Data Center/NOCMonitoring menggunakan Perangkat Internet Access Management (IAM) dan aplikasi monitoring jaringanPercepatan konfigurasi ISP dengan providernya
2.	Membuat masterplan intranet/internet yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal	Dokumen RITIK 2021 - 2025
3.	Membuat cadangan bandwidth agar apabila ada kendala bisa teratasi	sudah terealisasi pemanfaatan bandwidth cadangan yang berfungsi ketika ada kendala
4.	Menggabungkan aplikasi pelayanan yang ada di setiap OPD menjadi hanya 1 (satu) aplikasi yang memuat seluruh pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Menyusun blueprint platform, yang mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan yang ada di Sidoarjo, berupa rumah aplikasi yang mewadahi integrasi seluruh aplikasi pelayanan
5.	Memperbarui regulasi terkait teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo	Dalam proses penyusunan draft Perbup SPBE Kab Sidoarjo, rencana selesai di tahun 2022
6.	Memperluas jaringan koneksi internet menggunakan Fiber Optic (FO) sampai ke desa-desa agar masyarakat bisa mempromosikan produk UMKM melalui media digital	masih memerlukan pembahasan dengan Diskop (sebagai koordinator UMKM), dan Bappeda (terkait anggaran), namun sebagai langkah efisiensi dapat menambah hosting dan domain khusus UMKM tanpa memperluas jaringan, cukup dengan memanfaatkan akses internet desa, sehingga lebih cepat dalam mempromosikan produk UMKM

N. Urusan Penanaman Modal

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Melakukan koordinasi terkait program pengadaan bandwidth di MPP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">mempertahankan bandwidth dari Diskominfo, namun menambah bandwidth melalui kerjasama dengan penyedia jasa bandwidthkoordinasi dengan kominfo untuk penataan ulang topologi jaringan dan kebutuhan access point
2.	Mengkaji pembagunan mini MPP secara mendalam dan terukur, dikarenakan saat ini MPP Virtual lebih bisa dianggap efektif dan efisien	Melalui Aplikasi SIPRAJA



3.	Untuk menghindari tumpang tindihnya aplikasi pelayanan yang ada di Sidoarjo, Pemerintah Daerah hendaknya merencanakan masterplan secara jelas terkait inovasi teknologi pelayanan	Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun masterplan pengembangan aplikasi terintegrasi
----	---	---

O. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
1.	Terkait pemberian bonus atlet Porprov Jatim VII, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bisa berkoordinasi dengan Bupati dan BAPPEDA terkait alokasi anggarannya	Akan diusulkan pemberian reward /bonus untuk atlet berprestasi melalui Renja PAK 2022
2.	Pemerintah Daerah diharapkan bisa membuat rekam jejak perolehan prestasi para atlet Sidoarjo	Optimalisasi informasi prestasi atlet melalui media sosial dan elektronik

P. Urusan Pariwisata

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
1.	Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata harus terus melakukan kegiatan pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti pameran APKASI, MITF (Mojopahit Trafel Fair), mengadakan gelar seni di anjungan TMII optimalisasi promosi wisata melalui citytour, media sosial (instagram, youtube, dll)

Q. Urusan Perpustakaan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1.	Terkait indeks minat baca di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggap perlu terus melakukan inovasi dalam meningkatkan indeks minat baca di Sidoarjo, salah satunya dengan cara memetakan kebiasaan masyarakat, rata-rata usia dan minat masyarakat yang disesuaikan dengan konten buku di perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Perpustakaan Percontohan. Pada tahun 2021 terealisasi 1 perpustakaan dan tahun 2022 ditargetkan 6 perpustakaan Mengimplementasikan aplikasi SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library) yang menjangkau koleksi e-Book, dan layanan online pinjam buku, juga ada menu usulan buku yang diinginkan/ dibutuhkan ada di perpustakaan
2.	Indeks pembangunan literatif masyarakat diharapkan ada bukti nyata yang diterapkan di	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah kegiatan pendataan atau sensus perpustakaan desa/kelurahan dan



	masyarakat misalnya saja UU ITE yang perlu disampaikan dan disosialisasikan di masyarakat	sekolah yang ada di kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2021 kegiatan IPLM belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada tahun 2022. <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi SIDIRA ke Desa, Sekolah, baik melalui perpustakaan keliling
3.	Pengukuran indeks minat baca dan indeks literasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran perangkat-perangkat desa sampai ke tingkat RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran indeks minat baca di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 73,4% (Kategori Sangat Baik) , untuk tahun 2022 kegiatan pengukuran ini ditingkatkan levelnya menjadi Indeks kegemaran masyarakat dengan target 62% Dalam proses kegiatan pengukuran ini selalu melibatkan perangkat Desa/Kelurahan dan Karang taruna sebagai pengelola perpustakaan desa
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan bisa bekerjasama dengan pihak ketiga (penerbit) untuk memperoleh CSR dengan tujuan memperbaharui koleksi buku di setiap perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (penerbit) Beberapa penerbit telah memberikan bantuan koleksi bahan pustaka secara isidentil. Beberapa tahun terakhir telah berjalan kerjasama penyediaan bahan pustaka dan sarana prasarana pendukung dengan LSM Mutiara Rindang. Setiap tahun terdapat bantuan bahan pustaka dari masyarakat secara perorangan atau kelompok
5.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diharapkan ada diseluruh pelayanan perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	Telah difasilitasi melalui aplikasi e-SKM

R. Urusan Kearsipan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1.	Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk membuat regulasi terkait pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo, termasuk pengelolaan arsip fisik maupun dalam bentuk digital serta arsip kuno dan artefak sejarah.	Sudah ada Perda Kearsipan No 1 Tahun 2020 dan sudah ada Perbup Tata Kelola Kearsipan dalam proses Bagian Hukum

S. Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perikanan		
1.	Mewujudkan pembangunan budidaya air tawar bergantian dengan lahan pertanian di wilayah Sidoarjo Barat dengan menggunakan dana hibah dan menggunakan sistem pelatihan dan bantuan dengan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan permodalan untuk pembudidaya air tawar di daerah Sidoarjo Barat sebanyak 11 lokasi



	menggunakan anggaran PAK Tahun 2022	
2.	Memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana budidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak dan pembudidaya ikan di Sidoarjo Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Rehab saluran tambak di 55 titik lokasi mulai dari Kecamatan Waru sd Kecamatan Jabon, untuk menjaga kualitas air budidaya air payau (salinitas / kadar garam) • Pembangunan bronjong yang belum terbangun sebanyak 60 titik lokasi, sebagai informasi bahwa kebutuhan pembangunan bronjong masih banyak, sampai saat ini masih terpenuhi sekitar 55% • Pembangunan / rehab jalan produksi masih perlu dibanyak dibangun, karena pemenuhan masih sekitar 10%, sering terkendala status lahan, sehingga rencana diselesaikan melalui surat pernyataan warga kalau memperbolehkan pembangunan jalan produksi untuk kepentingan umum, selain itu juga membangun PJU 198 titik untuk penerangan di sekitar jalan produksi • Pembangunan jembatan produksi dari kayu ulin sebanyak 40 titik lokasi jembatan, dan yang belum terbangun sebanyak 20 lokasi

T. Urusan Perdagangan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
1.	Melakukan penertiban terhadap swalayan-swalayan yang tidak memiliki izin	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/189/438.1.1.3/2022 Tentang Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yang bertugas mengawasi toko swalayan, mall, pusat perbelanjaan terkait perijinan • Membuat aplikasi INDAGO (Informasi Perdagangan Sidoarjo) untuk memantau perijinan toko swalayan
2.	Merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang sudah tidak layak sehingga bisa menciptakan pasar rakyat yang representative	Revitalisasi Pasar Buduran & Watutulis, untuk Pasar Buduran sudah mendapatkan tugas pembantuan namun terkendala lahan (kurang dari 2.000 meter), sehingga untuk tahun 2022 diusulkan pasar prambon, krembung, bulang dan pasar desa surungan - balongbendo melalui APBN
3.	Mengevaluasi kembali terkait pembangunan pasar modern yang ada di Sidoarjo menyesuaikan dengan penerapan Perda tentang Pasar Swalayan	Mengevaluasi pemberian rekomendasi teknis pendirian toko swalayan sesuai dengan perda pasar swalayan, terutama terkait radius antara pasar swalayan dengan pasar tradisional 1.000 meter, antara toko swalayan dan toko swalayan lainnya yang 1 manajemen
4.	Menyelesaikan pembangunan Pasar Kepuhkiriman yang sudah bertahun-tahun terbengkalai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan upaya beauty contest untuk menjaring investor/mitra pembangunan pasar kepuhkiriman



		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak ada calon mitra yang berminat melalui beauty contest, pembangunan pasar kepuhkiriman menggunakan APBD
--	--	---

U. Unsur Penunjang

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah		
1.	Membuat sistem yang menampilkan kesesuaian jadwal pada SIRUP terkait data-data OPD tentang proses pengadaan barang dan jasa	Telah dibuat aplikasi SiMENTALBAJA, yang terintegrasi dengan data SIRUP.
2.	Membuat sistem yang membatasi jumlah paket pekerjaan yang diperoleh masing-masing kontraktor	Telah dibuat aplikasi SiMANIS PBJ yang didalamnya terdapat informasi pemenang tender maupun non tender, sehingga terdapat informasi data paket masing-masing kontraktor
OPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
3.	Melakukan koordinasi dengan BPN terkait berkas yang sudah ada di BPN, sehingga proses sertifikasi bisa segera diselesaikan.	Membentuk SK Tim Penelusuran Aset dan SK Tim Penyelesaian Status Kepemilikan BMD
4.	Melakukan koordinasi dengan desa terkait dengan status keberadaan/kepemilikan tanah di SD Inpres.	Pemanfaatan aset desa yang sudah tidak digunakan untuk fasilitas umum agar dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi / Bumdes
5.	Menentukan lokasi pembangunan Depo Arsip pada tahun 2022.	Koordinasi dengan Dinas Perpustakaan Arsip dan penyelesaian pemrosesan tukar menukar aset tanah di desa Lebo Kecamatan Sidoarjo sebagai alternatif penyediaan lahan Depo Arsip

V. Kecamatan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
OPD Pelaksana : Kecamatan		
1.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan terkait masterplan dalam pengaturan pengurusan perijinan secara online	sudah ada SIMBG dari pusat sehingga proses perijinan sudah tidak ada lagi di Kecamatan
2.	Berperan aktif dalam pengumpulan data kemiskinan di seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	sebenarnya dari tahun ke tahun sudah ada peran aktif dalam bentuk fasilitasi / pendampingan ke Desa, dan sudah ada aplikasi SIKSNG yang mengupdate data DTKS, dan bagi Desa yg belum memberikan honor utk operator dapat diusulkan melalui APBDes
3.	Perlu adanya tambahan pegawai (ASN/Non ASN) dalam meningkatkan pelayanan yang ada di kelurahan	sudah keluar SK Bupati tentang Anjab ABK Kecamatan/Kelurahan dan sedang dalam penataan oleh BKD dan Bagian Organisasi, apabila bisa ASN, jika tidak bisa maka melalui NonASN
4.	Program PIWK harus didukung regulasi yang tepat, menghindari tumpang tindihnya kewenangan antara Kecamatan dan OPD terkait	Terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sudah diatur dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2021 dan saat ini dalam proses review



5.	Melakukan koordinasi terkait pengembangan infrastruktur jaringan internet yang ada di setiap desa	Diskominfo disarankan akan memfasilitasi hosting dan domain (untuk promosi UMKM) serta pelatihan dari UMKM di Desa, dan dapat memanfaatkan akses internet yang ada di Desa, sehingga lebih cepat aksesnya dan lebih efisien anggaran. Akan diusulkan pada Renja 2023
----	---	--



BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.



BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Maret 2021 : Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Pelayanan Prima (A) diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo oleh Kementerian PAN dan RB di Jakarta;
2. Pada tanggal 18 Mei 2021 : Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPJ Tahun Anggaran 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur;
3. Pada tanggal 01 April 2021 : Penghargaan Pencapaian Terbaik Pertama Kategori III Penilaian Kompetensi di ajang BKN Award 2020 dari Kepala BKN Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bupati Sidoarjo diberikan di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Pada tanggal 13 April 2021 : Penghargaan atas kontribusinya ikut serta membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS terkait PermenPANRB Nomor 08 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS di K/L/P diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo diberikan oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia di Kantor Kementerian PAN & RB di Jakarta;
5. Pada tanggal 19 November 2021 : Penghargaan Top 30 KOVABLIK (Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) melalui Aplikasi SIPRAJA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterima oleh Bupati Sidoarjo dari Menteri PAN & RB diberikan di Grand City, Surabaya
6. Pada tanggal 26 November 2021 : Penghargaan dari BKN melalui ajang BKN Award 2021 “Penilaian Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik” peringkat II yang diberikan oleh Kepala BKN Kepada Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya;
7. Pada tanggal 30 November 2021 : Penghargaan Investment Award 2021 kategori Juara Pertama Klaster 1 PDRB lebih dari 100 Triliun Rupiah di Hall JW Marriot, Surabaya;



8. Pada tanggal 30 November 2021 : Penghargaan dan Sertifikat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Eksistensi Budaya Tradisional yang diberikan oleh Kemenparekraf Republik Indonesia;
9. Pada tanggal 10 Desember 2021 : Penghargaan “PR Indonesia Most Popular Leader In Social Media 2021” dari PR Indonesia ft. Kazee Digital Indonesia, di Bali;
10. Pada tanggal 14 Desember 2021 : Penghargaan “Implementasi Program Smart City” kategori Smart Governance Gerakan Menuju Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
11. Pada tanggal 20 Desember 2021 : Penghargaan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari Kementerian PAN & RB, di Jakarta;
12. Pada tanggal 20 Desember 2021 : Menerima Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB dengan kategori “Pemimpin Perubahan” diberikan kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali oleh Menteri PAN dan RB, di Jakarta;
13. Pada tanggal 20 Desember 2021 : Penghargaan “PR Indonesia Most popular Leader In Social Media 2021” dari PR Indonesia feat Kazee Digital Indonesia, di Bali;
14. Pada tanggal 29 Desember 2021 : Penghargaan Pertama dari Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia atas “Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa” sehingga seluruh Desa di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya;
15. Pada tanggal 10 Agustus 2022 : Penghargaan dari BKN sebagai “Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik” dalam Implementasi Manajemen ASN Terbaik diberikan oleh Wakil Kepala BKN, di Hall Golden Tulip, Batu;
16. Pada tanggal 05 September 2022 : Penghargaan dari MNC Portal Indonesia sebagai Best Leadership Based on Potential Area dalam ajang Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL), di Jakarta;
17. Pada tanggal 06 Desember 2022 : Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional dari Kementerian PAN dan RB, di Jakarta;
18. Pada tanggal 07 Desember 2022 : Penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur Tahun 2022 melalui Peduli Dilan (Peduli Disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa dan Lanjut Usia) oleh Kementerian PAN dan RB, di Madiun;
19. Pada tanggal 11 Desember 2022 : Penghargaan Sistem Merit milik BKD Kabupaten Sidoarjo dengan kategori Baik dengan nilai 314,7 dari Kementerian PAN dan RB, di Hotel Grand Sahid, Jakarta;



20. Pada tanggal 23 Desember 2022 : Penghargaan Innovatife Government Award (IGA) kategori IGA Kabupaten Sidoarjo Sangat Inovatif dalam acara Penganugerahan Inovatife Government Award (IGA), di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri;
21. Penghargaan Adipura Kota Sedang oleh KLHK, di Jakarta;
22. Penghargaan Kabupaten yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) sebagai Program Strategis Nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Helath Coverage (UHC) dari Wakil Presiden Republik Indonesia;
23. Pada tanggal 07 April 2021 : Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur, di Gedung Grahadi, Surabaya;
24. Pada tanggal 26 Desember 2021 : Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai “Daerah Responsif Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” di Paseban Sena Hotel, Probolinggo;
25. Pada tanggal 12 Januari 2022 : Menerima Piagam Penghargaan Kategori Terbaik ke-4 Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3), diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Halaman Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur;
26. Pada tanggal 24 Maret 2022 : Penghargaan dari PWI Jawa Timur sebagai “Kepala Daerah Tokoh Penggerak Olahraga” pada acara Anugerah Olahraga 2022 Seksi Wartawan Olahraga, diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, di Wahana Ekspresi Puspongoro, Gresik;
27. Pada tanggal 31 Maret 2022 : Penghargaan Kategori Tokoh Kepala Daerah Pendorong Transformasi Digital dalam UMKM dan Pelayanan Publik Berita Jatim Award dalam rangka HUT Berita Jatim ke-16 Tahun, diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, di Hall Hotel Mercure, Surabaya
28. Pada tanggal 27 Juli 2022 : Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Daerah Kabupaten / Kota Pembina Koperasi terbaik dalam Puncak Hari Koperasi ke-78 Tahun 2022 dan pembukaan KUKM Expo ke-9 Provinsi Jawa Timur, di Grand City, Surabaya
29. Pada tanggal 02 Agustus 2022 : Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas Kinerja Pencapaian Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) periode Januari s.d Mei 2022, dalam BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional), di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya;
30. Pada tanggal 01 November 2022 : Penghargaan “Penyokong Ekspor Jawa Timur” dari Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jawa Timur, di Novotel Samator, Surabaya;



31. Pada tanggal 14 November 2022 : Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke-9 berturut – turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Gubernur Jawa Timur, di Hotel Bumi Surabaya;
32. Pada tanggal 15 Desember 2022 : Penghargaan Peringkat I Pemerintah Daerah Penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terbaik dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur, diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya;
33. Pada tanggal 12 Januari 2023 : Penghargaan Kategori Terbaik ke-5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Lapangan Bola Prapat Kurung, Perak Timur, Surabaya;



BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2022 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2022 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.